45 TAHUN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PERESMIAN JEMBATAN K. COMAL PEMALANG

DALAM MENGABDI NEGARA
DAN SEBAGAI
ABDI MASYARAKAT
KITA TINGKATKAN
KARYA DAN JASA DI BIDANG
PEKERJAAN UMUM
DEMI KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum 1990

45 TAHUN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Ir. Radinal Moochtar

Republik Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum

SAMBUTAN

Diiringi dengan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik prakarsa penerbitan buku "45 Tahun Departemen Pekerjaan Umum" pada saat seluruh keluarga besar Pekerjaan Umum memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum yang ke 45 pada tanggal 3 Desember 1990 ini.

Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup luas mengenai perkembangan dan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum dengan seluruh jajarannya di dalam pengabdian kepada pembangunan bangsa dan Negara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno – Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan sejarah pengabdiannya selama 45 tahun sampai pada pelaksanaan Pelita Kelima ini Departemen Pekerjaan Umum telah mencatat pahit getirnya perjuangan pembangunan dan telah meninggalkan tapak-tilas hasil pembangunan di bidang sarana dan prasarana fisik, yang meskipun masih banyak lagi yang harus diperbaiki dan disempurnakan namun keadaannya telah jauh lebih baik daripada saat-saat sebelumnya.

Hasil-hasil pembangunan di bidang sarana dan prasarana Pekerjaan Umum hakekatnya tidak saja dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung, tetapi juga dapat menunjang sektor-sektor pembangunan yang strategis lainnya, yang pada gilirannya dapat menentukan keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian secara bertahap dan pasti telah dapat kita lalui dan atasi, sehingga kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, bebas dan berdaulat. Terutama selama lebih dari dua dasawarsa membangun sampai pada pertengahan Repelita V ini kitapun telah berhasil mengatasi berbagai hambatan, kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Kesemua itu telah memberi pengalaman yang berharga kepada kita dan menambah kepercayaan pada diri kita, bahwa kita akan berhasil mengatasi segala tantangan dan ujian di masa yang akan datang serta siap melanjutkan pembangunan menuju era tinggal landas yang akan datang.

Dan informasi yang disajikan dalam buku ini kiranya dapat menambah kepercayaan dan keyakinan bagi para remaja kita sebagai generasi penerus, bahwa hanya dengan pembangunan yang berkesinambungan sebagai pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia akan dapat mencapai hari esok yang lebih baik yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk itu mulai sekarang bersiapsiaplah wahai generasi muda untuk bekerja keras sekali lagi bekerja keras dengan semangat kejuangan yang tak kunjung padam seperti diteladankan oleh Sapta Taruna kita pada tanggal 3 Desember 1945 yang silam.

Selamat berjuang dan bekerja !

Jakarta, 3 Desember 1990.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR

DAFTAR ISI

Halaman

P R O F I L

A R T I K E L

LAMBANG DEP. P.U.

Keterangan :

- Lambang Departemen PU berlukiskan baling-baling dengan ketentuan seperti tercantum pada gambar.
- Warna dasar lambang adalah kuning (kuning kunyit).
- Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman.
- Penggunaan lambang: lihat Manual Tata Persuratan.

ARTI SIMBOLIS LAMBANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

1. BALING-BALING.
   - Menggambarkan "D I N A M I K A".
   - Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan "STABILITAS".
   - Secara keseluruhan menggambarkan "DINAMIKA YANG STABIL" dan "STABILITAS YANG DINAMIS".

2.1. BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG MENGARAH KEATAS.
   - Melambangkan "PENCIPTAAN RUANG".

2.2. BAGIAN LENGKUNGNYA DARI DAUN BALING-BALING.
   - Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia.

3. BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG MENGARAH KE KIRI DENGAN BAGIAN LENGKUNGNYA YANG TELUNGKUP.
   - Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   - Garis Horizontal : bentang jalan/jembatan diatas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.

4. BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG MENGARAH KE KANAN DENGAN BAGIAN LENGKUNGNYA YANG TERLENTANG.
   - Menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   - Garis Horizontal: menggambarkan penampang dari saluran air.

5. BALING-BALING DENGAN 3 DAUN INI MENGGAMBARKAN:
   - Tiga unsur kekaryaan Departemen Pekerjaan Umum.
     Tirta, Wisma (Cipta) dan Marga.
   - Trilogi Departemen Pekerjaan Umum, Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak tepat.

6. W A R N A.

   6.1. Warna kuning sebagai warna dasar melambangkan keagungan yang mengandung arti Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kedewasaan dan Kemakmuran.

   6.2. Warna biru kehitam-hitaman, mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan ketegasan bertindak.

   6.3. Silhouette yang berbentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling membentuk huruf-huruf P.U.

7. LAMBANG P.U.
   - Menggambarkan fungsi dan peranan Departemen Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila.

Keputusan Menteri P.U. No. 150/A/KPTS/1966
Tanggal 10 Nopember 1966.

"MARS PEKERJAAN UMUM"

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
No. 426/KPTS/1986
Tanggal 16 September 1986

C=1.4/4
Tempo di Marcia

Lagu & Syair: Ir. Binsar Nainggolan
NIP: 110032795.–

mf.–

Ka-mi war-ga Pe-ker-ja-an U-mum Tu-rut Meng-em-ban Tu-gas Pang-

p

Gil-an Ne-ga-ra. Me-rin-tis Pem-ba-ngu-han, Me-nu-ju Ci-ta Bang-sa

f

A- dil dan Makmur Ber-lan-das-kan Pan-ca-––si-la.......!

p

Reff:

Be-ker-ja Ke-ras, Ber-ge-rak Ce-pat, Ber-tin-dak Tepat

Ju-jur Ber-la-ku dan Meng-ab-di Pe-nuh Se-ti-a Da-lam Mem-be-la

Ne-ga-ra Ber-taq-wa Ke-pa-da Tu-han Yang Ma-Ha E-sa......!

Mf.–

Ka-mi war-ga Pe-ker-ja-an U-mum Meng-o-lah Tir-ta Di-bu-mi

p

Ta-nah Per-sa-da Mem-ba-ngun bi-na Mar-ga Men-cip-ta Kar-ya Wis-ma

f

Un-- -tuk ke – se-jah-tra-an Bang-sa In-do ne-sia.......!

Fine:

De-par-te-men Pe-ker-ja-an U-mum Hi––– dup-lah......!

Dipersembahkan untuk
Departemen Pekerjaan Umum

• Aransemen lagu: Dede Sapulette

KETERANGAN

- S = Sopran, A = Alto, T = Tenor, B = Bas
  mf= mezzo forte (sedang), f = forte (keras), P = pianosimo (lembut)
- Lagu mars ini dapat dinyanyikan dengan cara:
  1. Paduan Suara pria dan wanita yaitu : – Sopran (wanita)
     – Alto (wanita)
     – Tenor (pria)
     – B a s (pria)
  2. Paduan Suara Unisono : Satu suara seluruhnya.

Bab I

Pendahuluan

1. Istilah pekerjaan umum sebenarnya adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *openbare werken*. Istilah ini baru dipergunakan secara resmi sejak tahun 1942 sewaktu wilayah Indonesia diduduki oleh Jepang. Pihak pemerintah pendudukan Jepang mempergunakan istilah Jepang, yaitu *Kotobu Bunsitsu*.

2. Pekerjaan Umum sebagai fungsi negara telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda dengan nama *Burgelijke Openbare Werken* (St. 1919 No. 2, 1924 No. 576 dan 1925 No. 258 dan 345), yang selanjutnya diubah menjadi *Departement van Verkeer en Waterstaat* yang merupakan gabungan dari *Burgelijke Openbare Werken* dengan *Departement van Gouvernements Bedrijven* (kecuali *Dienst der Zoutregie* yang digabungkan dengan *Departement van Economische Zaken)*, sesuai St.1933 No. 509 jo. St. 1934 No. 603 dan 704..

3. Tugas-tugas yang diemban oleh Departemen Pekerjaan Umum tidaklah sama dari waktu ke waktu. Perubahan itu terjadi bukan karena fungsi pekerjaan umum itu telah berubah, tetapi terutama ditimbulkan oleh perubahan pengorganisasian negara pada umumnya dan pengorganisasian Departemen Pekerjaan Umum itu sendiri pada khususnya. Perbedaan dan perubahan yang terjadi selama ini pada umumnya tidak merubah pengertian dan hakekat pekerjaan umum itu sendiri. Namun perubahan-perubahan ini telah menyebabkan administrasi pekerjaan umum tidak dapat berkembang menurut suatu pola tertentu yang telah direncanakan dengan matang. Ini terjadi pada masa sebelum Orde Baru dan terutama disebabkan oleh terjadinya perubahan pengorganisasian yang dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan politis.

4. Dewasa ini pekerjaan umum sebagai salah satu fungsi negara meliputi usaha-usaha pembangunan, pembinaan, pengaturan dan pelayanan berbagai prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan-kegiatan dalam bidang perhubungan, pertanian, produksi/industri, perdagangan, pariwisata, kesehatan, transmi-

Bendung Sampean Baru, di propinsi Jawa Timur yang dibangun tahun 1979 dan selesai tahun 1984.

grasi, sosial dan sebagainya. Interaksi, interdepensi dan interelasi antara fungsi pekerjaan umum dengan fungsi-fungsi negara yang lain akan menimbulkan kaitan fungsional antara Departemen Pekerjaan Umum dengan berbagai Departemen lainnya. Kaitan fungsional menimbulkan berbagai macam konsekwensi pada pelaksanaan fungsi pekerjaan umum dan setiap kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi pekerjaan umum harus disinkronkan dengan kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi negara yang lain, disamping harus pula diusahakan agar ada kesatuan gerak dan tujuan di antara berbagai fungsi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sendiri.

5. Pelaksanaan pembangunan (termasuk penyediaan dan pengadaan) sampai sekarang ini masih merupakan fungsi pekerjaan umum yang paling menonjol. Karena biasanya membutuhkan anggaran yang besar dan mempunyai pengaruh langsung yang luas, penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana masih banyak ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum sendiri, ini terjadi sampai pelaksanaan Pelita I, terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa jumlah kontraktor umum nasional yang sudah dapat menyediakan modal dan keahlian yang diperlukan untuk mengerjakan proyek-proyek pekerjaan umum yang besar masih amat terbatas. Dengan masuknya bantuan luar negeri sejak Pelita I, maka beberapa kontraktor dan konsultan asing telah beroperasi di Indonesia, sedangkan dengan berbagai pengaturan dan pembinaan kontraktor dan konsultan nasional telah berkembang dengan sangat pesat, baik jumlah, spesifikasi maupun kemampuannya. Penggunaan peralatan dalam pembangunan prasarana dan sarana yang berkembang pesat, pada Pelita I pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah dari sumber bantuan luar negeri, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan baik secara swakelola maupun kontraktual peralatan pemerintah masih sangat dominan. Dengan berbagai upaya Pemerintah mendorong agar para kontraktor dapat memiliki peralat-

an sendiri; upaya lain adalah mendorong tumbuhnya perusahaan penyewaan peralatan konstruksi. Pelayanan prasarana dan sarana pekerjaan umum akhir-akhir ini semakin menonjol peranannya dalam menunjang dan mendorong pembangunan yang sejak Pelita V diarahkan untuk menyongsong era tinggal landas pada Pelita-pelita berikutnya. Bagaimanapun peranan pekerjaan umum masih cukup dominan dalam menunjang keberhasilan pembangunan selama ini, seperti keberhasilan peningkatan produksi pangan dan peranan pengairan di dalamnya, keberhasilan pembukaan daerah-daerah baru baik untuk transmigrasi, pertanian, perkebunan dikaitkan dengan pembangunan irigasi, pengembangan daerah rawa, pembangunan jalan, kemudian tumbuhnya daerah-daerah pemukiman baru melalui pembangunan perumahan dan lingkungannya.

Jembatan Arakundo di D.I. Aceh, dalam tahap pelaksanaan

6. Buku ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang perkembangan organisasi, tata kerja dan hasil-hasil kerja yang selama empat puluh lima tahun ini dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku pengemban fungsi pekerjaan umum di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dengan buku ini diharapkan para pembaca pewaris kemerdekaan dapat mengerti dan mendalami perjuangan menegakkan kemerdekaan dalam bidang Pekerjaan Umum yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin dan warga Pekerjaan Umum selama empat puluh lima tahun terakhir.

7. Dari perkembangan empat puluh lima tahun tersebut kita dapat menelusuri kembali fungsi, tugas dan peranan bidang pekerjaan umum dalam perkembangan pembangunan di tanah air. Beberapa pertanyaan muncul dengan segera, antara lain : Apakah pekerjaan umum itu urusan pemerintah ataukah urusan masyarakat? Kalau itu merupakan urusan pemerintah, maka pemerintah yang mana dan bagaimana koordinasinya? Kalau itu merupakan urusan masyarakat, maka bagaimana mengaturnya? Perkembangan kegiatan pekerjaan umum memang dalam jangka empat puluh lima tahun ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena peranan pekerjaan umum sangat dipengaruhi oleh konsep negara pada umumnya, maka beberapa kali perubahan mengenai konsep negara di Indonesia ini mempunyai peranan pula terhadap fungsi dan peranan pekerjaan umum yang dijalankan. Akhir-akhir ini yang menonjol adalah seberapa jauh keikutsertaan masyarakat di dalam penyelenggaraan kegiatan pekerjaan umum. Dan dengan munculnya badan-hukum-badan-hukum yang semakin besar kemampuannya sekarang ini maka keikutsertaan tersebut tentu harus diatur dengan cara yang sebaik-baiknya dan menguntungkan bagi negara.

P.T. SUBURO JAYANA INDAH CORP.

CONTRACTORS • DEVELOPER • GENERAL MERCHANTS • EXPORTERS • IMPORTERS

Jl. Suryalaya 1 No. 3 Telp. (022) 421573 Buahbatu Bandung

BANKERS : BANK DUTA - BANK DAGANG NEGARA - (BDN) - BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD JABAR)

Bab II

Departemen Pekerjaan Umum Pada Jaman Perjuangan (1945 – 1950)

1. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan kalimat-kalimat sakti yang telah membentuk negara, mendirikan pemerintahan dan mengobarkan semangat perjuangan kepada bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Proklamasi yang berlangsung di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta berlangsung pada akhir masa pendudukan Bala Tentara Pendudukan Jepang yang bersiap-siap menunggu kedatangan tentara Sekutu untuk mengoper kekuasaan menyusul penyerahan Jepang yang mengakhiri Perang Dunia II. Proklamasi di bawah penjagaan tentara Jepang tersebut tentulah tidak terjadi tiba-tiba, tetapi mempunyai rentetan yang panjang dilihat dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

2. Sebagaimana diberitakan surat kabar ASIA RAYA, Proklamasi diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Departemen-departemen sehari kemudian. Di dalam kabinet tersebut ada Menteri Pekerjaan Umum yang dijabat oleh **Abikusno Tjokrosoejoso** dan pada tahun 1945 Ir. Pangeran Mohamad Nur mewakili Menteri Pekerjaan Umum **Abikusno.** Kedua pejabat ini mulai membangun dan mengoper administrasi Pekerjaan Umum dengan susah payah karena dibayangi oleh tentara pendudukan Jepang yang *de facto* masih berkuasa.

3. Setelah berkobarnya perang Pasifik, maka pada bulan Maret 1942 Pemerintah *Nederland Indie* menyerah dan mulai saat itu wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Bala Tentara Penduduk-an Jepang. Struktur pemerintahan

pendudukan Jepang yang merupakan pemerintah militer membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu :

a. Pemerintah Militer Angkatan Darat *(Riku-Gun)* di Jakarta untuk Jawa dan Madura.

b. *Riku-Gun* di Bukittinggi untuk Sumatera, dan

c. Pemerintah Militer Angkatan Laut *(Kai-Gun)* di Makasar untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

Tiap-tiap wilayah dikepalai oleh seorang *Gun-Seikan*, kemudian disebut *Saiko Sikikan* dan berdiri sendiri-sendiri. Pembagian administratif dari tiap wilayah mengoper pembagian dalam wilayah Karesidenan *(Syuu)*, Kabupaten *(Ken)* dan Kotapraja *(Si)* seperti waktu jaman *Nederland Indie*, wilayah Propinsi dan *Gouvernement* ditiadakan sedang Daerah-daerah Kesultanan dan Kesunanan, *zelfbesturende lands, chappen* berjalan terus dan disebut *Kooti*.

Dalam bidang pekerjaan umum setiap wilayah pemerintahan berlaku pengoperasian organisasi-organisasi zaman *Nederland Indie*, hanya terjadi perubahan/pemisahan yang disesuaikan dengan ketentuan/kebu-

Jaringan irigasi Citarum — Jawa Barat.
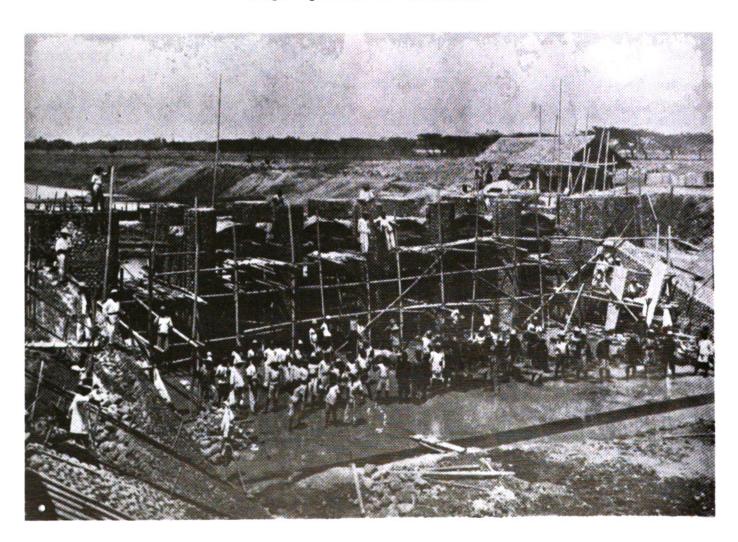
tuhan dari fihak Jepang. Bekas *Departement van Verkeer en Waterstaat (V & W)* di Bandung dinamakan *Kotobu Bunsitsu*. Pada saat itu dilazimkan pemakaian istilah Pekerjaan Oemoem (PO), Oeroesan Pekerjaan Oemoem (OPO) disamping istilah Jepang *Kotobu Bunsitsu*.

4. Dengan berakhirnya perang Pasific maka Tentara Pendudukan Jepang mempunyai tugas mengamankan secara *de facto* keadaan umum dan pemerintahan yang ada. Mereka sedang bersiap-siap untuk kembali ke negaranya sambil menunggu kedatangan Sekutu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hal yang dapat mengganggu keadaan ini. Namun dari pihak Republik Indonesia sebaliknya ingin secepat-cepatnya mengoper pemerintahan dari tangan Jepang. Setelah kemerdekaan diproklamasikan para pemuda/pegawai *Kotubu Bunsitsu* tidak mau ketinggalan dari pemuda-pemuda lainnya dan mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan merintangi serta mengganggu kemerdekaan yang diproklamasikan itu. Jiwa dan semangat yang menyala-nyala para pemuda ini kemudian dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama *Angkatan Muda* Departemen Pekerjaan Umum (AMDPU). Gerakan Pemuda ini dalam perjuangannya bekerjasama dengan gerakan-gerakan pemuda dari kantor-kantor dan jawatan lainnya yang ada di kota Bandung, seperti Pemuda Jawatan Pos/Telepon dan Telegrap, Kereta Api, Dana Pensiun, Pertambangan dan Gerakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik. Bersama gerakan-gerakan lain tersebut Angkatan Muda Dep. PU mengadakan kerjasama dan program bersama dimana kepada tiap-tiap gerakan pemuda diberi keleluasaan untuk mengutamakan perjuangan mereka menurut sifat bidang lapangannya masing-masing. Dan sebagai tindakan pertama adalah pengambil-alihan Jawatan-jawatan dan Kantor dari kekuasaan Jepang untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Gedung Sate telah pula diambil alih oleh para Pemuda Pegawai DPU dari Jepang dan kewajiban mereka selanjutnya adalah mempertahankan dan memelihara segala sesuatu yang telah diambil alih itu jangan sampai direbut oleh musuh.

5. Di lain pihak Pemerintah baru Republik Indonesia masih dalam taraf konsolidasi dan pengaturan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing Departemen Pemerintahan. Menteri Pekerjaan Umum juga mengadakan .pengumuman dan pendaftaran para insinyur dan tenaga-tenaga teknik serta pegawai-pegawai lainnya. Pada tanggal 1 Nopember 1945, sebagaimana dimuat oleh surat kabar Kedaulatan Rakyat, telah keluar Maklumat yang disahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum **Abikusno Tjokrosoejoso** yang mempermaklumkan bahwa Jawatan Listrik dan Gas seluruh Jawa dan Madura berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan pusat ditetapkan di Bandung. Sebagai Kepala Jawatan ditetapkan

Abikusno Tjokrosoejoso

R.M. ABIKUSNO TJOKROSOEJOSO

15 Juni 1897 – 1969

Abikusno Tjokrosoejoso

Tokoh yang dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1897 di Madiun pernah mengenyam pendidikan di *Koningin Emma School* di Surabaya dan selesai tahun 1917. Adik kandung **HOS Tjokroaminoto** ini dikenal sebagai seorang otodidak, dan dengan usaha sendiri ia dapat diterima di *Architectsexamen* melalui cara korespondensi, ia lulus dan mendapat gelar arsitek pada tahun 1925.

Menikah dengan **R.A. Kusmartinah, Abikusno Tjokrosoejoso** memperoleh putera sebanyak 7 orang.

Sebagai seorang arsitek yang terkenal, banyak pekerjaan proyek pembangunan yang diserahkan kepada **Abikusno,** namun demikian, **Abikusno** yang pantang bekerjasama dengan Belanda selalu meluangkan waktunya untuk memperhatikan dan membantu gerak langkah perjoangan **Sarekat Islam.** Sebagai pegawai swasta, **Abikusno** tidak pernah tetap tinggal di suatu kota, dimana dia dapat pekerjaan, di situ dia tinggal bersama keluarganya.

Pada jaman penjajahan Jepang, **Abikusno** tinggal di Jakarta, dan ditugasi menangani pembuatan gedung-gedung baru dan perbaikan Istana.

Abikusno yang pernah menjadi Pemimpin Redaksi *Mingguan Joyoboyo* adalah anggota *Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI).

R.M. Abikusno menjadi anggota Panitia 9 yang berhasil membuat rancangan pembukaan Undang-undang Dasar.

Sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya berhasil menetapkan keputusan penting ialah :

a) Mengesahkan Undang-undang Dasar Negara.

b) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Ir. Soekarno** dan **Drs. Moch. Hatta.**

c) Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Tanggal 19 Agustus 1945 berhasil dibentuk Kabinet Republik Indonesia yang pertama, dimana nama **R.M. Abikusno Tjokrosoejoso** ditetapkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia merangkap Menteri Perhubungan ad interim. Tindakan pertama sebagai Menteri Pekerjaan Umum ialah dengan dikeluarkannya maklumat bahwa Jawatan Listrik dan Gas seluruh Jawa dan Madura adalah di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Pada tanggal 29 Oktober 1945 beliau mengangkat Kepala Jawatan Listrik dan Gas Seluruh Jawa dan Madura **Ir. M.A. Safwan,** dan pembukaan jalan kereta api antara Jakarta Merak juga dibuka dengan resmi oleh Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Perhubungan ad interim.

Walaupun hanya 4 bulan sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terlihat bahwa **R.M. Abikusno Tjokrosoejoso** adalah seorang yang keras, disiplin dan berpegang pada satu prinsip perjoangan yang kuat dan tidak mudah digoyahkan. Karena itu ia sulit menerima pendapat orang lain bila tidak sesuai dengan prinsipnya sendiri. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya tugas yang harus dijalankan pada waktu itu sebagai seorang Menteri pertama pada suatu negara yang baru merdeka. Setelah tidak menjadi menteri **R.M. Abikusno Tjokrosoejoso** meneruskan kesibukannya dalam bidang arsitek dan aktif dalam kegiatan partai.

Segala kehidupan di alam ini tidak ada suatu yang abadi, baik itu kesenangan maupun kepedihan. Begitu juga bagi keluarga **R.M. Abikusno Tjokrosoejoso.** Setelah beberapa lama mengidap penyakit tekanan darah tinggi, **R.M. Abikusno** dalam usia yang mendekati 72 tahun, dipanggil menghadap Allah, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Surabaya.

Ir. M.A. Safwan; Kepala Daerah Jawa Barat **Ir. F.J. Inkiriwang** untuk Jawa Barat I di Jakarta **Ir. Soedoro** untuk Jawa Barat II di Bandung, Kepala Daerah Jawa Tengah **Ir. Moenandar** yang akan dipindahkan dari Bogor ke Semarang, Kepala Daerah Jawa Timur **Ir. Saljo** berkedudukan di Surabaya. Pengumuman itu ditandatangani di Bandung pada tanggal 29 Oktober 1945. Perubahan ini adalah kelanjutan dari pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara **Mr. A.G. Pringgodigdo.** Dalam pengumuman tersebut telah ditetapkan :

1. A. Jawatan Listrik dan Gas masuk Departemen Pekerjaan Umum;

   B. Tambang-tambang masuk Departemen Kemakmuran kecuali Tambang "Bayah" yang masuk Departemen Perhubungan.

2. Untuk membereskan soal gaji para pegawai maka Pemerintah telah membentuk suatu Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri.

3. Guna dapat menyusun pertahanan yang kompak Angkatan Muda DPU (AMDPU) membentuk seksi Pertahanan yang dipersenjatai dengan granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya yang dapat di rebut dari tentara Jepang. Pada mulanya Gerakan-gerakan Pemuda hanya menghadapi satu kekuatan lawan bersenjata, yaitu tentara Jepang, tetapi menjelang akhir bulan September 1945 di sana-sini di Indonesia telah mulai mengalir tentara pendudukan Sekutu yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang sebagai kelanjutan kalahnya Jepang dalam Perang Pasifik/Perang Dunia II.

7. Pada tanggal 4 Oktober 1945 kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang diikuti oleh serdadu Belanda dan NICA *(Netherlands Indies Civil Administration)*. Semenjak itu keadaan di kota Bandung menjadi tidak aman dan Gerakan-gerakan Pemuda di satu pihak dihadapkan kepada tentara Jepang dan tentara Sekutu/Belanda/NICA di pihak lain. Dari hari ke hari suasana kota Bandung menjadi semakin tegang. Pertempuran-pertempuran mulai meletus dan provokasi musuh semakin menjadi-jadi.

8. Pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan **Ir. Pangeran Moh. Noor,** pegawai-pegawai dari Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum mengangkat sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

9. Tentara Sekutu/Belanda/NICA telah mendirikan markasnya di bagian utara kota Bandung yang letaknya tak jauh dari Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum di Gedung Sate. Di gedung inilah segala kegiatan dari Gerakan Pemuda PU dipusatkan. Hampir setiap hari kantor Departemen dikacau oleh tentara Sekutu/Belanda/NICA sehingga para pegawai tidak dapat menunaikan tugasnya dengan te-

„KEDAULATAN RAKJAT"

PENGOEMOEMAN.

Pemerintah Repoeblik Indonesia.

TENTANG DJABATAN LISTRIK, GAS, DAN TAMBANG.

Pemerintah telah menetapkan jang berikoet:
A. Djawatan Listrik dan Gas masoek Departemen Pekerdjaan Oemoem.
B. Tambang-tambang masoek Departemen Kemakmoeran, ketjoeali Tambang „Bajah" jang masoek Departemen Perhoeboengan.

Oentoek membereskan soal gadjih para pegawai maka Pemerintah telah membentoek soeatoe „Panitia Perantjang Peratoeran Gadjih Pegawai Negeri".

Sebagai ketoea Panitia terseboet oleh Pemerintah telah di-angkat P. T. R. Soerasno.

Sebagai anggauta, Toean2 Mr. R. M. Abdoelkarim Pringgodigdo, R. Achmad Natanegara, Mr. R. Djatmika, Mr. R. Hindromartono, Mr. R. Saubari, Mr. R. Kosasih Poerwanegara, R. Machboeb, R. Wasid.

Djakarta, 27-10-1945.

SEKRETARIS NEGARA
A. G. PRINGGODIGDO.

MAKLOEMAT:

POESAT PIMPINAN DJAWATAN LISTRIK DAN GAS.

1. Mempermakloemkan bahwa Djawatan Listrik dan Gas seloeroeh Djawa dan Madoera, adalah dibawah:
   DEPARTEMEN PEKERDJAAN OEMOEM.
2. Poesat Pimpinan Djawatan Listrik dan Gas telah ditetapkan di Bandoeng.
3. Ditetapkan sebagai:
   Kepala Djawatan: Ir. M. A. Safwan.
   Kepala Daerah:
   Djawa Barat I: Ir. F. J. Inkiriwang, Djakarta.
   Djawa Barat II: Ir. Soedoro, Bandoeng.
   Djawa Tengah: Ir. Moenandar, sekarang di Bogor dan akan dipindahkan ke Semarang.
   Djawa Timoer: Ir. Saljo, Soerabaja.
4. Segala pekerdjaan berlangsoeng sebagai sediakala.

Bandoeng, 29 Oktober 1945.
KEPALA DJAWATAN LISTRIK & GAS SELOEROEH DJAWA DAN MADOERA.
(Ir. M. A. SAFWAN).
Mengetahoei dan mengesahkan:
MENTERI PEKERDJAAN OEMOEM.
(ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO).

Maklumat-maklumat dari surat kabar Kedaulatan Rakyat.

nang. Oleh karena itu pada permulaan bulan Nopember 1945 dengan persetujuan Menteri semua pegawai Departemen selama masih belum aman diperbolehkan untuk tidak masuk kantor terkecuali pegawai-pegawai yang muda-muda yang diserahi tugas untuk mempertahankan kantor serta milik Negara yang terdapat di dalamnya. Tugas yang berat ini diterima oleh para pemuda sebagai kewajiban yang mulia dan akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga.

10. Pada tanggal 24 Nopember 1945 di bagian utara kota meletus suatu pertempuran yang hebat. Penduduk banyak yang mengungsi ke bagian kota yang lain yang keadaannya masih aman. Pada waktu itu gedung Sate dipertahankan oleh para pemuda PU yang diperkuat oleh satu pasukan Badan Perjoangan yang terdiri dari lebih kurang empatpuluh orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Tetapi bantuan yang diberikan itu tidak lama karena pada tanggal 29 Nopember pasukan tersebut ditarik dari markas pertahanan Departemen Pekerjaan Umum.

11. Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 Nopember 1945 sebagaimana diliput Kantor Berita Antara mengumumkan susunan kabinet baru Pemerintah Republik Indonesia yang dikepalai oleh Perdana Menteri **Sjahrir** dengan dua belas Kementerian dan seorang Menteri Negara. Dalam kabinet baru ini **Ir. Putuhena** diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum menggantikan **Abikusno Tjokrosoejoso.** Dalam maklumat itu disebutkan, bahwa karena Kementerian pertama dari Republik Indonesia dibentuk buat sementara waktu tatkala saatnya genting dalam sejarah negara, maka sudah semestinya bagian-bagian pemerintah tadi menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa itu. Selanjutnya disebutkan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia setelah menjalani ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru ini ialah bahwa tanggung jawab adalah di dalam tangan Menteri. Maka mulailah terjadi perubahan dari kabinet presidential menjadi kabinet parlementer.

Ir. Putuhena

Peristiwa 3 Desember 1945.

12. Tanggal 3 Desember 1945, jam 11.00 pagi, pada waktu itu Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum hanya dipertahankan oleh 21 orang pemuda/pegawai yang tergabung dalam Angkatan Muda DPU. Tiba-tiba datang menyerbu sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan berat dan moderen. Para pemuda berusaha mempertahankan dan melawan dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Mereka dikepung rapat-rapat dan diserang dari segala penjuru dan terjadi pertempuran tidak seimbang yang baru

Gedung Sate, gedung pusat Dep. PU di Bandung yang kini tinggal kenangan.

berakhir pada jam 14.00 siang hari. Dalam pertempuran tersebut diketahui kemudian bahwa dari 21 orang itu 7 orang diantaranya dinyatakan hilang, 1 orang luka berat dan beberapa lainnya luka ringan. Ke tujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur adalah :

1. **Didi Hardianto Kamarga**
2. **Muchtaruddin**
3. **Soehodo**
4. **Rio Soesilo**
5. **Soebenget**
6. **Ranu**
7. **Soeharjono**

Batu Prasasti Sapta Taruna merupakan monumen peringatan gugurnya 7 syuhada PU.

Semula belum diketahui dengan pasti di mana jenazah-jenazah dari 7 orang pemuda dikebumikan. Baru pada bulan Agustus 1952 beberapa bekas kawan seperjuangan mereka telah mencarinya di sekitar Gedung Sate dan hasilnya hanya diketemukan 4 jenazah yang sudah berupa kerangka. Ke empat kerangka tersebut kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Sebagai penghargaan atas jasa jasa dari 3 orang pemuda lainnya yang kerangkanya belum dapat diketemukan lalu dibuat 2 tanda peringatan, yang satu dipasang di dalam Gedung Sate dan yang lainnya berwujud sebuah batu alam yang besar yang ditandai dengan tulisan-tulisan nama-nama 7 pemuda yang gugur tersebut dan ditaruh di halaman belakang Gedung Sate.

Sebelum itu, yakni pada tanggal 3 Desember 1951 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. Ukar Bratakusumah** menetapkan ke tujuh pemuda dinyatakan dan dihormati sebagai pemuda yang berjasa dan tanda penghargaan tersebut telah disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan pada tanggal 2 Desember 1961 Pernyataan Penghargaan tertulis Menteri Pertama **Ir. H. Djuanda** telah juga disampaikan kepada keluarga almarhum dalam suatu upacara. Peristiwa 3 Desember 1945 akan dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dengan kebulatan tekad warga Pekerjaan Umum untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian Sapta Taruna Kesatria Pekerjaan Umum dengan cara berjuang, bekerja dan mengabdikan diri untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

13. Setelah peristiwa 3 Desember 1945 Gedung Sate dijadikan kantor Jawatan Pekerjaan Umum Belanda dan tenaga-tenaga Belanda bekas tawanan Jepang maupun yang didatangkan dari luar negeri mulai menata kembali kantor Pekerjaan Umum dengan dibantu oleh tenaga-tenaga Indonesia yang tidak sanggup bertahan/berjuang mempertahankan Pemerintah Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1945 Sekutu mulai menguasai kota-kota besar di Indonesia yang diikuti oleh Belanda/NICA. Kemudian di Jawa dan Sumatera nama NICA diganti dengan AMACAB *(Allied Military Administration Civil Affairs Branch)*. Pada waktu itulah mulai terjadi bentrokan-bentrokan senjata antara Republik Indonesia dengan Sekutu/Belanda/NICA. Berangsur-angsur Sekutu meninggalkan Indonesia dan menyerahkan kekuasaannya di wilayah-wilayah yang dikuasainya kepada pihak Belanda, dengan mulai diserahkannya Indonesia Bagian Timur, kemudian Jawa dan akhirnya Sumatera. Di kemudian hari AMACAB dirubah menjadi *Tijdelijke Bestuur Dienst.*

14. Pusat pemerintahan Belanda yang berkedudukan di Jakarta pada waktu itu dipimpin oleh *Luitenant Gouverneur Generaal*. Di wilayah-wilayah yang baru dikuasainya melalui *aksi polisionil I dan II* Belanda menunjuk seorang *Regeringscommissaries voor Bestuursaangelegenheden* (RECOMBA) langsung di bawah *Luitenant Gouverneur Generaal* yang kemudian bernama *Hoge Vertegen Woordiger van de Kroon*. Untuk mempertahankan kedudukannya pemerintah Belanda mencetuskan gagasan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang akan berada dalam *gemeenebest (commonwealth)* Belanda, yang didahului dengan pembentukan *Voorlopige Federale Regering van Indonesie* yang diketuai oleh *Luitenant Gouverneur General/Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon*. Mulailah diciptakan negara-negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, Negara Madura dan Negara Pasundan.

Belanda di Jakarta dan di wilayah yang dikuasainya mulai mengatur/menyusun organisasi baru yaitu W & W *(Departement van Waterstaats en Wederopbouw)* dan V.E.M. *(Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen)* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Secretarist van Staat*. Di daerah-daerah dibentuk cabang-cabang W en W dan di negara-negara bagian ada *Ministrij van Verkeer en Waterstaat*. Disamping organisasi-organisasi W en W ini untuk kepentingan pembangunan kembali *(wederopbouw)* Belanda membentuk yayasan-yayasan diantaranya CSW *Centrale Stichting Wederopbouw)* dengan cabang-cabangnya yang disebut ROB *Regionale Opbouw Bureau)* yang membangun kota satelit Kebayoran. Di Negara Indonesia Timur tersebut WOI *(Wederopbouw Oost Indonesie)* mempunyai cabang-cabang POD *(Plaatselijke Opbouw Dienst)* di beberapa kota.

PARA SYUHADA DALAM PERISTIWA 3 DESEMBER 1945

Rio Soesilo

RIO SUSILO

Rio Susilo adalah putera kelahiran Cirebon pada hari Senin tanggal, 19 April 1923 di Arjawinangun dari Bapak **Marto Sudarmo** dan Ibu **Siti Sudarsih.** Putera kedua dari sepuluh bersaudara ini bersekolah di HIS Kebon Baru Cirebon sampai tahun 1929 dan lulus dari HIS Cilacap pada tahun 1936 MULO *Openbaar* di Magelang dan *Bouwkundige* (Sekolah Bidang Bangunan Jembatan) dan calon opseter tahun 1942 – 1944. Alamarhum baru bekerja di Kantor V & W selama 7 bulan sampai meletusnya pertempuran dalam mempertahankan Gedung Sate tanggal 3 Desember 1945. Untuk menghormati kepahlawanannya telah didirikan sebuah monumen Sapta Taruna di halaman kantor Dinas PU Cabang Banyumas Selatan Jalan Mayjen. Panjaitan No. 1 Cilacap.

DIDI HARDIANTO KAMARGA

Didi Hardianto Kamarga lahir pada tanggal, 12 Desember 1924 di Serang, Jawa Barat, putera R. Ka-

marga yang pada Tahun 1953 menjabat Kepala Pekerjaan Umum Jawa Barat., Menurut **Ir. AD. Kamarga,** pejabat Perusahaan Umum Listrik Negara, almarhum bersekolah di *Lagere school* Jalan Tegal, Jakarta dan HBS *Lyceum afd.* B/SMT di Bandung.

Setamat SMT lalu menjadi *Heiho* dan menjelang Proklamasi ia bergabung dengan ex kadet Akademi Militer **(A.H. Nasoetion dkk.),** membentuk barisan Keselamatan Rakyat (nantinya menjadi Tentara Keamanan Rakyat). Dengan menggunakan senjata rampasan dari Jepang, **Didi Hardianto Kamarga** dan kawan-kawan bergabung dengan para pemuda pegawai Pekerjaan Umum bertempur melawan Belanda, akhirnya diketahui gugur sebagai kusuma bangsa pada peristiwa 3 Desember 1945 dalam mempertahankan Gedung Sate.

SOEBENGAT

Almarhum adalah karyawan Pekerjaan Umum yang berkantor di Gedung Sate Bandung. Pangkat yang diketahui adalah Pegawai Tata Usaha Tingkat III. Alamat terakhir adalah di Muara Rajun Lama, Bandung. **Soebengat** meninggalkan seorang Istri **(Ruktiyah)** dan 3 orang anak **(Soemeni, Puliasih** dan **Ujiarti).** Almarhum gugur pada peristiwa 3 Desember 1945 dalam mempertahankan Gedung Sate dari serbuan tentara Belanda.

Ibu Ruktijah sampai saat ini bertempat tinggal di Kertosari, **Gringsing,** Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan membuka warung dimuka kantor Seksi Pekerjaan Umum di Weleri, sebelah barat Semarang.

SOERJONO

Soerjono (bukan **Soeharjono)** dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1926, putra **Dartam Kartodihardjo,** sekarang di Jalan Bekasi Timur IV Gang Buntu No. 10 Jakarta Timur. Menurut Ibu **Dartam, Soerjono** bersekolah di HIS Arjuna I Bandung dan HBS sampai kelas II pada Tahun 1942 dan lulus SMP Papandayan Bandung pada Tahun 1945.

Pada peristiwa 3 Desember 1945, **Soerjono** adalah anggota kelompok Gerakan Pemuda pelajar yang tergabung dalam kelompok Pelajar Bandung Timur yang diperbantukan untuk membantu pertahanan Gedung Sate dari serangan musuh. Akhirnya diketahui bahwa **Soerjono** termasuk salah satu pahlawan yang gugur pada peristiwa 3 Desember 1945, disamping **Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat** dan **Ranu.**

Semula belum diketahui dengan pasti dimana jenazah dari 7 orang pemuda itu dikebumikan. Barulah pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa kawan seperjuangannya dicari disekitar Gedung Sate. Empat Jenazah yang sudah berupa kerangka yang ditemukan kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Tanda peringatan yang kemudian dibuat diletakkan didalam Gedung Sate dan yang lainnya berupa sebuah batu alam yang ditandai dengan nama-nama 7 Syuhada ditaruh dihalaman Gedung Sate.

Oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. Ukar Bratakusumah** pada tanggal 3 Desember 1951 ke tujuh pemuda itu dinyatakan

dan dihormati sebagai "Pemuda yang berjasa" dan pada tanggal, 2 Desember 1961 Menteri Pertama **Ir. H. Djuanda** berkenan memberikan pernyataan penghargaan tertulis yang disampaikan kepada para keluarga yang telah ditinggalkannya.

Peristiwa 3 Desember 1945 akan dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan telah melahirkan Korps Pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa korsa, rasa kesetiakawanan serta kebanggaan akan tugasnya sebagai warga Pekerjaan Umum.
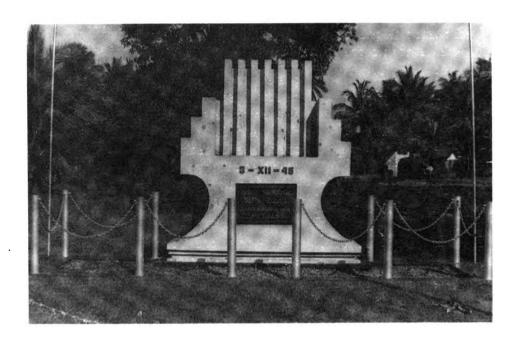
Monumen peringatan peristiwa 3 Desember 1945
di halaman Kantor Dinas PU Cabang Banyumas selatan – Cilacap

15. Pembinaan pekerjaan umum di pusat pemerintahan Republik Indonesia pada awal zaman kemerdekaan itu dilakukan oleh suatu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan dengan seorang Menteri.

Dalam kabinet pertama, **Abikusno Tjokrosoejoso** disamping menjabat Menteri Pekerjaan Umum juga merangkap sebagai Menteri Perhubungan ad interim.

Pada saat itu dimulai penyusunan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum yang semula berkedudukan di Bandung kemudian setelah Bandung dikuasai oleh Sekutu/NICA dipindahkan ke Purworejo dan kemudian di Yogyakarta. Struktur organisasi pada waktu itu terdiri dari Menteri membawahi sejumlah jawatan, balai dan bagian yang umumnya mengoper keadaan di waktu jaman Nederland Indie. Sebagai pembantu Menteri ditunjuk seorang Sekretaris Jenderal dan jawatan-jawatan yang masuk di Kementerian Pekerjaan Umum adalah Jawatan Listrik dan Gas, Jawatan Jalan-jalan dan Lalulintas, Jawatan Gedung-gedung, Jawatan Urusan Laut, Jawatan Lapangan Terbang Sipil, Balai Penyelidikan Konstruksi, Balai Perumahan, Balai Pembangunan, Balai Alat-alat Besar, Bagian Umum, Bagian Undang-undang, Bagian Perbendaharaan, Bagian Publiciteit dan Bagian Pegawai.

Kantor Departemen Pekerjaan Umum Purworejo — Jawa Tengah.

Organisasi PU di daerah-daerah mengoper organisasi dari pendudukan Jepang yang sebagian besar mengikuti organisasi zaman kolonial Belanda. Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi hanya ada di Jawa. Di Sumatera baru dibentuk pada tahun 1947. Semula dinamakan Jawatan PU Propinsi dan pernah pula dinamakan Jawatan/Dinas PJG (Pengairan, Jalan dan Gedung) atau Jawatan/Dinas PU dan Perhubungan. Pada umumnya, berhubung dengan keadaan perjuangan, organisasi Pekerjaan Umum belum berfungsi dan hubungan hierarchis dari Kementerian Pekerjaan Umum di Yogyakarta dengan daerah belum terwujud. Segala kegiatan masih dikerahkan untuk membantu perjuangan tersebut. Pada waktu itu di lingkungan Departemen mulai terbentuk Serikat Sekerja antara lain *SBDPU (Serikat Buruh Djawatan Pekerjaan Umum), SBLG (Serikat Buruh Listrik dan Gas), SBLP (Serikat Buruh Laut dan Pelayaran).* Pembentukan serikat-serikat ini menyusul terbentuknya Kabinet Parlementer yang mendorong dibentuknya partai-partai dan organisasi-organisasi bawahannya, suatu awal penyelenggaraan negara menurut sistem liberal.

Gedung Departemen Pekerjaan Umum – Yogyakarta

16. Penyusunan organisasi Departemen Pekerjaan Umum dalam alam demokrasi liberal tersebut mengikuti pola kabinet Inggris dengan menempatkan seorang Sekretaris Jenderal yang "permanen" dan merupakan puncak karier seorang pegawai negeri. Kombinasi *expert-lay* man merupakan salah satu cara untuk kelangsungan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Di Indonesia maksud ini ternyata tidak dapat sepenuhnya terlaksana karena kabinet silih berganti dan sangat mempengaruhi program-program pelaksanaan pekerjaan di bidang pekerjaan umum.

Karena masih langkanya tenaga ahli teknik dan departemen teknis ini masih sangat muda usia, maka dalam pergantian pimpinan sering terjadi seorang yang tadinya menjadi menteri pada kesempatan berikutnya menjadi Sekretaris Jenderal seperti yang terjadi pada Ir. Putuhena. Kekompakan dan jiwa korsa yang tidak ada duanya dalam lingkungan korps pekerjaan umum.

17. Kalau pada zaman kolonial Hindia Belanda dahulu ada lebih kurang 300 orang insinyur sipil yang bekerja di Departemen, maka pada awal kemerdekaan jumlahnya masih sekitar lima belas. Sumber dari tenaga-tenaga teknik pada waktu itu adalah Institut Pendidikan Teknik Pemerintah di Negeri Belanda sedang di Indonesia untuk tenaga teknik tinggi terdapat di Bandung *(Technische Hoge School),* yang semula hanya untuk jurusan *civil engineur* (insinyur sipil) dan kemudian pada waktu Negeri Belanda diduduki Jerman pada awal Perang Dunia II ditambah dengan jurusan kimia dan mesin. Sedangkan untuk tenaga teknik menengah terdapat tiga sekolah teknik, yaitu : KWS *(Koningin Wilhelmina School)* di Jakarta, KES *(Koningin Emma School)* di Surabaya dan PJS *(Prinses Juliana School)* di Yogyakarta.

Untuk tenaga teknik lainnya di beberapa kota besar terdapat sekolah-sekolah pertukangan *Europese en Inlandse Ambachtschool)*. Pada masa itu HPW *(Hoofd Provinciale Waterstaatdienst)* dan EAW *(Eerst Aanwezen Waterstaatambtenaar)* di wilayah *Residentie/*Keresidenan umumnya dijabat oleh tenaga-tenaga insinyur sipil Belanda yang sudah berpengalaman melalui masa kerjanya di *sectie-sectie* dan *district*. *Regentschaps-werken, Landschaps-werken dan Local werken* dijabat oleh tenaga-tenaga teknik menengah sedang *Gemeentewerken* di beberapa kota besar dipimpin oleh tenaga insinyur.

Pada masa pendudukan Jepang semua pimpinan, tenaga pimpinan/ teknik Belanda digantikan oleh tenaga dari Jepang dan Indonesia. Pengoperan tenaga-tenaga pimpinan Belanda yang selama ini sebagian besar melancarkan segala kegiatan pekerjaan umum baik teknik maupun administratip kepada tenaga-tenaga Jepang dan Indonesia, kemudian penyesuaian pada tata kerja Jepang, banyak membawa pengaruh kepada keutuhan organisasi pekerjaan umum. Jumlah tenaga teknik Indonesia yang berpengalaman, terutama didikan sekolah tinggi teknik masih sangat sedikit, bahkan terbatas sekali. Pada waktu itu diusahakan tambahan tenaga teknik dengan membuka kembali Institut Pendidikan Tinggi dan Menengah yang disesuaikan dengan sistem Jepang. Disamping itu juga diusahakan pengiriman tenaga-tenaga Indonesia untuk dididik di Jepang, namun selama masa pendudukan itu usaha-usaha ini belum memberikan hasil yang berarti sebagaimana ditulis **Ir. Irdam Idris** pada buku *"Sejarah Perkembangan Pekerjaan Umum di Indonesia"*.

18. Setelah agresi militer II berakhir dengan diadakannya persetujuan Rum Royen maka Republik Indonesia terpaksa harus ikut dalam pembentukan suatu negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, yang dibentuk menyusul penyerbuan ibukota Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948, ditiadakan dan menjelma kembali menjadi Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebagai kelanjutan Konperensi Meja Bundar di Den Haag kemudian terbentuk Republik Indonesia Serikat dan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS yang berbentuk federasi negara negara bagian dan Republik Indonesia (Yogyakarta) tidak bertahan lama gabungkan diri dengan Republik Indonesia dan pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi PU pada saat lahirnya RIS menggambarkan keadaan dualistis. Pada pusat pemerintahan RIS di Jakarta, terdapat Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS sebagai penjelmaan dan peleburan dari Departemen W en W, Departemen VEM (kecuali *Mijnbouw* yang masuk dalam Kementerian Kemakmuran) dan Departemen *van Scheepvaart* dari zaman pendudukan Belanda. Pada organisasi Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS ini terdapat departemen departemen dan jawatan-jawatan :

a. Departemen Pekerjaan Umum yang mengurus jalan, pengairan dan gedung;
b. Departemen Perhubungan yang membawahi Jawatan Angkutan Darat dan Sungai, Jawatan Pelabuhan, Bagian Penerbangan Sipil, Bagian Perniagaan;
c. Jawatan Pos, Telepon dan Telegrap;
d. Jawatan Tenaga yang mengurus kelistrikan, tenaga air dan Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Penepetel);
e. Jawatan Kereta Api.
f. Jawatan Meteorologi dan Geofisika; serta
g. Jawatan Pelayaran yang mengurus penerangan pantai, perambuan untuk pelayaran interinsuler dan internasional.

Organisasi Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS ini dipimpin oleh tenaga-tenaga Indonesia. Tenaga-tenaga Belanda dikembalikan ke negerinya dan ada sebagian diantaranya yang menjadi penasihat sementara.

Pada Pusat Pemerintahan Negara RI (Yogyakarta) terdapat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan RI sebagai kelanjutan dari Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya. Pada organisasi Kementerian terdapat jawatan-jawatan :

a. Jawatan Pengairan dan Assainering;
b. Jawatan Jalan-jalan dan Lapangan Terbang Sipil;
c. Jawatan Gedung-gedung;
d. Jawatan Perlautan;
e. Jawatan Perhubungan;
f. Jawatan Perlengkapan, dan
g. Jawatan Penyelidikan Teknik.

Dualisme antara Kementerian Pekerjaan Umum RIS dan RI Yogyakarta ditambah dengan wilayah kewenangannya berjalan terus sampai saat struktur pemerintahan berubah kembali dari negara serikat menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Kedua Kementerian dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga berkedudukan di Jakarta. Sesungguhnyalah pada saat itu konsolidasi dan koordinasi organisasi PU dapat dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Juga dengan dibentuknya Kementerian Perhubungan beberapa urusan diserahkan pengelolaannya pada kementerian tersebut. Di antaranya adalah urusan pelabuhan, lalulintas, kereta api dan pos, telepon dan telegrap.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Negara Kesatuan RI terdiri dari jawatan-jawatan , Balai dan Urusan-urusan sebagai berikut : a. Jawatan Pengairan, b. Jawatan Gedung-gedung, c. Jawatan Jalan, Jembatan dan Konstruksi, d. Jawatan Tata Ruangan Negara, e. Jawatan Teknik Penyehatan, f. Jawatan Teknik, h. Urusan Pegawai, i. Urusan Perlengkapan j. Urusan Keuangan dan Anggaran Belanja, k. Urusan Tata Hukum dan Penerangan Dokumentasi, dan l. Urusan Umum, Ekspedisi, Arsip, Rumah Tangga dan Perpustakaan.

KISAH JAMAN JEPANG:

IRIGASI KARANGTALUN

Pembangunan irigasi Karangtalun pada zaman penjajahan Jepang yang penyelesaiannya satu bulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diresmikan oleh pejabat Pemerintah Jepang waktu itu yang disebut *Soomubutyoo Kakka* yang mewakili *Gunseikan Kakka, Yamauti Gunseisibu Tyookan* Yogyakarta (Surat kabar: Asia Raya) Dilaporkan oleh Ir. Niromatu bahwa pelaksanaan proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Tenaga yang bekerja pada proyek tersebut adalah kaum
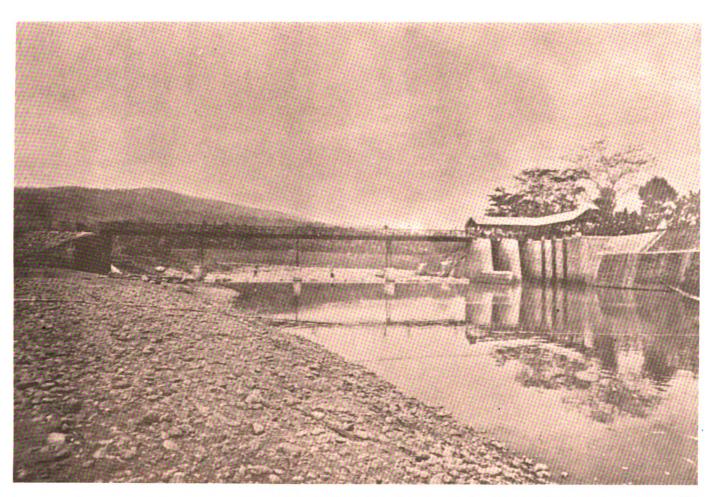
Jaringan Irigasi Karangtalun di Jawa Tengah (Foto: Perpustakaan PU)

pekerja sebanyak 1.280.000 orang (baca: satu juta duaratus delapanpuluh ribu orang) dan pekerja sukarela sebanyak 68.000 orang belum termasuk tenaga pelaksana, pengawas dan tenaga-tenaga Jepang sendiri dan biaya yang dihabiskan sebanyak Rp 1,5 juta (uang waktu itu).

Hasil yang dicapai adalah saluran irigasi sepanjang 21 km, terowongan Bligo sepanjang 600 meter, 52 jembatan dimana disebutkan bahwa jembatan Adikarto mempunyai bentangan sepanjang 12 meter. Kemampuan mengairi sawah seluas 10.000 ha.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, Pemerintah Jepang berharap dapat memlipatgandakan hasil bumi untuk memperteguh garis belakang karena dengan hasil yang bertambah, tidak ada lagi orang yang berperang dengan perut kosong atau kelaparan.

Bekal untuk makan harus mereka bawa sendiri, bahkan penduduk dari lereng gunung Merapi hanya membawa jagung rebus untuk makannya. Proyek yang dikerjakan selama 24 jam non stop itu dibagi menjadi 3 plug, tiap plugnya bekerja selama 8 jam dan tiap rombongan hanya diijinkan beristirahat selama 8 jam juga sambil menanti rombongan baru yang akan menggantikan tenaga mereka.

Untuk tenaga pelaksana (pegawai pengairan) dan pengawas walaupun

Proyek Irigasi Karangtalun berkembang menjadi Proyek Irigasi Kali Bawang dan kemudian berkembang lagi menjadi Proyek Irigasi Kali Progo tahun 1972 sampai tahun 1986 dapat memperluas daerah irigasinya menjadi 34.706 ha dengan membangun 9 buah bendung besar, 180 buah bangunan air, beberapa talang dan syphon serta saluran induk yang diperpanjang menjadi 31 kilometer.
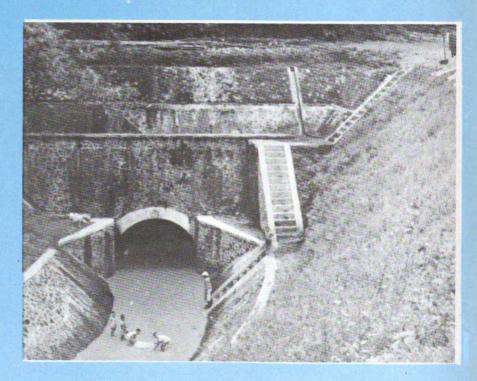
Terowongan Bligo, dibangun pada masa penjajahan Jepang.

Pengerahan tenaga sebanyak 1.280.000 orang tersebut tak lain adalah taktik **Sri Sultan Hamengkubuwono IX** agar rakyat Yogyakarta tidak habis dibawa Pemerintah Jepang untuk dipekerjakan sebagai Romusha di Thailand ataupun Birma. Tenaga sebanyak itu diambil dari seluruh tenaga muda yang produktif dari kurang lebih 23 kecamatan di sekitar Yogyakarta. Setiap harinya tiap kecamatan harus dapat mengumpulkan tenaga sebanyak 2.000 orang dengan sanksi apabila tidak dapat menyediakan tenaga yang diperlukan, camat tersebut dapat digeser kedudukannya. Jadi setiap harinya mengalir tenaga sebanyak 46.000 orang untuk bekerja secara bersama-sama di proyek tersebut.

mereka tidak bekerja secara langsung, mereka harus melatih lebih dahulu pekerja-pekerja yang belum mampu bekerja kasar. Setiap harinya para pegawai dan pengawas tersebut hanya diijinkan istirahat selama 8 jam dan berjalan hingga 3 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, Proyek Irigasi Kali Progo telah menghabiskan dana sebesar Rp 42 milyar lebih, baik dari APBN maupun dari bantuan luar negeri. Tenaga manusia yang bekerja pada proyek tersebut tidak lebih dari 10.000 orang pekerja maupun pegawai proyek.

THE INDONESIAN/AUSTRALIAN VENTURE THAT'S COME A LONG WAY & STILL GOING PLACES
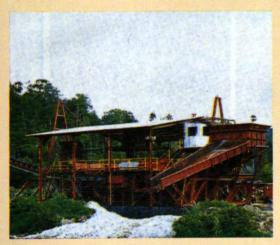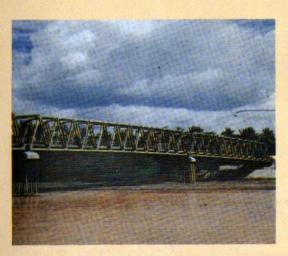
Successful management of large scale engineering projects calls for a combination of experience, resource and reliability. Since 1985 the Indonesian/Australian joint venturers of PT Bakrie & Bros and Transfield have, with the formation of Trans-Bakrie, achieved just such a combination. The local expertise and reputation of PT Bakrie combined with Transfield's vast resources as Australia's largest self sufficient project management group constitutes a formidable force in engineering project management.

If achievements speak for themselves, Trans-Bakrie's list of products and services makes compelling reading.

Fabrication and Erection

1. **Steel Structure :**
   - Steel bridges
   - Transmission Line Towers
   - Buildings
   - Power Stations, Industrial Structure

2. **Welded H-Beams**

3. **Plate Works:**
   - Ducts, Stacks
   - Bins, Hoppers
   - Storage Tanks

4. **Mechanical Handling Equipment: - Others**
   - Conveyor
   - Stacker, Reclaimer
   - Crane Structure

5. **Off - Shore Jacket, Platforms**

STEEL FABRICATION AND CONSTRUCTION

Head Office:
P.T. Trans-Bakrie
Wisma Bakrie, 1st Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta, 12920 - Indonesia
Telex : 62420
Fax : (21) 5200286
Phone : (21) 5200259

Factory:
Sumuranja Cilegon,
West Java
Phone : 082-124286

IR. MARTINUS PUTUHENA

Ir. **M. Putuhena** lahir tanggal 27 Mei 1901 di Kampung Ihamahu di Pulau Saparua, Maluku, menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet **Syahrir,** I, II dan III (14 Nopember 1945 sampai dengan 27 Juni 1947).

S.D. dijalaninya di *Saparuace School*, MULO di Tondano dan AMS/B di Yogyakarta (keduanya mendapat bea siswa Pemerintah Hindia Belanda), kemudian lulus dari *Technische Hoge School* Bandung pada tahun 1927 dengan gelar insinyur dan langsung bekerja pada *Departement van Burgelijke Openbare Werken* dan menjelang Perang Dunia II ditugaskan di Mataram (NTB) sebagai Kepala PU.

Dalam masa R.I. (Yogyakarta), beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Teknik Yogya dan Kepala Jawatan Gedung-Gedung. Beliau adalah Ketua Panitia Militer Urusan Teritorial yang mempunyai tugas mengalihkan anggota-anggota KNIL ke Angkatan Perang RIS di Ujung Pandang. Tanggal 15 Maret 1950 waktu diangkat menjadi Perdana Menteri Negara Bagian NIT beliau ikut serta dalam likuidasi NIT kedalam Negara Kesatuan R.I.

Setelah kembali ke Jakarta, beliau menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga selama enam tahun sampai 1956. Pada tahun 1953 Ir.**M. Putuhena** mendirikan Lembaga Pendidikan (ATPUT) guna mendapatkan tenaga-tenaga ahli bidang PU.

Setelah pensiun pada tahun 1956, beliau menangani Perusahaan Tambang Timah (Billiton) dan tahun 1958 diutus ke Negeri Belanda untuk berunding dalam rangka pengalihan modal swasta Belanda kepada Pemerintah R.I.

Sekembali dari Negeri Belanda beliau bergerak dalam bidang konsultan (CV. Hattawano dan PT INDOCIPTA).

Ir. **M. Putuhena** adalah penerima Bintang Maha Putera Utama pada tanggal 17 Agustus 1976 dan setelah sakit beberapa lama, beliau wafat pada tanggal 20 September 1982 dengan meninggalkan seorang isteri (Ny. **LBH Wattimena)** dan 7 orang putra dan putri.

IR. H. PANGERAN MOHAMAD NOOR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957 (Kabinet Ali Sastromidjojo)

9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959 (Kabinet Karya)

Ir. **H. Pangeran Mohamad Noor** adalah seorang bangsawan yang menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada masa Kabinet **Ali Sastromidjojo** (24 Maret 1956 s/d 14) 1959). Putra **Pangeran Ali** dan **Ratu Intan** binti **Pangeran Kesuma Giri** ini lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, 24 Juni 1901, didampingi seorang istri yakni **Gusti Aminah** binti **Gusti Mohamad Abi** dan mempunyai 11 orang putra yang saat ini masih hidup tinggal 6 orang. Sekolah Dasar dijalaninya di Kotabaru dan Amuntai lulus tahun 1911, lulus dari *Hollands Inlandse School* (HIS) di Banjarmasin tahun 1917, *Hogere Burger School* (HBS) lulus tahun 1923, dan terakhir lulus dari *Technische Hoge School* (THS) di Bandung pada tahun 1927.

Setelah lulus sebagai Insinyur, **Pangeran Mohamad Nor** diangkat menjadi Insinyur Sipil pada Departement B.O.W; dari tanggal 1 Juli 1927 sampai dengan 1929 ditempatkan di Tegal, dipindahkan ke Malang dari 1929 sampai dengan 1931 untuk menangani Irrigatie Afd. Brantas, kemudian kembali lagi ke Batavia di Departement V & W.

Tahun 1931 sampai dengan 1939 terpilih sebagai *Lid Volksraad* (dua periode) mewakili daerah Kalimantan. Disamping itu dari tahun 1933 sampai dengan 1936 beliau ditempatkan di Banjarmasin pada Departe-

ment V & W, yang kemudian dipindahkan lagi ke Batavia diangkat sebagai *Gedelegeerde Volksraad*.

Mulai tahun 1937 sampai dengan 1942, ditempatkan di berbagai instansi antara lain di Bandung sebagai Insinyur di Departement V & W kemudian di Banyuwangi sebagai *Sectie Ingeniur pada Irrigatie Afd.* Pekalen-Sampean.

Pada masa Penjajahan Jepang Ir. **H. P.M. Noor** disamping aktif di Departemen Pekerjaan Umum juga ditunjuk sebagai Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Setelah kemerdekaan beliau diangkat menjadi Wakil Menteri PU dalam masa Kabinet **Syahrir** I (1945 - 1946).

Kemudian dari tahun 1945 sampai dengan 1950, menjadi Gubernur Kalimantan yang pertama, berkedudukan di Yogyakarta, merangkap Anggota DPA.

Ir. **H.P.M. Noor** dalam masa Orde Baru adalah Anggota DPA (1968 - 1973), dan menjadi Anggota DPR/MPR-RI dari 1971 - 1977 menggantikan Prof. **Dr. Kiai. H. Masykoer Dahlan** mewakili Golongan Karya daerah pemilihan Kalimantan.

Diantara kegiatannya sebagai Menteri PU dan Tenaga Ir. **H. Pangeran Mohammad Noor** pernah memprakarsai Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Barito dan Proyek Pasang - Surut untuk meningkatkan usaha transmigrasi. Dari Pengembangan Sungai Barito tersebut yang telah dilaksanakan adalah PLTA - Riam Kanan Proyek Pengerukan Muara/Ambang Sungai Barito dan sedang dibangun proyek irigasi Riam Kanan. Almarhum adalah penerima Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra Utama Klas III tahun 1973 dan pada tahun 1971 mendapat penghargaan dari **Yayasan Dr. Yoze Rizal,** Manila, di Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum Pada Jaman Pancaroba (1950 – 1966)

1. Masa 1950 - 1966 bagi Republik Indonesia adalah masa pancaroba. Pada saat itu banyak terjadi perubahan. Pada tahun 1950 negara-negara bagian satu demi satu menggabungkan diri dengan RI Yogyakarta. Sementara itu dengan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 telah ditetapkan tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS sehingga dapat melicinkan jalan ke arah penggabungan negara-negara bagian. Menanggapi keinginan rakyat yang makin meluas di negara-negara bagian di seluruh Indonesia, maka dengan melalui jalan konstitusional pada tanggal 15 Agustus 1950 telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam sistem ini pemerintahan meneruskan pola sebelumnya sejak Kabinet **Syahrir,** dimana Pemerintah bertanggungjawab melalui Menteri-menteri Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1950 dibentuk Kabinet RI Kesatuan yang pertama dengan Perdana Menteri **Moh. Natsir.** Kabinet ini terdiri dari beberapa partai, karena tidak ada partai yang menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak itu selama kurun waktu sampai 1959 terjadi berbagai Kabinet yang silih berganti sampai kemudian muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dengan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 ditetapkan untuk sementara menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan ini berlangsung sampai pemberontakan G.30 S/PKI pada bulan September 1965 dan munculnya Orde Baru yang berlangsung hingga kini dan disebut sebagai Orde Pembangunan,
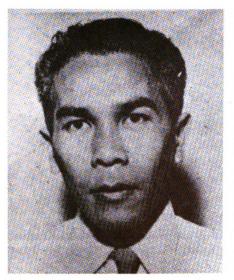
Ir. H. Johannes

Ir. Ukar Bratakusumah

Ir. Suwarto

Prof. Ir. Roosseno

MASA DEMOKRASI LIBERAL

2. Dalam kurun waktu 1950 - 1959, 7 (tujuh) Kabinet terbentuk, masing-masing adalah :

a. Kabinet **Natsir** (6 September 1950 - 27 April 1951) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. H. Johannes;**

b. Kabinet **Sukiman** (27 April 1951 - 3 April 1952) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. Ukar Bratakusumah;**

c. Kabinet **Wilopo** (3 April 1952 - 1 Agustus 1953) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. Suwarto;**

d. Kabinet **Ali Sastroamidjojo** I (1 Agustus 1953 - 12 Agustus 1955) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Prof. Ir. Roosseno** yang sejak 12 Oktober 1953 diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan sebagai gantinya diangkat **Mohammad Hasan** sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

e. Kabinet **Burhanudin Harahap** (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **R.P. Suroso;**

f. Kabinet **Ali Sastroamidjojo** II (24 Maret 1955 - 9 April 1957) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. Pangeran Mohammad Noor;**

g. Kabinet **Djuanda** (Kabinet Karya) (9 April 1957 - 10 Juli 1959) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga **Ir. Pangeran Mohammad Noor.**

3. Kabinet Republik Indonesia Kesatuan yang pertama dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1950. Keputusan ini tidak mengatur bidang/lapangan tugas masing-masing kementerian. Akibatnya terjadi perbedaan interpretasi dan pendapat mengenai hal yang menyangkut bidang tugas kementerian, misalnya mengenai kedudukan dan wewenang beberapa jawatan tertentu sebagai berikut :

a. Jawatan Teknik Penyehatan diminta oleh Kementerian Kesehatan;

b. Jawatan Pelabuhan diminta oleh Kementerian Perhubungan;

PROF. DR. IR. HERMAN YOHANNES

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga

6 September '50 s/d 27 April '51
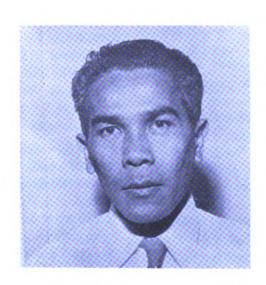
1. Pengalaman saya dalam bidang Pekerjaan Umum hanya sedikit, demikian pengungkapan beliau yang menjadi Menteri Tenaga Pekerjaan Umum dan Pembangunan dalam Kabinet **Natsir.** Sewaktu menjabat Menteri Tenaga Pekerjaan Umum dan Pembangunan, Prof. **Ir. Johannes** dihadapkan berbagai masalah. Diantaranya menangkis serangan oposisi di Parlemen mengenai kenaikan tarif listrik yang sebetulnya diputuskan oleh Kabinet sebelumnya.

Waktu itu Kebayoran Baru mulai dibangun, dengan demikian diperlukan air bersih untuk warga setempat. Dibangunlah beberapa sumur artetis yang dapat menyemburkan airnya setinggi satu meter di atas permukaan tanah. Disamping pembangunan baru tersebut, rehabilitasi sarana dan prasarana yang telah dirusak dan dibakar pada perang kemerdekaan harus dilaksanakan dengan cepat.

Pembangunan gedung-gedung sekolah waktu itu mempergunakan kerangka gedung prefabricated dari besi dan disebarkan ke beberapa kota antara lain 4 buah di Yogyakarta dan 2 buah di Jakarta. Adapun di Yogyakarta, yang memakai kerangka tersebut adalah Gedung SMA Teladan, Akademi Senirupa Indonesia dan Asrama Dharma Putera sedangkan yang di Jakarta dipakai pada Kantor Kepolisian di Kebayoran Baru.

Jabatan Menteri Tenaga, Pekerjaan Umum dan Pembangunan diakhirinya pada tanggal 26 April 1951. Hal yang paling mengesankan ialah, **Ir. Putuhena** yang menjabat Men-

teri Pekerjaan Umum sebelumnya, bersedia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga, Pekerjaan Umum dan Pembangunan pada waktu itu **Prof. Ir. Herman Johannes** menjadi Menteri.

2. Menurut **Prof. Dr. Ir. Herman Johannes,** Pembangunan ialah semua usaha bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Kemajuan itu sendiri adalah keadaan masa kini yang lebih baik daripada keadaan masa lampau, dan keadaan masa datang yang lebih baik daripada keadaan masa kini, baik lahiriah maupun batiniah.

Menurut beliau Departemen Pekerjaan Umum sekarang disamping telah berhasil membangun sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat, juga telah berperanserta dan berjasa dalam pembinaan bahasa Indonesia terbukti dengan pernah dibentuknya Panitia Istilah dan diterbitkannya buku istilah dalam bahasa Indonesia. Panitia itu sendiri terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bersama dengan Universitas Gajah Mada dan dibentuk tahun 1969 serta **Prof. Dr. Ir. Herman Johannes** duduk di dalamnya sebagai anggota panitia.

3. **Prof. Dr. Ir. Herman Johannes** telah membuat karya tulis dari hasil penelitian sebanyak 157 buah dan 21 diantaranya ditulis dengan memakai bahasa asing (Belanda dan Inggris). Di antara hasil karyanya yang sampai sekarang masih ditekuninya ialah bagaimana menciptakan tungku atau kompor yang bebas dari bahaya kebakaran dan mudah dipergunakan pada rumah susun di Perumnas.

Maha Putera bangsa ini dilahirkan di sebuah pedesaan di ujung timur yang jauh dari keramaian, tepatnya di Pulau Roti Nusa Tenggara Timur. Setelah berusia 7 tahun **Herman Johannes kecil** mulai menapakkan kakinya di sebuah sekolah desa untuk mulai belajar bagaimana ilmu itu dapat diserap. Tahun 1928 diseberangilah lautan menuju ke Makasar (Ujungpandang) untuk menuntut ilmu di MULO setelah menyelesaikan Europese Lagere School di Kupang. Setamat dari MULO tahun 1931, dilanjutkan sekolahnya di AMS di Batavia (Jakarta) yang diselesaikannya pada tahun 1934.

Herman Johannes kuliah di Technische Hoogschool di Bandung sambil menjadi guru C.O.M.B. (Cursus Opleiding Middelbare Bouwkundigen) di Bandung, Guru Sekolah Menengah Teknik di Jakarta dan Dosen Fisika di Perguruan Tinggi Kedokteran Jakarta.

Pada masa perang kemerdekaan **Ir. Johannes** menjadi anggota Pasukan Akademi Militer (A.M) Sektor Wehrkreise 105a, di bawah Komando Kolonel **Jatikusumo** dan Anggota Staf Sub Wehrkreise 104 di bawah Komando Mayor **Sukasno. Prof. Ir. Herman Johannes** pernah ditugaskan oleh Kolonel **Suharto** untuk merusak beberapa jembatan agar bisa menghambat gerak pasukan Belanda, perintah itu harus dilaksanakan dengan catatan tidak boleh menghancurkan jembatan-jembatan tersebut sampai hancur total. Diantara jembatan-jembatan yang harus dirusak adalah jembatan Tegalyoso dan jembatan Sentolo. Walaupun bom yang dipakai merusak jembatan-jembatan tersebut na-

mun hanya kerangka jembatan itu saja yang jatuh ke sungai, kemudian setelah selesai peperangan jembatan-jembatan tersebut mudah diperbaiki kembali.

Pernah menerima beberapa penghargaan di antaranya Bintang Gerilya, Bintang Maha Putra Kelas III dan Satya Karya Kelas I.
Rumah yang ditempati sekarang juga merupakan penghargaan dari Alumnus Teknik Sipil Gajah Mada yang waktu penyerahannya diserahkan oleh Ketuanya **Ir. Soenarjono Danoedjo** pada tahun 1977.

4. Dari sekian banyak jabatan yang dipangkunya, hingga sekarang masih memegang sebagai Guru Besar di Universitas Gajah Mada, ketua Hatta Foundation dan Ketua Regional Science dan Development Centre Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Harapan beliau pada Departemen Pekerjaan Umum sekarang ialah Departemen Pekerjaan Umum masih diharuskan berperanserta dalam Pembangunan Nasional Indonesia, di bidang :

1. Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum perlu meningkatkan penyediaan air irigasi yang cukup dan reklamasi rawa-rawa.
2. Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum perlu meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan jalan lintas Sumatera, membangun jalan lintas Kalimantan, Sulawesi dan membangun jalan di Irian Jaya.
3. Pemukiman, Departemen Pekerjaan Umum diminta untuk memikirkan penyediaan air bersih untuk daerah transmigrasi dan kawasan perindustrian serta daerah pariwisata maupun pelabuhan.

Khususnya untuk pembangunan Indonesia Bagian Timur beliau sangat berharap agar cepat terlaksana, lebih-lebih di daerah Nusa Tenggara Timur dimana dapat diteliti sungai-sungai yang sering terlanda erosi dan longsor sehingga dapat menjadi sungai yang dapat menahan air pada waktu musim penghujan.

Banyak yang telah dihasilkan akan tetapi masih banyak lagi yang masih harus ditingkatkan hingga Departemen Pekerjaan Umum berhasil mengukir sejarah pada Pembangunan Nasional Indonesia.

c. Jawatan Pangkalan Terbang diminta oleh Kementerian Perhubungan;

d. Jawatan Perumahan Rakyat diminta oleh Kementerian Sosial.

Dalam masa ini terjadi proses penggabungan dan pemecahan bidang tugas Kementerian Pekerjaan Umum. Penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terjadi sejak perubahan dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia belum selesai, sudah diadakan perubahan berupa pemecahan dari satu kementerian menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Kementerian Perhubungan. Di samping itu dalam usaha untuk menggabungkan peralatan negara bagian ke dalam organisasi pusat pemerintahan negara kesatuan banyak dijumpai kesukaran baik teknis, politis maupun psichologis. Serikat-serikat sekerja yang sudah muncul pada tahun 1947 menyusul seruan pembentukan partai-partai dan organisasi bawahannya mulai pula mencari kesempatan dalam situasi dan kondisi yang kurang baik ini.

Mohammad Hasan

R.P. Suroso;

Ir. H. Djuanda

Pangeran Mohammad Noor

4. Keperluan yang sangat mendesak pada waktu itu adalah berkembang pesatnya ibukota Jakarta yang dibanjiri oleh pendatang dari luar daerah baik karena faktor keamanan akibat perang kemerdekaan dan pemberontakan serta pemindahan ibukota dari Yogyakarta ke Jakarta, mengakibatkan keperluan yang mendesak akan perumahan khususnya bagi pegawai. Pembangunan kota satelit Kebayoran Baru yang sudah dimulai tanggal 18 Maret 1949 di masa pemerintahan pra federal Belanda yang diselenggarakan oleh suatu yayasan yaitu CSW sejak 1950 dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk Proyek Pembangunan Chusus Kotabaru Kebayoran (PCK). Agar penanganan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung-gedung negara terutama di kota-kota besar dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, sejak 1 Januari 1951 dibentuk Jawatan Gedung-gedung Daerah di kota-kota Jakarta Raya, Tangerang, Bogor/Cipanas, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Malang/Lawang, sebagai instansi vertikal dari Jawatan Gedung-gedung Negara Pusat terlepas dari Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi.

5. Dasar hukum dari Dinas-dinas PU Propinsi mulai disempurnakan. Selama waktu itu ketentuan-ketentuan

tugas Dinas Pekerjaan Umum di Propinsi hanya berpedoman pada undang-undang pembentukan daerah-daerah serta pemerintah otonom propinsi dan daerah istimewa setingkat propinsi, yaitu Undang-undang Nomor 22 yang ada sebelum agresi militer Belanda II. Tugas-tugas yang diserahkan itu meliputi pembinaan obyek-obyek (jalan, pengairan, gedung) yang penting untuk lingkungan propinsi disertai hak-hak penggunaan dan pemilikan atas barang-barang bergerak dan barang tak bergerak yang digunakan untuk tugas pembinaan itu. Di samping itu kepada propinsi diperbantukan para pegawai yang ada di propinsi dan tenaga-tenaga dari pusat untuk menjalankan tugas yang diserahkan. Dengan adanya penyerahan ini maka lahirlah hak pengawas dari pihak yang menyerahkan, yaitu Menteri yang harus mempergunakannya secara bijaksana sehingga tidak mencampuri dan tidak menyinggung hak otonomi dari propinsi. Tugas-tugas yang mengandung aspek-aspek nasional dan internasional dikecualikan dari penyerahan tersebut *(voorbehoudentaak)*. Hal-hal tersebut antara lain pembangkit tenaga air, pengerukan sungai, tata penggunaan ruang/tanah negara, pembangunan kota-kota dan sebagainya. Dalam hubungan ini mengenai jalan dapat dicatat bahwa di Sumatera dan pulau-pulau lainnya

Pembangunan Perumahan Kota Baru Kebayoran Tahun 1950 (Foto: IPPHOS)

akan dikecualikan dalam penyerahan tersebut suatu *asweg* (jalan poros) yang akan tetap dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan kemudian hari dikenal sebagai jalan negara, sedang jalan yang diserahkan disebut jalan propinsi. Penyerahan ke daerah otonom bawahan menyebabkan timbulnya istilah jalan Kabupaten dan jalan Kotapraja. Mengenai gedung-gedung dapat dicatat, bahwa yang diserahkan pada propinsi hanya urusan sekolah-sekolah rakyat/dasar dan keperluan-keperluan jawatan-jawatan atau dinas propinsi lainnya. Pembinaan gedung-gedung negara lainnya masih dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Presiden Sukarno dan Walikota Sudiro Jakarta meninjau pembangunan Kota Baru Kebayoran (Foto : IPPHOS)

Ketetapan untuk penyerahan sebagian tugas pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada propinsi sebagai daerah otonom telah diputuskan dalam Sidang Dewan Menteri tanggal 10 Agustus 1951, khususnya untuk Jawa dan Sumatera. Ketetapan berupa Peraturan Pemerintah baru diundangkan dalam masa kabinet yang lain yaitu tanggal 21 April 1953 yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Peraturan Pemerintah ini dimuat dalam Lembaran Negara RI 1953 Nomor 31. Tugas-tugas bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini adalah :

a. menguasai perairan umum seperti sungai, danau, sumber dan lain-lain sebagainya;

b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahan air;

c. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan umum, yang tidak diurus langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga serta bangunan-bangunan turutannya, tanah-tanahnya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalulintas di atas jalan-jalan tersebut;

d. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalulintas air dan sebagainya;

e. membikin, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, sumur-sumur artetis, pembuluh-pembuluh pembilas dan sebagainya;

f. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Propinsi;

g. memelihara lain-lain gedung Negara terkecuali yang pemeliharaannya diurus langsung oleh Jawatan Gedung-gedung Negara, dengan catatan bahwa pembiayaannya diperhitungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Dari penyerahan tersebut dikecualikan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu :

a. Urusan sungai-sungai yang terbuka untuk pelayaran internasional;

Jalan Jenderal Sudirman ditahun 50'an. *(Foto : IPPHOS)*

b. urusan pembikinan dan eksploitasi bangunan-bangunan pembangkit gaya tenaga air.

Peraturan Pemerintah tersebut, pada pasal 4, juga menegaskan bahwa penyerahan urusan-urusan pekerjaan umum termaksud dalam peraturan ini tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan atas urusan-urusan tersebut serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah propinsi atau daerah-daerah otonom bawahan guna kemakmuran umum tentang hal-hal mana Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat mengadakan peraturannya. Kemudian untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan membangun, memperbaiki, atau memperluas obyek-obyek bidang pekerjaan umum di daerah propinsi atau daerah otonom bawahan, yang biayanya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga memerlukan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga terlebih dahulu. Ini berarti adanya standar pembiayaan dalam bidang pekerjaan umum. Dalam hal-hal luar biasa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat mengambil keputusan untuk menahan penyelenggaraan suatu pekerjaan propinsi atau daerah otonom bawahan guna kepentingan Negara dan diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Wewenang yang demikian ini ditambah dengan kenyataan bahwa pemerintah daerah otonom kurang memiliki sumber-sumber pembiayaan menyebabkan ketergantungan yang amat besar kepada Pemerintah Pusat. Di kemudian hari dengan terbatasnya anggaran Pemerintah Pusat menyebabkan merosotnya keadaan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional.

6. Pada tahun 1952 dengan semakin berkembangnya kota Jakarta dan guna menampung perkembangan

industri terdapat keinginan untuk membangun waduk Jatiluhur yang dapat membangkitkan tenaga listrik dan sekaligus memberikan suplesi air irigasi bagian utara Jawa Barat serta supply air bersih untuk kota Jakarta. Gagasan ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1948 yaitu dengan adanya tokoh yang bernama **van Blomenstein** yang menulis buku *Wellvaart plan voor Java en Madura.* Gagasan ini memberikan gambaran tentang kemungkinan pengembangan sungai-sungai di seluruh Jawa dan menghubungkannya dengan sejumlah waduk serbaguna yang dapat bermanfaat bagi pembangkitan tenaga listrik, irigasi, pelayaran, air bersih penggelontoran dan sebagainya. Salah satu waduk yang diidentifikasi adalah waduk Jatiluhur.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri **Ali Sastroamidjojo** II telah dicetuskan program untuk memulai pembangunan secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (lima tahun) dengan menitikberatkan pada dasar kepentingan rakyat. Suatu rencana lima tahun diumumkan yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 — 1961. Sayang sekali kabinet telah jatuh pada bulan April 1957, dan walaupun pemerintah berikutnya tetap memberikan perhatian atas rencana itu namun perkembangan politik kenegaraan telah berubah.

7. Dengan berlakunya sistem banyak partai maka Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dikuasai oleh satu mayoritas. Akibatnya adalah terbentuknya kabinet yang didukung oleh beberapa partai sehingga mudah goyah. Selanjutnya kabinet silih berganti dan hanya berlangsung dalam waktu yang tidak lama, sehingga program-program tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kabinet sudah jatuh. Masalah lain yang mengganggu negara baru adalah adanya sejumlah pemberontakan bersenjata yang berlangsung selama kurun waktu 1950 — 1958, dimulai dengan **Kartosuwiryo** (DI/TII), APRA, **Andi Aziz,** RMS dan lain-lain dan terakhir adalah PRRI/Permesta pada tahun 1957 — 1958. Pemilihan umum baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 dan kemudian terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, dengan komposisi yang masih seimbang dan tidak adanya mayoritas di dalamnya. Pada masa itu situasi politik dan keamanan yang kurang stabil ditambah dengan pengaruh perang dingin antara kedua blok Barat dan Timur menyebabkan terdapatnya keinginan untuk dapat terbentuknya negara kuat dengan pemerintahan yang stabil. Konstituante yang berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 ditugaskan segera menetapkan undang-undang dasar baru setelah bersidang sejak 10 Nopember 1957 sampai dua tahun kemudian belum juga berhasil menetapkan dasar negara. Dwi Tunggal **Soekarno-Hatta** mulai ada tanda-tanda perpecahan, sehingga **Presiden Soekarno** sebagai pribadi membentuk pemerintahan yang disebut dengan nama Kabinet Karya (9 April 1957 — 10 Juli 1959) dengan **Ir. Djuanda** sebagai Perdana Menteri Kabinet Djuanda masih meneruskan Rencana Lima Tahun khususnya pembangunan bendungan Jatiluhur. Situasi keuangan negara sejak berakhirnya *'Korea Boom'* tidak semakin baik dengan akibat kurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan prasarana, dan upaya merebut Irian Barat dari tangan Belanda sebagai kelanjutan perjuangan kebangsaan menyebabkan keperluan yang mendesak akan peralatan militer yang menyedot anggaran negara termasuk hutang luar negeri.

Pada tanggal 5 Juli 1959 terbit Dekrit Presiden yang menetapkan :

(1) Pembubaran Konstituante;

(2) Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sedang Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku;

(3) Pembentukan Majelis Permusyawaran Rakyat Sementara.

8. Sebelum Dekrit Presiden sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem ini di tingkat Kementerian biasanya Menteri didampingi oleh seorang Sekretaris Jenderal yang merupakan jabatan tertinggi pegawai negeri. Di bawahnya adalah jawatan-jawatan yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang yang penting. Di tingkat Daerah/Propinsi dibentuk Dinas-dinas Pekerjaan Umum Propinsi. Penyeragaman dengan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang terdapat di Jawa berlangsung sesuai dengan pembentukan propinsi-propinsi. Pengadaan organisasi PU Daerah Otonom Bawahan berlangsung terus disamping pembentukan unit kerja vertikal dari Dinas PU Propinsi. Gerakan-gerakan daerah serta pertumbuhan pemerintahan otonom daerah yang telah mengakibatkan dibentuknya propinsi-propinsi baru membawa konsekwensi dibentuknya Dinas-dinas PU baru. Beberapa Dinas

PU Propinsi yang mengalami pemekaran organisasi dipecah dengan menjadikan Dinas PU Daerah menjadi Dinas PU Propinsi, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Di Kalimantan pada waktu itu pernah diadakan jabatan Koordinator Dinas PU Kalimantan. Masalah yang dihadapi dalam pengadaan tenaga pimpinan adalah sangat langkanya tenaga ahli teknik /sarjana dengan pengalaman kerja yang mencukupi. Pada masa itu pernah pula dikenal istilah insinyur praktek, yaitu tenaga teknik lulusan KWS, KES, PJS yang sudah berpengalaman dan berprestasi baik diangkat menjadi insinyur praktek.

Perusahaan Negara mulai menjadi pemikiran di kalangan Pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang dasar mengenai penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang penting. Selain itu dengan adanya keputusan Pemerintah membatalkan perjanjian KMB dan repatriasi warga negara Belanda maka banyak badan usaha milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah. Yang pertama terpikir untuk segera dikuasai oleh negara adalah listrik dan gas, kemudian menyusul keperluan akan perumahan sebagaimana berjalan dengan pembangunan kota Kebayoran Baru oleh sebuah Yayasan pada masa pendudukan Belanda. Untuk itu dibentuk Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara; juga pembentukan Perusahaan Negara 'Pembangunan Perumahan'. Dengan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda lainnya maka perusahaan-perusahaan konstruksi Belanda yang dikenal dengan istilah *'the big five'* juga dirubah menjadi perusahaan Negara: HBM *(Hollandsche Beton Maatschappij)* menjadi PN. Hutama Karya, NEDAM *(Nederlands Aannemings Maatschappij)* menjadi PN. Nindya Karya, VAM *(Volkers Aannemings Maatschappij)* menjadi PN. Waskita Karya.

Perusahaan-perusahaan konstruksi yang di zaman Hindia Belanda dikenal sebagai *'the big five'* tersebut memang merupakan perusahaan yang dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna menyelenggarakan pekerjaan -pekerjaan di Indonesia dan telah menjadi besar dan profesional. Kelima perusahaan tersebut secara bergantian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan PU dan menurut **Prof. Roosseno** pada ceramahnya di

Departemen Pekerjaan Umum tanggal 5 Desember 1984, *'arisan tender'* itu bukan penemuan GAPENSI (Gabungan Pelaksana Nasional Indonesia), tetapi sudah ada sejak jaman kolonial, ya di antara ke lima perusahaan itu, dengan menggunakan anggaran Pemerintah Hindia Belanda, baik pusat ataupun daerah yang diatur dalam OFV *(Ordonnantie Financiale Verhouding)*.

Selain memanfaatkan perusahaan-perusahaan, Pemerintah Kolonial dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menggunakan pajak khusus yang dikenal dengan *herendienst* (rodi), dimana penduduk yang sudah dewasa diharuskan menyumbangkan tenaganya untuk beberapa hari dalam setahun untuk keperluan tersebut di atas. Pajak ini kemudian diganti dengan *weg-geld* (sumbangan untuk keperluan jalan) dan akhirnya dihapuskan, tetapi pada zaman pendudukan Jepang dikenal istilah *kingrohosi/romusha* yaitu kerja sistem gotang royong menggerakkan tenaga dan bahan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan, seperti yang ditulis oleh surat kabar 'Asia Raya' yang mengerahkan lebih kurang satu juta orang untuk pembangunan saluran Mataram di Yogyakarta.

10. Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang administrasi keuangan berpedoman kepada ICW *(Indische Comptabiliteits Wet)* yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan *in eigenbeheer* (swakelola) dan *in aanbesteding* (diborongkan). Persyaratan-persyaratan teknis lainnya berpedoman kepada AV 1941 *(Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken in Nederlands Indie)*. Waktu itu istilah kontraktor belum dipakai tetapi dipergunakan istilah pemborong atau pelaksana. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Nasional Indonesia) merupakan gabungan para pemborong bangunan/pelaksana nasional sebagai upaya untuk menandingi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di alam Indonesia merdeka maupun pemborong-pemborong non pribumi lainnya. Para anggota GAPENSI umumnya adalah pemborong/pelaksana yang memulai usahanya sebagai pemborong kecil-kecilan sebagai sub kontraktor dengan mengandalkan tenaga para mandor yang berpengalaman. Pada masa itu pemborong/pelaksana nasional didorong agar dapat berkembang dan menggantikan peranan *Big Five* secara berangsur-angsur. Dengan terbentuknya perusahaan-perusahaan negara sebagai kelanjutan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda maka lengkaplah pembentukan dunia usaha jasa konstruksi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pekerjaan umum dan di kemudian hari muncul AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) dan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).

Kegiatan Pembuatan Saluran

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

11. Beberapa hari setelah Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, dengan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959, telah dibentuk Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden dan **Ir. H. Djuanda** sebagai Menteri Pertama.

Dalam kabinet ini para Menteri dikelompokkan sebagai Menteri-menteri inti dan Menteri-menteri Negara. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959 diangkat Menteri-menteri Muda; salah satu diantaranya adalah Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga, **Ir. Sardjono Dipokusumo** yang berkedudukan dalam lingkungan Menteri Inti Bidang Produksi. Perubahan Kabinet pada tanggal 18 Februari 1960 menjadi Kabinet Kerja II menambahkan jabatan Wakil Menteri Pertama dan menambah jumlah menteri inti dan merubah sebutan Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dan dalam *regrouping* kabinet dalam Kabinet Kerja III yang mengangkat sejumlah wakil menteri pertama **Ir. Dipokusumo** digantikan oleh **Mayor Jenderal D. Suprajogi** sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang merangkap dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi (Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962). Susunan baru Kabinet Kerja IV pada tanggal 13 Nopember 1963 (Keputusan Presiden Nomor 232 Tahun 1963) menempatkan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam lingkungan Kompartemen Pembangunan dengan Menteri Pekerjaan Umum **Mayor Jenderal D. Suprajogi** Sejak itu sebutan kementerian dirubah menjadi departemen sesuai pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Menteri sebagai pembantu Presiden memimpin Departemen pemerintahan.

12. Bidang tugas yang dimaksud dalam urusan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga adalah :

a. Perairan, yang meliputi pengairan (irigasi), pengendalian banjir (flood control), air minum dan teknik penyehatan (assainering);

b. Ketenagaan yang meliputi pembangkit tenaga listrik, gas, kokas dan lain-lainnya;

c. Jalan-jalan umum yang meliputi bangunan jalan, jembatan dan segala bangunan pelengkapnya;

d. Bangunan-bangunan yang meliputi bangunan untuk pabrik, bangunan umum negara, gedung-gedung dan perumahan pegawai negeri;

e. Perencanaan dan pembangunan kota dan daerah *(city and regional planning)*;

f. Penelitian, penyelidikan dan perundang-undangan untuk kepentingan dan mengenai bidang/lapangan tugas tersebut;

g. Pembinaan, pendidikan dan latihan tenaga teknik.

Dalam susunan organisasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tahun 1959 itu beberapa jawatan dijadikan Direktorat Jenderal, Menteri Muda/Menteri dibantu oleh staf pem-

Ir. Sardjono Dipokusumo

Mayor Jenderal D. Suprajogi.

LETNAN JENDERAL DADANG SUPRAYOGI

Putra Indonesia ini dilahirkan di Bandung, tanggal 12 April 1914, sempat mengecap pendidikan *Middelbare Handel School* di Bandung dan Staf Komando Angkatan Darat. Pada tahun 1935 sampai dengan 1942 bekerja sebagai *Book Houder* di *Gemeente* Bandung, sedang pada penjajahan Jepang menjabat Inspektur Keuangan Kotapraja Bandung. Beliau menikah dengan **Ny. Nana Suprayogi** yang memperoleh putra dua orang.

Tahun 1945 **Dadang Suprayogi** mengawali karier militernya sebagai Kepala Perbekalan Komando Pertahanan Priangan dan Inspektur Administrasi Divisi Siliwangi. Panglima Divisi Siliwangi dijalaninya tahun 1956 sampai 1957.

Pada tahun 1958 beliau diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi dan pada tahun 1959 sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga merangkap sebagai Menteri Inti Produksi/Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi.

Pada masa jabatannya selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, **Dadang Suprayogi** membangun berbagai macam proyek antara lain, di Sumatera pembangunan jembatan sungai Musi (jembatan Ampera), di Pulau Jawa pembangunan Waduk Jatiluhur dan Karangkates, di Bali pembangunan lapangan terbang Ngurah Rai, di Kalimantan pembangunan bendung Riam Kanan, jalan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sedangkan di Indonesia Bagian Timur (IBT) pembangunan jalan di Nusa Tenggara Timur, ruas antara Maumere - Ende, pembangunan Universitas Oceanografi di Ambon, pembangunan Kota Baru di Amahai Pulau Seram, dan di Jakarta pembangunan sarana Asian Games pada tahun 1962, termasuk pembangunan jalan Jakarta By Pass, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia dan lain-lainnya.

Dadang Suprayogi dalam pesannya kepada para karyawan dan pimpinan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang saat ini masih mengerjakan/melaksanakan pembangunan agar meningkatkan kreativitas dan berinisiatif serta tidak cepat puas. Penelitian dan pengembangan agar dikembangkan lebih luas lagi peranannya agar bisa memberikan masukan-masukan dalam bidang produksi, perindustrian dan pendidikan. Dalam melaksanakan program tinggal landas Departemen Pekerjaan Umum agar mempunyai tenaga spesialisasi karena pembangunan makin lama makin sempurna sesuai arus kemajuan teknologi.

Letnan Jenderal Purnawirawan ini menerima sepuluh tanda penghargaan diantaranya Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, delapan bintang jasa antara lain Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Tingkat II/Adipradana. Dua bintang diterimanya dari luar negeri ialah, Bintang Pemerintah Perancis dan Pemerintah Jerman.

Setelah mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan naga beliau pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator/Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan terakhir sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai tahun 1982. Jabatan lain yang pernah dipegangnya ialah Ketua Harian KONI Pusat, Anggota Internasional Olimpic Committee.
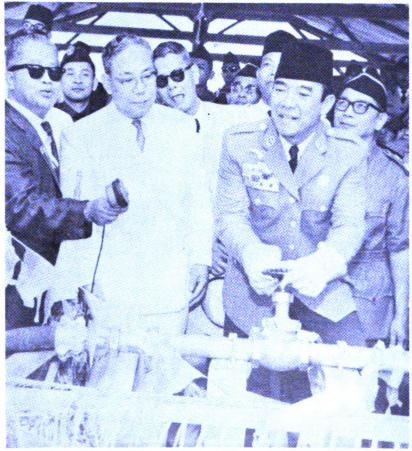
Presiden Pertama RI didampingi Menteri P.U. Mayjend. D. Suprajogi meresmikan proyek Penjernihan Air Minum Pejompongan (Foto: Dokumentasi PU)

bantu menteri yaitu Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pekerjaan Umum, Direktur Jenderal Pengairan, Direktur Jenderal Perumahan dan Direktur Jenderal Tugas Khusus. Masing-masing Direktur Jenderal membawahi jawatan-jawatan tertentu. Jawatan dan Balai di lingkungan Departemen adalah :

(1) Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan;
(2) Jawatan Perairan;
(3) Jawatan Teknik Penyehatan;
(4) Jawatan Perumahan Rakyat;
(5) Jawatan Gedung-gedung Negara;
(6) Jawatan Alat-alat Besar;
(7) Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan;
(8) Balai Penyelidikan Masalah Air;
(9) Balai Tata Ruangan dan Pembangunan Kota;
(10) Balai Konstruksi;
(11) Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan; dan
(12) Perusahaan Listrik Negara.

Sekretaris Jenderal membawahi Biro Menteri yang terdiri atas Sekretaris dan Bagian-bagian, yaitu Hubungan Luar Negeri, Pendidikan, Hukum dan Perundang-undangan, Penyaluran Bahan Bangunan, Ketenagaan, Keuangan, Pegawai dan Umum.

Mengikuti susunan Kabinet Kerja III, bidang tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dibagi dalam bidang-bidang :

a. Bidang Produksi :

(1) Perairan :

(a) Irigasi untuk memperbesar produksi pangan;

(b) Perairan (pencegahan bahaya banjir dan erosi) untuk mengamankan produksi pangan;

(c) Perairan (lalulintas sungai) untuk memperlancar distribusi/produksi pangan;

(2) Tenaga Listrik, Gas dan Kokas : Untuk kepentingan produksi industri dan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar serta penerangan listrik bagi masyarakat;

b. Bidang Distribusi Komunikasi :

Jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar proses produksi di segala bidang dan untuk memperlancar jalannya distribusi dan penyaluran bahan makanan, bahan mentah dan lain-lain;

c. Bidang Kesejahteraan :

(1) Perumahan dan Pembangunan Kota :
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat serta untuk mempertinggi efisiensi kerja;

(2) Air Minum dan Teknik Penyehatan :
Untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan produksi industri.

3. Sejak tahun 1960 perkembangan dari penyediaan anggaran untuk bidang pekerjaan umum menunjukkan kenaikan menjadi lebih dari empat kali lipat jika dibandingkan dengan penyediaan anggaran pada tahun 1959. Walaupun dari sudut itu menggembirakan, namun pekerjaan kurang berjalan dengan lancar. Inflasi semakin tinggi dan usaha-usaha pengamanan terhadap sisa-sisa pemberontakan di daerah-daerah belum seluruhnya selesai; selain itu Pemerintah masih dihadapkan dengan sengketa dengan Belanda mengenai pengembalian Irian Barat. Usaha-usaha tersebut memakan anggaran belanja negara yang tidak kecil sedang konsistensi dalam masalah pelaksanaan anggaran belum dapat terlaksana.

Dalam masa bakti Kabinet Kerja ini Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga telah mulai melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan prasarana yang mempunyai peranan strategi dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan yang cukup berarti. Pekerjaan-pekerjaan yang penting diantaranya ialah :

— Proyek-proyek pengairan sedang dan kecil tersebar di daerah-daerah
– Proyek pembukaan lahan pasang surut di Kalimantan dan Sumatera.
— Proyek serbaguna Waduk Jatiluhur.
— Proyek terowongan Tulung Agung Selatan.
— Proyek Air Minum Pejompongan (Jakarta) dan Cisangkui (Bandung)
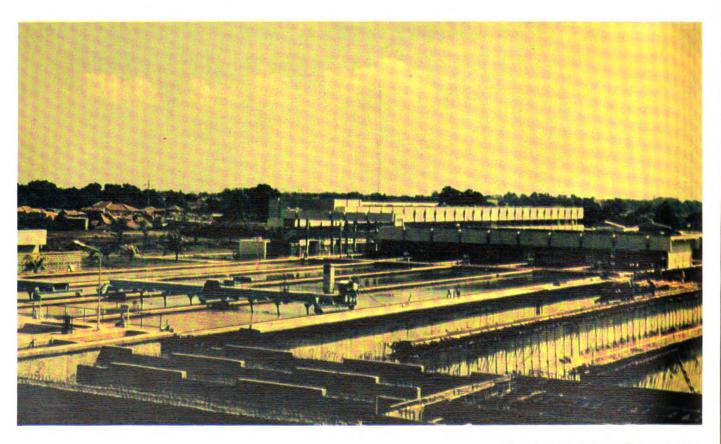
Instalasi Air Minum Pejompongan
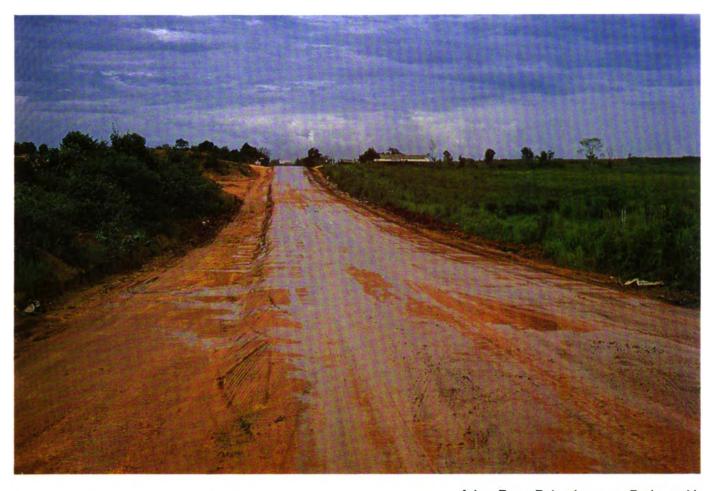
Jalan Raya Palembang — Prabumulih.

— Proyek rehabilitasi dan pembangunan jalan di Sumatera dan Jakarta (bantuan/pinjaman ICA Amerika Serikat).

— Proyek pembangunan jalan Kalimantan (bantuan/pinjaman Rusia).

— Pembangunan jalan-jalan sekunder *(feeder roads)* tersebar di daerah-daerah (pinjaman SAC—Amerika Serikat).

— Pembangunan jembatan-jembatan besar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa.

— Perencanaan dan pembangunan kota Pakan Baru dan Palangkaraya.
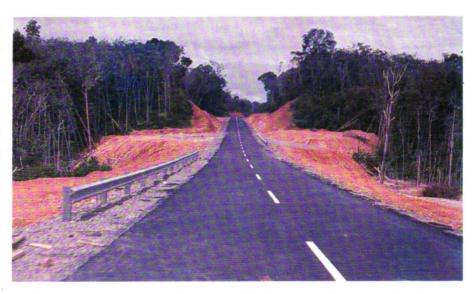
Jalan Raya Muara Bungo — Lubuk Linggau.
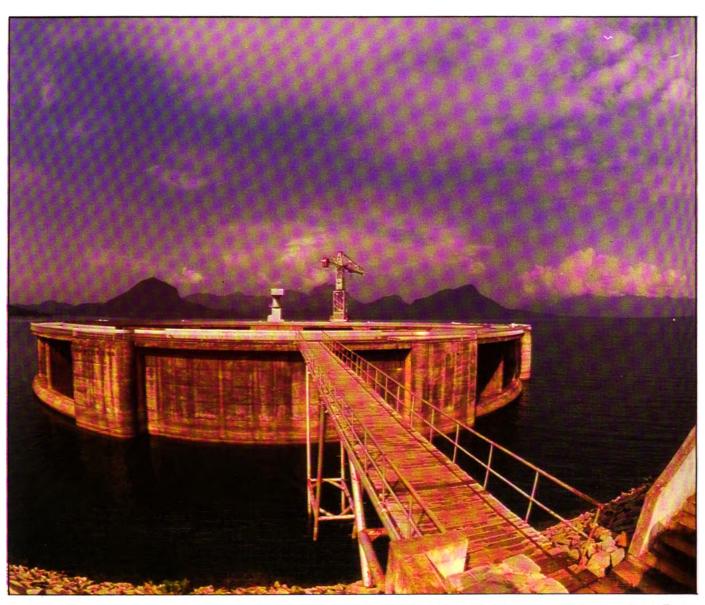
Bangunan Turbin Bendungan Jatiluhur — Jawa Barat.

— Pembangunan pusat-pusat listrik : PLTA Jatiluhur, PLTU Priok, PLTU Semarang dan PLTD-PLTD di 85 kota di daearah-daerah.

14. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam sidangnya pada tanggal 10 Nopember 1960 sampai 7 Desember 1960 telah menghasilkan 2 ketetapan, yaitu :

(a) Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960, yang menetapkan Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.

(b) Ketetapan MPRS Nomor II/MPR/1960, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Setelah pada tanggal 1 Januari 1961 dicanangkan dimulainya Pembangunan Nasional Semesta Berencana, maka segera dimulailah pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek pembangunan di segala sektor di seluruh tanah air. Proyek-proyek Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang tercantum dalam pola proyek dari rencana Pem-

bangunan Nasional Semesta Berencana, yang penting diantaranya ialah :

(1) Rehabilitasi Pengairan seluas 54.182 ha, penyempurnaan dan peningkatan seluas 226.000 ha, perluasan seluas 117.000 ha dan pembangunan baru proyek-proyek besar seluas 909.000 ha. Seluruhnya meliputi luas areal 1.306.182 ha.

(2) Pembangunan pusat-pusat pembangkit kelistrikan, yaitu pusat listrik tenaga air, pusat listrik tenaga uap, pusat listrik tenaga diesel, pusat listrik tenaga gas sejumlah duapuluh tiga proyek dengan jumlah daya terpasang sebesar 1.363.900 KW, tersebar di seluruh Indonesia.

(3) Rehabilitasi dan pembangunan jalan raya sepanjang 2.713 km, peningkatan (modernisasi) jalan Negara sepanjang 1.910 km, peningkatan jalan krikil (negara, propinsi, kabupaten) sepanjang 19.985 km, pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 1000 m dan persiapan jalan baru sepanjang 1.625 km.

(4) Perbaikan dan perluasan air minum di beberapa kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

(5) Usaha Rerencanaan Kota, termasuk ibukota dan kota satelit.

(6) Pembangunan gedung-gedung negara, rumah sakit, sekolah dan perumahan pegawai.
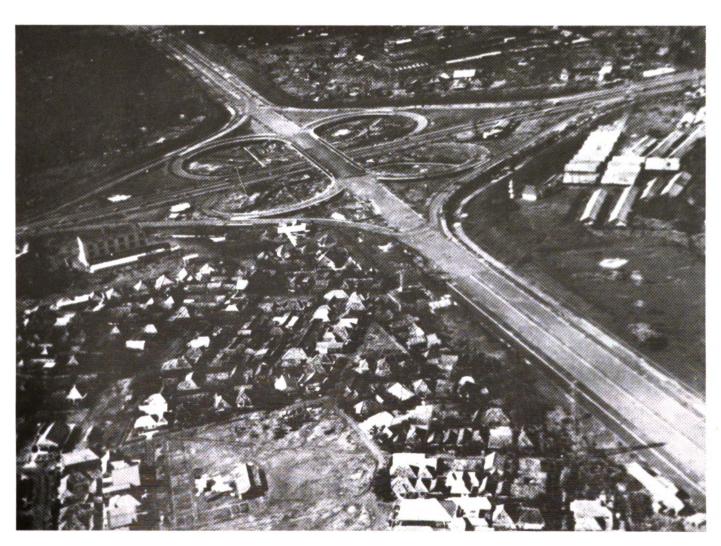
Jembatan Semangi karya Ir. Sutami (. Foto: ARNAS RI)

Dalam mengadakan perbaikan dan/atau pembuatan jalan raya, RPNSB (Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana) Tahap Pertama (1961/1969) antara lain juga menggariskan, agar prioritas pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan yang mempunyai nilai strategis.

b. Jalan yang langsung berkepentingan/berhubungan dengan obyek-obyek pembangunan semesta dalam bidang produksi.

c. Perbaikan dan/atau pembuatan jalan-jalan baru antar ibukota Propinsi dengan ibukota kabupaten.

d. Perbaikan dan/atau pembuatan jalan-jalan baru antar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

Pembuatan jalan-jalan baru agar diutamakan jalan "Trans Sumatera" termasuk proyek jalan Takengon — Blangkejeren Kotacane (Aceh)supaya dimasukkan tahap I, dan "Trans Sulawesi" yang mempunyai nilai strategis yang sangat besar. Dalam rangka ini pada tahun 1962 dibangun jembatan besar di atas Sungai Musi Palembang yang dinamakan jembatan Ampera dengan dana pampasan perang (Jepang).
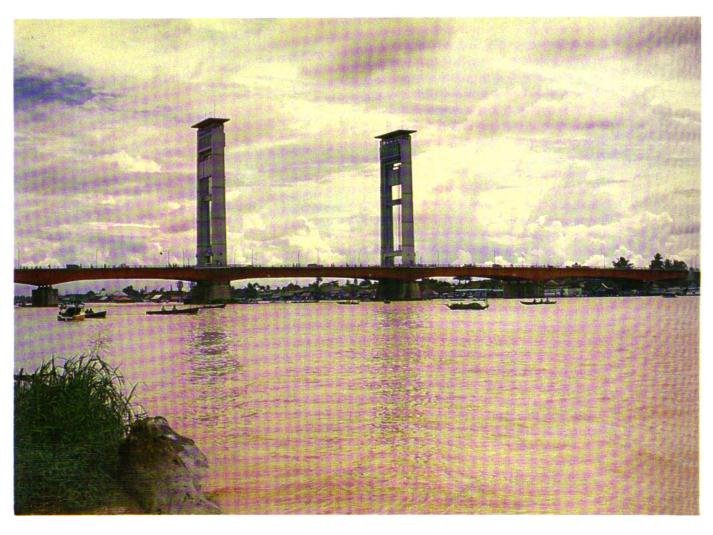
Jembatan Ampera, merupakan Jembatan Gerak Pertama di Indonesia
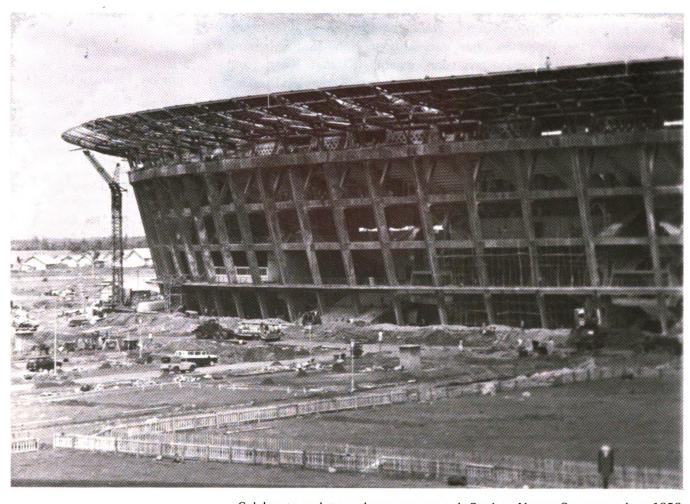
Salah satu sudut pembangunan proyek Stadion Utama Senayan tahun 1959

Sementara itu atas prakarsa Presiden Soekarno pada waktu itu dibangun suatu "Gelanggang Olahraga" *(Sport Venues)* di Senayan Jakarta lengkap dengan segala fasilitas olahraga dan akomodasi yang diperlukan, baik untuk para atlet, officials, press dan tamu-tamu lainnya. Pembangunan diselenggarakan oleh Komando Urusan Pembangunan Asian Games di bawah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Proyek pembangunan ini yang dikenal sebagai Proyek Mandataris diselenggarakan dengan bantuan Rusia. Dengan selesainya proyek ini memungkinkan diselenggarakannya Asian Games ke IV di Indonesia pada tanggal 24 Agustus 14 September 1962.

Pada tanggal 17 Agustus 1961 juga atas prakarsa Presiden Soekarno mulai dikerjakan pembangunan Proyek Tugu Monumen Nasional sebagai Proyek Mandataris yang secara fisik baru selesai pada tahun 1965.

Didalam pelaksanaannya proyek-proyek pola RPNSB 1961-1969 itu tidak berjalan seperti diharapkan karena tidak didukung rencana pembiayaan yang memadai. Proyek pembiayaan/pendanaan pembangunan (disebut proyek B) yang mengandalkan pada hasil pengerahan "dana dan tenaga" di dalam negeri, pengolahan sumber daya alam terutama hutan (ekspor kayu secara besar-besaran), pertambangan dan lain-lain, belum dapat direalisasikan karena estimasi yang berlebihan.

Disamping itu adanya penyimpangan dari rencana, karena ternyata rencana proyek yang disiapkan oleh Depernas dan ditetapkan sebagai proyek RPNSB 1961-1969 itu kurang realistis dan kurang pragmatis, masih terdapat kelemahan dan kurang matang perencanaannya. Seperti diketahui Depernas baru dibentuk pada bulan Oktober 1958 (Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958) dan ditetapkan kembali pada bulan Juli 1959 (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1959) praktis hanya mempunyai waktu yang relatif sangat singkat kira-kira hanya kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung dari mulai pembentukannya tanggal 23 Oktober 1958 sampai pembukaan Sidang MPRS 10 Nopember 1960 (jika dimanfaatkan secara penuh). Bahan-bahan masukan yang diolah dan digunakan oleh Depernas adalah bahan-bahan yang disiapkan oleh Departemen Teknis, yang kedudukannya masih dalam taraf penyusunan dan konsolidasi, dan belum mempunyai aparat perencanaan yang tangguh. Disamping itu data/informasi untuk perencanaan boleh dikata masih cukup langka. Kondisi yang demikian itu ditambah lagi dengan tidak adanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan (yang ada di luar dugaan dan perhitungannya) dan adanya perjuangan merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, yang disusul lagi perjuangan Dwi Komando Rakyat, yaitu Perhebat Ketahanan Revolusi, bantu perjuangan Revolusioner Rakyat Singapore, Sabah dan Brunai untuk menggagalkan Negara Malaysia dan berakhir dengan "Konfrontasi Malaysia"

15. Pelaksanaan pembangunan semesta baru berjalan 2 (dua) tahun, dan susunan Kabinet diperbaharui dan diganti. Kabinet Kerja yang berakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963, diadakan susunan baru dan regrouping sesuai dengan tingkat perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme pada tanggal 27 Agustus 1964 dibubarkan, dan dibentuk Kabinet Dwi Kora (Dwi Komando Rakyat), dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1964. Dalam susunan Kabinet Dwikora, yang menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ialah: Mayor Jenderal TNI **D. Suprajogi.**

Susunan organisasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Dwikora ini disesuaikan dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 5/PRT/1964 dan terdiri dari :

a. Pimpinan Tertinggi Departemen:
   1) Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
   2) Para Pembantu Menteri, yaitu:
      Pembantu Menteri I: Bidang Ketenagaan, Perairan dan Urusan Perusahaan Negara; Pembantu Menteri II: Bidang Jalan-jalan dan Urusan Anggaran dan Belanja Negara;
      Pembantu Menteri III: Bidang Tata Bangunan, Teknik Penyehatan dan Urusan Perencanaan.

b. Pimpinan Tertinggi dibantu oleh Staf, yaitu:
   1) Staf Umum, yaitu terdiri atas:
      a) Inspektur Keuangan
      b) Para Kepala Biro (7)

2) Staf Teknis, yang terdiri dari:
   a) Para Kepala Direktorat (5)
   b) Para Kepala Lembaga (5)
   c) Para President Direktur BPU-PLN, PGN dan PAN.

c. Aparat Pembantu lainnya, yaitu:
   1) Kabinet Menteri
   2) Inspektur Umum.

d. Badan-badan Khusus, yaitu :
   1) Badan Pertimbangan (Bapertim).
   2) Badan Perencanaan Departemen (Baperdep).
   3) Dan lain-lain.

e. Aparat Pelaksana Pusat, yaitu:
   1) Biro-biro (I s/d VII), yang memberikan pelayanan administrasi dan teknik.
   2) Direktorat-direktorat :
      a) Direktorat Pengairan.
      b) Direktorat Jalan Umum
      c) Direktorat Teknik Penyehatan
      d) Direktorat Ketenagaan
      e) Direktorat Bangunan Umum.
   3) Lembaga-lembaga :
      a) Lembaga Penyelidikan Masalah Air, Hidrologi dan Hidrometri.
      b) Lembaga Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan
      c) Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan
      d) Lembaga Penyelidikan Masalah Konstruksi Beton
      e) Lembaga Penyelidikan Masalah Ketenagaan.

f. Aparat Pelaksana di Daerah :
   1) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I (DPUP)
   2) Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga (ATPUT).
   3) Badan-badan Pelaksana Proyek
   4) Perusahaan-perusahaan Negara.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tanggal 25 Mei 1965 Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dikeluarkan dari lingkungan Kompartemen Pembangunan dan ditetapkan menjadi Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang membawahi:

1) Departemen Listrik dan Ketenagaan
2) Departemen Pengairan Dasar
3) Departemen Bina Marga
4) Departemen Cipta Karya dan Konstruksi.
5) Departemen Jalan Raya Sumatera.

(Disamping itu ada Departemen Pengairan Rakyat, yang termasuk dalam lingkungan Kompartemen Pertanian dan Agraria).

Dengan Keputusan Presiden yang sama, diangkat :

1) Mayor Jenderal TNI **D. Suprajogi** sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang sekaligus dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1965 ditugaskan untuk menyelenggarakan pembangunan Proyek *"Political Venues"* di Jakarta (Proyek Conefo).
2) **Ir. Setiadi Reksoprodjo,** sebagai Menteri Listrik dan Ketenagaan.
3) **Ir. P.C. Harjosudirdja,** sebagai Menteri Pengairan Dasar.
4) Brigadir Jenderal TNI **Hartawan Wirjodiprodjo,** sebagai Menteri Bina Marga.
5) **David GEE Cheng,** sebagai Menteri Cipta Karya dan Konstruksi.
6) **Ir. Bratanata,** sebagai Menteri Jalan Raya Sumatera.
7) **Ir. Sutami,** sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk Urusan Penilaian Konstruksi.

Dengan dibentuknya Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan 5 (lima) Departemen dalam lingkungannya, maka tugas-tugas, fungsi-personal dan alat kelengkapan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dipecah dan dibagikan ke 5 (lima) Departemen yang bersangkutan.

Pegawai-pegawai yang dipekerjakan di Departemen-departemen ditetapkan status Satminkalnya pada Departemen yang bersangkutan. Yang bekerja di Kompartemen statusnya sebagai Departemen yang diperbantukan kepada Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Susunan Organisasi Staf Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang ditetapkan dengan Peraturan Menko PUT Nomor 1/PRT/1965, adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan :
   1) Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga.

2) Menteri Negara diperbantukan kepada Menko Pekerjaan Umum dan Tenaga.

b. Unsur Pembantu Pimpinan :
   1) Pembantu Menteri Koordinator I Urusan Operasi dan Teknik.
   2) Pembantu Menteri Koordinator II Urusan Pendidikan, Pembinaan Tenaga dan Keamanan.
   3) Pembantu Menteri Koordinator III, Urusan Administrasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

c. Biro Menteri Koordinator, yang membawahi:
   1) Bagian I : Sekretariat dan Perundang-undangan.
   2) Bagian II : Tata Usaha Umum.

d. Unsur Pengawasan :
   1) Inspektur Teknik
   2) Inspektur Pendidikan
   3) Inspektur Khusus
   4) Inspektur Irian Barat
   5) Inspektur Keuangan.

e. Unsur Pelayanan Teknik dan Administrasi:
   1) Biro I/A: Koordinasi Perencanaan dan Operasi Teknik.
   2) Biro I/B: Koordinasi Urusan Perusahaan-perusahaan Negara.
   3) Biro I/C: Urusan Pembangunan Berdikari/Evaluasi.
   4) Biro II/A: Urusan Pendidikan, Pembinaan Personil.
   5) Biro II/B: Urusan Sosial Politik. Humas dan Keamanan.
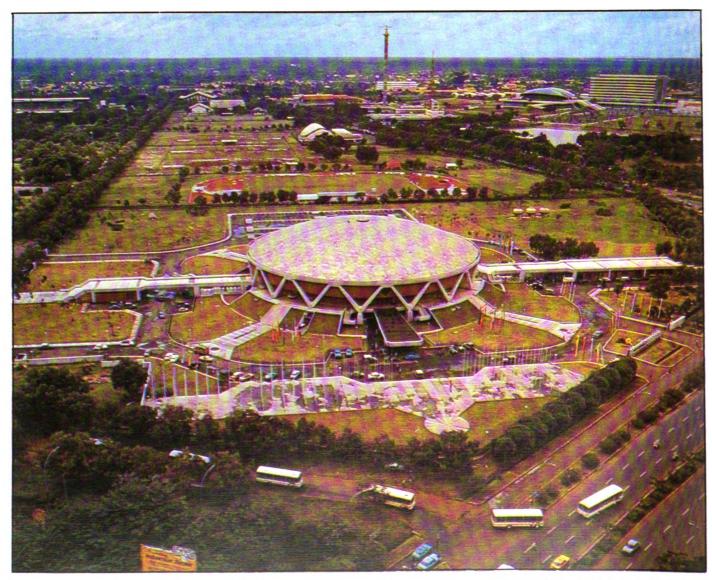
Pengembangan Kawasan Senayan

6) Bagian Urusan Dalam 4 s/d 6 dipimpin oleh Pembantu Menko II.
7) Biro III/A: Koordinasi Anggaran dan Urusan Pembiayaan.
8) Biro III/B: Urusan Luar Negeri, HELEN dan Progress Report.
9) Bendaharawan Kompartemen. 7 s/d 9 dipimpin oleh Pembantu Menko III.

16. Pada awal tahun 1965 pemerintah dalam hal ini Presiden memandang perlu untuk membangun *"Political Venues"* di Jakarta (Indonesia) yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Proyek ini yang dikenal sebagai Proyek Mandataris, bahkan ada yang menyebut "Proyek Mercusuar" diselenggarakan didalam upaya penyediaan fasilitas untuk kepentingan penyelenggaraan konperensi-konperensi internasional dalam rangka penggalangan Persatuan Bangsa-Bangsa terutama negara-negara *The New Emerging Forces*. Gagasan-gagasan mengenai *Conference of The New Emerging Forces (Conefo)* timbul setelah Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 7 Januari 1965.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 pembangunan proyek tersebut ditugaskan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Kompartemen Pembangunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan (I). Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 6/PRT/1965 tanggal 8 Maret 1965 dibentuk suatu Komando Pembangunan dengan nama "Komando Pembangunan Proyek Conefo" (KOPRONEF).

Proyek Conefo tidak hanya menuntut adanya pengerahan segala dana dan upaya termasuk pengerahan semua perusahaan negara jasa konstruksi, tetapi juga menuntut kemampuan teknik konstruksi dengan teknologi yang canggih. Seluruh kegiatan mulai dari rancangbangun, pelaksanaan dan pengendalian sampai pada pengawasan pembangunan dilakukan oleh tenaga-tenaga putra-putra Indonesia sendiri. Tenaga-tenaga ahli dari Tiongkok yang katanya diperbantukan untuk melaksanakan proyek ini praktis tidak sampai sempat bekerja. Gambar disain proyek ini diciptakan oleh tenaga muda Tim Arsitek Indonesia di bawah pimpinan **Ir. Sujudi** atas petunjuk Presiden **Soekarno** dan dengan beberapa perbaikan ditetapkan untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan Proyek Conefo, proyek-proyek RPNSB dan proyek-proyek pembangunan pada umumnya diselenggarakan dalam situasi Indonesia diliputi oleh suasana revolusioner konfrontasi Malaysia, kesulitan ekonomi dan suhu politik yang meninggi. Golongan ekstrim kiri yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya, yang mendapat angin baik, memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat kedudukannya dan melancarkan fitnah dan issue kejinya guna menyingkirkan lawan-lawan politiknya, yang akhirnya mencapai puncaknya pada pengkhianatan G.30.S/PKI. peristiwa Madiun pada tahun 1948.

17. Gerakan 30 September/PKI telah merenggut jiwa pahlawan-pahlawan Revolusi, dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1965 dapat ditumpas oleh Operasi Militer di bawah Pimpinan Mayor Jenderal TNI **Soeharto** sebagai Panglima Kostrad. Seluruh kekuatan rakyat Indonesia yang berjiwa Pancasila mengutuk G.30.S/PKI sehingga PKI dan golongan ekstrim kiri lainnya tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Tuntutan pembubaran PKI bergema di mana-mana. Gerakan perjuangan rakyat dengan unjuk perasaan (demonstrasi) mulai terorganisir sejak tanggal 25 Oktober 1965 dengan terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI).

18. Penumpasan sisa-sisa dan pembersihan terhadap unsur-unsur G.30.S/PKI berjalan di mana-mana, baik di dalam masyarakat sendiri dengan caranya sendiri, maupun dan lebih-lebih dalam instansi-instansi sipil dan militer. Beberapa instruksi resmi telah dikeluarkan diantaranya:

— Instruksi Presidium Kabinet Dwikora Nomor 48/D/Instr/1965 dan Nomor 48a/D/Instr/1965
— Instruksi Presiden RI Nomor 22/KOTI/1965.

Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Keputusan Nomor 32/KPTS/1965 tanggal 18 Oktober 1965 telah mengambil tindakan yang perlu, melarang untuk melakukan kegiatan

BAS 300

BUKAKA
BTH-8,5-120

"TAMAN MINI INDONESIA INDAH" KEBUDAYAAN, PENDIDIKAN DAN HIBURAN

Dalam usaha membangun manusia Indonesia, peranan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang dikelola secara profesional dapat membantu membentuk dasar-dasar pendidikan kepada seluruh masyarakat terutama generasi muda untuk mengenal dan mencintai alam, seni budaya bangsa serta memupuk rasa nasional dan mengagumi keindahan. Dengan demikian keberadaan TMII dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap pengetahuan dan kemajuan teknologi, cinta tanah air, cinta bangsa dan Negara. Semua ini dapat dicapai di TMII dengan menyaksikan dari dekat ....

Utaian 27 rumah adat daerah seluruh Indonesia yang menggambarkan kehidupan sosial budaya yang lengkap dengan berbagai peragaan kesenian, pakaian adat ataupun pameran hasil kerajinan daerah yang bersangkutan, upacara tradisional yang meliputi daur hidup manusia maupun kepercayaan bisa pula disaksikan di setiap anjungan.

Flora Indonesia yang berciri khas, ditampilkan dengan tata taman yang menawan di Taman Kaktus, Taman Anggrek, Taman Buah-buahan, Taman Apotik hidup, Taman Bunga Keong Emas, Taman Burung serta Museum Komodo tersedia untuk para pecintanya, masing-masing dalam suasana yang unik dan pasti memuaskan.

Jajaran Museum Perangko, Museum Transportasi, Museum Indonesia, Museum Keprajuritan, Museum Asmat, Museum Olahraga dan yang terbaru Museum Minyak dan Gas "Graha Widya Patra" menggambarkan jati diri bangsa Indonesia di masa lalu yang menyimpan kenangan, masa kini sebagai kenyataan dan masa depan sebagai harapan.

Fasilitas bagi anak-anak adalah penting bagi TMII, Istana Anak-anak Indonesia yang indah dan megah, Taman Amon Putra, Taman Renang Ambar Tirta semua menjanjikan kebahagiaan bagi anak-anak. Sedangkan Teater Imax "Keong Emas" yang berlayar amat lebar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang kemegahan bumi Indonesia, adapaun bagi mereka yang memerlukan informasi lengkap tentang wisata dan budaya akan dapat dijumpai di Pusat Informasi Budaya dan Wisata (PIBW) dalam bentuk tulisan, audiovisual maupun video cassete. Film Tiga dimensi juga dapat dinikmati di sini dan anda akan merasa berada dalam nuansa lain.

Nikmatilah rekreasi anda, meskipun waktu yang dimiliki sangat singkat TMII dapat disaksikan dalam sekejap dengan menggunakan mobil keliling, atau melayang dengan Sky Lift dan Aeromovel SHS 23.

Sungguh TMII adalah harmoni antara kemajuan teknologi dengan keindahan alam serta budaya bangsa Indonesia. Selamat berrekreasi .....(Yk/90)

organisasi bagi beberapa organisasi massa, diantaranya Serikat Buruh Listrik dan Gas (SBLG/SOBSI), Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU /SOBSI), yang menurut kenyataan terdapat cukup fakta dan indikasi yang membuktikan tersangkutnya anggota pimpinan organisasi massa dengan kegiatan G.30.S/PKI sekaligus mencabut hak-haknya untuk diikutsertakan dalam Lembaga/Badan Pertimbangan, Badan Perencanaan Departemen, Badan Pembantu Proyek dan Dewan-dewan Perusahaan di lingkungan Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Tindakan penertiban dan pengamanan aparatur Departemen-departemen di lingkungan Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dilakukan terhadap pegawai, karyawan dan mahasiswa ikatan dinas serta unsur-unsur yang terlibat dan yang mendukung G.30.S/PKI.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 47/D/ Instr/1965 dan Nomor 48/D/Instr/ 1965, Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga telah menerbitkan Instruksi-instruksi Nomor 06/Instr/1965 dan 07/Instr/ 1965, yang memerintahkan agar pada tingkat Departemen, Perusahaan Negara, Proyek dan lain-lain di lingkungan Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dibentuk "Tim Pengamanan dan Pengawasan Operasi Teknik" dan "Tim Penelitian Penyegar" *(Team Screening)*. Untuk koordinasi pelaksanaan pengamanan dan penertiban itu dibentuk suatu tim yang diberi nama Tim Koordinasi Pengamanan dan Penertiban Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan Keputusan Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 44/KPTS /MENKO/1965 tanggal 8 Nopember 1965, sebagai aparat pembantu bagi Menteri Koordinator dan Para Menteri di lingkungan Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

19. Sementara itu gelombang unjuk rasa, yang menuntut penyelesaian politik dengan pembubaran PKI kian keras dan bertambah meluas. Situasinya makin menjadi panas membakar dan menjurus ke arah konflik politik. Dan lebih hebat lagi ditambah dengan timbulnya rasa tidak puas masyarakat yang luas terhadap ekonomi negara dan kehidupan perekonomian rakyat yang semakin serba sulit.

Keadaan yang dirasakan tidak tertahankan lagi mendesak para pemuda dalam kesatuan-kesatuan aksi seperti: KAMI, KAPPI, KASI, dan lain-lain sebagai suatu Front Pancasila bersama-sama dan serentak berkumpul di muka gedung MPR/ DPR pada tanggal 12 Januari 1966 untuk menyampaikan tuntutan 3 (tiga) pasal, yaitu:

1. Pembubaran PKI;
2. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G.30.S/PKI;
3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi.

Tuntutan ini kemudian terkenal sebagai *Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA)*. Dalam situasi politik dan militer akibat G.30.S/PKI serta melandanya gelombang unjuk

Panglima Kostrad May. Jen. Suharto menyaksikan penggalian jenazah 7 Pahlawan Revolusi (Foto : IPPHOS)

rasa yang makin keras, dilakukan perubahan dan penyempurnaan lagi terhadap susunan Kabinet (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1966 tanggal 21 Pebruari 1966). Dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi itu terdapat jumlah menteri yang banyak sekali. Karena itu khalayak menyebutnya sebagai "Kabinet Seratus Menteri." Susunan baru kabinet dengan jumlah menteri yang sedemikian banyak, ternyata justru malah mengundang rasa tidak puas dan kemarahan di kalangan rakyat banyak, karena didalam susunan baru Kabinet itu masih bercokol tokoh-tokoh yang masih berat diduga terlibat G.30.S/PKI.

Pada saat Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu akan dilantik pada tanggal 24 Pebruari 1966 kota Jakarta meledak dilanda arus gelombang unjuk rasa yang semakin hebat dan keras dan meluas ke mana-mana.

Mayjend. Suharto, selaku Pimpinan Tertinggi Angkatan Darat.
Foto: ARNAS RI

20. Situasi konflik tidak terhindari lagi. Kehidupan politik seluruh bangsa dan negara dicekam oleh suasana tegang dan tidak menentu selama beberapa puluh hari. Akhirnya para pemimpin bangsa Indonesia dengan jiwa besarnya, dengan semangat kesetiakawanan-sosial yang tinggi dan dengan cara yang menurut kepribadian Indonesia dapat menyelesaikan dan mengakhiri konflik politik dengan dikeluarkannya Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS tertanggal 11 Maret 1966, yang memerintahkan **Letnan Jenderal TNI Soeharto,** Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas

nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya revolusi demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Surat Perintah 11 Maret yang kemudian lebih dikenal sebagai **Supersemar** ternyata mempunyai daya kekuatan yang ampuh luar biasa dapat menyelamatkan keutuhan Bangsa dan Negara menghembuskan nafas kesegaran baru, membuka babak baru yang penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, berkat kearifan, kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari pengembannya.

Berdasarkan wewenang yang bersumber pada Supersemar, **Letnan Jenderal TNI Soeharto** atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat maupun daerah beserta semua organisasi yang seasrah/berlindung/bernaung di bawahnya. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966; rakyat menyambutnya dengan perasaan lega.

Dalam pada itu untuk menanggapi perkembangan situasi, maka pada tanggal 27 Maret 1966 diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap susunan Kabinet Dwikora, yang lebih banyak merupakan penyederhanaan, karena jumlah menterinya banyak dikurangi. Perubahan dan penyempurnaan kabinet itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966 tentang Susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi tanggal 27 Maret 1966.

Dalam susunan kabinet ini Kompartemen-kompartemen ditiadakan, termasuk Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang dijadikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang dimasukkan dalam lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga merangkap Komandan Kopronef ditunjuk **Ir. Sutami.** Di bawah Menteri ditetapkan Deputi Menteri yang diserahi tugas memimpin Departemen.

Dalam susunan kabinet ini Departemen Jalan Raya Sumatera dikeluarkan dari lingkungan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan dimasukkan dalam Kementerian Pembangunan Proyek-proyek Mandataris. Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi ini berjalan sampai tanggal 25 Juli 1966 dengan terbentuknya Kabinet Ampera.
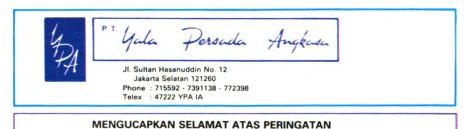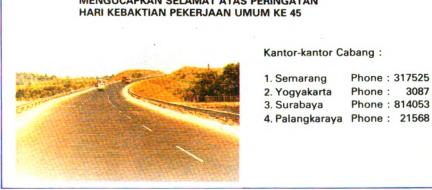
PENGIKAT UANG ANDA ROBEK ?

TENTU SAJA !

Tingkat suku bunga menarik dari **EXIMSAVE membuat uang simpanan Anda bertambah terus; Bunga Harian bebas diambil setiap hari.**

Bukan itu saja, dengan EXIMSAVE Anda pasti lebih tenang karena BANKEXIM adalah Bank Pemerintah yang bereputasi internasional, terjamin aman dan terpercaya.

mulai sekarang 20%

Bunga EXIMSAVE ~~19%~~ per tahun.
Tingkat bunga dijamin sampai akhir Desember 1990.

Hanya untuk perorangan.

Hubungi segera kantor cabang BANKEXIM terdekat di kota Anda.

BANKEXIM, Bank Nasional Bereputasi Internasional - Terpercaya !

Kantor Pusat : Bank Ekspor Impor Indonesia Jl. Lapangan Setasiun No. 1, Jakarta 11110, Indonesia P.O. Box 1032, Tel. 673122, 6900991.

Kantor Cabang Jakarta : Jakarta Puncak Emas, Tel 5200234 • Jakarta Metropolitan Plaza, Telp 5782287 • Jakarta Berdharma, Tel 5701766 • Jakarta Kebun Melati, Tel 323371 • Jakarta Lapangan Merdeka Selatan, Tel. 350887 • Jakarta Gambir, Tel 342654 • Jakarta Kota, Tel 673122 • Jakarta Fatahillah, Tel 674592 • Jakarta Tanjung Priok, Tel 490980 • Jakarta Cikini, Tel 331758 • Jakarta Gatot Subroto, Tel 512056 • Jakarta Cilangkap, Tel 8401240 ext. 5623, 5674 • Jakarta Jatinegara, Tel. 8194237 • Jakarta Kebayoran, Tel. 7391357

Kantor Cabang Lainnya :
JAWA : Bandung Asia Afrika, Tel (022)439-383, Bandung Lapangan Raya, Tel (022)434-609, Cirebon, Tel (0231)5506, Cilacap, Tel (0282)21391, Tegal, Tel (0283)41628, Pekalongan, Tel (0285)41085, Semarang, Tel (024)24031, Surabaya Niaga, Tel (031)20857, Surabaya Pemuda, Tel (031)40756, Malang, Tel (0341)26987, Jember, Tel (0331)21271, Banyuwangi, Tel (0333)41674 • **BALI** : Denpasar, Tel (0361)23984 • **LOMBOK** : Cakranegara, Tel (0364)23426 • **KALIMANTAN** : Pontianak, Tel (0561)34247, Singkawang, Tel 21389, Banjarmasin, Tel (0511)8475, Samarinda, Tel (0541)23051, Balikpapan, Tel (0542)24523 • **SUMATERA** : Banda Aceh, Tel (0651)23992, Lhok Seumawe, Tel (0645)22407, Medan Balai Kota, Tel (061)515160, Medan Imam Bonjol, Tel (061)519877, Pematang Siantar, Tel (0622)24376, Rantau Prapat, Tel 581, Padang, Tel (0751)22375, Pekanbaru, Tel (0761)25003, Rengat, Tel 172, Dumai, Tel (0765)21216, Jambi, Tel (0741)22202, Bengkulu, Tel (0736)31244 Palembang Arief, Tel (0711)21543, Palembang Pusat Dagang, Tel (0711)26425, Bandar Lampung, Tel (0721)41795 • **SULAWESI** : Manado, Tel (0431)51877, Palu, Tel (0451)21582, Ujung Pandang, Tel (0411)7545 • **MALUKU** : Ambon, Tel (0911)3122, Ternate, Tel (0921)21790 • **IRIAN JAYA** : Jayapura, Tel (0967)21576, Merauke, Tel (0971)21128, Biak, Tel (0961)21557, Tembagapura, Tel 7624, Manokwari, Tel (0962)21301, Nabire, Tel 145, Sorong, Tel (0951)21321, Fak-Fak, Tel 2124.

Bab. IV

Departemen Pekerjaan Umum Pada Jaman Pembangunan

1. Orde Baru, yang lahir tanggal 11 Maret 1966, adalah tatanan seluruh kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam semangatnya mengandung koreksi total dan perombakan atas segala penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah terjadi sebelum tahun 1966. Perombakan yang menyangkut hal-hal yang mendasar itu, hakekatnya merupakan perbaikan yang dilakukan dengan usaha pembangunan Nasional yang berencana dan bertahap. Oleh karena itu Orde Baru adalah Orde Pembangunan !

Dalam rangka usaha mengadakan koreksi total secara konstitusional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengadakan Sidang pada tanggal 20 Juni 1966 sampai tanggal 5 Juli 1966 dan telah menghasilkan duapuluh empat keputusan penting, diantaranya ialah :

(1) Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

(2) Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.

(3) Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tatacara Pengangkatan Pejabat Presiden.

(4) Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi dan Pembangunan.

KABINET AMPERA

2. Beberapa saat setelah sidang MPRS usai, pada tanggal 25 Juli 1966 dibentuk Kabinet Ampera

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1966 dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi.

Tugas Pokok Kabinet Ampera ialah Dwi Darma, yaitu:

a. Menciptakan kestabilan sosial politik.

b. Menciptakan kestabilan sosial ekonomi.

Program Kabinet Ampera ialah Catur Karya, yaitu :

a. Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;

b. Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti yang dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966;

c. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan Nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS /1966.

d. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dalam susunan Kabinet Ampera tersebut **Ir. Sutami** diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan memimpin Departemen Pekerjaan Umum (tanpa bidang ketenagaan). Bidang ketenagaan dimasukkan dalam tugas dan fungsi Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga.

Presiden **Soekarno** sesuai dengan pengumumannya tertanggal 20 Pebruari 1967, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, yaitu **Jenderal TNI Soeharto** dalam rangka usaha untuk mengakhiri konflik politik demi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap susunan Kabinet Ampera.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1967 tanggal 11 Oktober 1967 ditetapkan Susunan Kabinet Ampera yang disempurnakan. Dalam susunan baru ini Pimpinan Kabinet dijabat oleh **Jenderal TNI Soeharto,** yang merangkap Menteri Pertahanan Keamanan. Sedang jabatan Menteri Utama ditiadakan. Tugas pokok dan program Kabinet masih tetap, yaitu: Dwi Darma dan Catur Karya Kabinet Ampera. Susunan dan jumlah anggota Kabinet yang memimpin Departemen masih sama.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966 (pasal 22) menentukan bidang tugas Departemen Pekerjaan Umum Kabinet Ampera sebagai berikut:

(1) Departemen Pekerjaan Umum mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi tugas serta kegiatan :

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, kecuali Departemen Listrik dan Ketenagaan, dan urusan Pengairan Rakyat dari Departemen Pe-

Prof. Dr. Ir. H. Sutami

PROF. DR. IR. H. SUTAMI

Prof. DR. Ir. H. Sutami (almarhum) adalah seorang putra kelahiran Solo tanggal 19 Oktober 1928 yang menamatkan sekolahnya di Sekolah Teknik Tinggi Bandung tahun 1956 dan meninggal dunia pada tahun 1980. Almarhum mendapat anugerah gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu teknik dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1976. Sejak tahun 1953 sampai dengan 1956 beliau mahasiswa ikatan dinas HBM NV disamping itu menjabat Asisten Luar Biasa Mata Kuliah Bangunan Air, Mekanika Teknik Fakultas Teknik UI di Bandung serta Asisten Konstruksi Beton ATPUT di Bandung. Setelah lulus dari pendidikannya, diangkat sebagai pegawai di HBM NV di Jakarta. Pada tahun 1956 sebagai Pelaksana Proyek Penjernihan Air di Pejompongan Jakarta, tahun berikutnya sebagai Pelaksana Proyek Penjernihan Air Cisangkui Bandung. Kuasa Direksi HBM NV untuk Pelaksanaan Proyek-proyek Pelabuhan dijabatnya sejak tahun 1958 selama 7 bulan, kemudian diangkat sebagai Pemimpin Cabang II Jakarta HBM NV. Anggota Dewan riset Nasional dijabat oleh beliau pada tahun 1960. Tahun 1961 sampai dengan 1966 menduduki jabatan Direktur PN. Hutama Karya. Pembangunan jembatan sungai Musi tahun 1963 ikut ditanganinya sebagai Pemimpin Proyek Jembatan Musi. Disamping jabatan-jabatan pelaksana pembangunan ke-PU-an, Ir. Sutami juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Teknik UI. Tahun 1965 selain menjabat sebagai Direktur Utama PN Hutama karya juga menjabat Deputy Komandan/-Ketua Team IV Pelaksana *Kopronef*.

Jabatan Menteri sejak tahun 1965 sampai dengan 1978 adalah :

- Menteri Negara Urusan Penilaian Konstruksi.

- Menteri Negara diperbantukan pada Menko PUT yang ditugaskan sebagai Penyelenggara Proyek Conefo/Komandan Kopronef.
- Menteri Koordinator Kompartemen PUT dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi.
- Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Ampera.
- Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan I.
- Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan II.
- Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI.

Guru Besar UI dalam Ilmu Wilayah dijabatnya pada tahun 1976. Pada tahun 1977 menjabat sebagai anggota MPR-RI dan pada tahun 1978 sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Tanda Penghargaan yang didapat oleh beliau adalah :

- Bintang Mahaputra Adipradana.
- Bintang Ancient Order of Sikatema Medal Maginoo, Philipina.
- Bintang Grand Croix De L'Orde De Leopold II (Belgia).
- Satyalencana Pembangunan.
- Piagam Anugerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengabdi dan Pendorong dalam Bidang Science & Technology.

Ir. Sutami meninggal tanggal 13 Nopember 1980 dalam usia 52 tahun dan meninggalkan seorang istri **Ny. Sri Maryati** dan 5 orang putra dan putri.
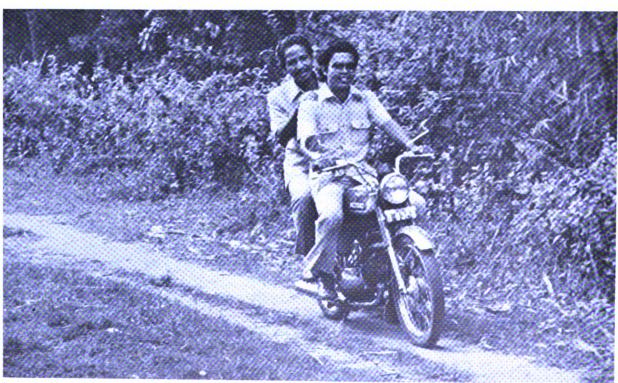
Ketulusan pengabdian dalam keadaan apapun diberikan Ir. Sutami dalam tugasnya.

Presiden dan Ibu Suharto didampingi Menteri PU Ir. Sutami pada peresmian salah satu proyek PU.

ngairan Dasar.

b. Departemen Jalan Raya Sumatera dari Kementerian Proyek-proyek Mandataris.

(2) Departemen Pekerjaan Umum dalam melaksanakan bidang tugas tersebut dibagi dalam empat Direktorat Jenderal, ialah:

a. Direktorat Jenderal Pengairan Dasar.
b. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
c. Direktorat Jenderal Bina Marga.
d. Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera.

Berdasarkan Strategi Dasar Kabinet Ampera Departemen Pekerjaan Umum menyiapkan Strategi Dasar Stabilitas dan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, dengan maksud untuk memberikan arah bagi usaha dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum, dalam rangka :

(1) Menciptakan kondisi mental/psikologi bagi keperluan stabilitas sosial politik dan sosial ekonomi.
(2) Menciptakan kondisi struktural baik infra maupun supra struktural sebagai prasarana stabilitas materiil.
(3) Menciptakan kondisi materiil dalam masa kerja Kabinet Ampera

Dalam strategi Dasar dan Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum itu, disebutkan bahwa peranan Pekerjaan Umum ialah: memberikan karya-karya teknik untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat tetap yang akan memberikan hasil yang berulang dan berlipat gan-

Presiden sedang menerima penjelasan dari Ir. Sutami disaksikan Menteri Kuangan Prof. Ali Wardhana.

serta mencegah proses kemelaratan;

c. Bina Marga (jalan dan jembatan) serta pelayaran sungai untuk melancarkan perhubungan lalu lintas, pembangunan perekonomian dan pengembangan ekspor *(export drive)*;

d. Air bersih untuk perindustrian, fasilitas pelabuhan dan penyediaan air minum untuk rakyat;

e. Tata Kota dan Daerah, Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat untuk pengembangan lingkungan masyarakat *(community development)*.

da di bidang prasarana fisik sebagai landasan dan pelengkap serta persyaratan bagi usaha pembangunan perekonomian dan kesejahteraan serta *"community development"* (pengembangan lingkungan masyarakat) dalam mewujudkan keinginan rakyat yang diperjuangkan di bidang sosial politik menjadi kebutuhan rakyat yang nyata dalam prasarana penghidupan sosial ekonomi.

Fungsi Departemen Pekerjaan Umum dalam kedudukannya sebagai Aparatur Negara ialah melakukan tugas dan kegiatan Negara untuk:

a. penguasaan bumi dan air dan pengusahaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

b. penciptaan ruang yang memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia;

c. pembinaan/pembangunan jalan dan jembatan untuk pembukaan dan pembinaan daerah;

d. pengendalian dan penyaluran air untuk kemakmuran rakyat;

Unsur-unsur prasarana yang termasuk dalam Bidang Pekerjaan Umum ialah:

a. Pengairan untuk memberikan pengairan (irigasi teknis) bagi menunjang usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam rangka mempertinggi produksi pangan;

b. Pengembangan wilayah sungai dan pengendalian sungai untuk memanfaatkan sumber-sumber air dan pengamanan daerah produksi

Ir. Sutami meresmikan salah satu proyek Pengairan dengan didahului pemutaran pintu air.
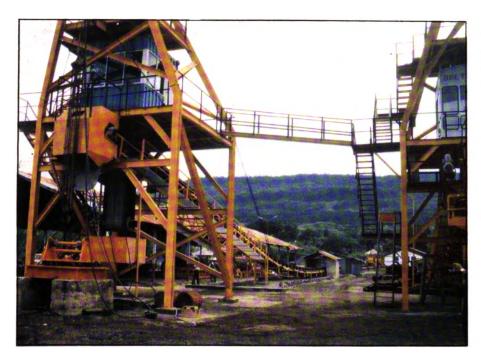
Salah satu sarana penunjang pembangunan ke-PU-an, Stone Cruiser.

Instalasi Penjernihan Air Minum Pulogadung

Dalam tahap rehabilitasi (penyelamatan dan rehabilitasi) yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam skala prioritas utama, ialah:

(1) Pemeliharaan, penyelamatan dan pengamanan prasarana (sungai bangunan saluran pengairan, jalan, jembatan dan sebagainya) agar tetap dapat berfungsi secara optimal;

(2) Rehabilitasi prasarana dengan memberikan prioritas kepada yang langsung dapat meningkatkan produksi pangan, menguntungkan ekspor dan melancarkan arus barang *(flow of goods)* di dalam negeri;

(3) Menyelesaikan proyek-proyek yang mempunyai arti ekonomis penting dan yang segera dapat memberikan hasil;

(4) Meneruskan proyek pengolahan aspal dalam Negeri baik aspal murni (dengan kerjasama dengan Departemen Pertambangan) maupun aspal Buton, dan meningkatkan produksinya, agar dalam jangka pendek dapat mengurangi impor aspal dari Luar Negeri dan dalam jangka panjang dapat menuju swasembada *(self-supporting)*;

(5) Meneruskan perencanaan dan persiapan proyek-proyek baru (seperti Proyek Jalan Raya Sumatera), dengan tidak banyak memerlukan pembiayaan;

(6) Menyelesaikan pembersihan aparatur dan personil Departemen Pekerjaan Umum dari unsur-unsur G.30.S/PKI dan untuk menciptakan aparatur Departemen Pekerjaan Umum, yang bersikap mental Orde Baru dan yang siap dan mampu melaksanakan kewajibannya.

Untuk mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan tersebut dan dalam keadaan kekurangan tenaga terlatih *(skill)* dalam beberapa hal dipergunakan jasa-jasa kekaryaan ABRI, *"Civic Mission"* atau pasukan Zeni Angkatan Darat. Pengikutsertaan atau pemanfaatan jasa-jasa tersebut memang sangat diperlukan untuk melakukan penerobosan dalam mencapai sasaran dalam waktu yang ditentukan dengan aman, lebih-lebih hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan tindakan yang bersifat rutin saja. Disamping itu dalam upaya untuk mengembalikan tertib administrasi yang telah rusak akibat penyelewengan yang dilakukan sebelum tahun 1966, banyak hal yang perlu diselesaikan dengan *task force* (gugus tugas).

Kebijaksanaan umum yang dipergunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka program rehabilitasi dan stabilitasi sosial politik dan sosial ekonomi pada waktu itu ialah :

(1) Kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Kabinet Ampera Nomor 01/U/IN/8/1966 tanggal 15 Agustus 1966.

(2) Pemeliharaan, pembinaan dan rehabilitasi bangunan prasarana yang telah ada dan yang mempunyai arti ekonomi penting serta yang menunjang pembangunan di bidang lain harus didahulukan agar keadaannya tidak merosot dan dapat berfungsi
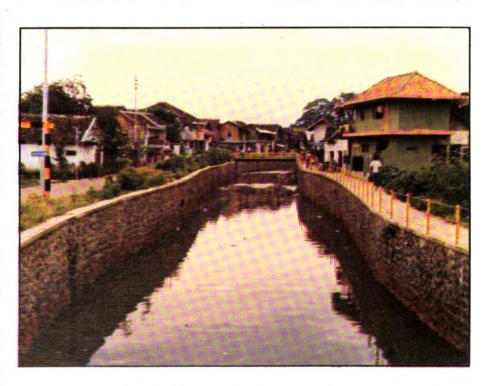
Peningkatan Saluran Pembuang di daerah padat penduduk.
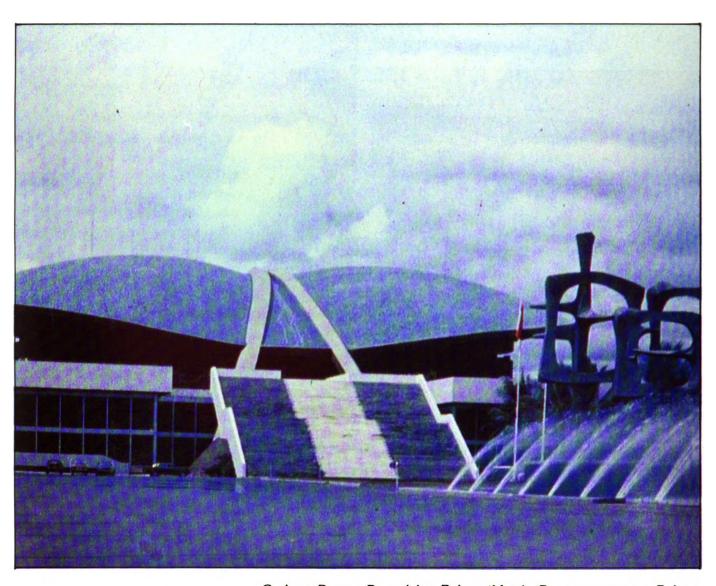
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.

secara optimal.

(3) Proyek-proyek yang sedang dalam pelaksanaan dan yang mempunyai arti ekonomis penting serta yang dapat meunjang usaha-usaha pembangunan di bidang lain dapat dilanjutkan pembangunannya.

(4) Proyek *Political Venues Conefo* yang pembangunannya sudah dimulai sejak Maret 1965 berdasarkan Keputusan Presidium Nomor 79/U/Kep/11/1966 dilanjutkan dan diubah rencana penggunaannya dan dijadikan Gedung MPR/DPR.

(5) Perhatian perlu lebih banyak diarahkan terhadap soal *"planning, programming* dan implementasinya" serta soal *"research"* (riset).

(6) Mengusahakan tercapainya apa yang disebut *"The Most Economical Construction Time"* (waktu pelaksanaan pembangunan yang paling ekonomis).

(7) Pelaksanaan pekerjaan secara fisik harus memenuhi persyaratan teknis dan teknologis.

(8) Mengusahakan adanya pergeseran dari Pusat ke Daerah dalam hal ketrampilan dan pengetahuan *(skill and knowhow)* baik teknik maupun manajerial.

(9) Mengusahakan sistem pengawasan yang efektif tetapi tidak menghambat jalannya pekerjaan.

Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan program Dwi Darma dan Catur Karya Kabinet Ampera dalam tahap stabilisasi (penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi) sampai akhir 1968 ialah :

(1) Aparatur Departemen Pekerjaan Umum yang bersikap mental

Bangunan talang beton di proyek irigasi Sanrego — Sulawesi Selatan.

Orde Baru berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Aparatur Departemen Pekerjaan Umum yang siap dan mampu melaksanakan Pembangunan Lima Tahun mendatang dan tahap-tahap selanjutnya.

Sebagai suatu prasyarat untuk era dan tahap berikutnya, yaitu tahap Pembangunan Lima Tahun.

Karena kebutuhan masyarakat tidak dapat berhenti dulu selama pelaksanaan suatu rencana, maka disamping usaha kegiatan untuk mencapai sasaran pokok tahap demi tahap itu, perlu dilakukan upaya dan kegiatan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas-tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum, yang harus dilakukan secara terus menerus,

b. pembinaan kondisi dan hasil-hasil yang sudah dicapai (ada),

c. pemenuhan "kebutuhan segera," guna mengatasi masalah/persoalan sementara atau ketidakseimbangan sementara yang ada.

Departemen Pekerjaan Umum dalam melaksanakan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966 mempunyai empat Direktorat Jenderal, yaitu :

A. Direktorat Jenderal Pengairan Dasar, yang menyelenggarakan manajemen operatif untuk pelaksanaan irigasi dan tugas Departemen di bidang pengairan, yang berhubungan erat dengan pemanfaatan serta pengembangan sumber-sumber air.

C. Direktorat Jenderal Bina Marga, yang menyelenggarakan manajemen operatif untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Departemen bidang Bina Marga (jalan umum). Bidang tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, ialah : Pembinaan Jalan Umum (termasuk jembatan dan semua bangunan pelengkapnya) dan Pengusahaan Pertambangan Aspal.

D. Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera menyelenggarakan manajemen operatif untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Departemen dalam hal pembangunan jalan raya Sumatera.

Penampang saluran jaringan irigasi.

Bidang tugas Direktorat Jenderal Pengairan Dasar, ialah : Irigasi, Pengaturan sungai (sodetan, normalisasi sungai, tanggul, pengaturan lalu lintas sungai); Pencegahan dan Pengendalian Banjir; Reklamasi dan Konservasi tanah (saluran, polder, pematangan tanah, dan sebagainya) dan bidang Teknik Air (Hydro Technic) pada umumnya .

B. Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang menyelenggarakan manajemen operatif untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Departemen di bidang Cipta Karya. Bidang tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya, ialah: Perumahan Rakyat; Tata Bangunan (gedung-gedung Negara dan bangunan-bangunan umum); Tata Pembangunan Kota dan Daerah; dan
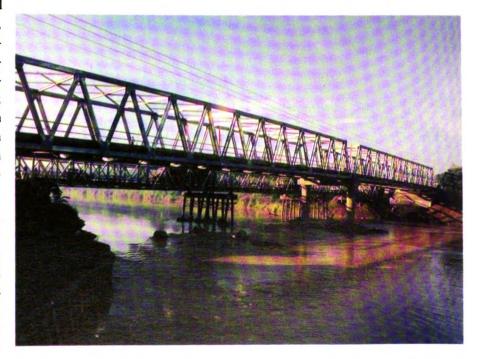
Jembatan Tol pertama di luar jawa. Jembatan Tallo Lama (Sulawesi Selatan).

Peranan alat-alat besar dalam menunjang pembangunan ke-PU-an.

E. Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal menyelenggarakan pengawasan umum atas pelaksanaan kebijaksanaan Departemen yang ditetapkan oleh Menteri.

Departemen Pekerjaan Umum mempunyai badan-badan pelayanan untuk pembinaan dan pelayanan teknis dan administratif, yang terdiri dari :

(1) Eksploitasi Alat-alat Besar
(2) Eksploitasi Bahan-bahan Bangunan,
(3) Institut Pendidikan Pekerjaan Umum,

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Menteri lewat Sekretaris Jenderal. Badan-badan tersebut berkedudukan langsung di bawah Menteri, sedang pembinaan administratif (pengaturan) dan teknis (petunjuk, cara, metoda) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Departemen Pekerjaan Umum juga mendapat tugas untuk membina, mengawasi, mengkoordinir dan mengurus Perusahaan-perusahaan Bangunan Negara yang ada di lingkungan kewenangannya. Perusahaan Bangunan Negara adalah Perusahaan Negara yang berfungsi memberi jasa di bidang pembangunan, yang mempunyai bidang tugas :

a. Perencanaan dan *Consulting Engineering*, atau
b. Pelaksanaan Pembangunan (bangunan sipil dan konstruksi), atau
c. Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi.

Dalam menjalankan pembinaan pengawasan, terhadap Perusahaan-perusahaan Bangunan Negara itu Menteri dibantu oleh sebuah badan pembantu yang dinamakan Dewan Direksi Perusahaan Bangunan Negara, sebagai pengganti dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara (BPU-PBN).

Unsur-unsur pelaksana di daerah ialah Dinas-dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I/Propinsi di seluruh Indonesia yang bertugas kewajiban :

a. Menyelenggarakan manajemen operatif untuk pelaksanaan tugas-tugas Departemen Pekerjaan Umum (Pusat) di daerah;
b. Menyelenggarakan manajemen operatif untuk pelaksanaan tugas-tugas urusan Pekerjaan Umum dari daerah otonom.

Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I/Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggungjawab :

a. kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas-tugas Departemen (Pusat),
b. kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam melaksanakan tugas daerah otonom.

3. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1967 tanggal 10 Oktober 1967 Organisasi-organisasi :

(1) Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera, yang diadakan dalam rangka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966, jo Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 75/U/Kep/11/1966 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/1967.

(2) Otorita Jalan Raya Sumatera yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 jo Nomor 13 Tahun 1965, dinyatakan dilebur dan dijadikan Proyek Khusus dari Departemen Pekerjaan Umum yang ditugaskan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri/Departemen Pekerjaan Umum.

Berdasarkan wewenang yang diperoleh dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) amar Ketiga Keputusan Presiden tersebut Menteri

Kegiatan penyuluhan, salah satu penyampaian informasi yang efektip bagi masyarakat.

LEMBAGA PENGAWASAN

1. Sejarah kelembagaan pengawasan sebenarnya telah menempuh jalan yang cukup panjang, yaitu dengan ditetapkannya *Indische Comptabiliteits Wet* (ICW) pada tahun 1864. *Indische Comptabiliteits Wet* merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur perbendaharaan dan keuangan negara. Sejak ditetapkannya pada tahun 1864 hingga tahun 1925, ICW telah mengalami tiga kali perubahan yaitu pada tahun 1895, 1917 dan 1925. Kemudian, sejak Proklamasi Kemerdekaan dapat dicatat adanya dua kali perubahan pada tubuh ICW, yaitu pada tahun 1954 dan tahun 1968. Perubahan yang terjadi pada tahun 1968 adalah pembaharuan ICW menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1968, yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Hal yang menonjol yang patut dicatat dalam sistem ICW ini adalah adanya *Algemeene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan), suatu badan yang bersifat otonom, yang berada di luar pemerintah dan tidak ikut dalam tugas eksekutif.

2. Di samping adanya lembaga pengawasan fungsional ekstern Pemerintah yaitu Bepeka sejak tahun 1950, dalam sistem pemerintahan Indonesia telah dikenal adanya lembaga pengawasan fungsional intern, yaitu Jawatan Akuntan Negeri, suatu badan pengawasan di bawah Thesauri Jenderal Departemen Keuangan. Karena jumlah Bendaharawan makin bertambah maka pada tahun 1953, dengan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1953 pada Inspektur Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara diberi wewenang pula untuk melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan.

3. Pada akhir tahun lima puluhan, pengambilan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dengan Perpu No. 19 tahun 1960 dijadikan perusahaan milik negara. Kejadian ini mendorong timbulnya Peraturan Presiden No. 9 tahun 1960 yang memberikan tugas yang lebih luas kepada Jawatan Akuntan Negeri. Tugas Jawatan Akuntan Negeri diperluas, tidak hanya meneliti jawatan yang mempunyai sistem pembukuan komersial, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan negara. Dalam Surat Keputusan tersebut nama Jawatan Akuntan Negeri diubah men-

jadi Jawatan Akuntan Negara dan berkedudukan langsung di bawah Menteri Keuangan.

4. Untuk pengawasan pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963 dibentuk Organisasi pengawasan baru, yaitu diciptakannya Urusan Pengawasan pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan serta Bagian Pengawasan Keuangan Departemen. Urusan Pengawasan berada di bawah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sedang Bagian Pengawasan Keuangan Departemen berada di bawah Sekretaris Jenderal Departemen dan terlepas dari Biro Keuangan.

5. Pada Pemerintah Orde Baru, pemerintah melancarkan kebijaksanaan ekonomi, yang dikenal sebagai kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijaksanaan tersebut diperlukan sebagai pra-kondisi untuk dapat dimulainya suatu pembangunan ekonomi yang berencana yang dimulai pada tahun 1969. Untuk menunjang suksesnya ekonomi, Pemerintah Orde Baru mengambil langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan serta pendayagunaan administrasi pemerintah. Langkah-langkah perbaikan administrasi pemerintahan itu dimulai dengan keluarnya :

a) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/V/KEP/8/1966.
b) Keputusan Presedium Kabinet Nomor 75/V/KEP/10/1966 yang disempurnakan dengan
c) Keputusan Presidium Kabinet Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
d) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen yang disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, organisasi disusun dengan memberikan ketegasan tentang adanya fungsi garis dan staf dalam organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, pembantu pimpinan, unsur pelaksanaan dan unsur pengawasan. Dalam organisasi departemen Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu, Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana, dan unsur pengawasannya adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal adalah pelaksana utama pengawasan di lingkungan departemen yang melaksanakan pengawasan fungsional intern.

6. Dalam kelembagaan Departemen Pekerjaan Umum, Inspektorat Jenderal dibantu oleh Inspektorat Administrasi dan Keuangan, Inspektur Teknik dan Inspektur Keamanan. Adanya Inspektur Teknik dalam kelembagaan Departemen Pekerjaan Umum adalah suatu keharusan mengingat fungsi Departemen Pekerjaan Umum sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pekerjaan umum. Dengan lahirnya Lembaga Inspektorat Jenderal dalam struktur organisasi Departemen sebagai instansi pengawasan fungsional intern, tidak berarti hapusnya pengawasan oleh pimpinan organisasi dan fungsi pengawasan yang lain. Justru dibentuknya lembaga pengawasan fungsional adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan oleh pimpinan/pengendali.

7. Menghadapi pembangunan lima tahun kedua (Pelita dua) yang dimulai tahun 1974, yang sasaran dan jangkauannya lebih luas, administrasi pemerintahan sebagai pendukung pembangunan perlu disiapkan agar mampu mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Untuk itu administrasi pemerintahan perlu diperbaiki dan disempurnakan. Perlunya perbaikan administrasi pemerintahan ini juga disadari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dalam Keputusan Nomor IV/1973 mengamanatkan perbaikan administrasi pemerintahan tersebut. Keputusan MPR tersebut kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974, tentang PELITA II yang pada Bab 30 berisi tentang Administrasi Pemerintah.

Pada awal Pelita III (tahun 1979), Inspektur pada Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum yang semula pembagian kerjanya berdasarkan bidang, kini diubah menurut wilayah. Dengan demikian, Inspektur-Inspektur Teknik yang ada adalah Inspektur Teknik Wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Inspektur Wilayah Timur, ditambah Inspektur Peralatan dan Perbekalan. Di samping itu, fungsi bagian Tata Usaha ditingkatkan menjadi Sekretariat Inspektorat Jenderal, agar kegiatan pendukung ini dapat menunjang kegiatan utama yaitu penyelenggaraan pengawasan. Dalam periode yang sama usaha penyempurnaan penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum mencapai suatu titik

yang menentukan dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan fungsional yang ditandai oleh keluarnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 177 tahun 1982 tentang pedoman Pokok Pelaksanaan Tugas Inspektorat Jenderal dan Prosedur Pengawasan Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman pokok ini kemudian dilengkapi dengan pedoman operasional dalam bentuk Daftar Simak Pengawasan yang merupakan pegangan bagi para pemeriksa.

Penyempurnaan lebih lanjut di bidang pengawasan sebagai bagian dari usaha penyempurnaan administrasi pemerintahan dalam Pelita IV dituangkan di dalam Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Departemen. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. Dalam Struktur Organisasi baru tersebut, fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal diperluas, demikian juga struktur organisasinya diperkuat dengan adanya 6 (enam) orang Inspektur Wilayah, yang tugasnya mengadakan pengawasan terhadap tugas pembangunan. Dalam Surat Keputusan tersebut, fungsi pengawasan terhadap tugas umum pemerintah memperoleh perhatian khusus yaitu dengan adanya Inspektur Tugas Umum dalam struktur organisasi Inspektorat Jenderal. Di samping itu, dalam struktur organisasi ini terdapat Inspektur Urusan Khusus yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan sosial politik dan keamanan. Inspektur Jenderal sebagai pimpinan tertinggi Inspektorat Jenderal juga dibantu oleh Inspektur Bakorstanas (Inspektur Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional), yang sebelumnya disebut Inspektur Opstib.

Perubahan/penyempurnaan pada tahun 1983, adalah ditetapkannya Wakil Presiden sebagai penanggung jawab di bidang pengawasan, dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keppres No. 31 tahun 1983 yang merupakan lembaga pengawasan fungsional di bawah pemerintah tetapi di luar Departemen. Ditunjuknya Menteri EKUIN dan WASBANG untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan fungsional lembaga Departemen dan non Departemen berdasarkan Kepres No. 32 tahun 1983 dan ditetapkannya Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan *pengawasan* kepada Para Menteri dan Pimpinan Lembaga non Departemen, digariskan pada kebijakan pertama agar meningkatkan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan oleh pimpinan masing-masing maupun pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional. Kedua, hasil pengawasan baik berupa penyempurnaan aparatur sampai ke pada melakukan tindakan penertiban perlu dilaksanakan.

Inspektorat Jenderal Dep. PU dewasa ini sedang dalam proses penerapan *Comprehensive Audit*, dari yang selama ini bersifat *Compliance Audit*.

Dalam penerapan ini telah dipilih pentahapan dalam empat jenis pemeriksaan sbb.:

— Administrative Audit, yang mempunyai sasaran tercapainya tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas.
— Operational Audit, yang mempunyai sasaran tercapainya efisiensi dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran (pemeriksaan Kinerja).
— Program Audit, yang mempunyai sasaran tercapainya manfaat dari prasarana dan sarana yang dihasilkan Departemen Pekerjaan Umum (mampu menunjang sektor-sektor pembangunan).

Dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang tertuang dalam kebijaksanaan pengawasan terutama dalam hal menunjang terciptanya situasi pengawasan yang mengarah meningkatnya pelaksanaan pengawasan melekat, Inspektorat Jenderal terus berupaya agar mampu melaksanakan pemeriksaan Kinerja dan program, dengan satu asumsi bahwa pelaksanaan pengawasan atasan langsung diharapkan mampu meliput Administrative dan Operational Audit secara bertahap, sehingga pada saatnya Inspektorat Jenderal hanya berfungsi sebagai unsur penunjang dalam jenis pemeriksaan operasional dan Administrasi.

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Jenderal memiliki 4 (empat) buah program yaitu :

— Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Kegiatan pada program ini adalah merupakan kegiatan pokok Inspektorat Jenderal.
Bentuk penuangannya berupa program kerja pemeriksaan tahunan

(PKPT), yang disahkan oleh Menko Ekuin dan Wasbang.
Dalam PKPT ini ditetapkan obyek pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, jumlah tenaga pemeriksa yang diperlukan, jangka waktu pemeriksaan, dana yang diperlukan serta jadwal pemeriksaan. Hasil yang diperoleh dalam Pelita IV adalah diterbitkannya 3121 buah Laporan Hasil Pemeriksaan dan 302 buah Laporan Hasil Pemeriksaan dalam tahun anggaran 1989/1990.

— Program Penelitian Aparatur Pemerintah:
Kegiatan pada program ini adalah kegiatan penyempurnaan pedoman-pedoman pemeriksaan. Kegiatan yang mendesak saat ini adalah penyempurnaan manual Performance Audit dan penyusunan manual Program Audit, beserta aplikasinya yang saat ini ditampung dalam program Institutional Development Training and Project (IDTP).

— Program Pendidikan Aparatur Pemerintah :
Kegiatan pada program ini adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan/kualitas aparat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil yang diperoleh dalam Pelita IV adalah Pendidikan dan Pelatihan 4 (empat) orang di Jepang, 20 (dua puluh) orang di Negeri Belanda dan 398 orang di Indonesia.

— Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah :

Kegiatan pada program ini adalah penyediaan prasarana kerja di Inspektorat Jenderal.

Kegiatan pengawasan lapangan.

Pekerjaan Umum dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/1967 tanggal 9 Nopember 1967 membentuk suatu badan pelaksana proyek dengan nama "Proyek Khusus Jalan Raya Sumatera" yang disingkat "Prosus Jaya Sumatera" dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pembangunan Proyek Jalan Raya Sumatera, yang meliputi pekerjaan-pekerjaan perancangan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek.
b. Menyelenggarakan segala daya upaya dan usaha-usaha untuk membantu meringankan pembiayaan proyek dalam batas ketentuan yang termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1967 amar keempat huruf a.

Proyek Jalan Raya Sumatera ini, meliputi :

(1) Proyek Pembuatan Jalan baru untuk jalan pokok *(trank-line)*,
(2) Proyek Rehabilitasi dan Peningkatan *(Up Grading)* jalan yang ada dalam rangka jalan pokok dan jalan pembuluh *(feeder roads)*.
(3) Proyek Pengusahaan Pemupukan Dana, yang bersifat menunjang pelaksanaan proyek dan/atau memanfaatkan hasil-hasil proyek dalam rangka tujuan pengembangan wilayah.

4. Untuk kepentingan pengamanan terhadap pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum, adalah syarat mutlak bahwa aparat Departemen Pekerjaan Umum harus bersih dari oknum-oknum yang terlibat dalam G-30-S/PKI dan gerakan kontra revolusi lainnya. Agar usaha pembersihan dan penertiban personil itu dapat diselesaikan dengan tertib dan mantap, maka dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 175/KPTS/1966 tanggal 13 Desember 1966 diadakan penyesuaian pedoman pembentukan Tim Penertiban Pembersihan Personil dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dengan keputusan tersebut diatur dan ditetapkan pedoman pembentukan sebagai berikut :

(1) Pada tingkat Departemen di bentuk Tim Khusus Penertiban/Pembersihan Personil Pusat Departemen Pekerjaan Umum;
(2) Pada tingkat unit/kesatuan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dibentuk Tim Khusus Penertiban/Pembersihan Personil Cabang Pekerjaan Umum dise-

*Ruas jalan Pulau Panjang — Sri Bawono — **Lampung**.*

suaikan dengan nama unit/kesatuannya;

(3) Pada tingkat daerah atau unit di daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I/Propinsi dibentuk Tim Khusus Penertiban/Pembersihan Personil Cabang Daerah Pekerjaan Umum, disesuaikan dengan nama dinas daerahnya.

Tim Khusus Penertiban/Pembersihan Personil Pusat bertugas :

a. Membantu Menteri dalam penyelenggarakan penertiban/pembersihan, pengawasan dan pengendalian personil di lingkungan kekuasaan Menteri.

b. Membantu Menteri dalam menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tim-tim Penertiban/Pembersihan Personil Cabang dan Cabang Daerah.

Menerima pengaduan naik banding dan menyelesaikannya; dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pedoman untuk pelaksanaan penindakan administratif terhadap personil menggunakan ketentuan-ketentuan dalam :

(1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Instr 09/KOGAM/5/1966 dan penjelasannya.

(2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952.

(3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1962.

(6) Surat Edaran Menteri Pertama Nomor 10/MP/61 tanggal 15 September 1961.

(7) Surat Edaran Kantor Urusan Pegawai Nomor A-24-2/AW-1984 tanggal 11 September 1963.

(8) Radiogram Kepala Staf KOGAM Nomor T-724/Da/8/1966.

KABINET PEMBANGUNAN I

5. Pada tanggal 21 sampai 30 Maret 1968 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengadakan Sidang Umum yang ke-V. Dalam Sidang tersebut telah diambil keputusan mengangkat **Jenderal Soeharto,** Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, sebagai Presiden Republik Indonesia sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

Pelantikan **Jenderal Soeharto,** sebagai Presiden Republik Indonesia, dilakukan di muka Sidang Umum MPRS tersebut pada tanggal 27 Maret 1968.

Sidang Umum MPRS tersebut belum berhasil untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun bagi pedoman pelaksanaan untuk Mandataris MPRS.

Sidang Umum MPRS ke-V telah menghasilkan 7 (tujuh) Ketetapan MPRS, dan yang terpenting di antaranya ialah : Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.

Tugas Pokok Kabinet Pembangunan yang diamanatkan oleh MPRS itu adalah melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera dengan perincian sebagai berikut :

a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;

c. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/1968;

d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Kelima perincian tugas pokok itu kemudian dinamakan Pancakrida.

Dalam susunan Kabinet Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968 jo Nomor 184 Tahun 1968, bidang tugas dan kedudukan Direktorat Jenderal Tenaga Listrik dari Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam Kabinet Ampera, ditetapkan menjadi tugas dari dan kedudukannya ditempatkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Diangkat

sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Ir. Sutami.

Dalam masa jabatan Kabinet Ampera yang lalu disamping usaha rehabilitasi dan penyempurnaan aparat pelaksana baik struktural, personil maupun manajerial, telah diadakan penelitian serta pengumpulan informasi dan data mengenai keadaan prasarana, khususnya mengenai jalan dan jembatan, pengairan, irigasi, sungai dan rawa, tenaga listrik, keciptakaryaan dan lain-lain. Berdasarkan kemampuan keuangan Negara, maka untuk dapat membereskan masalah prasarana Pekerjaan Umum di Indonesia itu diperlukan paling sedikit sepuluh tahun atau dua kali lima tahun.

Dalam rangka kebijaksanaan Kabinet Pembangunan dengan memantapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disiapkan oleh Kabinet Ampera, maka kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik adalah :

(1) Pemeliharaan, rehabilitasi dan upgrading bangunan prasarana yang telah ada dan yang mempunyai arti ekonomis penting serta yang menunjang pembangunan di bidang lain harus didahulukan agar keadaannya tidak merosot dan dapat berfungsi secara optimal.

(2) Proyek-proyek yang sedang dalam pelaksanaan dan yang mempunyai arti ekonomis penting serta yang dapat menunjang usaha pembangunan di bidang lain dapat dilanjutkan pembangunannya.

(3) Pemberian prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama diletakkan pada usaha-usaha yang dapat :

a. meningkatkan produksi pangan terutama beras (antara lain menyangkut proyek-proyek pengendalian banjir dan proyek-proyek irigasi).

b. membuka daerah-daerah produksi, baik produksi pangan maupun produksi ekspor,

c. Menciptakan lapangan kerja, dalam arti proyek-proyek yang padat karya. *(labour intensive)*,

d. membuka daerah dan menampung transmigrasi dari pulau Jawa.

Satu kata dan perbuatan.

(4) Perhatian perlu lebih banyak dicurahkan kepada soal-soal *planning*, *programming* dan implementasinya serta riset.

(5) Mengusahakan tercapainya apa yang disebut " *the most economical construction time*" (waktu pelaksanaan pembangunan yang paling ekonomis).

(6) Pelaksanaan pekerjaan secara fisik harus memenuhi persyaratan teknis dan teknologis.

(7) Melanjutkan usaha perbaikan, peningkatan *(up grading)*, penyempurnaan dari :

a. struktur organisasi pelaksanaan,

b. administrasi dan tata kerja khusus sistem penyusunan program *(program formulation)* dan sistem pelaksanaan proyek *(project execution)*,

c. tenaga kerja, untuk memperoleh ketrampilan *(skill)* manajerial dan teknik serta pengetahuan *(know how)* dalam rangka persiapan untuk modernisasi prasarana serta mencapai administrasi Pekerjaan Umum yang efektif.

(8) Mengusahakan adanya pergeseran dari Pusat ke Daerah dalam hal ketrampilan dan pengetahuan baik teknik maupun manajerial.

(9) Mengusahakan sistem pengawasan yang efektif tetapi tidak menghambat jalannya pekerjaan.

Berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap stabilisasi dan yang dimasukkan dalam Repelita yang pertama diarahkan kepada :

(1) Bidang Pengairan Dasar

a. Rehabilitasi pada sistem irigasi yang sudah ada, agar saluran-saluran dan bangunan-bangunannya dapat berfungsi secara maksimal, dan diutamakan pada daerah-daerah yang merupakan sentra konsumsi dan sentra produksi yang merupakan basis suplai pangan untuk daerah lain.

b. Melanjutkan proyek-proyek yang penting dan mendesak, dan yang segera dapat memberikan hasil dan manfaat.

c. Mengadakan survai dan perencanaan pembangunan pengairan serta pengembangan wilayah sungai (proyek-proyek serbaguna) sebagai persiapan untuk program pelaksanaan jangka panjang.

d. Memperbaiki dan menyempurnakan eksploitasi, manajemen, operasi dan pemeliharaan tata air dan irigasi.

(2) Bidang Bina Marga (Jalan Umum).

a. Rehabilitasi jalan-jalan ekonomis, yang dipilih secara selektif, untuk memperlancar arus lalu lintas barang serta semua kegiatan bidang pengangkutan/distribusi, sehingga secara langsung membantu peningkatan produksi pangan, pengembangan ekspor dan industri yang berkaitan dengan pertanian;

b. Peningkatan *(upgrading)* beberapa jalan ekonomis guna menampung dan memperlancar lalu lintas dan sentra produksi ke sentra konsumsi, yang mengalami perkembangan dan perubahan baik volume maupun intensitasnya.

Waduk Lapangan (Embung) di Nusa Tenggara Barat.
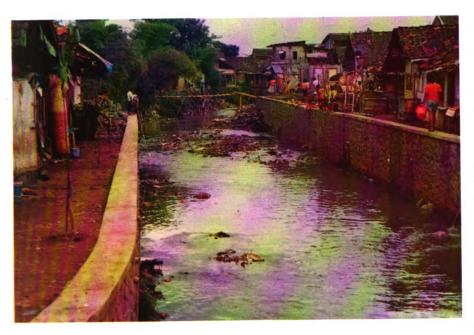
Normalisasi saluran di daerah padat penduduk.

b. Meningkatkan dan meratakan penyediaan tenaga listrik dengan menyelesaikan proyek-proyek Pusat Pembangkit Tenaga Listrik yang mempunyai arti ekonomis penting dan yang dapat menunjang perkembangan dan pembangunan ekonomi Negara.

c. Mengadakan tinjauan menyeluruh *(overall study)* mengenai ketenagaan, dengan mengadakan survai, dan riset untuk mengadakan penilaian (evaluasi) keadaan dewasa ini serta merencanakan pola pengembangannya untuk masa yang akan datang;

d. Meningkatkan produksi bahan-bahan kokas.

c. Melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang segera dapat memberikan manfaat seperti : Proyek jalan di Kalimantan, Nusa Tenggara, proyek jalan Takengon, proyek jembatan Riau dan sebagainya.

d. Mengadakan survai, perencanaan dan penelitian dalam rangka persiapan rencana pembangunan yang akan datang;

e. Mengusahakan adanya "Administrasi Jalan Raya" *(Highway Administration)*, yang berdayaguna.

(3) Bidang Cipta Karya

a. Meningkatkan upaya penyusunan rencana tata daerah (regional planning) dan pengembangan daerah;

b. Membantu, mendorong usaha pembangunan perumahan rakyat dengan menggunakan/memanfaatkan bahan-bahan setempat;

c. Menyelesaikan pembangunan proyek-proyek Air Bersih (Air Minum), yang mempunyai arti ekonomis penting (air minum untuk pelabuhan) dan sebagainya;

d. Mengusahakan tercapainya tertib pembangunan di Indonesia.

(4) Bidang Ketenagaan (Energi):

a. Melakukan rehabilitasi dan rekondisioning Pusat-pusat Pembangkit Tenaga Listrik demi keandalan penyediaan tenaga listrik dalam rangka meniadakan pemadaman-pemadaman bergilir terutama dimulai di Ibukota Propinsi, serta rehabilitasi dan rekondisioning Pusat-pusat Pembangkit Tenaga Gas dan saluran distribusinya terutama di kota-kota besar yang penting;

6. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik berpendapat, bahwa berhasil tidaknya suatu kegiatan dan pembangunan banyak tergantung pada *planning dan programmingnya*. Oleh karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat dijamin terselenggaranya "kelengkapan tindakan" *(completed action)*, serta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Dalam rangka usaha untuk mengintensifkan usaha penyusunan *planning dan programming* itu, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik mengadakan pendekatan pada pembinaan dan pengembangan daerah pada umumnya dan bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada khususnya, berupa suatu perencanaan daerah, perencanaan wilayah atau *regional planning*. Rencana Daerah *(Regional Planning)* menyajikan kumpulan dan susunan fakta

dan data, yang dapat memberikan gambaran menyeluruh *(overzicht)* yang jelas permasalahannya (problematik), kemungkinan-kemungkinan yang ada dan di antaranya memuat pula : rencana induk (master plan), rencana kota *(city plan)* dan sebagainya.

Rencana Daerah hakekatnya bukan merupakan suatu rencana yang mati, melainkan rencana yang hidup berkembang terus dan yang setiap kali dapat disempurnakan dan menyangkut jangkauan waktu yang panjang *(long range)*. Suatu Rencana Daerah akan menjamin dan mempermudah terselenggaranya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang, antar sektor, antar tugas dan antar daerah, serta berperan sebagai panduan (guidance) untuk pengembangan wilayah menghilangkan " kegandaan" *(doubleres)* atau kesenjangan *(gap)*. Pendekatan Rencana Daerah perlu diadakan untuk menuju pengendalian rencana pembangunan secara menyeluruh *(comprehensive)* dan menjamin adanya kontinuitas.

Aparat yang menyelenggarakan tugas-tugas Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di daerah-daerah perlu dipersiapkan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 di tiap Daerah Tingkat I Propinsi, terutama yang belum mempunyainya, perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan daerah setempat.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi perlu diberi garis penegasan sebagai berikut:

a. Sebagai aparat daerah, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi taktis di bawah komando Gubernur Kepala Daerah.

b. Mengingat sifat teknisnya, pembinaan teknis diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi disamping melakukan tugas urusan rumah tangga daerahnya masing-masing, diwajibkan pula melakukan tugas-tugas urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Pusat cq. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di daerah yang bersangkutan.

Proyek-proyek pembangunan yang besar bersifat Nasional, yang terletak di daerah dan yang memerlukan tenaga trampil *(skill)* baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan, diatur dan ditetapkan langsung oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

7.Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional di Indonesia sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1967 Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan untuk membuka pintu penanaman modal asing di Indonesia dan memberikan perangsang-perangsang tertentu antara lain berupa pembebasan pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu maksimal lima tahun dan lain sebagainya. Namun demikian masih dirasa perlu untuk menciptakan iklim usaha, dimana para penanam modal merasa tenteram dalam menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu dengan memberikan kebebasan dan kelonggaran dengan batas-batas tertentu dan tidak terlalu banyak mengadakan campur tangan administratif.

Dalam rangka usaha untuk merangsang minat penanam modal di Indonesia itu di bidang jasa konstruksi, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik menetapkan kebijaksanaan pokok sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan Terhadap Penanaman Modal Asing:

(1) Penanaman Modal Asing diizinkan membawa serta kontraktor dari luar negeri (setelah Penanam Modal Asing mengadakan tender Internasional di luar negeri) untuk mengerjakan proyek-proyeknya dalam wilayah Indonesia dalam rangka usaha penanaman modalnya.

(2) Kontraktor Asing (Luar Negeri) yang memenangkan tender tersebut di atas hanya melakukan kegiatan pembangunan untuk pekerjaan atau proyek yang disebut dalam izin penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada fihak Penanam Modal Asing.

(3) Untuk keperluan kegiatan tersebut butir (2) fihak Kontraktor tidak perlu dan tidak diperkenankan mendirikan badan hukum di Indonesia.

(4) Penanam Modal Asing, yang telah berkedudukan lebih dari tiga tahun di Indonesia diwajibkan mengadakan tender internasional di Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang berlaku di Indonesia dan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dengan memberikan pula kesempatan yang sama bagi para Kontraktor Nasional Indonesia untuk ikut serta dalam tender tersebut.

(5) Kontraktor asing yang memenangkan tender baik di luar negeri maupun di Indonesia, yang diadakan oleh Penanam Modal Asing, ditentukan sebagai Kontraktor Utama *(Main Contractor)* dan diwajibkan mengadakan tender taraf kedua untuk menyeleksi Sub Kontraktor-Sub Kontraktor, menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Dalam tender taraf kedua ini maka diundang dan diikutsertakan kontraktor-kontraktor Nasional termasuk Kontraktor Asing yang mengadakan usaha gabungan *(joint enterprise)* dengan perusahaan Indonesia.

(6) Kepada para Penanam Modal Asing diberikan kebebasan untuk menunjuk/menetapkan: *designer, surveyor*, konsultan, yang diinginnya sendiri. Dalam hal ini *designer, surveyor* dan konsultan tersebut tidak diperkenankan mendirikan badan hukum di Indonesia.

(7) Kegiatan yang dilakukan oleh *designer, surveyor* dan konsultan tersebut hanya meliputi pekerjaan dalam kaitan dengan izin penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada fihak Penanam Modal Asing.

Pekerjaan yang memerlukan perencanaan yang tepat.

b. Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan proyek *(project aid)* luar negeri sebagai Pinjaman Jangka Panjang.

(1) Dalam mengadakan seleksi atas *designer*, *surveyor* dan/atau konsultan asing fihak Penanam Modal Asing harus mengajukan nama-nama perusahaan/pemberi jasa kepada Pemerintah Indonesia untuk mendapat persetujuannya terlebih dahulu guna diseleksi lebih lanjut oleh fihak Penanam Modal Asing.

(2) Untuk mengadakan seleksi Kontraktor Asing, pada tahap pertama (selama tiga tahun pertama) tender dapat dilakukan di luar negeri, dan dapat pula diadakan di Indonesia, jika fihak Pemberi Pinjaman (Kredit) atau Konsultan Asing menganggap perlu.

(3) Setelah masa tiga tahun dilampaui, maka tender diadakan di Indonesia.

(4) Dalam menyelenggarakan tender internasional di Indonesia harus diberikan kesempatan yang sama kepada Kontraktor Nasional Indonesia, meskipun seleksi terhadap kontraktor yang bersangkutan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemberi Pinjaman (Kredit).

(5) Kontraktor yang memenangkan tender internasional, baik yang diselenggarakan di luar negeri maupun di Indonesia, ditetapkan sebagai Kontraktor Utama *(Main Contractor)*, dan diwajibkan mengikutsertakan/memberi pekerjaan kepada Kontraktor Nasional atau Kontraktor Asing yang mengadakan usaha gabungan *(joint enterprise)* dengan perusahaan Indonesia, yang ditetapkan sebagai Sub Kontraktor atas hasil seleksi yang diadakan oleh Kontraktor Utama.

C. Kebijaksanaan dalam rangka Proyek-proyek yang langsung dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), baik yang langsung dari dana Pemerintah maupun dalam bentuk kredit; dan proyek-proyek yang dibiayai oleh Perusahaan Negara atau Swasta Indonesia.

(1) Kontraktor Asing tidak diizinkan secara langsung mengerjakan proyek-proyek ini, kecuali mereka yang mengadakan "usaha ber-
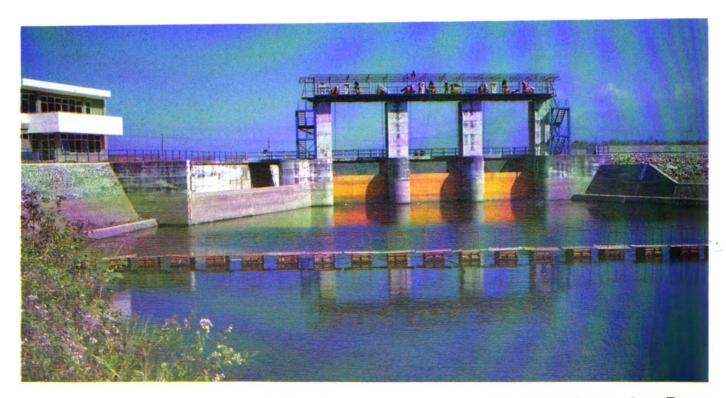
Bendung Widas — Jawa Timur.

sama" (joint venture) dengan Kontraktor Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia.

(2) Konsultan, surveyor dan/atau designer tidak diizinkan secara langsung mengerjakan proyek-proyek ini, kecuali mereka yang mengadakan "usaha bersama" *(joint venture)* dengan Konsultan, Surveyor dan/atau Designer Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia.

Urusan penyelenggaraan yang ada hubungannya dengan hal ikhwal penanaman modal asing ini di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dilakukan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perancang dan Hubungan Luar Negeri dengan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPMA).

REPELITA I

8. Setelah melampaui masa tiga tahun, akhirnya pelbagai kebijaksanaan yang telah dilancarkan melalui tahap-tahap : penyelamatan, rehabilitasi dan konsolidasi, telah memberikan hasil yang nyata dengan terciptanya stabilitas politik dan stabilitas ekonomi di Indonesia, yang memungkinkan dan memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang pertama, yang dimulai pada 1 April 1969.

Sebagai realisasi dari salah satu tugas Pemerintah, yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah dalam Kabinet Pembangunan (I) pada akhir tahun 1968 telah selesai menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I 1969/1970 — 1973/1974. Untuk tetap menjaga keluwesan dan kecepatan waktu serta tetap melandaskan pada sendi konstitusional, maka diambil suatu kebijaksanaan untuk menetapkan bentuk hukum dari Rencana Pembangunan Lima Tahun dalam Keputusan Presiden. Dan Repelita I (1969/1970 — 1973/1974) dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 1968.

Pekerjaan Bendungan pada salah satu proyek pengairan

Faktor yang penting dalam sistem pelaksanaan rencana pembangunan itu terletak pada rencana tahunannya, yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan dituangkan dalam Undang-undang. Dalam kaitan ini maka Dewan Perwakilan Rakyat selalu dapat ikut serta menentukan pelaksanaan rencana pembangunan itu. Dengan demikian sendi-sendi konstitusional tetap dipelihara, dijaga dan dipertahankan.

Pemerintah cq. Kabinet Pembangunan (I) dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 1969/1970 pada tanggal 14 Januari 1968 sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan, yang berlaku mulai tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1970. Dalam RAPBN 1969/1970 itu dimuat rencana operasional pembangunan tahun pertama dari Repelita I

Pekerjaan penuh resiko

Sistem kebijaksanaan pengajuan rancangan anggaran seperti itu dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah yang bersangkutan dan dijadikan tradisi dan kebiasaan nasional konstitusional.

Pola Umum dan Strategi Repelita I 1969/1970 – 1973/1974.

Rencana Pembangunan Lima Tahun ini memuat masalah-masalah perencanaan pembangunan, sebagai hasil pengolahan, perhitungan, dan

IRIGASI RIAM KANAN, KALIMANTAN SELATAN.

Bendungan Riam Kanan di Kalimatan Selatan

Indonesia telah swasembada pangan sejak tahun 1984. Dalam menunjang pelestarian swasembada pangan yang telah kita capai itu, maka pembangunan pengairan yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum terus ditingkatkan melalui usaha-usaha rehabilitasi, pemeliharaan maupun pembangunan jaringan irigasi baru terutama di pulau Jawa. Sejalan dengan program ekstensifikasih, pembukaan areal pertanian pangan untuk mengimbangi semakin menciutnya lahan-lahan produktif yang berubah fungsi di daerah sekitar perkotaan, maka pembangunan jaringan irigasi baru menjadi semakin penting artinya.

Salah satu proyek irigasi besar di luar pulau Jawa yang dimaksudkan

untuk menunjang peningkatan produksi pangan/pelestarian swasembada pangan tersebut ialah Proyek Irigasi Riam Kanan di Kalimantan Selatan yang akan mengairi areal persawahan seluas 26.000 Ha.

Bila di Riam Kanan ini tak dibangun proyek, maka produksi beras setiap tahunnya adalah 22.870 Ha kali dua ton (hanya sekali panen), atau 45.740 ton. Dengan dibangunnya proyek maka proyeksinya adalah tanaman padi musim hujan, 25.900 Ha (ada tambahan areal baru) kali empat ton, sama dengan 103.600 ton. Musim kemarau produksinya, 18.550 Ha, kali 4 ton, atau sebesar 74.200 ton. Total produksi setahun (dua kali panen dengan rata-rata produksi 4 ton/Ha) sebesar 141.335 ton, atau bila dibandingkan dengan tanpa proyek, mengalami kenaikan produksi 95.595 ton. Kenaikan produksi yang diproyeksikan sebesar 95.595 ton itu bila dirupiahkan, sekitar Rp 22,89 milyar.

Menjelang berfungsinya PLTA Riam Kanan tahun 1973, pada tahun 1970 - 1971 sebuah team Jepang mengadakan penelitian untuk mempelajari kemungkinan pengembangan sumber-sumber air di daerah sungai Barito. Team ini melahirkan master plan pengembangan sungai Barito dengan Proyek Irigasi Riam Kanan memperoleh prioritas utama. Tahun 1978, dengan bantuan JICA dilaksanakan studi kelayakan dan pada tahun 1983 dilakukan pekerjaan pembuatan detail design. Tahun 1984 OECF memberikan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek Irigasi Riam Kanan Tahap I untuk areal seluas 6.000 Ha di Kecamatan Tabuk Kabupaten Banjar.

Proyek Irigasi Riam Kanan ini direncanakan ditangani dalam tiga tahap, disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Pada tahap I, pekerjaan konstruksinya dimulai tahun 1988 diharapkan akan selesai tahun 1992, dengan perkiraan biaya sekitar Rp 139 milyar. Sumber dananya dari APBN sebesar Rp 58,3 milyar dan dari dana pinjaman OECF Jepang sebesar 6 milyar Yen. Dana untuk tahap I tersebut dipergunakan untuk menangani pekerjaan :

a) Pembangunan bendung sekitar 12 km di hilir Riam Kanan, yang dikerjakan oleh kontraktor BUMN PT. Adhi Karya.
b) Pembangunan saluran induk bagian hulu sepanjang 23,8 Km dengan 95 bangunan pelengkap.
c) Pembangunan saluran sekunder dengan 168 bangunan pelengkap, sepanjang 47,4 Km.
d) Pembangunan dua saluran pembuangan primer dengan 7 bangunan pelengkap, sepanjang 14,7 km.
e) Pembangunan 10 saluran pembuangan sekunder dengan 4 buah bangunan pelengkap sepanjang 25,5 km.
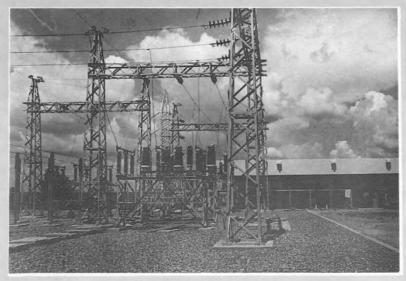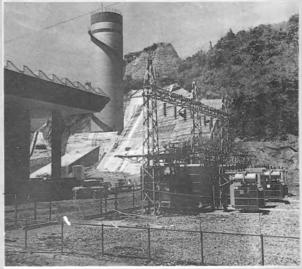
Instalasi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan oleh Bendungan Riam Kanan.

f) Pembangunan jalan inspeksi di 12 lokasi dengan panjang total 72 km.

g) Pembangunan jaringan tersier untuk luas areal persawahan 5.965 Ha, yang terdiri atas 84 blok tersier.

h) Pembukaan lahan persawahan baru seluas 3.000 Ha.

Untuk penanganan tahap I yang saat ini telah mencapai progres fisik lebih dari 50 persen tersebut selain melibatkan kontraktor BUMN PT. Adhi Karya, ditangani pula oleh kontraktor BUMN PT. Nindya Karya, kontraktor Silkar Internasional yang joint operation dengan Daewoo dari Korea Selatan, kontraktor CV Budi Karya, kontraktor Sebo Agung yang joint operation dengan kontraktor BB PP Soeparto, sementara pekerjaan saluran tersier saat ini sedang dalam proses tender.

Pekerjaan tahap II yang akan dimulai tahun 1992 dengan tiga tahun masa pelaksanaan atau sesuai dengan dana yang tersedia, akan ditangani :

a) Lanjutan pembangunan saluran induk dengan 48 bangunan pelengkap sepanjang 17,8 km.

b) Saluran sekunder dengan 255 bangunan pelengkap sepanjang 69,7 km.

c) Saluran pembuang primer dengan 32 bangunan pelengkap sepanjang 8,2 km.

d) Saluran pembuangan sekunder dengan 32 bangunan pelengkap sepanjang 66 km.

e) Jalan inspeksi sepanjang 105,4 km.

f) Saluran tersier untuk areal seluas 10.015 Ha. dengan 126 blok tersier.

g) Pembukaan lahan persawahan baru seluas 1.378 Ha.

Untuk pekerjaan tahap III akan meliputi :

a) Pembangunan lanjutan saluran sekunder sepanjang 52,4 km dengan 225 bangunan pelengkap.

b) Pembangunan saluran pembuang sekunder sepanjang 54,5 km dengan 36 buah bangunan pelengkap.

c) Pembangunan jalan inspeksi sepanjang 74,3 km dan sebuah jembatan.

d) Pembangunan jaringan tersier untuk areal persawahan seluas 9.920 Ha dengan 129 blok tersier.

Air baku irigasi yang diambil dari waduk Pangeran Muhammad Noor setelah dimanfaatkan untuk PLTA, selain untuk mengairi areal irigasi seluas 26.000 Ha atau tepatnya 25.900 Ha tersebut, juga akan dimanfaatkan untuk sumber air baku bagi kota Banjarmasin dan sekitarnya, dengan kapasitas 1 m3/dt. Bagi masyarakat Banjarmasin ini sangat penting artinya, sebab penyediaan air bersih bagi Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan tersebut hampir setiap tahun menghadapi persoalan krisis air di musim kemarau, karena sumber air baku untuk air bersih kota itu terpengaruh oleh air laut.

Sebagai gambaran, potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan untuk areal tanaman pangan di Kalimantan Selatan tersebut cukup luas, yakni areal yang berupa lahan kering sekitar 200 ribu Ha, dan areal lahan basah, rawa pasang surut sekitar 500 ribu Ha. Sampai dengan akhir Pelita IV lalu baru ditangani jaringan irigasi tersebar di propinsi itu dengan luas areal sasaran 120.159 Ha, sementara untuk rawa pasang surut pada kurun waktu yang sama, telah dibuka areal seluas 41.118 Ha, dan telah diolah menjadi areal persawahan pasang surut seluas 32.050 Ha.

Dari angka di atas menunjukkan bahwa masih cukup luas potensi yang bisa dikembangkan untuk perluasan areal tanaman pangan di Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung pelestarian swasembada pangan.-

penelitian yang mendalam dan terus menerus. Repelita I diarahkan pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak serta sekaligus menciptakan kerangka landasan baru yang memungkinkan bagi perencanaan dan pelaksanaan Repelita II dan berikutnya.
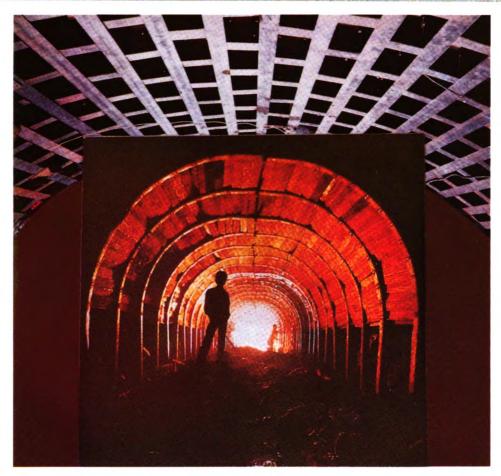
Berlandaskan kepada kenyataan yang dihadapi, khususnya keadaan perekonomian Indonesia, yang masih terbatas pada waktu itu, maka Repelita I tidak banyak memiliki pilihan (alternatif) sasaran, melainkan dihadapkan pada keharusan adanya pemilihan/penentuan prioritas yang tepat. Tanpa penentuan prioritas itu, lebih-lebih apabila terlalu banyak sasaran yang harus dicapai, maka dengan kemampuan yang terbatas tidak memungkinkan untuk dapat mengejar dan mencapai sasaran-sasaran yang di luar batas kemampuan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/1966, skala prioritas sasaran pembangunan adalah bidang-bidang pertanian, prasarana, industri, pertambangan dan minyak. Dalam Repelita pertama bidang pertanian dipilih sebagai titik sentral pembangunan; satu dan lain mengingat bahwa struktur perekonomian Indonesia pada waktu itu lebih berat bersandar pada sektor agraris, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor itu, sehingga sektor ini merupakan sebagian terbesar sumber pendapatan nasional; sebagian besar dari devisa diperoleh dari sektor perkebunan.

Pembangunan di sektor pertanian berarti memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat. Naiknya pendapatan masyarakat meningkatkan daya beli masyarakat; dan ini berarti terbukanya pasaran bagi produksi industri yang diperlukan konsumen. Pembangunan di sektor pertanian berarti pula merangsang perkembangan ekonomi yang lebih luas, ialah tumbuhnya industri, yang diarahkan kepada industri yang menunjang sektor pertanian dan industri pengganti barang-barang impor. Pembangunan di sektor pertanian menghasilkan pangan yang cukup, khususnya beras. Hasil pangan yang cukup mempunyai arti yang besar dalam memantapkan harga-harga pada umumnya, sehingga terciptalah stabilitas ekonomi, yang merupakan landasan utama bagi kelancaran pembangunan.

Dalam Repelita pertama pada skala berikutnya diberikan prioritas pada pembangunan sektor pertambangan, mengingat sumber-sumber potensial masih memberikan harapan yang besar bagi bertambahnya pro-
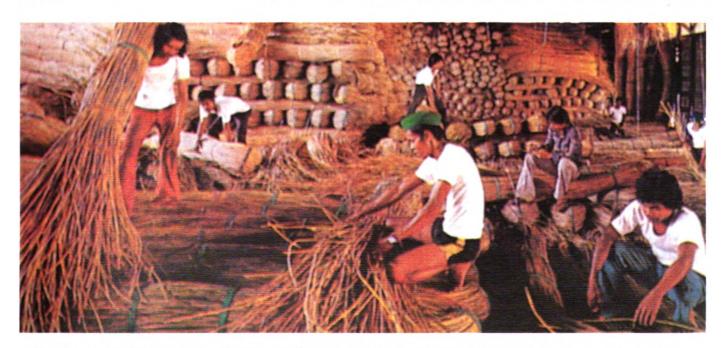
Pembangunan Prasarana dan Sarana untuk menunjang sektor-sektor strategis dan mendorong peningkatan Ekspor non Migas.
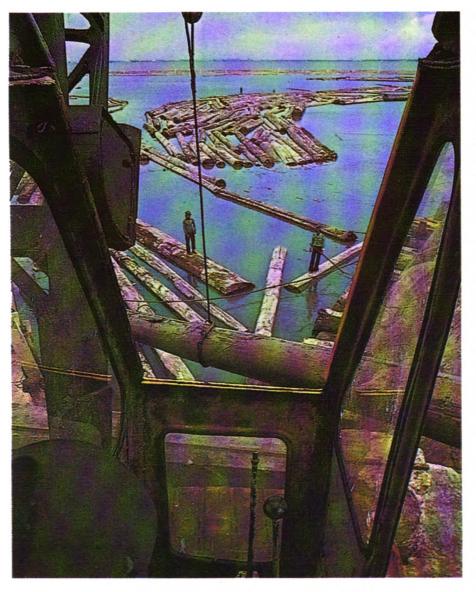
Peningkatan Ekspor non Migas disektor kehutanan.

duksi yang akan menambah penghasilan devisa. Di antaranya, yang sangat memberikan kemungkinan adalah minyak bumi, batubara, bauxit, tembaga, nikel, mangaan, emas, perak, belerang, intan dan sebagainya.

Pembangunan prasarana baik di darat, laut, udara maupun telekomunikasi merupakan bagian integral dari pola pembangunan nasional, sehingga Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, sebagai satu kesatuan politik, sebagai satu kesatuan kultural dan sebagai satu kesatuan hankam dapat tumbuh dengan lebih mantap dan kokoh.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan mental spiritual dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan meningkatnya keadaan perekonomian nasional, maka usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial dan mental spiritual harus tetap dibimbing dan diarahkan pada pemeliharaan dan pemupukan kepribadian nasional serta harus berjalan seirama dengan kemampuan ekonomi tersebut.

Untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah/ Negara yang sebaik-baiknya, juga dilakukan pembangunan aparatur Pemerintahan. Dalam jangka pendek, tujuan yang akan dicapai adalah efisiensi dan efektivitas dalam bidang organisasi, prosedur dan personil, sehingga administrasi pemerintahan di Indonesia mampu menyusun rencana, program dan pelaksanaan pembangunan. Administrasi pemerintahan tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, melainkan ditingkatkan agar mampu menjalankan fungsi pembangunan.

Tindakan-tindakan yang perlu diambil meliputi penyempurnaan struktur organisasi, penyempurnaan prosedur, penyempurnaan administrasi kepegawaian, penyempurnaan administrasi keuangan, administrasi peralatan dan perbekalan, administrasi statistik, administrasi Perusahaan Negara, penyempurnaan penelitian dan pengembangan ilmu administrasi Negara. Usaha-usaha penyempurnaan aparatur Negara telah mulai dirintis sejak Kabinet Ampera.

Pembangunan aparatur pemerintah dilakukan serentak dalam rangka Pembangunan Lima Tahun dan sekaligus menjadi alat untuk melaksanakan pembangunan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan. Bertolak dari prinsip itu, maka hanya ada satu rencana pembangunan Nasional, yaitu Repelita. Dengan demikian, kegiatan dan prakarsa daerah diletakkan dalam rangka pola umum rencana pembangunan nasional tersebut. Ini berarti bahwa rencana kerja dan kegiatan-kegiatan daerah ditujukan kepada bidang-bidang yang menunjang rencana pembangunan Nasional.

Peningkatan Ekspor non Migas disektor kehutanan.

Dalam rangka pengertian itu, maka yang dimaksud dengan "pembangunan daerah" ialah semua kegiatan pembangunan yang ada atau dilakukan di daerah, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

(1) kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan Nasional yang ada di daerah itu sendiri;

(2) kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah sendiri, di luar yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan "Proyek-proyek Nasional atau Proyek-proyek Pusat" yang berada di daerah tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Departemen Operasional (Teknis) yang bersangkutan. Dalam hubungan ini Gubernur Kepala Daerah ikut bertanggungjawab atas suksesnya setiap proyek pembangunan yang ada di daerahnya, dalam arti memberikan bantuan serta turut melaksanakan pengawasan atas kelancaran setiap proyek yang terletak di daerahnya. Yang dimaksud dengan "Proyek Nasional atau Proyek Pusat" ialah proyek-proyek pembangunan yang mempunyai nilai strategis dalam ruang lingkup Nasional. Sesuatu proyek dianggap mempunyai nilai strategis Nasional apabila dengan adanya proyek itu potensi-potensi ekonomi nasional dapat dikembangkan di seluruh daerah dalam rangkaian kesatuan Indonesia.

Bidang Tugas dan Kegiatan Operasional Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam Repelita I.

9. Dalam menghadapi pelaksanaan Repelita I, seperti telah diutarakan terdahulu, oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada tanggal 1 September 1968 telah ditetapkan Kebijaksanaan Umum Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan bidang tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

a. Bidang Pengairan Dasar

Dalam Repelita I antara lain telah ditetapkan, bahwa pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. Sasaran produksi beras yang akan dicapai dalam waktu lima tahun adalah sebanyak 15,4 juta ton, berarti suatu kenaikan sebesar 50% jika dibandingkan dengan produksi beras tahun 1968. Untuk mencapai sasaran itu diharapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Untuk menunjang peningkatan produksi pangan terutama beras itu dalam Repelita I diusahakan perbaikan dan perluasan irigasi, sehingga dapat mengairi sawah seluas 900 ribu hektar, sedangkan perluasan akan meliputi 840 ribu hektar. Dengan rencana ini diperhitungkan bahwa luas areal panenan padi akan meningkat dengan 1,7 juta hektar dalam waktu lima tahun (1969/1970 – 1973/1974).

Dalam Repelita I didahulukan kelanjutan atau penyelesaian proyek-proyek yang penting dan mendesak dan yang segera dapat memberikan hasil atau manfaat, di antaranya ialah Proyek Bendungan Serbaguna Jatiluhur dengan penyelesaian proyek pengairannya. Seperti telah dijelaskan, Bendungan Serbagua Jatiluhur yang pembangunannya dimulai tahun 1959, telah selesai dan diresmikan berfungsinya oleh Pejabat
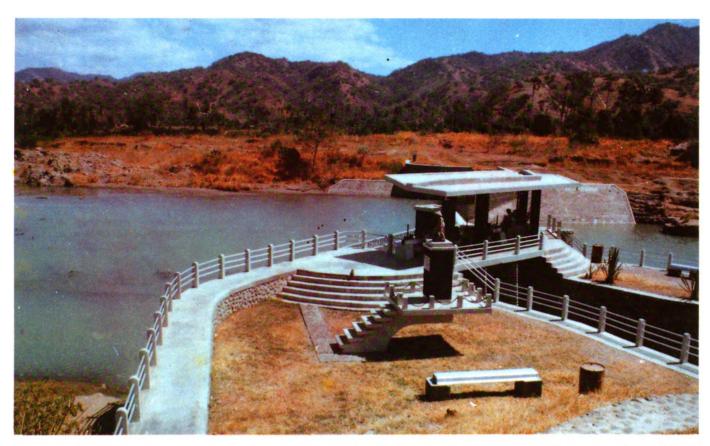
Bendung Sutami di pulau Flores N.T.T.

Waduk Karangkates — Jawa Timur.

Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI **Soeharto** pada tanggal 25 Agustus 1967. Penyelesaian proyek pengairan Jatiluhur dimaksudkan untuk dapat mengairi sawah seluas lebih kurang 190.000 hektar dengan panen gadu.

Proyek-proyek pembangunan baru antara lain ialah :

(1) Pembangunan Bendungan Karangkates dan bendungan Selorejo di Jawa Timur dalam rangka Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas.

(2) Pemanfaatan rencana teknis dan pembersihan "*cofferdam*" pada Proyek Sempor di Jawa Tengah.

(3) Proyek-proyek Irigasi di beberapa daerah antara lain: Proyek Karanganyar, Tajum, Way Seputih, Sisir Gunting, Ogan Kramasan, Polder Alabio, Kelara dan sebagainya.

Survai dan perencanaan diadakan untuk: Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo, Proyek Jratunseluna, Proyek Kali Progo, Proyek Citanduy.

Rehabilitasi dikerjakan pada normalisasi sungai-sungai di seluruh Indonesia dan pada sistem irigasi yang ada, agar saluran dan bangunan irigasi dapat berfungsi kembali secara maksimal, terutama di daerah-daerah yang merupakan sentra konsumsi dan sentra produksi pangan.

Proyek-proyek pembangunan dalam Pelita I yang dapat diselesaikan dan diresmikan pemanfaatannya, yang terpenting di antaranya ialah :

(1) Bendungan Selorejo, yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia **Jenderal Soeharto** pada tanggal 22 Desember 1970;

(2) Bendungan Karangkates, yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia **Jenderal Soeharto** pada tanggal 2 Mei 1972;

(3) Bendungan Lengkong Baru, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, **Ir. Sutami,** pada tanggal 16 Nopember 1973;

(4) Bendungan Sabo (Sabo dam) Mendalan, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pekerjaaan Umum dan Tenaga Listrik **Ir. Sutami,** pada tanggal 17 Nopember 1973.

b. Bidang Jalan dan Jembatan

Tujuan pembangunan di bidang perhubungan adalah untuk melancarkan arus barang dan lalu lintas orang, yang diperlukan bagi perkembangan perekonomian dan kehidupan masyarakat. Mengingat bahwa keadaan prasarana jalan di Indonesia telah terlalu lama tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya, bahwa ada gejala degradasi prasarana berjalan lebih cepat dari usaha rehabilitasi, maka keadaan prasarana terutama jalan mempunyai dampak yang jauh tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian Negara dan karenanya tidak dapat menampung volume lalu lintas yang diperlukan. Karena itu usaha dalam Pelita I diarahkan untuk memperkecil ketinggalan tadi, berupa tidak saja rehabilitasi, tetapi juga usaha peningkatan *(upgrading)*.

Rehabilitasi jalan dan jembatan dilakukan secara selektif dan di arahkan kepada pengembalian kon-

Presiden Soeharto sedang mengamati bahan bangunan disaksikan Dirjen. Cipta Karya Ir. Rachmat Wiradisurya dan Menteri PU Ir. Sutami.

disi jalan/jembatan agar dapat berfungsi secara maksimal serta diutamakan pada jalan-jalan ekonomi dari daerah produksi ke daerah konsumsi dan dari daerah produksi ke pelabuhan ekspor.

Dam rora kecil

Pekerjaan peningkatan *(upgrading)* jalan diutamakan pada jalan Jakarta - Bandung, Lhok Seumawe - lalu lintas yang tinggi, seperti Jakarta - Cikampek, Cirebon - Semarang, Jakarta - Bandung, Lho Seumawe - Langsa dan lain-lain. Peningkatan *(upgrading)* jembatan-jembatan yang besar dan penting misalnya: Jembatan Bunga Mas di Sumatera Selatan, Jembatan Sekogan di Kalimantan Barat, Jembatan -jembatan antara Jakarta - Semarang dan lain-lain.

Proyek-proyek jalan dan jembatan lainnya dalam Pelita I, antara lain :
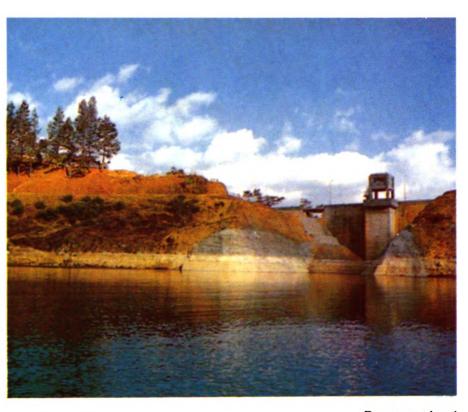
Pembangunan Jalan Lintas Sumbawa.

(1) Proyek Jalan Kalimantan, yang meliputi pembangunan jalan baru antara Balikpapan - Samarinda, dan peningkatan *(upgrading)* jalan Tanjung - Barabai.

(2) Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Nusa Tenggara Timur;

(3) Proyek Peningkatan Jalan Takengon;

(4) Proyek Jembatan Danau Bengkuang di Riau.

(5) Proyek Airport (Bandar Udara) Tuban di Bali.

Pekerjaan survai dan perencanaan yang dilakukan dalam Pelita I antara lain untuk menginventarisasi jalan-jalan dan jembatan Negara sepanjang 10.000 km.

Pekerjaan rehabilitasi, dan peningkatan *(upgrading)* jalan-jalan dan jembatan yang diprogramkan dalam Repelita I umumnya telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menunjang sektor-sektor strategis lainnya dalam pembangunan yang dapat menunjang perekonomian Negara dan yang pada akhirnya dapat memberikan landasan yang kuat bagi usaha pembangunan selanjutnya.

Pembangunan Jembatan Danau Bengkuang di Riau telah diselesaikan dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia **Jenderal TNI Soeharto.**

Sistim Instalasi Penjernihan air bersih terapung - Kalimantan Barat.

c. Bidang Keciptakaryaan

Sektor pembangunan yang ditunjang oleh bidang prasarana ini ialah Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat. Kesejahteraan Rakyat dalam arti yang luas akan terwujud dengan berhasilnya keseluruhan pembangunan. Oleh karena itu program-program di bidang ini dititikberatkan pada terwujudnya prasarana yang memungkinkan meningkatnya kesejahteraan rakyat, termasuk di antaranya: program penyuluhan pembangunan perumahan, perencanaan tata kota dan daerah, peningkatan penyediaan air bersih (air minum) dan sebagainya .

Dalam hal pembangunan perumahan rakyat, maka di dalam Pelita I ini kebijaksanaannya ialah bahwa Pemerintah tidak akan membangunkan /memberikan rumah-rumah dengan cuma-cuma, melainkan menyediakan fasilitas-fasilitas dan menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup dan

Peremajaan Kota - Kebon Kacang.

terbeli oleh rakyat. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, diharapkan rakyat akan mampu untuk mendirikan rumah-rumah sederhana, yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kesejahteraan.

Pembangunan Proyek Political Venues Conefo yang berdasarkan Keputusan Presidium Nomor 79/U/Kep/II/1966 dirubah dan dijadikan Gedung MPR/DPR, dan yang bagian tertentu yaitu "Main Conference Hall" telah selesai dan digunakan untuk Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, diselesaikan pembangunannya untuk tahap dan bagian berikutnya.

Dalam Pelita I diutamakan penyelesaian proyek-proyek penyediaan Air Bersih (Air Minum) yang mempunyai arti ekonomi penting, seperti Proyek Air Minum Pejompongan di Jakarta dan lain-lain.

d. Bidang Tenaga Listrik

Dalam Pelita I diutamakan pengembangan penyediaan tenaga listrik, yang diarahkan agar dapat mengikuti dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dalam permulaan Repelita I, maka secara kualitatif sasaran pembangunannya meliputi peningkatan efisiensi penggunaan pusat-pusat tenaga listrik dan peningkatan pengadaan tenaga listrik. Usaha peningkatan efisiensi meliputi rehabilitasi dan peningkatan kapasitas tenaga listrik, dan jaringan transmisi dan distribusi yang telah ada. Peningkatan pengadaan tenaga listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi yang baru.

Mengingat terbatasnya kemampuan anggaran dalam Repelita I, yang belum memungkinkan dapat melayani kebutuhan masyarakat di seluruh daerah, maka prioritasnya diberikan kepada usaha-usaha yang dapat membangkitkan kehidupan ekonomi, terutama untuk merangsang produksi. Dalam waktu lima tahun, kapasitas terpasang tenaga
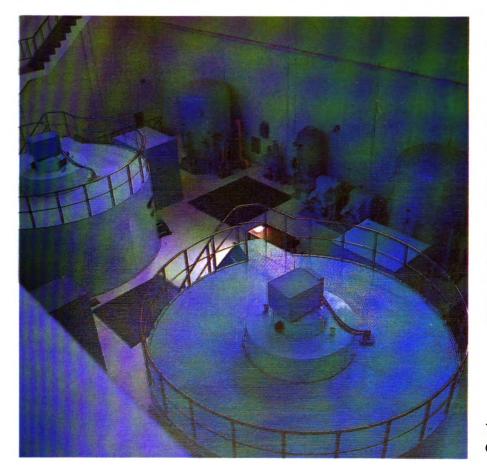
Turbin Pembangkit Tenaga Listrik Garung, Wonosobo.

Pembangkit Listrik Tenaga Air Selorejo Jawa-Timur.

listrik bertambah dengan 425.000 KW, atau 65% dari keadaan sebelum Repelita I.

Proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dibangun ialah: PLTA Riam Kanan (di Kalimantan), PLTA Ngebel (di Jawa Timur), PLTA Asahan (di Sumatera Utara), PLTA Batang Agam (di Sumbar), PLTA Garung (di Jateng), PLTA Karangkates (di Jawa Timur), PLTA Selorejo (di Jawa Timur) dan PLTA Tonsealama (di Sulawesi).

Proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dibangun ialah: PLTU Makasar (di Sulawesi Selatan), PLTU Palembang (di Sumatera Selatan), PLTU Tanjung Priok (di Jakarta); sedang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) ialah: PLTG Medan (di Sumatera Utara), PLTG Palembang (Sumatera Selatan), dan PLTG Semarang (di Jawa Tengah).

Proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di daerah-daerah yang seluruhnya memberikan kapasitas tambahan tenaga listrik dengan daya terpasang 22.400 KW.

Proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang penting dan telah diresmikan penggunaannya ialah:

(1) PLTA Karangkates (di Jawa Timur) Unit I dan II, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia **Jenderal TNI Soeharto** pada tanggal 4 September 1973.

(2) PLTA Selorejo (di Jawa Timur), diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, **Ir. Sutami** pada tanggal 4 Juli 1973.

10. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik guna mencapai sasaran pokok tahap stabilisasi politik dan ekonomi dan tahap Repelita I lebih lanjut, diperlukan pembinaan peralatan dan bahan bangunan secara lebih efisien dan efektif.

Dalam pembinaan peralatan diutamakan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala alat peralatan pembangunan yang ada, memproduktifkan secara maksimal baik peralatan produksi maupun peralatan pembangunan yang masih bekerja atau yang tidak dapat bekerja penuh ataupun yang masih dalam keadaan rusak yang dapat diperbaiki. Untuk keperluan itu diintensifkan usaha-usaha: pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repair), penggantian (replacement) dan pembaharuan (reconditioning). Guna memanfaatkan semua peralatan tersebut secara optimal diusahakan penyediaan suku cadang (spare part) baik dengan jalan rekayasa di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi yang ada, maupun dengan jalan mengimpor dari luar negeri dalam batas kemampuan devisa yang tersedia.

Untuk kepentingan efisiensi pengendalian dan koordinasi dalam penggunaan alat-alat besar di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diselenggarakan secara terpusat oleh Eksploitasi Alat-Alat Besar dan penyebarannya dilakukan dengan berpedoman pada "pendekatan proyek" *(project approach)* dan diusahakan sejauh mungkin dengan memanfaatkan peralatan yang ada di daerah setempat dan/atau daerah terdekat, sehingga mobilisasi dapat disederhanakan.

Dalam pembinaan bahan bangunan diutamakan memanfaatkan sebaik-baiknya bahan-bahan yang ada di tempat untuk mencapai stabilitas dalam penentuan harga dan peningkatan mutu, seperti: krikil, pasir, batukali, batu pecah *(steenslag)*, splits, bata, klinkers dan sebagainya. Usaha pokok dilakukan dengan memanfaatkan peralatan yang ada, serta pengusahaan "tambang 'penggalian" *(quarries)* yang ada.

Pembinaan Personil

11. Berdasarkan Keputusan Panglima Kopkamtib Nomor 028/KOPKAM/10/1968 jo 010/KOPKAM/3/1969 tentang Dasar Kebijaksanaan Pener-
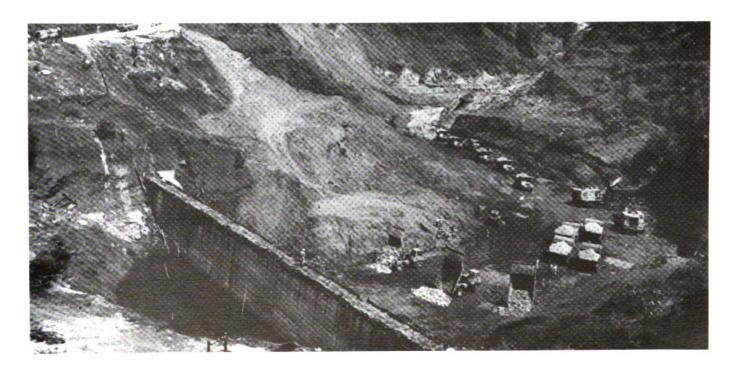
Bendungan Lahor dalam tahap pelaksanaan.

tiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara, maka dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 7/PRT/1980 tanggal 28 Juli 1970 ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Tim-tim Skrining dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik sebagai pengganti pedoman pembentukan Tim Penertiban/Pembersihan Personil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/KPTS/1966. Dengan ketetapan tersebut, maka untuk menyelenggarakan kegiatan penertiban/pembersihan personil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diadakan badan-badan khusus seperti :

(1) Pada Tingkat Departemen dibentuk Tim Skrining Departemen (Tiningdep) sebagai badan skrining yang tertinggi di Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

(2) Pada Tingkat Direktorat Jenderal/lingkungan kerja tingkat Pusat (Eksploitasi, Institut, Perusahaan Negara, Proyek) dibentuk Tim Skrining Lingkungan (Tiningling).

(3) Pada Unit-unit Kerja Departemen di Daerah dibentuk Tim Skrining Lingkungan Daerah (Tininglingda).

Tiningdep merupakan unsur pelaksana penertiban/pembersihan personil di seluruh unit kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan berada dalam bimbingan teknis Tim Skrining Pusat (Tiningpu).

Di dalam mempersiapkan aparatur Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang siap dan mampu dan yang bersikap mental Orde Baru dan berjiwa Pancasila, diperlukan pelaksanaan penertiban dan pembersihan personil dari unsur G-30-S PKI secara ketat dan pembinaannya diarahkan untuk mempersiapkan secara teknis fisik dan mental personil/petugas/karyawan yang tepat untuk tiap bidang tugas dan yang berdedikasi kepada tujuan yang ditetapkan. Di samping itu diusahakan untuk meningkatkan perbaikan pengelolaan dan administrasi personil pendidikan kesejahteraan dan pendayagunaan tenaga kerja, yang diarahkan kepada pemenuhan tenaga kerja dalam jumlah dan mutu yang cukup, sesuai dengan anggaran tenaga kerja, serta meningkatkan penggunaan tenaga kerja yang baik dan memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Mengenai peningkatan dayaguna pegawai mulai diusahakan secara bertahap program peningkatan (up-grading) para pegawai di Pusat dan di Daerah, dan melaksanakan alih tugas *(tour of duty)* dan alih daerah *(tour of area)* sambil dijaga tidak terjadi diskontinuitas kerja. Untuk peningkatan *(upgrading)* pegawai mulai diadakan: Sekolah Staf dan Pimpinan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (SESPUT) dan

Perencanaan merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan.

kursus-kursus, seperti Administrasi Keuangan, Kursus Sosial Politik dan sebagainya.

Dalam menghadapi permulaan pelaksanaan Repelita I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dianggap perlu untuk mendayagunakan / pembinaan partisipasi, bantuan dan tanggung jawab serta pengawasan sosial, mengingat pegawai, karyawan dan petugas di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada waktu itu terkelompok-kelompok dalam pelbagai organisasi massa.

Karena itu untuk menampung kegiatan dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui organisasi massa yang beraneka garis politiknya, wadah kegiatan yang bernama Badan Pertimbangan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Bapertim) yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/1966 dan Nomor 13/PRT/1966 perlu ditinjau kembali dan dibentuk Badan Pertimbangan yang baru dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 01/PRT/1969 tanggal 17 Januari 1969.

Dalam susunan baru keanggotaan Bapertim terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan dan/atau Pembantu Pimpinan Departemen yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri.
b. Unsur-unsur perwakilan Organisasi Massa yang ada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Menteri.
c. Unsur-unsur lain yang dianggap perlu oleh Menteri.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Bapertim ialah:

(1) Pegawai/Buruh/Karyawan yang bekerja pada Instansi, Lembaga dan/atau Perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan
(2) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI, dan
(3) Tidak pernah menjadi anggota atau simpatisan partai terlarang PKI beserta organisasi yang searah/berlindung/bernaung dengan/di bawah PKI, serta
(4) Yang diusulkan oleh Organisasi Massa atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Tugas kewajiban Bapertim ialah:

a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan, saran-saran dan usul-usul kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, baik diminta maupun tidak diminta;
b. Membantu Menteri/Pimpinan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam menciptakan dan/atau memelihara iklim kerja yang sehat dan kerjasama yang baik guna kelancaran tugas pokok dan program kerja Departemen dalam rangka mensukseskan Repelita dengan jalan memberikan dukungan *(support)*, partisipasi yang sebesar-besarnya serta melakukan pengawasan sosial, yang konstruktif dan bertanggungjawab.

Kebijaksanaan pembentukan Bapertim ditempuh, karena pada waktu itu banyak pegawai/karyawan yang tergabung dalam organisasi massa atau Organisasi Serikat Buruh, baik yang menjadi *onderbouw* sesuatu partai politik ataupun tidak. Di antaranya yang tidak terkena larangan atau pembubaran dan masih ada dalam tahun 1969 ialah :

(1) Serikat Buruh Pekerjaan Umum dan Tenaga (SBPUT),
(2) Serikat Buruh Djawatan Pekerjaan Umum (SBDPU),
(3) Persatuan Buruh Departemen PU (PBDPU,)
(4) Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI),
(5) Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO),
(6) Kesatuan Buruh Pembangunan Umum (KBPU),
(7) Kesatuan Buruh Marhaen/Front Marhaen (KBFM).
(8) Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI),
(9) Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI),
(10) Konsentrasi Karyawan dan Buruh (KONKARBU),
(11) Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI),
(12) Rukun Ibu Warga Pekerjaan Umum (RIWPU).

Di dalam praktek dengan keadaan pegawai, karyawan, petugas yang berkelompok-kelompok dalam Organisasi Massa atau Serikat Buruh beranekaragam itu sukar dicapai adanya kekompakan dan kesatuan

tindak yang dapat menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik secara berdayaguna. Padahal pegawai negeri dan karyawan yang bekerja di dalam dan untuk Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik merupakan Aparatur Pemerintah, yang harus siap dan mampu, bersikap mental Orde Baru serta bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugas pengabdiannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Atas pertimbangan yang demikian itu pada tahun 1971 Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dan memandang perlu untuk membentuk satu wadah guna menghimpun para pegawai, yang diberi nama *Korps Pegawai Republik Indonesia* (KORPRI). Pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia dalam kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan KORPRI ialah:

a. Ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Republik Indonesia, sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya kemajuan di segala bidang menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b. Memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan;

c. Membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap Negara dan Pemerintah.

Dengan terbentuknya *Korps Pegawai Republik Indonesia* (KORPRI) maka di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik hanya ada organisasi pegawai *Korps Pegawai Republik Indonesia* (KORPRI) Unit Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Peningkatan Disiplin Karyawan.

DHARMA WANITA

1. *Foto bersama pengurus Dharma Wanita Unit Departemen Pekerjaan Umum.*
2. *Acara pelepasan balon pada pembukaan PORSENI Tahun 1987.*

arah dan sehaluan dengan pelaksanaan tugas pegawai Republik Indonesia sebagai aparatur negara dan abdi negara, serta meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada tahun 1979 Dharma Wanita dibentuk dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berkesinambungan material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu lahirnya Dharma Wanita sebagai organisasi wanita di Indonesia dengan maksud membimbing kegiatan isteri pegawai Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab bernegara, memupuk rasa senasib dan sepenanggungan, untuk meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan di kalangan para isteri pegawai Republik Indonesia, mengintegrasikan kegiatan isteri pegawai Republik Indonesia agar se-
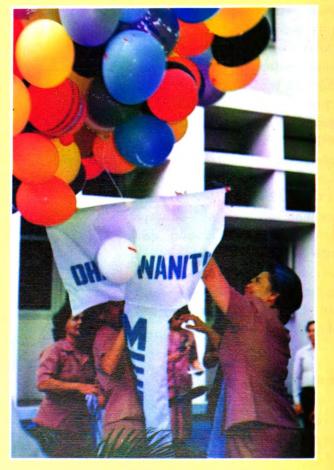
3. *Bu Sutami (tengah) berpakaian seragam Riwput didampingi Ibu Suyono.*
4. *Ibu Sunaryono Danudjo di Panti Jompo dan kegiatan Simulasi.*
5. *Bu Cosmas Batubara sejenak berpose bersama anggota Dharma Wanita setelah mengadakan bakti sosial.*
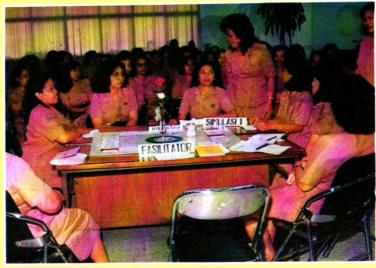
Dengan adanya Musyawarah Nasional Pertama Dharma Wanita tanggal 31 Mei 1979 maka Rukun Ibu Warga Pekerjaan Umum (RIW-PU) bergabung dalam organisasi Dharma Wanita sebagai satu-satunya organisasi isteri pegawai Republik Indonesia.

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.
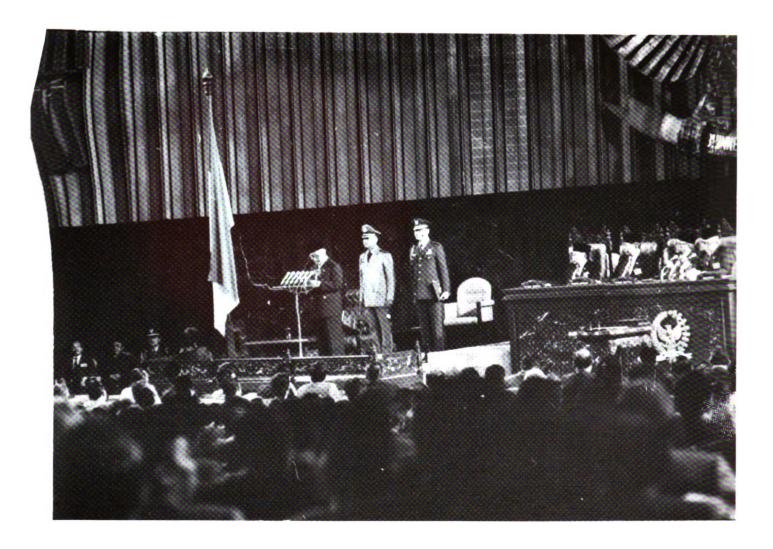
KABINET PEMBANGUNAN II

12. Tahun 1973 mempunyai arti yang penting dalam kehidupan konstitusional dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Indonesia untuk pertama kalinya mempunyai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih oleh rakyat, sebagai hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971. Juga untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh wakil-wakil rakyat di MPR hasil Pemilihan Umum itu.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971, sebagai Lembaga Tertinggi Negara telah mengadakan sidang umumnya sejak tanggal 12 sampai dengan 24 Maret 1973 dan yang telah menghasilkan sebelas ketetapan MPR-RI. Di antaranya yang terpenting ialah:

(1) Ketetapan MPR-RI, Nomor III/MPR/1973 tentang Laporan dan Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia,

(2) Ketetapan MPR-RI, Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),

(3) Ketetapan MPR-RI Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum,

(4) Ketetapan MPR-RI, Nomor IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia,

(5) Ketetapan MPR-RI, Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris

MPR untuk melaksanakan tugas Pembangunan

Berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1973, Jenderal TNI **Soeharto** telah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan dilantik pada tanggal 23 Maret 1973 di muka Sidang Umum MPR.

Dengan Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1973 telah dilimpahkan tugas dan kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan tugas pembangunan untuk jangka waktu lima tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun II dalam rangka GBHN;

b. Terus menertibkan dan mendayagunakan aparatur negara di segala bidang dan tingkatan;

c. Menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila;

d. Melaksanakan politik Luar Negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Disamping itu kepada Presiden/Mandataris MPR juga diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
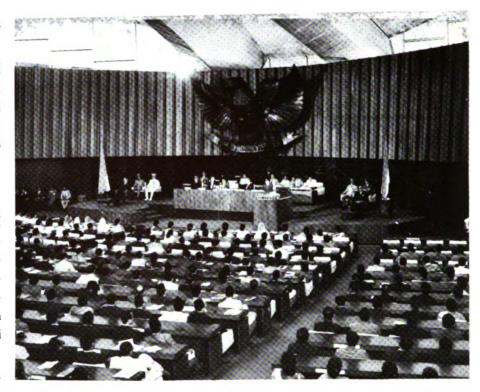
Pidato kenegaraan Presiden RI Suharto didepan DPR Tanggal 16/8-1973 (Foto: Deppen RI)

13. Untuk melaksanakan amanat MPR tersebut Presiden dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 28 Maret 1973 menetapkan:

(1) Membubarkan Kabinet Pembangunan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 183 Tahun 1968 jo Nomor 64 Tahun 1971; dan

(2) Membentuk Kabinet Pembangunan II, yang terdiri dari:

a. Tujuhbelas Menteri yang memimpin Departemen, dan

b. Lima Menteri Negara yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan di bidang tertentu.

c. Menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila;

d. Melaksanakan politik Luar Negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Disamping itu kepada Presiden/Mandataris MPR juga diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kabinet Pembangunan II dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 28 Maret 1973. Dalam susunan Kabinet Pembangunan II, **Prof. Dr. Ir. Sutami,** diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang memimpin Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya dalam persidangan tahun 1973, maka program kerja Kabinet Pembangunan II adalah sebagai berikut:

Pertama : Memelihara dan meningkatkan stabilitas politik;

Kedua : Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban;

Ketiga : Memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi;

Keempat : Menyelesaikan Repelita I dan selanjutnya menyiapkan dan melaksanakan Repelita II.

Kelima : Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Keenam : Meningkatkan penertiban dan pendayagunaan aparatur;

Ketujuh : Menyelenggarakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977.

Ketujuh program kerja itu dinamakan Sapta Krida Kabinet Pembangunan II.

Beberapa aspek dari Sapta Krida yang perlu dicatat sebagai acuan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pemantapan stabilitas politik akan dapat dicapai apabila ada kesadaran politik pada semua lapisan masyarakat, setiap orang, setiap partai politik, setiap organisasi masyarakat, setiap organisasi profesi, setiap organisasi karya, dan segenap aparatur Pemerintah. Kesadaran politik berarti rasa dan tanggung jawab bersama dalam memecahkan masalah nasional, dalam mencapai tujuan dan program bersama. Kesadaran politik besar rasa tanggung jawab yang perlu dikembangkan itu harus bermuara pada tujuan bersama, yaitu: kemajuan dan kesejahteraan bersama, yang merupakan masalah dan kepentingan bersama. Karena itu perlu dikembangkan komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban ditujukan untuk menanamkan perasaan tenteram lahir dan batin dalam hati masyarakat yang membangun, sebagai pelaksanaan dari tugas pemerintah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kesadaran hukum dan ketertiban perlu ditanamkan secara meluas dan mendalam, baik di kalangan penegak hukum sendiri, di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah maupun di kalangan masyarakat dan selanjutnya perlu diikuti dengan tindakan-tindakan yang lebih nyata agar apa yang telah menjadi kesadaran itu benar-benar terasa dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Masalah pokok dari usaha untuk meningkatkan stabilitas ekonomi tetap berkisar pada usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menempuh kebijaksanaan, seperti: pengendalian secara ketat kestabilan harga pada tingkat wajar; anggaran belanja berimbang; penggunaan keuangan negara secara hemat, efektif dan efisien; peningkatan produksi dan lain-lain.

Tujuan pemeliharaan dan peningkatan stabilitas politik, keamanan dan ekonomi adalah untuk mensukseskan pelaksanaan Repelita I serta memperkokoh landasan bagi usaha pembangunan Repelita II.

REPELITA II

14. Dalam penyelesaian Repelita I perlu diusahakan tercapainya sasaran setiap sektor, serta tercapainya sasaran-sasaran yang menyeluruh dari keseluruhan Repelita itu. Di samping itu perlu diusahakan peningkatan masalah pengendalian dan pengawasan proyek-proyek pembangunan, antara lain dengan menyempurnakan sistem pelaporan (penyusunan, penyampaian dan penilaiannya) agar dapat memberikan gambaran keadaan secara obyektif dan pada waktu yang secepat-cepatnya. Dengan demikian akan segera dapat diketahui masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Aparatur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di

seluruh bidang dan tingkatan perlu diperbaiki dan disempurnakan terus menerus, agar lebih siap dan mampu menghadapi pelaksanaan Repelita II yang pasti akan meningkat kegiatannya dan makin luas jangkauannya.

Repelita II (1974/1975 - 1978 1979) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974, yang dijadikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedua.

Repelita II harus merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Repelita I. Dalam Repelita I bangsa Indonesia telah dapat menyelamatkan diri dari kehancuran ekonomi yang menjadi sumber utama merosotnya mutu kehidupan. Repelita I telah berhasil memperkokoh landasan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Repelita II harus dapat ditangani berbagai-bagai masalah sosioekonomi yang sampai pada saat itu memang belum mungkin ditangani secara besar-besaran. Masalah-masalah besar sosial ekonomi yang digarap segera antara lain ialah: perluasan kesempatan kerja, kenaikan pendapatan/penghasilan setiap orang, dan lebih meratakan keadaan sosial.

Bapak Presiden Soeharto resmikan Waduk Sempor di Jawa Tengah pada Tahun 1978.

Sasaran yang ditentukan dalam Repelita II adalah:

Pertama : Tersedianya pangan dan sandang yang serba kecukupan, dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umumnya.

Kedua : Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain, yang diperlukan terutama untuk kepentingan rakyat banyak.

Ketiga : Keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna;

Keempat : Keadaan Kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata.

Kelima : Meluasnya kesempatan kerja.

Digitized by Google

Kawasan Pemukiman yang ideal.

Pembangunan prasarana yang meliputi: listrik, irigasi, jalan, pelabuhan laut dan udara, telekomunikasi dan alat pengangkutan ditingkatkan dan diperluas untuk menunjang gerak pembangunan guna mempercepat laju bertambahnya produksi barang dan jasa serta mendorong berkembangnya pariwisata dalam arti yang sehat dan sekaligus untuk memperkuat kesatuan Indonesia.

Dalam rangka pemerataan pembangunan maka proyek-proyek pembangunan perlu disebarkan ke daerah-daerah dengan memperhatikan keselarasan kaitan dengan perencanaan pembangunan regional.

Untuk perbaikan mutu kehidupan dan lingkungannya, masalah perumahan perlu diperhatikan dengan menyebarluaskan ketrampilan pembuatan dan penyediaan bahan-bahan perumahan yang murah, pengerahan dana-dana pembangunan dan sarana lain yang diperlukan. Pada dasarnya pembangunan perumahan harus diusahakan oleh kekuatan masyarakat sendiri. Pemerintah mengusahakan terciptanya suasana yang memungkinkan dan menggairahkan pembangunan perumahan itu serta memberikan pengarahan dan bimbingan.

Strategi pembangunan dalam Repelita II harus diarahkan pada terbukanya lapangan dan kesempatan kerja yang makin meluas.
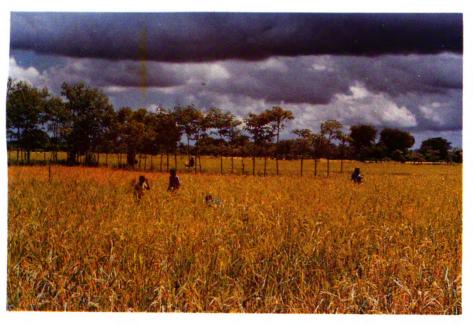
Lahan pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi.

a. Pengairan

Secara garis besar usaha yang dilakukan kecuali menyelesaikan program-program tahun terakhir Repelita I, seperti: penyelamatan tanah dan air, perbaikan dan pengamanan sungai, perbaikan dan perluasan irigasi dan pembangunan irigasi baru, maka dalam Repelita II dilakukan usaha-usaha bidang pengairan, yang mencakup:

(1) mengembangkan daerah pertanian dengan menyediakan air irigasi, mengamankan daerah pertanian yang berpenduduk padat terhadap banjir lahar, dan mengembangkan daerah rawa untuk pertanian.

Jaringan irigasi menunjang swasembada pangan.

(2) membantu memperkecil masalah penduduk dan memperluas kesempatan kerja, dan

(3) menunjang pengembangan industri dengan pembangunan proyek-proyek serbaguna dan menyediakan air untuk industri.

Kebijaksanaan pokok yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut ialah:

Pertama: Melanjutkan pekerjaan-pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan jaringan-jaringan yang ada, sehingga semua jaringan tersebut selesai dikerjakan dalam Repelita II.

Kedua: Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan jaringan-jaringan irigasi baru dengan mengutamakan jaringan irigasi sederhana yang meliputi daerah seluas ± 470.000 hektar dan pengembangan daerah rawa seluas ± 80.000 hektar; dan dipusatkan di daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah pusat konsumsi pangan, daerah transmigrasi dan daerah padat penduduk.

Ketiga: Mengintensifkan pekerjaan pengamanan daerah produksi pertanian terhadap bencana alam, seperti banjir, akibat letusan gunung berapi dan sebagainya.

Keempat: Mengintensifkan perencanaan pembangunan sumber-sumber air dengan perencanaan pengembangan daerah pengaliran sungai yang menyeluruh untuk mendapatkan pola rencana antara lain guna menunjang industri dan pembangkitan tenaga listrik.

Kelima: Mengintensifkan usaha penelitian dan penyelidikan dalam masalah teknik pengairan.

Program untuk mencapai tujuan di bidang Pengairan ialah:

(1) Program Perbaikan dan Penyempurnaan irigasi.

(2) Program Pembangunan Jaringan Irigasi Baru, antara lain meliputi pengembangan irigasi sederhana seluas ± 470.000 hektar dan dibangun di 17 Propinsi.

(3) Program Pengaturan serta pengembangan Wilayah Sungai dan Daerah Rawa, yang meliputi antara lain: Wilayah Sungai Citanduy, Pemali Comal, Bengawan Solo, Kali Brantas dan beberapa wilayah sungai lainnya untuk pengamanan daerah produksi pangan terhadap banjir. Perluasan areal persawahan pasang surut di Kalimantan.

(4) Program Penelitian, Survai, Penyelidikan dan Perancangan, Pengembangan Sumber-sumber air, sebagai persiapan data yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan pengairan dalam Repelita yang akan datang.

b. Bina Marga

Pembangunan prasarana jalan/jembatan mempunyai dampak yang sangat menentukan dalam sektor perhubungan untuk memperlancar arus lalu lintas angkutan barang dan mobilitas manusia agar mampu menunjang usaha peningkatan pembangunan di sektor lain serta ikut membina kesatuan bangsa dan Negara dalam rangka Wawasan Nusantara.

Pembangunan jalan di daerah Jambi.

Peningkatan jalan di daerah pemukiman.

Pembangunan di bidang jalan kecuali menyelesaikan pembangunan program Repelita I tahun terakhir, maka dalam Repelita II dilakukan secara bertahap melalui program-program sebagai berikut:

(1) Rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan jalan kepada keadaan sebelum terjadinya kerusakan, antara lain meliputi pekerjaan perbaikan sebagian lapis dasar jalan dan lapis penutup jalan.

(2) Peningkatan kapasitas/mutu jalan yang disesuaikan dengan lalu lintas yang sudah bertambah, meliputi pekerjaan: memperkuat lapis dasar jalan, menyempurnakan lapis penutup jalan, memperlebar dan memperbaiki arah *(alligment)* jalan dimana perlu.

(3) Pembangunan jalan dan jembatan baru yang didahului oleh survai, persiapan dan penjajagan cara pembiayaan. Termasuk dalam kegiatan ini rekonstruksi dan pembangunan jalan/jembatan: Sijunjung - Lubuklinggau, Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi), Balikpapan - Samarinda, Amurang - Kotamobagu - Duloduo, Telukbetung - Bakauheni, Padang - Medan, Surabaya - Malang, Jakarta - Merak, Denpasar - Gilimanuk, Pontianak - Sintang, dan lain-lain.

(4) Pemeliharaan jalan untuk mempertahankan keadaan jalan dan menghindarkan kerusakan jalan, yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan program rehabilitasi dan peningkatan.

Mulai April 1977 kepada Direktorat Jenderal Bina Marga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1977 diserahi tugas untuk melakukan pembangunan guna mempersiapkan lahan pemukiman transmigrasi dalam rangka menunjang program transmigrasi dan pembentukan struktur pengembangan wilayah serta daya dukung lingkungan hidupnya.

c. Tenaga Listrik

Sebagai faktor produksi, tersedianya tenaga listrik yang cukup, menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor: industri, pertanian, pertambangan, pendidikan,

kesehatan dan lain-lain, yang kesemuanya merupakan sektor yang sangat vital bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam Repelita II dilakukan kegiatan pembangunan Pusat-pusat Listrik untuk pembangkitan tenaga listrik sejumlah 1.105 Megawatt dan terdiri dari:

(1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): Batang Agam (Sumatera Barat), Tes (Bengkulu), Tonsea Lama (Sulawesi Utara), Karangkates Unit III (Jawa Timur), Wlingi (Jawa Timur), Garung (Jawa Tengah), Juanda/Jatiluhur Unit VI (Jawa Barat).

(2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU): Muara Karang (Jakarta), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) dan Ujung Pandang (Sulawesi Selatan).

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG): Jakarta Raya, Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), Semarang (Jawa Tengah), Cilacap (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur).

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP): Dieng (Jawa Tengah) dan Kamojang (Jawa Barat).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Priok.

(5) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah-daerah terpencil.

Di samping itu dikerjakan pula pembangunan jaringan transmisi sepanjang 3.700 kilometer, dengan bangunan pelengkapnya termasuk gardu induk yang bersangkutan, jaringan distribusi untuk tegangan primer sepanjang 8.500 kilometer dan sekunder sepanjang 11.020 kilometer serta gardu distribusi sebanyak 5.640 buah.

Dalam Repelita II dimulai kegiatan penelitian untuk pembangunan beberapa Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam Repelita-Repelita berikutnya, antara lain: Sawangan (Sulawesi Utara), Sentani (Irian Jaya), Ayung (Bali), Cimanuk (Jawa Barat), Serayu (Jawa Tengah), Maninjau (Sumatera Barat), Sadang (Sulawesi Selatan), Larona (Sulawesi Tenggara) dan Jratunseluna (Jawa Tengah).

d. Cipta Karya

Dalam Repelita II kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan perumahan, ialah:

(1) Mengadakan studi pendahuluan untuk menentukan lokasi dan besarnya pembangunan sesuai rencana kota dan diutamakan di kota-kota besar dengan pertambahan penduduk yang pesat seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Ujung Pandang, Banjarmasin, dan lain-lain.

Jaringan Kelistrikan Wlingi — Jawa Timur.

(2) Memberikan bantuan teknis untuk mengadakan persiapan dan menciptakan sistem pembiayaan jangka panjang dalam rangka program perbaikan kampung. Kegiatannya pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

(3) Membantu dalam penyiapan tanah matang *(site and services)* berupa prasarana luarnya yang menghubungkan tanah yang digarap dengan bagian lain yang sudah berkembang, misalnya jalan masuk, saluran air minum, saluran listrik. Untuk pengisian

*Program Pemugaran Perumahan Desa di daerah Magelang - **Jawa Tengah**.*

tanah matang yang tersedia seluruhnya dalam Repelita II dapat disediakan untuk pembangunan rumah sebanyak 225.000 unit rumah sederhana.

(4) Mengenai pembangunan rumah sederhana itu dalam Pelita II dirintis pembangunan rumah sederhana sebagai proyek percobaan sebanyak 10.000 unit rumah sederhana di Jakarta dan yang diikuti selanjutnya di kota-kota lainnya untuk merangsang kegiatan yang serupa oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

(5) Memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan untuk pembangunan perumahan desa dan pemugaran desa. Untuk keperluan itu di tugaskan kepada Pusat-pusat Informasi Teknik Pembangunan atau yang dikenal sebagai *Building Information Centre (BIC)* yang telah dibentuk selama Repelita I di kota-kota : Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar (Ujung Pandang) dan Banjarmasin.

Program Penyediaan Air Minum yang dilakukan dalam Repelita II meliputi kegiatan-kegiatan :

(1) Rehabilitasi, ekstensifikasi dan pembangunan baru untuk daerah perkotaan, yaitu untuk : 2 (dua) kota metropolitan (4.000 1/detik), 3 (tiga) kota besar (1.000 1/detik), 60 kota sedang (6.000 1/detik) dan 40 kota kecil (1.000 1/detik).

(2) Perbaikan dan penyediaan air minum untuk daerah pedesaan, terutama daerah yang langka akan sumber air bersih.

Dalam hal teknik penyehatan dan/atau assainering kegiatan yang dilakukan berupa :

(1) Melanjutkan proyek-proyek percontohan di tempat-tempat yang kondisinya sangat parah.

(2) Mengadakan penelitian mengenai cara pembuangan dan pengolahan air buangan dan persampahan.

(3) Melanjutkan survai dan studi kelayakan untuk memperoleh data informasi mengenai assainering.

Pembinaan perkembangan/pengembangan tata kota dalam Repelita II dilakukan untuk:

(1) Adanya keseimbangan antara kota-kota dengan kawasan ekonomi yang dilayaninya, serta antara kota satu dengan lainnya, di dalam satu pola kebijaksanaan nasional pengembangan perkotaan.

(2) Mendorong perwujudan dan perkembangan jaringan pusat pertumbuhan baru, terutama dalam usaha meningkatkan peranan kota menengah dan kecil untuk menampung dan mengarahkan arus urbanisasi, disertai kebijaksanaan yang mendorong perkembangan industri beserta prasarana yang diperlukan dan yang memperluas lapangan kerja di daerah.

(3) Meningkatkan mutu dan jumlah fasilitas pelayanan umum kota serta kemampuan administrasi dan pengelolaan kota sesuai dengan fungsi dan peranannya.

(4) Menciptakan iklim yang mengairahkan kegiatan ekonomi dengan perbaikan kondisi pemukiman, penentuan lokasi kegiatan industri yang tepat.

Dalam usaha penertiban dalam pelaksanaan pembangunan terutama Gedung-gedung Negara, maka untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan ada 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

Pertama: Aspek pembiayaan/penyediaan dana, yang titik beratnya terletak pada prosedur dan tata administrasi yang tertib sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku *(rechmatigheid)*.

Kedua: Aspek teknik teknologis, teknik konstruksi dan administrasi teknik pembangunan *(doelmatigheid* dan *planmatigheid)*, yang titik beratnya terletak pada :

(1) Pengendalian desain *(design control)*, yaitu pengendalian pada tahap perencanaan untuk menghasilkan Dokumen Pelelangan/ Dokumen Pelaksanaan, yang mencakup semua aspek dan ketentuan yang harus dipedomani sehingga dalam pelaksanaan dan penggunaan bangunannya rasional dan efisien;

(2) Pengendalian mutu *(quality control)*, yaitu pengendalian pada tahap pelaksanaan, sehingga memenuhi rencana, uraian dan syarat pekerjaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen pelaksanaan;

(3) Penyelesaian pengendalian pelaksanaan itu supaya menepati "waktu pembangunan yang paling ekonomis" *(the most economical construction time)* sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan tersebut di atas sejak tahun 1971 telah diterbitkan buku Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung-gedung Negara sebagai tindak usaha penertiban dan penyeragaman prosedur dan tata cara pembangunan. Dalam pedoman tersebut antara lain diatur dan ditetapkan tata cara dan pentahapan mengenai : program perancangan pertanahan, perencanaan pelelangan, pelaksanaan dan pengelolaan. Juga diatur dan ditetapkan mengenai wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan gedung Negara sebagai berikut :

(1) Departemen/Lembaga Negara yang bersangkutan (yang mendapat wewenang berdasarkan Surat Edaran Perdana Menteri nomor 2/RI/1965, jo Keputusan Perdana Menteri nomor 68/PM/1962, dan Keputusan Menteri Pertama nomor 13/MP/1962, menyelenggarakan :

a. Perancangan dan Penyusunan Program dan Rencana Anggaran;

b. Penentuan Lokasi, penyediaan tanah pengurusan tanah dan pengurusan hak tanah;

c. Penyusunan persyaratan perencanaan, pemilihan Perencana dan penugasan perencanaan;

d. Pengesahan karya perencanaan *(desain)*, dan dokumen pelelangan/pelaksanaan;

e. Persiapan dan pelaksanaan pelelangan pekerjaan, serta penanda tanganan Kontrak Perjanjian Pekerjaan;

f. Pengendalian administrasi keuangan;

g. Pengesahan laporan, berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran;

h. Penggunaan dan pemeliharaannya.

(2) Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Tata Bangunan, Jawatan Gedung-gedung Negeri Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (untuk daerah yang tidak ada JGN-nya), menyelenggarakan :

a. Membantu menentukan lokasi, membantu pengurusan hak atas tanah (oleh JGN Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum Propinsi).

b. Penghapusan bangunan Negara, jika ada pembongkaran gedung (oleh Direktorat Tata Bangunan);

c. Membantu penyusunan persyaratan dan pemulihan perencanaan (oleh JGN Daerah atau JGN Pekerjaan Umum Propinsi);

d. Pengesahan karya perencanaan (oleh JGN Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum Propinsi);

e. Pengesahan Dokumen Pelelangan dan Pelaksanaan;

f. Penyaringan Kontraktor Pelaksana;

g. Pembukaan dan penilaian penawaran, pengusulan pelulusan pekerjaan;

h. Pengendalian administrasi teknis;

i. Pengesahan laporan, berita acara teknis;

j. Pendaftaran (registrasi), penentuan harga sewa perumahan negeri.

(3) Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) setempat, menyelenggarakan : pembayaran angsuran (termijn);

(4) Perencana (Konsultan) yang ditunjuk, menyelenggarakan :

a. Pengumpulan data;

b. Penyusunan konsep rencana;

c. Penyusunan dokumen pelelangan dan pelaksanaan;

d. Penjelasan Pekerjaan;

e. Pembukaan dan penilaian penawaran;

f. Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan;

g. Penyelenggaraan administrasi pengawasan;

h. Penyesuaian perencana.

(5) Kontraktor Pelaksana, yang ditugaskan menyelenggarakan :

a. Persiapan dan perhitungan penawaran;

b. Penanda tanganan kontrak perjanjian kerja;

c. Pelaksanaan Pekerjaan.

Mengingat bahwa masalah pembinaan dan pengembangan perumahan menyangkut berbagai segi yang memerlukan langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah yang menyeluruh secara terus-menerus dan

meliputi jangka waktu yang panjang, maka perlu ada suatu lembaga atau badan yang dapat memikirkan dan merumuskan kebijaksanaan untuk pengendalian, pembinaan dan pengembangan pembangunan perumahan itu. Untuk itu pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1974 tanggal 12 Juli 1974 membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional, yang mempuyai fungsi membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan perumahan, serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan oleh Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen dan Instalasi-instalasi maupun Badan-badan Khusus lainnya yang bertugas untuk bidang itu.

Keanggotaan Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional, yang diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, terdiri dari: Menteri Sosial (merangkap Wakil Ketua), Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Menteri Kesehatan, Gubernur Bank Central dan Direktur Jenderal Cipta Karya (merangkap Sekretaris Eksekutif).

Untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974 (Lembaran Negara 1974 nomor 37) didirikan suatu Perusahaan Umum dengan nama Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), sebagai suatu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan kegiatan produktif di bidang perumahan rakyat dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Untuk menunjang pembangunan perumahan disiapkan sistem pembiayaan dengan Bank Hipotik Perumahan, yang ditugaskan untuk
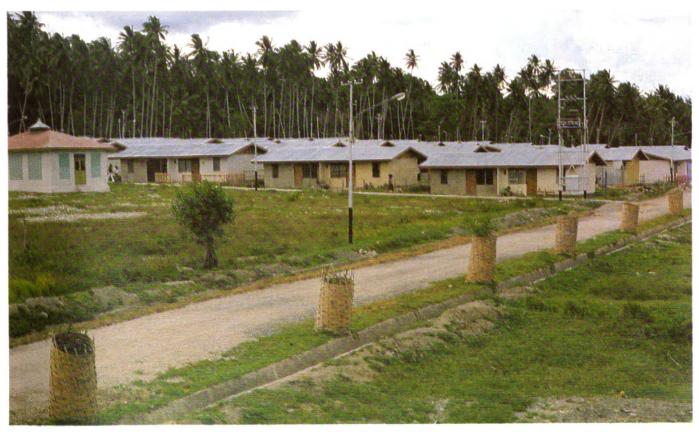
Lokasi Perumahan yang dibangun Perum Perumnas di Palu - Sulawesi Tengah.

PT. PRAMBANAN DWIPAKA

GENERAL CONTRACTOR

Office : Jl. Pejanggik No. 48 Cakranegara Telp. (0364) 22867 - 23302
Head Office : Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 26 Surabaya Telp. (031) 66154 - 67340
Representatif : Jl. Sesetan No. 198 A Denpasar Telp. (0316) 23658 - 25697
Jl. Pangeran Natadireja No. 102 Bengkulu Telp. (0736) 21874
Cabang : Jl. Da Colmera T - 110
Telp. (0390) 22081
Fac. 22082 - Telex 35584 Indra Ia
Dili - Timor Timur.

GENERAL CONTRACTOR

PT. WATU BESI RAYA

PUSAT : JL. JM. MARQUES 11 TELP. 21379 TELEX 35584 INDRA IA DILI TIMTIM - CAB : JL. TANAH ABANG III/6 TELP. 356512 TLX. 46043 BAWOK IA JAKARTA 10660, FAX : 356517

Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45
3 Desember 1945 – 3 Desember 1990

C.V. AKAM

KONTRAKTOR • LEVERANSIR • PERDAGANGAN UMUM

JL. JACINTO CANDIDO No. 4 DILI, TIM-TIM. ☎ : (21219) - 0390
JL. Akadiruhun - 19 - 21 Dili. Tim-Tim. Telp : 21046 - 0390
Fac : 21044 - 0390

Direksi beserta segenap Karyawan
Mengucapkan
Selamat atas masa Bakti Dep. P.U. ke 45
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990

PT. EDI MULYA CORPORATION

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

KANTOR CABANG : Jl. Belarmino Lobo Telp. 21572 P.O. Box 20, Dilli, Timor Timur

Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45
3 Desember 1945 – 3 Desember 1990

Presiden Soeharto meresmikan Proyek Nusa Dua - Bali.

mengelola pinjaman hipotik untuk perumahan rakyat. Dengan surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974 Bank Tabungan Negara (BTN) ditunjuk sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat. Di samping itu disiapkan peraturan dan pengaturan yang efektif mengenai kriteria untuk seleksi penghunian dan pemilikan rumah.

Organisasi dan Tata Kerja pada Repelita II

15. Dalam rangka program penertiban dan pendayagunaan aparatur Negara, Pemerintah melalui Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1974 dan nomor 45 Tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974 dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet nomor 15/U/Kep/8/1966, mengadakan penertiban Organisasi Departemen-departemen dengan menegaskan dan menyempurnakan kedudukan, tugas pokok fungsi dan susunan organisasinya sesuai dengan perkembangan keadaan pemerintahan Negara.

Menurut ketentuan dalam keputusan itu kedudukan suatu Departemen dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai bagian dari pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Departemen mempunyai fungsi-fungsi:

(1) kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan, kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pemberian izin;

(2) pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;

(3) pelaksanaan tugas pokok;

(4) pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok.

Dalam lampiran 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 antara lain ditetapkan bahwa susunan Organisasi Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik terdiri dari:

(1) Menteri;
(2) Sekretariat Jenderal;
(3) Inspektorat Jenderal;
(4) Direktorat Jenderal Pengairan;
(5) Direktorat Jenderal Bina Marga;
(6) Direktorat Jenderal Cipta Karya
(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
(8) Pusat-pusat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tersebut di atas dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 145/KPTS/1975 tanggal 2 Juni 1975 ditetapkan Susunan dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang baru dan mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 3/PRT/1968.

Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 145/KPTS/1975 tersebut Susunan Organisasi ditetapkan menjadi sebagai berikut:

(1) Menteri, sebagai unsur pimpinan,
(2) Sekretariat Jenderal, sebagai unsur pembantu Pimpinan, yang membawahi:
  a. Biro Perencanaan,
  b. Biro Kepegawaian,
  c. Biro Keuangan,
  d. Biro Perlengkapan,
  e. Biro Hukum,
  f. Biro Bina Sarana Perusahaan,
  g. Biro Umum.
(3) Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan, yang terdiri dari:
  a. Sekretariat Inspektorat Jenderal,
  b. Inspektur Administrasi,
  c. Inspektur Pengairan,
  d. Inspektur Bina Marga,
  e. Inspektur Cipta Karya,
  f. Inspektur Tenaga Listrik dan Gas.
(4) Direktorat Jenderal Pengairan, sebagai unsur pelaksana utama di bidang pengairan yang meliputi: sungai, rawa, irigasi, dan sumber-sumber air yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah, dan terdiri dari:
  a. Sekretariat Direktorat Jenderal.
  b. Direktorat Bina Program Pengairan.
  c. Direktorat Sungai,
  d. Direktorat Rawa,
  e. Direktorat Irigasi,
  f. Direktorat Peralatan Pengairan,
  g. Direktorat Penyelidikan Masalah Air.
(5) Direktorat Jenderal Bina Marga, sebagai unsur pelaksana utama di bidang jalan dan jembatan yang meliputi: peningkatan dan pembinaan jaringan jalan umum serta bangunan pelengkapnya, dan terdiri dari:
  a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
  b. Direktorat Bina Program Jalan,
  c. Direktorat Pembangunan Jalan,
  d. Direktorat Pemeliharaan Jalan,
  e. Direktorat Peralatan Jalan,
  f. Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan.

Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 299/KPTS/1975 tanggal 7 Nopember 1975 dibentuk Kantor Wilayah Peningkatan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga *(Road Betterment Regional Office)* di Medan, untuk Wilayah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat); Palembang (untuk Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung), Bandung (untuk Jawa Barat, dan Jawa Tengah) dan Surabaya (untuk Jawa Timur, Bali dan sebagian Jawa Tengah).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1977, dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 112/KPTS/1977 tanggal 30 April 1977 ditetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi dan ditempatkan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

(6) Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai unsur pelaksana utama di bidang kecipta-karyaan yang meliputi: perumahan, tata bangunan, teknik penyehatan, tata kota dan tata daerah, dan terdiri dari:
  a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
  b. Direktorat Perumahan,
  c. Direktorat Tata Bangunan,
  d. Direktorat Teknik Penyehatan.
  e. Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah.
  f. Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
(7) Perusahaan Umum Listrik Negara, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 sebagai unsur pelaksana pengusahaan di bidang kelistrikan (dalam keputusan ini Direktorat Jenderal Tenaga Listrik ditiadakan).
(8) Pusat Penelitian dan Pengembangan, sebagai sumber pelayan-

an dan penunjang di bidang penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha,
b. Bidang Perencanaan,
c. Bidang Tata Laksana,
d. Bidang Teknologi,
e. Bidang Informasi Ilmiah.

(dalam keputusan ini belum dibentuk sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 Lampiran 10).

(9) Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, sebagai unsur pelayanan di bidang pengembangan pegawai dan tenaga kerja yang terdiri dari:

a. Bagian Pendidikan,
b. Bagian Penelitian,
c. Bagian Keuangan,
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.
e. Bidang Diklat Ketatalaksanaan,
f. Bidang Diklat Pengairan,
g. Bidang Diklat Bina Marga,
h. Bidang Diklat Cipta Karya,
i. Diklat Wilayah I Medan,
j. Diklat Wilayah II Bandung,
k. Diklat Wilayah III Yogyakarta,
l. Diklat Wilayah IV Surabaya,
m. Diklat Wilayah V Ujung Pandang,
n. Unit-unit Penataran.

Pengujian mutu bahan bangunan.

(10) Pusat Pengolahan Data dan Statistik, yang terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha,
b. Bidang Pengolahan Data,
c. Bidang Statistik,
d. Bidang Pemetaan.

(11) Pusat Pembinaan Peralatan, sebagai unsur pelayanan dan penunjang di bidang pembinaan, penyediaan peralatan dan perbekalan, yang terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan,
b. Bagian Keuangan,
c. Bagian Kepegawaian,
d. Bagian Umum,
e. Bidang Perbekalan,
f. Bidang Pemeriksaan dan Pemeliharaan,
g. Bidang Gugusan Peralatan,
h. Bidang Bengkel Pusat (I),
i. Bidang Bengkel Pusat (II),
j. Depot-depot.

(12) Jawatan Gedung-gedung negara Daerah, yang ada di beberapa Kota Besar dan sebagai organisasi vertikal di bawah Direktorat Tata Bangunan.

(13) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi sebagai unsur pelaksana di daerah dan merupakan Unit Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat I/ Propinsi.

Dengan terbentuknya organisasi baru berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 145/KPTS/1975 maka organisasi Badan Pertimbangan dan Lembaga non struktural lainnya, yang tidak lagi disebut dalam penetapan terakhir dinyatakan dibubarkan.

Peraturan Perundang-undangan

16. Di bidang pengairan telah diundangkan Undang-undang nomor 11 Tahun 1974 (LN 1974 nomor 65 dan TLN nomor 3046) yang merupakan landasan pokok untuk pengelolaan bidang pengairan secara nasional. Dalam undang-undang tersebut telah dibakukan beberapa istilah di bidang pengairan antara lain:

(1) "Air" menurut undang-undang itu ialah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk air di laut;

(2) "Sumber Air" ialah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan bumi;

(3) "Pengairan" ialah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;

(4) "Tata Pengaturan Air" ialah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti: pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan. Pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat;

(5) "Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;

(6) "Tata Air" ialah susunan dan letak air;

(7) "Pembangunan Pengairan" ialah segala usaha pengembangan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan kegiatan teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan kehidupan rakyat.

Undang-undang pengairan tersebut mengatur: hak penguasaan dan wewenang, perencanaan dan perencanaan teknik, pembinaan, pengusahaan, eksploitasi dan pemeliharaan, perlindungan, pembiayaan , ketentuan pidana dan lain-lain. Undang-undang tersebut masih perlu diikuti peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Di bidang keciptakaryaan khususnya bidang rumah-rumah Negeri, sebagai tindak lanjut Undang-undang nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri, telah diterbitkan pelbagai peraturan/keputusan sebagai berikut:

(1) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (LN 1974 nomor 19);

(2) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penetapan Status Rumah Negeri;

(3) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

(4) Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan nomor 211/KPTS/1974 - Kep. 1189/MK/IV/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara (sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut);

(5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 74/KPTS/1974 tanggal 4 April 1974 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Pelaksana Wewenang untuk merubah/menetapkan Status Rumah Negeri;

(6) Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan nomor 1556/D.IV/VII/1977 - B24.I/DJA/III.O/17/1977 tanggal 13 Juli 1977 sebagai perubahan/penyempurnaan pelaksanaan ketentuan mengenai standardisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Ketua Bappenas nomor Kep. 322 MK/I/5/1970 - 127/KPTS/1970 dan Kep. 071/Ket/5/1970 tanggal 23 Mei 1970.

KABINET PEMBANGUNAN III

17. Pemilihan Umum, yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977, telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pemilihan itu telah terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 5 (lima) tahun 1978 - 1983. Dalam dimensinya sejarah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang itu merupakan kurun waktu yang amat penting bagi perjoangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis Permusyawaran Rakyat dengan ketetapan MPR nomor VIII/MPR/1978 menugaskan kepada Presiden/Mendataris MPR untuk dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;

a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Repelita III dalam rangka Garis-Garis Besar Haluan Negara;

b. Meneruskan menertibkan dan mendayagunakan aparatur negara di segala bidang dan tingkatan;

c. Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila;

d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan Nasional.

Di samping itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umumnya bulan Maret 1978 telah mengambil beberapa ketetapan penting dan diantaranya ialah:

(1) Ketetapan MPR nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

(2) Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

(3) Ketetapan MPR nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR.

Untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR itu Presiden dengan keputusannya nomor 59/M Tahun 1978 tanggal 29 Maret 1978 membentuk Kabinet Pembangunan III dengan: 3 (tiga) Menteri Koordinator, yang masing-masing mengkoordinir suatu bidang; 4 (empat) Menteri Muda dengan tugas tertentu dan 17 (tujuh belas) Menteri yang memimpin Departemen. (Catatan: Kabinet Pembangunan II dinyatakan berhenti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54/M Tahun 1978).

Dalam Kabinet Pembangunan III yang diangkat dan ditetapkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum ialah **Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa.** Departemen Pekerjaan Umum dalam Kabinet ini tidak lagi menangani bidang tenaga listrik. Bidang ini selanjutnya merupakan bagian dari bidang tugas Departemen Pertambangan dan Energi.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70/M Tahun 1978 tanggal 20 April 1978, susunan Kabinet Pembangunan III ditambah dengan 6 (enam) orang Menteri Muda yang diperbantukan masing-masing kepada seorang Menteri, diantaranya ialah Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat yang diperbantukan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

DR. IR. POERNOMOSIDI HADJISAROSA

Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa lahir pada tanggal 7 September 1934 di Klaten, Jawa Tengah, menjabat Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1978 sampai dengan 1983. Lulus SMA di Surakarta 1953, ITB Jurusan mesin pada tahun 1956, melanjutkan pendidikan ke luar negeri di Fakultat Fur Bergbau und Huettenwesen der Bergakademie Clautsthal Jerman Barat, tahun 1960 meraih diploma Ingenieur dan pada tahun 1963 lulus Doctor Ingenieur.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, **Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa,** mengawali kerjanya di pabrik baja "Maxmillion Shutte" di Jerman Barat. Sedang di Indonesia dari tahun 1963 sampai dengan 1965 sebagai Ahli Teknik Bagian Perkembangan Industri Direktorat Perindustrian Dasar Berat Departemen Perindustrian dan Pertambangan. Disamping itu juga menjabat sebagai Penasehat Ilmiah Menteri/Panglima AURI.

Jabatan yang didudukinya dari tahun 1965 sampai dengan 1978 sebelum menjabat Menteri Pekerjaan Umum tahun 1978 adalah sebagai berikut :

- Sekretaris Menteri Negeri Urusan Penilaian Konstruksi Kompartemen PUT merangkap Kepala Staf Komando Pembangunan Proyek Conefo.
- Assisten Urusan **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** Menteri PUT.
- Kepala Staf Komando Proyek Pengairan Jatiluhur merangkap Kepala Biro Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Departemen Pe-

kerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

- Deputy Ketua Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Regional dan Daerah.
- Direktur Jenderal Bina Marga.

Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa mempunyai 2 orang putra dan seorang istri **Ny. BRA Dlureg Suryo Mentaram.**
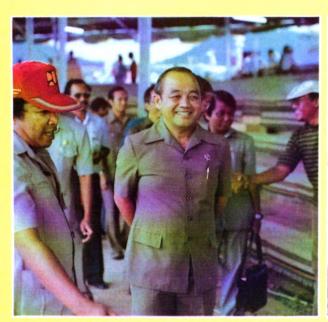
Kejujuran, berprakarsa, tekun, cekatan, teliti dan rapih yang dibarengi senyum merupakan pribadi yang terus ditanamkan oleh Purnomosidi.

Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa

Drs. Cosmas Batubara

Tugas Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat ialah: membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program-program dan kebijaksanaan di bidang Perumahan Rakyat. Untuk jabatan ini diangkat **Drs. Cosmas Batubara.**

Program umum Kabinet ini diberi nama Saptakrida Kabinet Pembangunan III, yang terdiri dari:

Pertama: Terciptanya keadaan dan suasana yang semakin menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat dengan semakin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya;

Kedua: Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;

Ketiga: Terpeliharanya stabilitas nasional yang semakin mantap;

Keempat: Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa;

Kelima: Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam.

Keenam: Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila;

Ketujuh: makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Senyum dua menteri (Ir. Poernomosidi dan Ir. Affandi) memberikan kecerahan dan harapan bagi masyarakat.
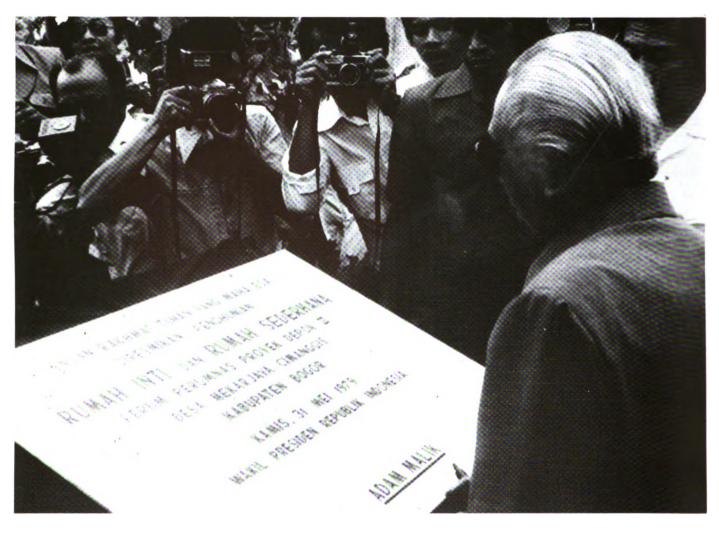
Wakil Presiden Adam Malik meresmikan Perumnas Depok II, 31 Mei 1979.

Dalam GBHN, yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978, antara lain telah digariskan, bahwa pelaksanaan pembangunan dalam Repelita III harus tetap didasarkan atas kebijaksanaan yang berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sebagai salah satu unsur penting dalam Trilogi Pembangunan tersebut di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai langkah dan kegiatan, yang tercakup dalam 8 (delapan) jalur pemerataan, yaitu:

(1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;

(2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;

(3) Pemerataan pembagian pendapatan;

(4) Pemerataan kesempatan kerja;

(5) Pemerataan kesempatan berusaha;

(6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;

(7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;

(8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Kebijaksanaan umum yang menyeluruh dan terpadu seperti tertuangkan dalam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan ditetapkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas bagi pemerintah dan segenap aparaturnya secara keseluruhan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Saptakrida Kabinet Pembangunan III.

Kunjungan Menteri PU dan Menmud UPR ke proyek-proyek Perumahan yang dibangun Perum Perumnas.

REPELITA III.

18. Repelita III disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1979 tanggal 11 Maret 1979 dan meliputi masa pembangunan 1979/1980 — 1983/1984. Sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Repelita II, maka Repelita III memuat perluasan kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam Repelita III juga diberikan perhatian secara penuh terhadap bidang atau masalah yang dalam Repelita II belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan, fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kunjungan Kerja Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat — Cosmas Batubara di proyek Perumahan

Tujuan Repelita III ialah untuk:

(1) Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang merata dan adil, serta

(2) Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dalam pelaksanaan Repelita III dilanjutkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan kepada trilogi pembangunan dan yang di-

jabarkan lebih lanjut dalam 8 (delapan) jalur pemerataan seperti telah diutarakan di muka. Prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi dalam rangka menciptakan keseimbangan struktur ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial, budaya dan lain-lain ditingkatkan sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan ekonomi.

Kebijaksanaan umum yang ditempuh Departemen Pekerjaan Umum dalam Repelita III, ialah:

(1) Melanjutkan kebijaksanaan perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan proyek-proyek yang telah ditempuh dalam Repelita II dan meningkatkannya dalam Repelita III;

(2) Melaksanakan persiapan gagasan, rencana dan program Departemen Pekerjaan Umum secara menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka Pembangunan Nasional;

(3) Pembangunan prasarana fisik diarahkan untuk lebih meningkatkan keseimbangan pengembangan wilayah;

(4) Memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan wilayah melalui optimasi penyusunan rencana dan program;

(5) Memperhatikan kebutuhan dan tantangan baru serta aspirasi yang timbul berkembang sebagai akibat proses pembangunan.

Pengairan

Berdasarkan kebijaksanaan umum Repelita III, maka kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pengairan ialah melanjutkan pelaksanaan program Repelita II dengan memberi penekanan kepada: pemilikan dan penguasaan air dan sumber-sumbernya; pemanfaatan air dengan dukungan perencanaan yang mantap; pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air untuk mencapai hasilguna yang semaksimal mungkin berdasarkan prinsip kerjasama dengan bimbingan pemerintah; dan meningkatkan kerjasama antar lembaga yang bersangkutan dalam pengamanan fasilitas irigasi dan daerah aliran sungai sebagai tindakan untuk mencegah kemerosotannya.

Tujuan pembangunan pengairan ialah menunjang usaha peningkatan produksi pangan melalui penyediaan air irigasi yang cukup serta pengamanan areal produksi dari kerusakan yang diakibatkan oleh air seperti banjir; menunjang pembukaan dan pemanfaatan areal baru dan mengembangkan, mengatur serta menjaga kelestarian sumber-sumber air. Di samping itu juga untuk menunjang penyediaan air untuk kesejahteraan masyarakat antara lain untuk bahan baku air minum, untuk penggelontoran dan untuk menunjang pembangunan industri dan kelistrikan.

Untuk mencapai tujuan itu, maka program pengairan dalam Repelita III, ialah:

(1) Program Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi seluas 536 ribu hektar;

(2) Program Pembangunan Jaringan Irigasi Baru, seluas lebih kurang 700.000 hektar;

(3) Program Pengembangan Daerah Rawa.

Proyek-proyek yang termasuk dalam program perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi ialah: Prosida, Prosijat, Way Seputih/Way Sekampung, Serayu, Gambarsari Pasanggrahan, Delta Brantas, Simalungun, Tabo-tabo, Pengembangan Lombok Selatan, Mbay, Lambor, Lalung. Semarang Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Proyek-proyek untuk pembangunan jaringan irigasi baru yang meliputi sasaran areal seluas 700.000 hektar terdiri dari:

a. Pembangunan irigasi sederhana yang terutama ditujukan untuk perluasan areal sawah dengan irigasi secara cepat dan dengan biaya yang relatif murah, serta dalam waktu singkat dapat menunjang usaha peningkatan produksi pangan dan konsolidasi pemantapan daerah transmigrasi serta pemukiman penduduk setempat.

b. Pengembangan irigasi sedang kecil dengan memprioritaskan pembangunan irigasi yang sifatnya cepat menghasilkan dan mempercepat usaha konsolidasi daerah-
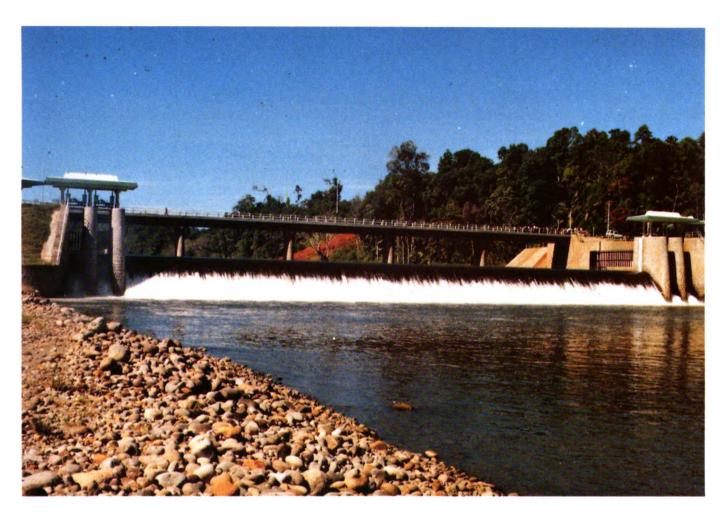
Bendungan Muko-Muko, Bengkulu.

daerah transmigrasi serta pemukiman lainnya. Tersebar di propinsi-propinsi.

c. Pengembangan irigasi khusus, yang pada umumnya terdiri dari pembangunan prasarana irigasi baru yang besar, sehingga diperlukan pengamanan secara khusus. Ditujukan untuk menunjang peningkatan produksi pangan dan dapat merupakan pusat produksi baru bagi daerah/propinsi yang bersangkutan. Proyek-proyek ini antara lain adalah irigasi: Krueng Jrue, Krueng Baro, Jambu Aye/Langkahan, Batang Gadis, Batang Tonggar, Panti Rao, Air Beliti, Belitang, Way Jepara, Way Carup, Way Umpu, Way Pangubuhan, Way Rarem/Abing, Teluk Lada, Ciletuh, Cikunten, Cidurian, Padawaras, Pengembangan Wilayah Kedu Selatan, Lodoyo, Binuang, Luwu, Pamukulu, Kelara, Bali, Riam Kanan, Wawotobi, Kali Progo, Dumoga, Gumbasa, Sungai Dareh dan Sitiung.

d. Usaha-usaha pengembangan dan pemanfaatan air tanah terutama di daerah-daerah di mana pembangunan irigasi konvensional tidak dimungkinkan.

Dalam Repelita III, Program Pengembangan Daerah Rawa dimaksudkan untuk membuka areal irigasi pasang surut seluas 400.000 hektar dan reklamasi rawa seluas 135.000 hektar dengan jumlah luas areal seluruhnya menjadi kira-kira 535.000 hektar. Proyek-proyek yang dilakukan dalam rangka program ini meliputi pengembangan pengairan pasang surut (di Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan/Tengah); dan reklamasi daerah rawa (di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).

Di samping ketiga program utama tersebut di atas ada 6 (enam) program penunjang lainnya, yaitu:

(1) Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air;

PEMBANGUNAN JALAN ARTERI SULAWESI

Jalan arteri Sulawesi atau lebih populer dengan Jalan Lintas Sulawesi pada akhir Pelita III lalu, kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sulawesi Selatan

Panjang ruas jalan antara Ujung Pandang ke perbatasan Sulawesi Tengah sekitar 568 Km. Kondisinya, 513 Km. telah beraspal, 55 Km. masih berupa jalan tanah.

Sulawesi Tengah.

Panjang ruas jalan antara Batas Sulawesi Selatan sampai batas Sulawesi Utara, sekitar 688 Km. Sepanjang 216 Km. diantaranya telah beraspal, sementara sisanya masih berupa jalan tanah/AWCAS.

Sulawesi Utara.

Jarak perbatasan Sulawesi Tengah sampai ke ibukota propinsi, Manado, sekitar 638 Km, dengan jalan beraspal 331 Km dan 307 Km. sisanya masih berupa jalan tanah.

Sulawesi Tenggara.

Ruas jalan yang beraspal sepanjang 173 km, yakni ruas antara Kendari Kolaka. Bahkan sampai saat ini hubungan darat antara Sulawesi Tenggara - Sulawesi Selatan dan Su-

Peningkatan jalan terus dilakukan diberbagai daerah termasuk ruas jalan Parigi — Poso, Sulawesi Tengah.

Peranan jalan dalam menunjang pemukiman daerah terus dibangun (ruas jalan Amurang — Kota Mubagu — Doloduo).

lawesi Tenggara - Sulawesi Tengah belum terbuka. Untuk membuka hubungan darat Sulawesi Tenggara dengan kedua tetangganya itu tengah dalam perintisan. Misalnya, melalui dana Inpres Peningkatan Jalan Propinsi (IPJP) sejak beberapa tahun lalu ditangani pekerjaan penunjangan jalan antara Kolaka di Sulawesi Tenggara ke arah Malili di Sulawesi Selatan, dengan menyusuri Teluk Bone sepanjang 365 Km. juga Ruas jalan Pohara - Lasolo - Batas Sulawesi Tengah, sepanjang 350 km.

Pekerjaan peningkatan jalan dan program penanganannya dalam Pelita V, seiring dengan pencepatan pembangunan Indonesia Bagian Timur, dapat dikemukakan seperti di bawah ini :

Sulawesi Selatan

a) Ruas jalan Ujung Pandang - Pare-pare sepanjang 155 Km. dengan dana IBRD telah ditangani dalam Pelita III lalu, dan saat ini ditangani melalui program pemeliharaan. Ruas ini kondisinya mantap (aspal beton).

b) Ruas jalan Pare-pare - Tarumpakae sepanjang 70 Km, telah ditangani dalam Pelita IV lalu, saat ini kondisinya mantap.

c) Ruas jalan Tarumpakae - Palopo sepanjang 146 Km, dengan bantuan Jerman Barat/KFW telah ditingkatkan dalam Pelita III, dan saat ini ditangani melalui program pemeliharaan. Ruas ini kondisi-`ya mantap dengan aspal beton.

d) Ruas jalan Palopo - Wotu sepanjang 132 Km, dengan bantuan pinjaman USAID/Amerika Serikat telah ditangani dalam Pelita III lalu. Ruas jalan dengan aspal beton berkondisi mantap ini ditangani melalui program pemeliharaan.

e) Ruas jalan Wotu - Tindatana/batas Sulawesi Tengah, sepanjang 65 Km, saat ini sedang ditangani pekerjaan peningkatan jalan, dengan dana Rp 6,8 milyar pinjaman IBRD. Pembangunan jalan yang dilaksanakan mulai Mei 1987 itu diharapkan selesai Juni 1991 dengan konstruksi aspal beton. Dalam penanganan ruas ini, medannya cukup berat, dengan cuaca tak menentu, sehingga un-

tuk pekerjaan pemotongan tebing sering terganggu oleh hujan dan mengakibatkan jalan berlumpur berat.

Potensi yang ada di sepanjang jalur tersebut, misalnya tambak udang dan tambak bandeng rakyat di pantai barat Sulawesi Selatan, perkebunan cengkeh, cokelat dan kelapa hibrida di daerah Tarumpakae dan Palopo serta pertanian dan transmigrasi di Kabupaten Pinrang dan Luwu akan memperoleh kemudahan dengan mulusnya ruas-ruas jalan di daerah ini.

Sulawesi Tengah.

a) Ruas jalan Tindatana/batas Sulawesi Selatan - Taripa sepanjang 75 Km, saat ini sedang ditangani pekerjaan konstruksi. Dengan biaya Rp. 10,5 milyar pinjaman IBRD, penanganan yang dimulai Februari 1988 itu diharapkan selesai tahun 1991.

b) Ruas jalan Taripa - Batumancu sepanjang 46 Km, dengan pinjaman IBRD tengah dikerjakan pula. Proyek peningkatan jalan dengan biaya Rp 4,9 milyar yang dimulai Februari 1988 diharapkan selesai tahun 1991.

c) Ruas jalan Batumancu - Poso sepanjang 48 Km, saat ini tengah ditangani dengan biaya Rp 6,6 milyar dari pinjaman IBRD, diharapkan selesai tahun 1991.

d) Ruas jalan Poso - Tambarana sepanjang 55 Km, ditangani dengan program pemeliharaan, yang pada tahun anggaran 1989/1990 dan 1990/1991 ini memperoleh dana sebesar Rp. 765 juta.

e) Ruas jalan Tambarana - Sausu sepanjang 58 Km, penanganannya diharapkan dapat segera dimulai, karena saat ini sedang dalam proses tender.

f) Ruas jalan Tolae - Parigi sepanjang 30 Km. dengan bantuan pinjaman IBRD, tahun 1990/1991 ini memperoleh dana sebesar Rp 500 juta dalam rangka program pemeliharaan berkala.

g) Ruas jalan Parigi - Toboli sepanjang 18 Km. dengan bantuan pinjaman IBRD, saat ini sedang dalam pekerjaan konstruksi dengan biaya Rp 4,6 milyar, diharapkan selesai tahun 1991.

h) Ruas jalan Toboli - Ampibabo sepanjang 30 Km dengan pinjaman IBRD ditangani peningkatannya yang diharapkan selesai tahun 1991. Biaya yang diserap untuk proyek ini sebesar Rp 1,1 milyar.

i) Ruas jalan Ampibabo - Kasimbar sepanjang 57 Km. dengan dana pinjaman ADB akan ditangani, saat ini sedang proses tender.

j) Ruas jalan Kasimbar - Mepanga sepanjang 114 Km. akan ditangani dengan dana pinjaman ADB. Untuk proyek tersebut, saat ini sedang dalam tahap evaluasi tender.

k) Ruas jalan Mepanga - Molosipat/batas Sulawesi Utara sepanjang 91 Km, saat ini sedang dalam proses tender, dan akan ditangani dengan pinjaman ADB.

Dengan dana pinjaman Bank Dunia, saat ini tengah diselesaikan pula pembangunan jaringan irigasi Parigi - Poso untuk areal seluas 28.000 Ha.

Apa yang diprogramkan untuk penanganan jalan di Sulawesi Tengah tersebut nampak jelas usaha-usaha percepatannya, dan ini akan sangat besar artinya bagi pengembangan potensi di sepanjang ruas jalan tersebut. Bisa disebutkan, antara lain daerah transmigrasi Mayoa, Kilo dan Tambarana di Kabupaten Poso, Sausu, Tolai, Mepanga, Taopa dan Lambunu di pantai timur Donggala.

Sulawesi Utara.

a) Ruas Jalan Batas Sulawesi Tengah/Molosipat - Marisa - Lemito sepanjang 150 Km, saat ini sedang dalam proses tender.

b) Ruas jala Pabulo - Paguyaman sepanjang 49 Km, tengah dalam pekerjaan konstruksi dengan biaya Rp. 4,5 milyar pinjaman IBRD yang diharapkan selesai dalam tahun anggaran 1992/1993.

c) Ruas Jalan Paguyaman - Isimu sepanjang 53 Km, saat ini tengah dalam konstruksi dengan dana Rp. 5,5 milyar yang diprogramkan akan selesai pada akhir Pelita V.

d) Ruas jalan Isimu - Kwandang sepanjang 60 Km, saat ini sedang dalam proses tender.

e) Ruas jalan Kwandang - Atinggola sepanjang 42 Km, dengan dana APBN tahun 1990/1991 ini memperoleh dana Rp. 1 milyar, untuk program peningkatan.

f) Ruas jalan Atinggola - Kaiya sepanjang 159 Km, dari dana APBN sebesar Rp. 5,3 milyar tahun 1990/1991 ini ditangani melalui program pemeliharaan berkala.

g) Ruas jalan Kaiya - Amurang sepanjang 46 Km telah ditangani dalam Pelita IV lalu, dengan menggunakan dana pinjaman ADB.

h) Ruas jalan Amurang - Manado sepanjang 83 Km, telah ditingkatkan dalam Pelita II dan III lalu. Saat ini penanganannya melalui

program pemeliharaan.

Dengan demikian, maka pada akhir Pelita V nanti, seluruh ruas jalan antara Ujung Pandang di Sulawesi Selatan sampai dengan Manado di Sulawesi Utara kondisinya menjadi mantap.

Untuk Sulawesi Tenggara, penanganan jalan dan jembatan baik pada jalan nasional maupun propinsi berupa pekerjaan peningkatan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta penggantian jembatan pada tahun anggaran 1989/1990 telah menyerap dana sekitar Rp. 21,4 milyar. Pada tahun 1990/1991 ini dana yang dialokasikan baik bersumber dari APBN, IPJP, APBD maupun pinjaman luar negeri, sebesar Rp. 59,7 milyar.

Dana tersebut antara lain dipergunakan untuk menangani pekerjaan peningkatan jalan pada ruas :

a) Kolaka - Wolo, dengan target 12 Km, biaya Rp. 1,72 milyar.
b) Wolo - Batas Sulawesi Selatan, target, 30 Km, biaya Rp. 3,8 milyar.
c) Pembangunan dua jembatan dengan panjang total 200 meter pada ruas jalan propinsi Wolo - Batas Sulawesi Selatan, dengan biaya Rp. 1,5 milyar.
d) Untuk ruas jalan nasional Tengah, target 10 Km, dengan dana dari APBN sebesar Rp. 1,5 milyar.
e) Untuk ruas jalan nasional Kendari - Kolaka sepanjang 173 Km yang telah beraspal sejak Pelita III lalu, pada tahun 1989/1990 dan 1990/1991 ini dilakukan pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 67,2 Km, dengan dana sebesar Rp. 12,8 milyar. Sisanya, sepanjang 105,8 Km ditangani melalui program pemeliharaan dan rehabilitasi.

Pada ruas jalan Kolaka - Wolo - Batas Sulawesi Selatan, potensi besar yang ada dalam tanaman cokelat rakyat yang merupakan komoditi agro industri andalan bagi Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada ruas jalan Kendari - Kolaka adalah potensi pertanian tanaman pangan dan transmigrasi yang telah berkembang.

Lintas Barat.

Selain lintas Sulawesi sebagai telah diuraikan diatas, sejak awal Pelita IV lalu dikembangkan pula pembangunan jalan pantai barat pulau Anoa tersebut. Program ini dilaksanakan untuk mengatasi isolasi di wilayah itu sekaligus mengembangkan potensi perikanan/tambak dan pertanian. Ruas ini meliputi route : Ujung Pandang - Pare Pare - Majene - Mamuju yang saat ini sudah dalam kondisi mantap. Dari Mamuju dibuka ruas jalan ke arah utara, Kaluku - Karussa - batas Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala. Untuk propinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala. Untuk propinsi Sulawesi Tengah - dari batas Sulawesi Selatan menuju Donggala - Palu - melalui pantai barat keutara, yakni ruas Tompe - Sabang - Ogoamas - Ogotua, Toli Toli - Palele - perbatasan Sulawesi Utara.

Penanganan ruas jalan di pantai barat Sulawesi itu, sementara ini ditangani APBD pemda setempat.

PT. TRIFA ABADI

GENERAL CONTRACTOR

JLN. BALIKPAPAN RAYA NO. 11-B JAKARTA - PUSAT
TELP. : 365733 - 365879 - 365968
TELEX : 45772 TRIFA IA FACS. (021) : 3806026 JKT.

KANTOR CABANG :
PEKANBARU : JALAN CEMARA NO. 59 - A TELP. : 24685
PALEMBANG : JALAN VETERAN NO. 432C TELP. : 28340
JAMBI : JALAN BRIG. JEND. KATAMSO NO. 92 TELP. : 22909

P.T. SWADAYA UNION NARATAMA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIERS
PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN

Mengucapkan
Selamat 45 tahun
Departemen Pekerjaan Umum
3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.

JAKARTA = JL. PROF DR. LATUMETEN
KOMPLEK KOTA GROGOL PERMAI BLOK A - 7
JAKARTA 11460
TEL . 5600609, FACS 5600713

BANJARMASIN = JL. DAHLIA II NO IA
BANJARMASIN 70112
KALIMANTAN SELATAN
PHONE (0511) 68775

PT. HAJI MUHAMMAD TAHER

KANTOR PUSAT :
JL. KAPT. P. TENDEAN 25 - 33
BANJARMASIN (0511) 4724 - 2905 - 4149

KANTOR CABANG :
1 JL.DEMAK 145
SURABAYA (031) 516455

2 Jl. BANGKA VIII / 23
JAKARTA (021) 7994386
INDONESIA

RUMAH :
JL. KERAMAT RAYA 111
TELP. (0511) 2863
BANJARMASIN

Di kota-kota besar kepadatan lalu-lintas condong meningkat.

(2) Program Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;

(3) Program Penelitian, Persiapan dan Perancangan Pengembangan Sumber Air;

(4) Program Pendidikan dan Latihan dalam Pertanian dan Pengairan;

(5) Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Pemerintah;

(6) Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah.

b. Bina Marga

Pembangunan jalan selama Repelita III mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada.

Pembangunan jalan baru dilakukan apabila dapat meningkatkan serta meratakan pembangunan daerah/wilayah, terutama jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya, serta mengusahakan keserasian antara Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan dengan cara yang banyak menyerap tenaga kerja dan sejauh mungkin menggunakan peralatan dan bahan dalam negeri. Di samping itu disesuaikan dengan fungsi jalan tanpa membedakan status jalan yang bersangkutan. Fungsi jalan dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) jalan untuk jangkauan pelayanan jarak jauh (jalan arteri);

(2) jalan untuk jangkauan pelayanan jarak menengah (jalan kolektor), dan

(3) jalan untuk keperluan pelayanan setempat (jalan lokal).

Dalam kenyataannya sebagian besar jalan Negara dan jalan Propinsi berfungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor. Pembangunan jaringan jalan dilakukan untuk mendapatkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang dapat melayani angkutan dan lalu lintas yang terus meningkat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan ialah:

(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan guna mempertahankan kondisi jalan dan jem-

batan agar tetap dalam keadaan baik.

(2) Pemeliharaan jalan dilakukan setiap tahun, sedang rehabilitasi dilakukan pada jalan dan jembatan yang rusak agar dapat kembali pada kondisi baik dan dapat berfungsi melayani kepadatan lalu-lintas.

(3) Peningkatan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kondisi jalan dan penggantian jembatan lama agar mampu melayani meningkatnya lalulintas yang berkembang sampai 20 tahun mendatang.

(4) Pembangunan jalan dan jembatan baru yang disesuaikan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, pembangunan daerah pemukiman transmigrasi, pertanian dan pertumbuhan kota.

Kegiatan pembangunan di bidang jalan dan jembatan tersebut di atas meliputi:

(1) pemeliharaan jalan sepanjang 29.140 kilometer dan rehabilitasi jalan sepanjang 1.570 kilometer;

(2) peningkatan jalan sekitar 11.000 kilometer;

(3) penggantian jembatan pada jalan negara dan propinsi 89.780 meter dan jembatan pada jalan kabupaten 47.500 meter;

(4) penunjang jalan yang dilakukan beberapa kali selama Repelita III terhadap Jalan Negara sekitar 7.700 kilometer jalan Propinsi 14.000 kilometer dan jalan Kabupaten 41.000 kilometer;

(5) pembangunan jalan baru sepanjang 995 kilometer.

Dalam kegiatan tersebut termasuk pembangunan jalan dan jembatan dalam kota, berupa peningkatan jalan sepanjang 1.020 kilometer, penggantian jembatan sepanjang 5.920 meter serta pembangunan jalan baru sekitar 370 kilometer.

Dalam Repelita III di samping kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas diusahakan pemantapan pengaturan segala sesuatu mengenai jalan, mengingat bahwa peranan dan kedudukan jaringan jalan dalam kehidupan bangsa hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta dapat mengendalikan pembentukan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan, serta pemantapan hankamnas dalam rangka perwujudan sasaran-sasaran pembangunan nasional.

Pengembangan/pembangunan prasarana jalan umumnya memerlukan investasi biaya yang cukup tinggi. Karena itu dalam rangka pemantapan pengaturan mengenai jalan ini perlu segera diupayakan sistem pembiayaan pembangunan jaringan jalan, yang tidak terlalu membebani anggaran Negara, yaitu: penerapan sistem jalan tol pada bagian wilayah tertentu yang telah mengalami tingkat perkembangan yang tinggi. Dengan sistem jalan tol, melalui pungutan tol, biaya pembangunan dan pengembangan, pengelolaan jalan tertentu dibebankan pada pemakai jalan sendiri, yang menikmati manfaat jalan tol tersebut. Dengan demikian tidak menjadi beban Anggaran Negara, dan dirasakan lebih adil, karena beban Anggaran Negara hakekatnya adalah beban seluruh rakyat, termasuk yang tidak menikmati manfaat jalan-jalan tertentu. Untuk dapat memberi nikmat pemanfaatan jalan bagi para pemakai jalan tol yang ikut membiayai jalan tersebut, sudah tentu perlu diupayakan agar pembangunan jalan tol memenuhi persyaratan teknik tertentu, sebagai jalan bebas hambatan yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pemakai jalan.

c. Pemukiman Transmigrasi

Pembangunan, penyediaan lahan untuk pemukiman transmigrasi, yang menjadi tugas Departemen Pekerjaan Umum sejak diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 6 Tahun 1977, merupakan bagian dari usaha pembangunan di bidang transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan transmigrasi ditempuh beberapa kebijaksanaan antara lain:

(1) Perlu diperhitungkan pengaruh pembangunan pemukiman bagi lingkungan hidup,

(2) Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan transmigrasi perlu dikaitkan dengan pengelolaan kelestarian sumber daya alam untuk mencegah akibat sampingan penggunaannya kepada lingkungan hidup.

(3) Penggunaan sumber daya alam didasarkan kepada:

a. dayaguna dan hasilguna yang optimum dalam batas-batas kelestarian yang mungkin dicapai,

b. tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya

alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem,

c. memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan bagi pembangunan di masa depan.

(4) Pelaksanaan transmigrasi ditujukan untuk menunjang usaha pembangunan daerah/wilayah dalam rangka usaha meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas dalam penentuan lokasi pemukiman transmigrasi digunakan kriteria makro dan kriteria mikro.

Lahan pertanian di daerah transmigrasi.

Perumahan di lokasi Pemukiman Transmigrasi di daerah Pasang Surut Sumatera Selatan.

Kriteria makro, meliputi:

(1) Kriteria lahan yang terdiri dari:
  a. kemiringan tidak melebihi batas maksimum kemampuan penanganan *konversi*, yaitu 8%;
  b. kemampuan tanah berada di atas batas minimum dalam arti cocok untuk usaha tani,
  c. bebas dari kebutuhan untuk menampung perkembangan penduduk lokal untuk jangka waktu 20 tahun. Kepadatan penduduk tidak melebihi 75 jiwa per kilometer persegi,
  d. secara mengelompok, luasnya menampung minimum 5.000 kepala keluarga atau sekitar 10.000 hektar.

(2) Kriteria Pengembangan Wilayah, yang terdiri dari:
  a. memberikan kontribusi yang terbesar dalam pembentukan struktur pengembangan wilayah yang hendak dituju pada tahun ke-20. Letaknya secara relatif dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik yang sudah ada maupun masih dalam rencana pengembangan;
  b. memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada daya dukung lingkungan hidup tanpa melampaui batas maksimum kemampuan ekologis lingkungan.

(3) Pada tahap penetapan lokasi "Kelompok Besar" periode jangka menengah (5 tahun). Luasnya kelompok lahan bersama-sama tingginya aksebilitas riil "jangka pendek" memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan struktur pengembangan wilayah yang hendak dituju.

(4) Pada tahap penetapan lokasi "Kelompok Besar" periode tahunan: Tingkat aksibilitas tertinggi dan efisiensi penyiapan lahan yang setinggi-tingginya ditinjau dari penempatan peralatan besar dan mobilitas penggunaan selama umur pakainya.

Kriteria mikro, meliputi:

(1) Pada tahap penetapan rencana kerangka "Kelompok Besar" pemukiman:
  a. tata ruang pada tingkat wilayah pengembangan partiil dalam rangka pembentukan struktur pengembangan wilayah yang dituju, bertumpu pada peranan kota, baik yang ada maupun yang baru;
  b. tingkat kesuburan tanah harus cukup menjamin produksi pangan di masa depan, yang disesuaikan dengan perkembangan penerapan teknologi;
  c. keadaan iklim antara lain curah hujan, distribusi hujan, suhu dan intensitas sinar matahari, harus memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanaman dan untuk mencapai hasil yang baik;
  d. faktor penyediaan air baik untuk minum maupun untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kesejahteraan keluarga. Air minum cukup tersedia dan mudah diperoleh di daerah penempatan, terutama pada musim kemarau;
  e. faktor vegetasi: harus hindarkan daerah-daerah yang masih merupakan hutan primer maupun hutan sekunder yang mampu menghasilkan produksi kayu sebesar 50 m3/hektar dan bukan hutan lindung;
  f. kemiringan tanah tidak melebihi batas maksimum kemampuan penanganan *konversi* masing-masing: daerah datar dengan kemiringan 0—3% diprioritaskan untuk budidaya tanaman pangan, daerah datar berombak 3—8% untuk budidaya tanaman pangan dan atau peternakan atau peternakan campuran *(mix farming)*, daerah berombak bergelombang 8—15% untuk budidaya tanaman tahunan/perkebunan. Hutan di sekitar sungai, anak sungai dan mata air tidak dibuka bersih; paling sedikit disisakan jalur hutan selebar 100 meter pada kanan kiri sungai atau di sekitar mata air. Pohon-pohon besar dengan diameter lebih dari 60 sentimeter tetapi kayunya tidak dapat dimanfaatkan, sepanjang tidak mengganggu tidak ditebang.

(2) Pada tahap lokasi pasti: kepastian hak atas tanah bagi kepentingan transmigrasi.

Dengan memperhatikan potensi daerah, kemampuan dan daya dukung serta faktor-faktor lainnya, maka pemukiman transmigrasi dapat merupakan:

a. Pertanian pola tanah kering,
b. Pertanian pola persawahan,
c. Pertanian pola persawahan pasang surut,
d. Pertanian pola perkebunan,
e. Pertanian pola peternakan,
f. Pertanian pola campuran,
g. Pertanian pola perikanan dan sebagainya.

Kegiatan yang perlu dilakukan untuk penyiapan lahan pemukiman transmigrasi ialah: pembukaan tanah, pembangunan perkampungan; pembangunan jalan penghubung, jalan poros, dermaga, jembatan; pembangunan fasilitas pembibitan, pembangunan rumah, sarana air bersih, gedung sekolah puskesmas/balai pengobatan, gudang serta fasilitas perkantoran, rumah petugas dan lain-lain.

Dalam Repelita III kegiatan tersebut di atas dilakukan untuk pembangunan 44 daerah pemukiman pasang surut dan 206 daerah pemukiman tanah kering, sehingga berjumlah seluruhnya 250 daerah pemukiman. Pembangunan sarana dan fasilitas untuk daerah pemukiman itu terdiri dari: jalan penghubung 4.120 kilometer, jalan poros 10.000 kilometer, jalan desa 15.000 kilometer, jalan pertanian 15.000 kilometer, penyiapan lahan 625.000 hektar dan pembangunan rumah 500.000 satuan.

d. Cipta Karya

Dalam Repelita III kebijaksanaan ditekankan kepada kegiatan pembangunan perumahan dan pengembangan produksi bahan bangunan lokal; perbaikan "kampung"; pengembangan kelembagaan keuangan, perbaikan perumahan desa dan pengembangan sistem penyediaan air bersih. Dalam pembangunan perumahan hal penting yang mendapat perhatian ialah antara lain: adanya program terpadu mengenai penggunaan tanah kota dan desa, pembiayaan, pengusahaan, kesehatan lingkungan, produksi bahan bangunan lokal, pengembangan wilayah dan pedesaan/perkampungan.

Program-program yang dilakukan dalam Repelita III ialah :

(1) Program utama terdiri dari:
   a. Program perencanaan tata kota dan tata daerah.

Manfaat air bagi penduduk.
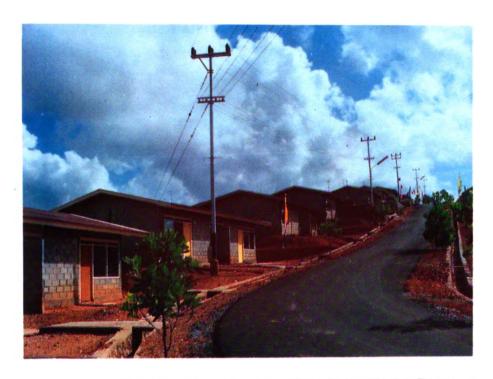
Pengembangan wilayah melalui program Perum Perumnas.

Dalam Repelita III diusahakan peningkatan dan pemerataan pembangunan perumahan rakyat, agar makin banyak rakyat yang menikmati dengan harga yang dapat terjangkau oleh rakyat banyak. Perumahan rakyat yang dibangun melalui Perumnas, meliputi: perumahan sederhana dan inti sekitar 120.000 rumah, yang pemilikan nya dikaitkan dengan sistem pemilikan rumah melalui fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (KPR/BTN).

Peningkatan kegiatan Pusat Informasi Teknik/*Building Information Centre* (BIC) untuk memberikan penyuluhan, informasi, pembinaan teknis pembangunan dan peningkatan ketram-

Termasuk di dalamnya mengadakan studi potensi daerah dan penyusunan rencana pembangunan daerah; studi pengembangan kota, penyusunan landasan/peraturan operasional dan peningkatan kemampuan aparatur daerah. Penyusunan rencana umum kota bagi kota-kota metropolitan dan Ibukota Daerah Tingkat I serta kebijaksanaan nasional mengenai perkotaan.

b. Program perumahan.

Pada dasarnya pembangunan perumahan rakyat merupakan tanggung jawab masyarakat, sedang kewajiban pemerintah adalah berupa pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan bimbingan, serta pemberian berbagai fasilitas bantuan dan perangsang.
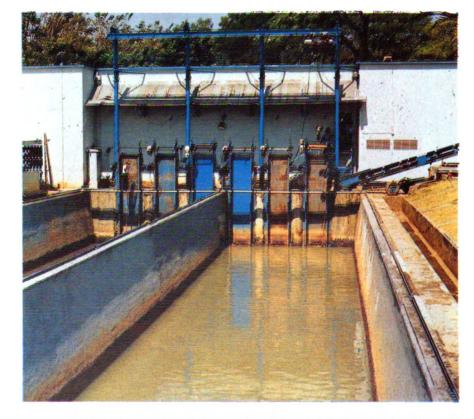
Air bersih sebagai salah satu kendala pengembangan lingkungan.

pilan kearah partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan perumahan rakyat, perbaikan kampung dan penanganan perumahan desa.

c. Program Peningkatan Lingkungan Pemukiman. Perbaikan penyehatan lingkungan meliputi perbaikan sistem pembuangan sampah, pembuangan air rumah tangga, dan pembuangan air hujan, untuk daerah-daerah yang mendesak yaitu : daerah pemukiman rakyat berpenghasilan rendah, daerah kritis, dan daerah yang banyak penyakit. Diantaranya ialah 9 kota untuk perbaikan sistem pembuangan sampah dan 14 kota untuk drainasi.

d. Program Penyediaan Air Bersih Penyediaan air bersih dengan kapasitas 23.094 liter/setiap detik untuk 305 kota. Di samping itu diusahakan peningkatan perbaikan mekanisme dan kemampuan pengelolaan sistem penyediaan air bersih.

e. Program Pemugaran Perumahan Desa.
Kegiatan pemugaran perumahan dan lingkungan desa meliputi sekitar 6.000 desa, yang mencakup 1.000 desa tingkat swadaya, 3.000 desa tingkat swakarya dan 2.000 desa tingkat swasembada.

(2) Program Penunjang, yang terdiri:

a. Program Pendidikan Aparatur Pemerintah, terutama untuk membina tenaga trampil di bidang perumahan rakyat, air bersih dan penyehatan lingkungan.

b. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan, untuk penyempurnaan tata perencanaan, prosedur kerja, sistem informasi, pengendalian pelaksanaan dan pengawasan.

c. Program penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah, untuk dapat lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perumahan rakyat, air bersih dan penyehatan lingkungan.

Disamping program-program tersebut di atas diupayakan pula langkah-langkah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebakaran maupun keruntuhan bangunan umum sebelum waktunya, seperti: gedung kantor, sekolah, bioskop, pusat pertokoan, pasar dan lain-lain, yang dirangkaikan dengan sistem pengamanan bangunan, sistem pemadam kebakaran kota, pembinaan tanggung jawab jasa konstruksi, peningkatan kegiatan pengawasan, pengaturan pelaksanaan pembangunan gedung umum dan penyebaran informasi mengenai keselamatan lingkungan dan keselamatan bangunan.

Dalam kurun waktu 1978 - 1982 proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum, yang telah selesai dan diresmikan berfungsinya oleh Presiden Republik Indonesia, antara lain:

Penyediaan air bersih melalui program paket.

Digitized by Google

(1) Proyek Jalan Nusa Dua (Bali), yaitu Jalan Raya Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yang telah diresmikan penggunaannya pada tanggal 15 Desember 1980.

(2) Proyek Pembangunan Rumah Susun Perum Perumnas di Tanah Abang, Jakarta, yang telah diresmikan penghuniannya pada bulan april 1981.

(3) Proyek Pembangunan Jembatan Kapuas di Kalimantan, yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Januari 1982.

(4) Pada tanggal 23 Maret 1982 telah diresmikan Jembatan Ketahun dan Bendung Selima di Desa Pisang Berebus, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Sawahlunto - Sijunjung, Sumatera Barat.

Organisasi dan Tata Kerja pada Repelita III

19. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1978 jo nomor 70/M Tahun 1978, maka kepada Menteri Pekerjaan Umum diperbantukan Menteri Muda Perumahan Rakyat sebagai Menteri Negara Pembantu Presiden, dengan tugas: membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam mengikuti dan mengkoordinasikan
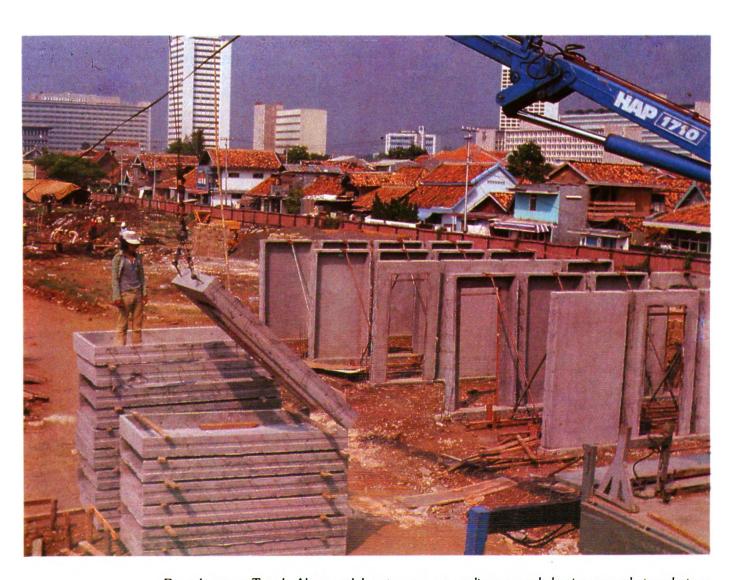
Rumah susun Tanah Abang salah satu cara penyediaan rumah bagi masyarakat perkotaan.

pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang perumahan rakyat.

Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 diadakan perubahan terhadap susunan organisasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 145/KPTS /1975. Perubahan itu ialah sebagai berikut:

(1) Nama/judul Departemen menjadi: "Departemen Pekerjaan Umum" (tanpa Tenaga Listrik).

(2) Organisasi, tugas dan fungsi mengenai tenaga dan listrik dihapuskan. (catatan: dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi).

(3) Dalam susunan organisasi pelaksana ditambahkan organisasi instansi vertikal di daerah, yang terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Propinsi di seluruh Indonesia.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Propinsi tersebut di atas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 60/KPTS/1982 tanggal 1 Maret 1982. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas:

a. Melakukan sebagian tugas pokok dan fungsi Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.

b. Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menjalankan fungsi koordinasi di Wilayah Propinsi dalam bidang Pekerjaan Umum.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum itu terdiri dari:

(1) Unsur pimpinan yaitu: Kepala Kantor Wilayah.

(2) Unsur pembantu pimpinan, yaitu: Bagian Tata Usaha, yang mempunyai:
   a. Sub Bagian Umum,
   b. Sub Bagian Kepegawaian,
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Unsur pelaksana/pelayanan, yaitu:

a. Bidang Teknik, dengan:
   — Seksi Penyusunan Program,
   — Seksi Informasi Tata Laksana.

b. Bidang Peralatan dan Perbekalan, dengan:
   — Seksi Peralatan,
   — Seksi Pemeliharaan Peralatan,
   — Seksi Perbekalan.

c. Bidang Pengujian, dengan:
   — Seksi Pengujian Air,
   — Seksi Pengujian Tanah,
   — Seksi Pengujian Bahan Bangunan.

Dengan perubahan, tambahan dan penyempurnaan tersebut diatas, maka Struktur Organisasi Departemen Pekerjaan Umum secara menyeluruh menjadi seperti di gambarkan dalam Bagan dibawah ini.

Peraturan Perundang-undangan

20. Bertitik tolak pada perkembangan, bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan Nasional, maka demi terselenggaranya peranan jalan serta pembinaannya secara mantap, konsepsional dan menyeluruh, pengaturan penyelenggaraan dan pembinaannya perlu ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam masa pemerintahan Kabinet Pembangunan III telah diterbitkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 1980 Undang-Undang nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN. 1980 nomor 83), yang mengatur antara lain mengenai:

(1) Jaringan jalan, peranan dan pengelompokannya (Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal).
(2) Bagian Jalan:
   a. Daerah Manfaat Jalan (badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya),
   b. Daerah Milik Jalan,
   c. Daerah Organisasi Jalan.
(3) Hak Penguasaan Jalan.
(4) Wewenang Pembinaan Jalan (Jalan Nasional, Jalan Daerah).
(5) Penyelenggaraan Jalan Tol (Syarat, Wewenang Penyelenggaraan, Pemakaian Jalan Tol).
(6) Larangan dan Ketentuan Pidana.

Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah diterbitkan dan diundangkan dua perangkat peraturan pelaksanaan yaitu:

(1) Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
(2) Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

Dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tersebut di atas antara lain ditetapkan pola tata pengaturan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air, demi menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang
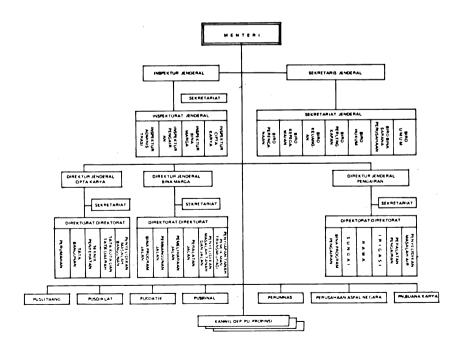
sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan tersebut dalam Bab I, II, IV, V dan VI *Algemeen Water reglement* 1936 *(Staatsblad 1936* nomor 489) dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1982 antara lain diatur dan ditetapkan hal-hal mengenai: Wewenang pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi; Inventarisasi Jaringan Irigasi; Penyediaan air irigasi (perencanaan, pelaksanaan an tata caranya); Pembagian dan pemberian air irigasi; Penggunaan air irigasi; Pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; Pembiayaan dan Tata Laksana Pengurusan Irigasi; Ketentuan Pidana dan lain-lain.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1982 ini maka ketentuan yang termaktub dalam Bab III *Algemeen Waterreglement* 1936 *(Staatsblad* 1936 nomor 489) dan *Algemeen Water Beheersverordening (Staatsblad* 1937 nomor 559) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk Kepentingan efisiensi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, yang menjadi tugas wewenang Departemen Pekerjaan Umum dan pembangunan pusat listrik tenaga air (PLTA) yang termasuk tugas dan wewenang Departemen Pertambangan dan Energi, diadakan kerjasama antara kedua Departemen tersebut. Dalam rangka upaya itu diterbitkan Keputusan Bersama

Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 436/KPTS/Pertam/1979 - 161/KPTS/1979 tanggal 19 Mei 1979 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggunaan Anggaran proyek-proyek Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi kepada Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam keputusan bersama itu antara lain disepakati:

(1) Pelimpahan itu meliputi pelaksanaan pembangunan setempat untuk bangunan pembangkit listrik *(power house)* dan bangunan PLTA lainnya di sekitar bendungan, yang erat hubungannya dengan penyaluran tenaga listrik, baik pekerjaan teknik sipil, maupun pekerjaan elektro mekanik, termasuk gardu induk dan pekerjaan besi *(metalwork)* menurut petunjuk dan pembinaan yang diberikan oleh Perusahaan Listrik Negara.

(2) Penyediaan anggaran tahunan untuk pembangunan proyek PLTA yang bersangkutan, yang dilimpahkan itu disusun dan diatur bersama oleh Direktur Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi dan Direktur Jenderal Pengairan.

(3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pembangunan proyek PLTA yang bersangkutan selesai dan dapat dioperasikan, pengurusannya diserahkan kembali oleh Direktur Jenderal Pengairan kepada Direktur Jenderal Ketenagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri PU Purnomosidi dan Menteri Muda Perumahan Rakyat Cosmas Batubara meninjau pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Usaha pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan umum memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, yang tidak mungkin keseluruhannya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu untuk dapat membiayai pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan perlu ditempuh sistem jalan tol sebagai salah satu upaya agar masyarakat pemakai jalan, yang menikmati manfaat jalan, dapat ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan jalan tersebut.

Untuk menampung pelaksanaan sistem tol bagi jaringan jalan tertentu, dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1978 tanggal 25 Pebruari 1978 (LN. 1978 nomor 4) telah ditetapkan penyertaan modal Negara dalam pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1978 tersebut di atas dalam masa kerja Kabinet Pembangunan III dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia telah ditetapkan beberapa jalan bebas hambatan *(Free Way)* tertentu menjadi jalan tol dan besarnya uang tol, diantaranya:

(1) Jakarta - Bogor - Ciawi dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 jo nomor 19 Tahun 1979 tanggal 19 April 1979. Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 109/KPTS/1980 tanggal 24 Maret 1980 jo nomor 320/KPTS/1980 tanggal 6 Agustus 1980 penye-

Unit Patroli Keselamatan Sarana, bagian dari pelayanan kepada pemakai jalan tol.
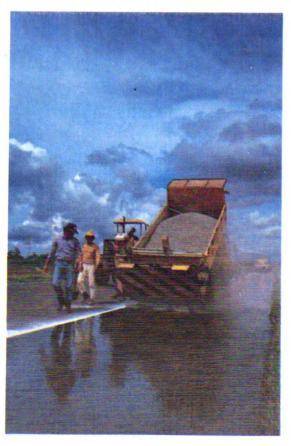
Pekerjaan Lapis Ulang di jalan tol.

lenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi tersebut termasuk Ramp Barat Utara, Gerbang Tol di Taman Mini Interchange serta Cibubur Interchange di serahkan kepada PT. (Persero) Jasa Marga.

(2) Jembatan Citarum Rajamandala dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 Tahun 1979 tanggal 13 Agustus 1979, yang penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaannya telah dilimpahkan kepada PT. (Persero) Jasa Marga dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 178/KPTS/1980 tanggal 1 Mei 1980.

(3) Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1981 tanggal 15 Agustus

1981 jo nomor 39 Tahun 1981, 56 Tahun 1981, 57 Tahun 1981 dan 22 Tahun 1982 untuk ruas jalan tol dan jembatan tol:

a. Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Tangerang;
b. Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Layang Intra Urban Barat-Selatan;
c. Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Cikampek;
d. Jalan Bebas Hambatan Semarang Utara-Selatan;
e. Jalan Bebas Hambatan Surabaya - Gempol;
f. Jalan Layang Wonokromo - Surabaya;
g. Jalan Bebas Hambatan Belawan - Medan - Tanjung Morawa;
h. Jembatan Sungai Kapuas Pontianak;
i. Jembatan Sungai Tallo - Lama Ujung Pandang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14A tahun 1980 tanggal 14 April 1980, antara lain memuat ketentuan bahwa di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diperhatikan mengenai: Pengutamaan Hasil Produksi Dalam Negeri dan Pengutamaan Perusahaan Setempat (Pemborong/Rekanan Setempat).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut perlu ada upaya untuk mendorong peningkatan dunia usaha, dengan jalan antara lain:

(1) meningkatkan kerjasama yang serasi antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dunia usaha swasta dan koperasi,
(2) menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha,
(3) meningkatkan kewiraswastaan, kealian dan kemampuan usaha.

Upaya pembinaan menjadi penting untuk lebih ditingkatkan lagi terutama terhadap usaha golongan ekonomi lemah, melalui pemberian bantuan kredit dengan syarat yang tidak memberatkan, bantuan keahlian, penyuluhan dan sebagainya. Di samping itu juga diupayakan untuk memperbaiki pelaksanaan prakualifikasi menuju pemberian penilaian atas kemampuan sesuatu perusahaan secara obyektif dan adil.

Di bidang pembangunan dan pengadaan bangunan Gedung Negara diusahakan peningkatan dan penyempurnaan tertib pelaksanaan pembangunan, agar bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraan pembangunannya dilakukan oleh pelbagai instansi masing-masing dapat memenuhi persyaratan fungsional, teknis teknologis, serta keselarasan terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Untuk itu dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 61/KPTS/1981 tanggal 10 Maret 1981 telah ditetapkan Prosedur Pokok untuk pengadaan bangunan Gedung Negara, sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pengadaan bangunan Gedung Negara baik di pusat maupun di daerah.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan tersebut, dengan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 104/KPTS/1982 tanggal 2 Juli 1982 diatur dan ditetapkan Pedoman Ope-

Jembatan Tallo Lama, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

rasionil Pengisian dan Pelaksanaan DIP - Proyek Gedung Pemerintah dan Perumahan Dinas, yang terdiri dari:

(1) Pedoman Penyelenggaraan Proyek Gedung Pemerintah dan Perumahan Dinas;

(2) Pedoman Penetapan Harga Satuan per Meter Persegi untuk pembangunan Gedung Pemerintah dan Perumahan Dinas;

(3) Pedoman Teknis Penyelenggaraan Proyek Gedung Pemerintah dan Perumahan Dinas.

21. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 12 Maret 1983 telah menghasilkan 8 (delapan) buah Ketetapan MPR, yang secara historis sangat menentukan bagi jalannya mekanisme Pemerintah dan Pembangunan di Indonesia.

Dari delapan buah Ketetapan MPR itu yang terpenting dalam hubungannya dengan tugas pemerintah dan pembangunan di antaranya ialah:

(1) Ketetapan MPR nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

(2) Ketetapan MPR nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;

(3) Ketetapan MPR nomor V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia **Soeharto** selaku Mandataris MPR serta Pengukuhan Pemberian Gelar sebagai Bapak Pembangunan Indonesia;

(4) Ketetapan MPR nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas
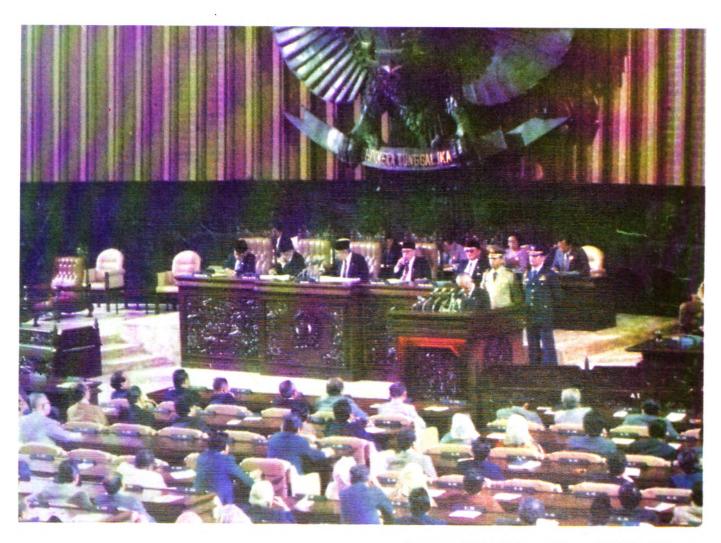
Suasana ketika Sidang Umum MPR berlangsung.

dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional;

(5) Ketetapan MPR nomor VI/MPR /1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Semua ketetapan MPR tersebut di atas, terutama yang mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang telah memberikan pedoman pengarahan dan petunjuk untuk penyelenggaraan kegiatan nasional dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, perlu difahami dan dilaksanakan oleh Pemerintah bersama seluruh rakyat dari semua lapisan, semua kalangan dan semua generasi bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Hal itu menjadi amat penting, karena tahun-tahun yang akan datang bangsa Indonesia menghadapi pekerjaan yang besar, sedangkan ujian yang harus dilalui adalah ujian yang berat.

KABINET PEMBANGUNAN IV

22. Dengan memperhatikan Ketetapan-Ketetapan MPR tersebut di atas Jenderal (Purn) **Soeharto** yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden/Mandataris MPR, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45/M Tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 membentuk Kabinet Pembangunan IV dan sekaligus membubarkan Kabinet Pembangunan III, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59/M Tahun 1978 dan nomor 70/M Tahun 1978.

Susunan Kabinet Pembangunan IV ini terdiri dari:

(1) 3 (tiga) orang Menteri Koordinator yang masing-masing mengkoordinir bidang tertentu;

(2) 8 (delapan) orang Menteri Negara yang masing-masing melaksanakan tugas/urusan tertentu;

(3) 21 (duapuluh satu) orang Menteri yang masing-masing memimpin suatu Departemen;

(4) 5 (lima) orang Menteri Muda yang masing-masing diperbantukan kepada seorang Menteri untuk tugas/urusan tertentu.

Jumlah Anggota Kabinet Pembangunan IV ialah sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) orang Menteri. Dalam susunan Kabinet tersebut yang ditunjuk/diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum ialah **dr. Ir. Suyono Sosrodarsono.** Menteri Muda Perumahan Rakyat yang dalam Kabinet Pembangunan III yang lalu diperbantukan kepada Menteri Pekerjaan Umum maka dalam Kabinet Pembangunan IV ini ditingkatkan sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat yang melaksanakan koordinasi dalam bidang perumahan rakyat tidak lagi diperbantukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, melainkan bersifat koordinasi dan bekerjasama.

Memahami tugas nasional yang utama untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila memperhatikan perkembangan nasional dan internasional yang akan sangat mempengaruhi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dan meneliti tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepada

Dr. Ir. Suyono Sosrodarsono

DR. IR. SUYONO SOSRODARSONO

DR. Ir. Suyono Sosrodarsono menjabat Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1983 sampai dengan 1988. Lulus dari Sekolah Tinggi Teknik Bandung pada Th. 1955 dan Gelar Doktor Honoris Causa dari Technische Hogeschool Delft-Negeri Belanda, pada tahun 1986. Ir. Suyono Sosrodarsono bekerja di lingkungan PU yakni :

- Pegawai Jawatan Perumahan Rakyat.
- Pejabat Kepala Bagian Pembinaan Pemeliharaan Pengawasan Jawatan Perumahan Rakyat.
- Pemimpin Pembangunan Khusus Pejompongan Jawatan Pembinaan Kota Direktorat Jenderal PU disamping tugas pada Jawatan Perumahan Rakyat.
- Kepala Bagian Perencanaan Jawatan Perumahan Rakyat merangkap sebagai Kepala Jawatan Perumahan Rakyat.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang dijabat dari tahun 1959 sampai dengan 1963.

Sejak tahun 1963 beliau pindah ke Ibukota Jakarta menduduki jabatan Kepala Direktorat Bangunan Umum Departemen PUT sampai tahun 1965. Tahun 1965 sebagai Pembantu Menteri Pengairan Dasar, Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum dijabatnya sejak Tahun 1966 sampai dengan 1982. Pada tahun 1982 menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan tahun 1983 diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Tahun 1988, **Ir. Suyono Sosrodarsono** menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sampai saat ini. Bintang penghargaan yang diperoleh adalah Bintang Mahaputra Kelas III. Disamping itu juga

menerima "The Grand Gordon of The Order of The Sacred Treasure dari Sri Baginda Kaisar Jepang Akihito tgl. 1 Desember 1989. **Ir. Suyono Sosrodarsono** lahir di Madiun tanggal 3 Maret 1926, didampingi seorang istri yakni **dr. Astuti** dan mempunyai 3 orang putri. Beliau juga anggota tentara Pelajar pada jaman perjuangan.
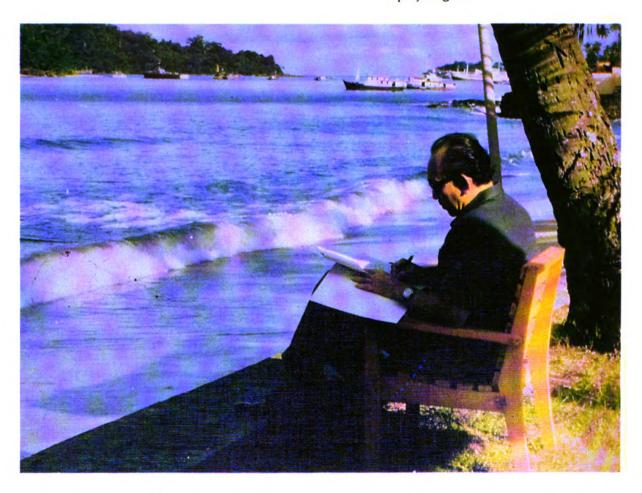
Dimanapun termasuk ditepi pantai pak Yono selalu mencatat apa yang dianggap penting dan baik yang perlu diketahui dan ditindak lanjuti bawahannya.

Mandataris MPR, maka dalam membentuk Kabinet Pembangunan IV itu Presiden **Soeharto** sekaligus telah menetapkan Pancakrida Kabinet yang juga merupakan program nasional untuk waktu lima tahun mendatang.

Pancakrida Kabinet Pembangunan IV itu terdiri dari:

Pertama: Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap;

Kedua: Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Ketiga: Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa;

Keempat: Meningkatnya pelaksanaan politik luar Negeri yang bebas aktif untuk kepentingan Nasional;

Kelima: Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Pancakrida Kabinet Pembangunan IV hakekatnya merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Saptakrida Kabinet Pembangunan III dahulu. Dengan demikian kiranya terjamin kesinambungan program-program nasional dari kurun waktu lima tahun yang lalu dengan program nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang dengan kecenderungan yang makin menyempurnakan dan meningkat dari tahap satu ke tahap berikutnya.

Dalam susunan Kabinet Pembangunan IV ini program pembangunan untuk penyiapan pemukiman transmigrasi tidak lagi menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum, melainkan dialihkan menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri Transmigrasi secara penuh.

Kabinet Pembangunan IV lahir dalam situasi pembangunan yang dihadapkan kepada ujian dan tantangan berat dari resesi ekonomi dunia dan konflik yang masih melanda dunia yang berkepanjangan. Resesi ekonomi dunia untuk kurun waktu lima tahun mendatang diperkirakan masih memberikan dampak dan pengaruh yang demikian hebat, sehingga sejak tahun 1983 akibat-akibatnya telah terasa membahayakan kelanjutan pembangunan nasional. Tekanan terhadap pembangunan makin terasa bertambah berat karena menurunnya harga minyak bumi.

Dalam situasi yang demikian itu demi menjaga kesinambungan pembangunan dan memelihara tertib kehidupan konstitusional, Kabinet Pembangunan IV mulai bekerja pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1983/1984 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Repelita III. Sesuai dengan keadaan perekonomian yang sulit maka didalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sikap hemat dan prihatin harus ditunjukkan oleh segenap aparatur pemerintahan, sehingga dapat menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat.

Betapapun beratnya situasi dan tantangan yang dihadapi, namun
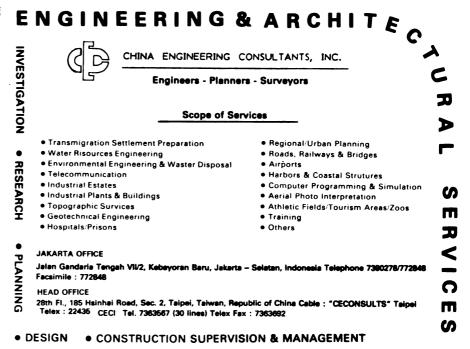
Pemerintah telah bertekad untuk melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun yang mendatang, termasuk menyusun dan melaksanakan Repelita IV, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Sebab, kurun waktu lima tahun mendatang setelah tahun 1983 merupakan kurun waktu yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan bangsa Indonesia lebih lanjut. Kurun waktu Repelita IV sudah melewati pertengahan serta menjelang tahap purna perjalanan pembangunan jangka panjang, ke arah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam kurun waktu ini Angkatan 45 akan makin mendekati perampungan tugas sejarahnya dan mulai menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada generasi penerus.

Sambutan hangat pada setiap kunjungan Menteri P.U ke daerah-daerah.

REPELITA IV.

23. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983 antara lain telah digariskan, bahwa dalam Pelita IV harus diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan lagi dalam Pelita V, sehingga dalam Pelita VI nanti Bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan Repelita IV ialah:

Pertama: Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Kedua: Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka dalam Pelita IV prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.

Berdasarkan Pola Umum Pelita Keempat yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983, maka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 Tahun 1984 tanggal 19 Maret 1984 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) 1984/1985 - 1988/1989. Kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai Repelita IV menurut tradisi konstitusional dituangkan dalam rencana tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kebijaksanaan Pemerintah lainnya. Rencana tahunan dari Repelita IV disusun dengan memperhatikan kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian dari Pelita IV.

Pemerintah menyadari bahwa dalam kesulitan perekonomian Indonesia sebagai dampak resesi
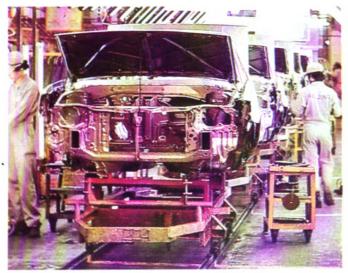
Peningkatan komoditi-komoditi ekspor untuk menunjang pembangunan.

ekonomi dunia, maka untuk membiayai pelaksanaan Repelita IV tidak dapat sekedar mengandalkan pada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam, tetapi harus dapat diusahakan peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dan sumber-sumber lain di luar minyak bumi dan gas alam, dengan peningkatan ekspor komoditi dan jasa serta pariwisata.

Dalam Repelita IV akan dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan delapan jalur pemerataan akan ditingkatkan dan makin diperluas dalam rangka pelaksanaan prinsip pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga secara keseluruhan keadilan sosial mendapat perhatian yang lebih besar dalam Pelita IV.

Menteri PU Ir. Suyono Sosrodarsono dengan salah satu anggota Komisi V di tengah-tengah masyarakat di daerah Magelang — Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai unsur kedua Trilogi Pembangunan, yang merupakan prasyarat bagi tercapainya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, akan dicapai melalui kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor, yaitu: sektor Pertanian, industri, pertambangan, perdagangan dan lain-lain dengan tetap berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja.

Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum berupa sarana dan prasarana fisik harus dapat menunjang dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang bersifat strategis dalam pembangunan nasional dan yang pada gilirannya mendorong terwujudnya tujuan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam menunjang dan mendukung sektor pembangunan diartikan:

(1) Mewujudkan peranan fungsional dari Program bidang Pekerjaan Umum dalam merealisasikan tuntutan kebutuhan masyarakat.

(2) Secara aktif memikirkan dan merumuskan pola pendekatan penunjangan sektor yang terkait, khusus perencanaan dan pengembangan tata ruang, perencanaan kota, terpadu dalam satu paket penunjangan sektor pembangunan di berbagai wilayah.

(3) Pada dasarnya semua sektor pembangunan harus ditunjang dan didukung dengan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum.

Sektor pembangunan yang terkait langsung dengan program pembangunan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum dalam Repelita IV ialah: peningkatan produksi pangan dan ekspor bahan pertanian: pembangunan industri pengembangan energi: pembangunan perhubungan: pembangunan transmigrasi: peningkatan kesehatan masyarakat: pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup: pengembangan pariwisata: pengembangan koperasi: tenaga kerja dan dunia usaha.

Strategi pembangunan yang ditempuh Departemen Pekerjaan Umum dalam Repelita IV ialah:

(1) Menunjang secara terkoordinasi dan sinkron program-program nasional penting, yang bertujuan

meningkatkan taraf hidup masyarakat baik ekonomis maupun sosial;

(2) Mendorong terwujudnya keseimbangan tingkat pertumbuhan antar wilayah, yang diukur dengan tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan;

(3) Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum yang mampu mendorong adanya tingkat kemudahan yang merata bagi masyarakat, sehingga melancarkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan bidang sehari-hari, dalam kegiatan berusaha dan dalam mendapatkan/memanfaatkan kesempatan kerja;

(4) Memadukan berbagai langkah penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral, yang meliputi penanganan bersama dalam perancangan/perencanaan, pendayagunaan pencapaian sasaran serta dalam sinkronisasi pengadaan dan pendayagunaan dana dengan mengadakan konsultasi sektoral dan regional;

(5) Mengusahakan kelancaran jasa distribusi dalam rangka memperlancar pemasaran produksi, dan dalam menekan biaya angkutan;

(6) Memanfaatkan secara optimal potensi sumber air dan lahan dalam wilayah-wilayah sungai (atau sistem sungai tertentu) dengan memadukan berbagai kegiatan lintas sektoral, khususnya kegiatan-kegiatan yang mendayagunakan sumber daya air ke dalam suatu rencana Pengembangan Wilayah Sungai sebagai suatu cara pendekatan wilayah dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber air.

(7) Menggunakan semaksimal mungkin bahan dalam negeri, dan meningkatkan kemampuan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah yang bonafide; diusahakan peningkatan kemampuan para Kontraktor dan Konsultan Nasional sebagai mitra *(partner)* dalam pembangunan dan untuk meningkatkan peranan para Kontraktor dan Konsultan Nasional tersebut dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional;

(8) Meningkatkan pengaturan dan pengawasan, pembinaan dalam bidang Pekerjaan Umum untuk meningkatkan tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pemanfaatan.

Berdasarkan strategi pengembangan tersebut di atas, maka kebijaksanaan pembangunan dalam Repelita IV di bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

(1) Memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap proyek-proyek yang dapat cepat berfungsi untuk

Daerah aliran sungai.

menunjang keberhasilan sektor-sektor strategis dalam pembangunan.

(2) Memberikan perhatian utama terhadap proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak di daerah-daerah yang padat penduduknya. Penggunaan alat-alat berat hanya dilakukan untuk membantu tenaga manusia atau jika pekerjaan itu memang harus dilaksanakan dengan alat-alat berat dan/atau di daerah-daerah yang sulit mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan;

(3) Menempuh pentahapan dalam menyelesaikan sasaran pembangunan, dalam arti sasaran fungsional tidak diselesaikan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, maka tahun-tahun pertama pembangunan sebelum sasaran keseluruhan dapat diselesaikan, bangunan-bangunan, prasarana telah dapat berfungsi pada tingkat tertentu dengan catatan bahwa hal itu secara teknik dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Menempuh pentahapan dalam memenuhi standar sasaran pembangunan, dalam arti persyaratan standar teknik terbaik akan dicapai secara bertahap sesuai dengan dana yang dapat disediakan;

(5) Mengenai proyek-proyek besar, prioritas diberikan kepada proyek-proyek lanjutan dan proyek-proyek pembangunan prasarana yang langsung mendukung dan menunjang produksi pangan, pengembangan industri dan peningkatan perhubungan sesuai dengan prioritas yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1983 dengan segala segi keperluan prasarana;

(6) Memantapkan pendayagunaan dan penertiban pemanfaatan hasil-hasil pembangunan prasarana Pekerjaan Umum;

(7) Meningkatkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
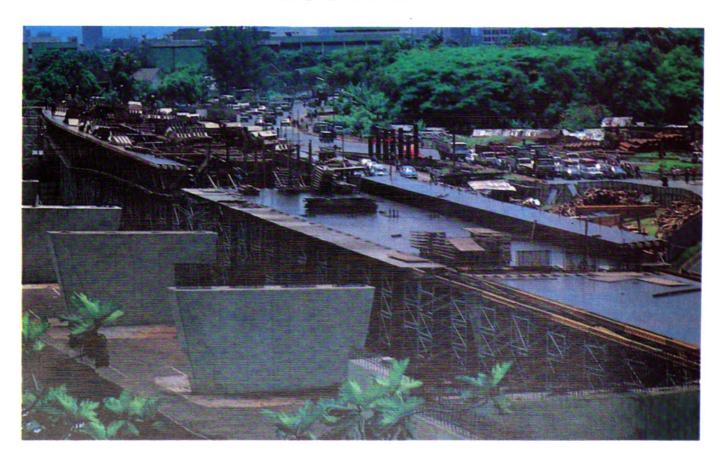
Tahap pembangunan jalan tol.
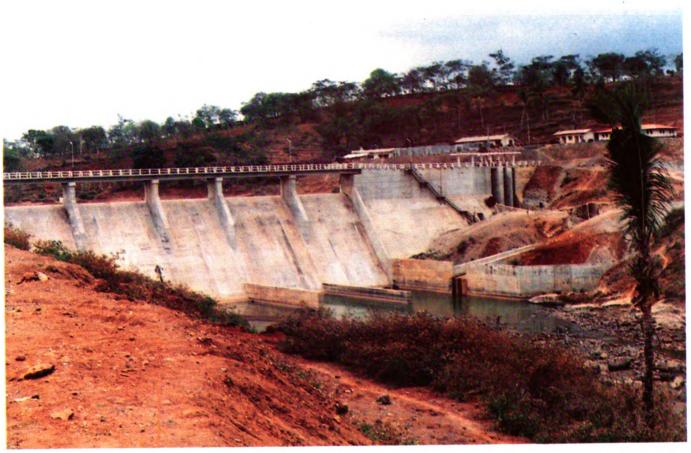
Bendung Padang Sappa Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Pengerjaan Saluran.

rangka pendayagunaan sumber daya yang tersedia seperti: dana, bahan-bahan dan alat-alat serta sumber daya manusia;

(8) Memanfaatkan secara efektif bantuan luar negeri sebagai unsur komplementer untuk lebih mempercepat terwujudnya pembangunan prasarana fisik dan sarana di bidang Pekerjaan Umum.

a. Pengairan

Untuk menunjang pembangunan pertanian khususnya peningkatan produksi pangan dalam Pelita IV dilaksanakan proyek-proyek di bidang Pengairan, sebagai berikut:

P.T. LEPEN KENCANA UTAMA
ENGINEERING, CONTRACTOR & DEVELOPER
Jl. Danau Gelinggang No. 8, Jakarta 10210. Phone 582830

ECI

EBARA
EBARA
NAMA UNTUK SEGALA POMPA
Dari pompa untuk distribusi air bersih, pompa air kotor, pompa proses, pompa tambak, pompa irigasi sampai pompa untuk menanggulangi banjir, EBARA lah jawabannya. Kualitas andal, suku cadang/pelayanan purna jual terjamin.
Untuk segala persoalan pompa, hubungi Showroom:
• Jl. Gunung Sahari Raya 57 G Jakarta 10610
• Telepon: 420-9908 • Telex: 49128 PALCO IA • Fax: 414-318

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. HUTAMA KARYA
CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS
" MITRA TERPERCAYA DALAM BERKARYA "
KANTOR PUSAT :
JL. LETJEN HARYONO MT. KAV. NO. 8
PO BOX 172 JATJG, JAKARTA 130001
TELP : 8193708, TELEX : 48113 HK. IA, FAX : 8196107

BERSAMA ANDA KAMI MEMBANGUN
MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK
Dirgahayu 45 th masa Bhakti Dep. P.U
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990
P.T. MULTI KONTRINDO PERKASA
GENERAL CONTRAKTOR'S
Wisma BCA 5Th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 22 - 23 Jakarta 12920
Phone 5782373, 5782374, 5782344 (8 Lines) Facsimile : 5782343,
Telex 625772 BSW IA

euroconsult
CONGRATULATES DEPT. P.U. ON
THE OCCASION OF 45 TH ANNIVERSARY
AND THEIR ACHIEVEMENTS
SO FAR AND .... WILL GLADLY
ASSIST YOU IN YOUR CHALLENGING
TASKS AHEAD.

(1) Perbaikan dan pemeliharaan prasarana pengairan;

(2) Pembangunan Jaringan irigasi;

(3) Pengembangan daerah rawa.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pengairan tersebut di atas ditempuh kebijaksanaan pengembangan secara bertahap yang efektif, sehingga setiap tahapan sudah segera dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

Proyek perbaikan dan pemeliharaan prasarana pengairan dimaksudkan untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana pengairan dalam penyediaan air irigasi serta menjaga tingkat pelayanan yang sudah ada sesuai dengan yang direncanakan terutama dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi penanaman padi (Bimas, Inmas, Insus) termasuk usaha pengembangan perikanan tambak. Usaha dan kegiatan tersebut berupa: perbaikan dan penggantian saluran dan bangunan air, perbaikan bendungan/waduk, pengamanan bangunan pengairan yang sudah dalam kondisi kritis, serta tambahan saluran dan bangunan irigasi termasuk tersier agar air irigasi dapat dimanfaatkan lebih merata dan efektif di tingkat usaha tani. Di samping itu juga dapat memberikan pelayanan tani dan dapat memberikan pelayanan bagi penyediaan air bagi keperluan di luar sektor pertanian seperti: air baku untuk air minum, industri, penggelontoran dan lain sebagainya.
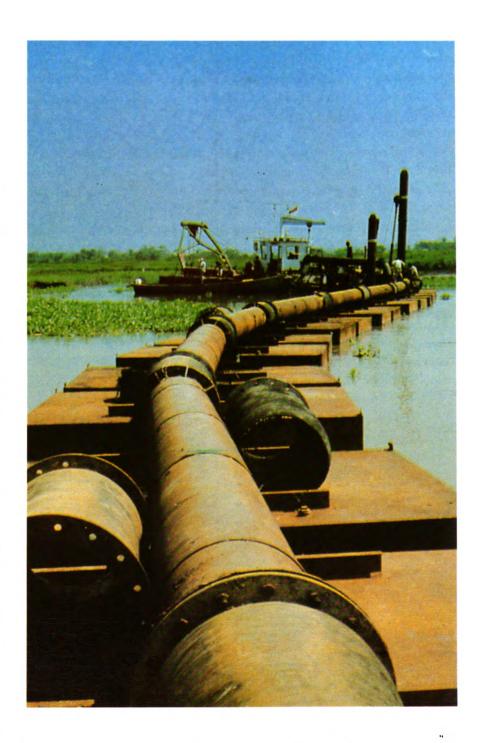
Kapal keruk sedang disiapkan dalam rangka rehabilitasi prasarana pengairan di proyek serbaguna Jatiluhur.

Untuk menjaga agar jaringan irigasi tetap dalam keadaan baik dan dapat berfungsi serta dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya diperlukan usaha pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai. Untuk itu di samping pemantapan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan reklamasi dilakukan penyuluhan bagi para petani pemakai air, yang dihimpun dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan lembaga-lembaga lainnya dalam cara pengelolaan pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan irigasi, agar mereka dapat memberikan peran sertanya secara berdaya guna.

Usaha perbaikan jaringan irigasi dalam Repelita IV meliputi areal pengairan seluas 360.000 hektar tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, antara lain: Jatiluhur, Cirebon dan Rentang di Jawa Barat; Pemali Comal dan Semarang Barat di Jawa Tengah; Madiun, Kediri dan beberapa daerah Jawa Timur; Aceh Utara dan Barat; Simalungun di Sumatera Utara; Way Sekampung di Lampung Tengah; Sulawesi Selatan; Lombok, Sumbawa, Flores dan lain-lain.

Proyek pembangunan jaringan irigasi bertujuan untuk menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, berupa perluasan sawah dengan irigasi teknis baik areal yang semula berupa sawah tadah hujan, atau lahan pertanian tanah kering, atau lahan perkebunan maupun lahan baru.

Pembangunan irigasi yang direncanakan dan dilaksanakan dalam Repelita IV meliputi areal seluas 600.000 hektar dan jaringan tersier seluas 720.000 hektar, yang terdiri dari:

(1) Pembangunan jaringan Irigasi Sedang - Kecil yang tersebar dan menjangkau daerah-daerah terpencil hampir di semua propinsi dengan biaya yang relatif rendah dan dapat segera berfungsi;
(2) Pengembangan irigasi khusus, yang pada umumnya merupakan pembangunan irigasi besar, yang dilengkapi dengan bangunan bendungan/waduk besar untuk menjamin penyediaan air terutama pada musim hujan;
(3) Pengembangan air tanah di daerah-daerah yang rawan dan langka air permukaan untuk kepentingan pertanian dan keperluan rumah tangga.

Program yang ketiga untuk menunjang perluasan areal pertanian ialah pengembangan daerah rawa dengan memanfaatkan lahan rawa pasang surut dan rawa bukan pasang surut. Usaha ini dikaitkan pula dengan kegiatan transmigrasi dan pemukiman penduduk dan dilaksanakan dengan mengadakan

Jembatan Comal — Jawa Tengah

JALAN ARTERI LINTAS TIMUR SUMATERA MENJANJIKAN MASA DEPAN YANG CERAH.
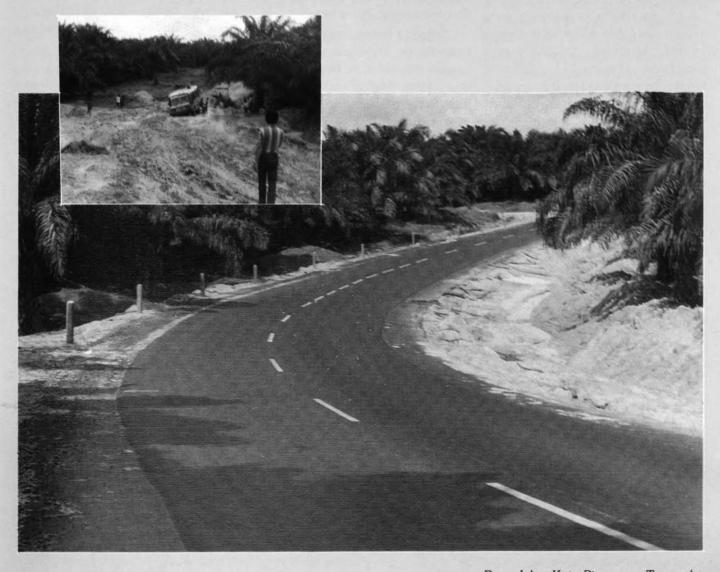
Ruas Jalan Kota Pinang – Torgamba

Belahan timur Sumatera dewasa ini masih memiliki potensi yang belum dikembangkan secara maksimal. Potensi dimaksud ialah lahan yang begitu luas yang ternyata sangat cocok untuk menambang "emas hijau", kelapa sawit dan karet serta tanaman komoditi agro bisnis lainnya.

Menurut catatan, di Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan terdapat sekitar 3,50 juta hektar lahan bergambut yang sangat cocok untuk tanaman kelapa sawit, kelapa hibrida dan sejenisnya. Sebagian dari areal tersebut, saat ini sudah mulai digarap, berupa hamparan perkebunan baru kelapa sawit dan karet serta kelapa hibrida, terutama di Riau, yang jumlahnya sudah mendekati 200.000 hektar. Sementara areal lainnya yang masih berupa hutan baik di Jambi maupun Sumatera Selatan, telah diproyeksikan untuk tanaman serupa.

Pengembangan belahan timur Sumatera itu secara ekonomis akan sangat berperan dalam rangka semakin meningkatkan kemampuan ekspor non migas kita yang terus-menerus harus semakin digalakkan.

Dalam usaha mendukung perkembangan ke depan dan menggarap potensi yang begitu besar, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalan, jembatan dan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting, disamping penyediaan sumber daya manusia yang akan mengolah dan menangani agro bisnis ini.

Dalam kaitan inilah sejak akhir Pelita III lalu, Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga mulai merintis, membuka dan menangani ruas-ruas jalan di timur Sumatera tersebut, yang lebih dikenal dengan jalan arteri lintas timur Sumatera. Yang dimaksud dengan jalan arteri lintas timur Sumatera itu ialah ruas jalan yang menghubungkan ujung utara pulau Sumatera di Banda Aceh sampai dengan ujung selatan Sumatera, Bakauheni di Lampung, melalui route Banda Aceh – Medan – Rantau Prapat – Dumai – Pakan Baru – Japura – Merlung – Jambi – Palembang – Kayu Agung – Menggala – Terbanggi Besar – Bandar Lampung – Bakeuheni. Dari sini dengan ferry terus ke Merak. Untuk ruas ini melalui Propinsi Daerah Istimewa Aceh – Sumatera Utara – Riau – Jambi – Sumatera Selatan dan Lampung.

Selain itu, hubungan darat antara ujung utara Sumatera ke ujung selatan pulau ini dapat ditempuh melalui jalan yang lebih dikenal dengan nama Lintas Sumatera. Yakni ruas jalan
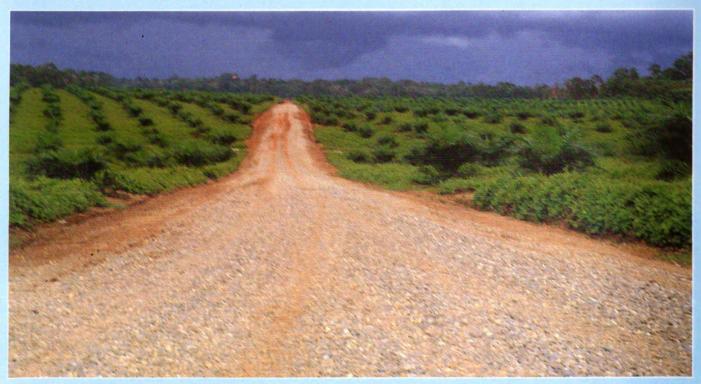
Sarana-sarana jalan dibangun untuk memperlancar pengangkutan hasil-hasil perkebunan

yang menghubungkan Banda Aceh – Medan – Padang – Sidempuan – Bukit Tinggi – Muara Bungo – Lubuk Linggau – Kotabumi – Bandar Lampung – Bakauheni. Jalan lintas Sumatera Utara – Sumatera Barat – Jambi – Sumatera Selatan – Lampung ini, untuk saat sekarang lebih tepat disebut sebagai lintas tengah, karena sejak beberapa tahun terakhir dikembangkan pula ruas jalan yang dapat disebut sebagai lintas barat Sumatera, yakni Banda Aceh – Meulaboh – Tapak Tuan – Sidikalang – Sibolga – Simpang Empat – Pariaman – Padang – Painan – Muko-muko – Bengkulu – Mana – Bintuhan – Krui – Kotabumi – Bandar Lampung. Route ini melalui Propinsi Daerah Istimewa Aceh – Sumatera Utara – Sumatera Barat – Bengkulu – Lampung. Untuk lintas barat tersebut, saat ini tengah dalam penyelesaian "penembusan" hubungan antara Sumatera Barat – Sumatera Utara di pantai barat perbatasan kedua propinsi, yang pengalokasian dananya, menggunakan dana APBD Pemda setempat.

Akhir Pelita V

Program penanganan ruas jalan di lintas timur Sumatera seperti telah dikemukakan di atas, direncanakan pada akhir Pelita V sudah selesai seluruhnya, sehingga hubungan antar propinsi di Pulau Sumatera ataupun antar propinsi di Sumatera dengan pulau Jawa, akan mempunyai banyak pilihan. Upaya penanganan ruas-ruas jalan di lintas timur tersebut, dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Dari data-data di atas, dengan penanganan jalan arteri lintas timur sepanjang 2.418,9 Km itu, maka pada akhir Pelita V, memasuki periode tinggal landas dalam Pelita VI, kawasan sepanjang pantai timur pulau Sumatera dapat diharapkan berkembang pesat. Semua potensi yang mungkin dapat dikembangkan di daerah ini, akan memperoleh kemudahan dalam hal prasarananya. Saat ini saja, dalam keadaan penanganan ruas pantai timur belum selesai, indikasi perkembangannya memberikan janji cerah di masa depan. Sebagai contoh, bus jarak jauh, Medan – Jakarta, cukup berkembang pesat, dengan mengambil route Medan – Dumai – Lubuk Linggau – Bandar Lampung – Jakarta. Indikasi lain, di sepanjang jalan mulai dari Kisaran – Rantau Prapat, dapat kita lihat peremajaan perkebunan kelapa sawit, karet, penanaman komoditi baru, cokelat dan sebagainya.

Pada ruas Banda Aceh – Medan, potensi pertanian pantai timur Aceh yang subur, kawasan industri Lhok Seumawe, dengan sendirinya akan semakin berkembang pula. Di samping itu, Pemerintah melalui Direktorat Rawa Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum tengah menangani irigasi tambak rakyat seluas 3.000 hektar yang tentunya akan memberi manfaat bagi petani tambak setempat. Pada saatnya nanti, produk udang dari daerah ini diharapkan tidak sekedar memenuhi konsumsi lokal, tapi juga dapat mensuplai daerah lain disamping untuk ekspor.

Sedangkan di sepanjang jalan antara Rantau Prapat – Kota Pinang – Torgamba – Dumai, dapat kita saksikan terhampar begitu luas perkebunan kelapa sawit dan perkebunan baru, yang telah mulai berproduksi. Untuk ruas Pakan Baru – Simpang Japura – batas Jambi, dapat kita lihat perkebunan baru, khususnya kelapa sawit dan karet yang mulai tumbuh membesar. Satu dua tahun lagi, mulai berproduksi. Sementara ruas Merlung – Jambi – Palembang – tersedia lahan yang siap untuk dibuka sebagai areal perkebunan pula.

Dalam rangka mendukung perkembangan yang akan begitu pesat di masa datang, sudah barang tentu pelabuhan-pelabuhan ekspor akan ditangani pula, karena bila mengandalkan pelabuhan yang ada sekarang. Belawan – Dumai – Palembang, maka jarak angkut produk kelapa sawit/CPO ke pelabuhan akan terlalu jauh, yang akan membawa akibat menurunnya mutu CPO tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga jual.

Oleh karenanya, untuk mendukung pelabuhan ekspor yang direncanakan di Kuala Enok (Riau), ditangani pula ruas jalan dari arteri timur ke pelabuhan tersebut, yakni ruas Kuala Enok – Siberida sepanjang 81 km, dengan perkiraan biaya sekitar Rp 14 milyar.

Di Sumatera Selatan, akan dikembangkan pelabuhan ekspor Tanjung Siapi-api, mengingat pelabuhan Palembang di sungai Musi semakin hari semakin dangkal, sehingga saat ini hanya mampu beroperasi delapan jam sehari.

Dalam rangka ini, akan dibangun jalan antara Palembang – Tanjung Siapi-siapi yang berjarak 74 km, mulai Km 20 pada ruas jalan antara Palembang – Betung yang saat ini telah selesai ditingkatkan. Untuk pelaksanaan konstruksinya, memerlukan biaya sekitar Rp 18 milyar, dan sekarang sedang dalam tahap study kelayakan.

Soil Cement

Disamping analisis yang menjanjikan masa depan cerah atas pengembangan prasarana jalan di pantai timur Sumatera ini, maka dalam pelaksanaannya di lapangan bukannya tidak menghadapi persoalan-persoalan. Dari aspek teknologi dan konstruksi, masalah "miskinnya" quarry di daerah Riau – Jambi dan Sumatera Selatan, mendorong diintrodusirnya soil semen sebagai pengganti batu dan pasir. Apabila direntang memanjang, volume soil semen untuk memperkuat badan jalan ini jumlahnya cukup besar. Mulai dari ruas Toramba – Dumai, Pakan Baru – Batas Jambi, Merlung – Jambi, terus ke Betung – Palembang, dengan rentang jarak lebih dari 1.000 Km.

Dengan modal pengalaman menangani teknologi soil semen tersebut, baik pelaksana proyek maupun konsultan dan kontraktor, maka untuk menghadapi masalah yang sama di daerah lain, akan menjadi semakin mudah.

Aspek lain dari kemajuan yang akan dicapai di daerah sepanjang pantai timur Sumatera ini ialah masalah kesempatan kerja yang akan terbuka luas di sektor agro bisnis sekaligus akan merubah komposisi demografi atau kependudukan setempat, yang semula merupakan daerah kosong, menjadi daerah penyebaran penduduk. Dari segi Hankamnas ini tentunya akan membawa dampak positif pula.

Dari gambaran di atas, pembangunan prasarana jalan di pantai timur Sumatera yang akan membawa pengaruh bagi kemajuan ekonomi, kesempatan kerja dan kependudukan, teknologi serta Hankamnas itu, maka memang tidak berlebihan bila dikatakan bahwa upaya Pemerintah menangani jalan dan jembatan pada arteri lintas timur tersebut, benar-benar menjanjikan masa depan cerah.

PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN LINTAS TIMUR SUMATERA 1989 – 1992.

No.	Propinsi	Panjang jl/jbt.	Program Penanganan				Keterangan
			89/90	90/91	91/92	92/93	
1.	D.I. Aceh	491 1,526	13 152	78 79,5	145 795	– 200	Penanganannya dilaksanakan secara bertahap, tidak pada semua ruas jalan, karena ditangani sebelumnya.
2.	Sumatera Utara	487	–	–	–	–	
3.	Riau	639 1,240	195 300	37 640	201 300	206 –	
4,	Jambi	207,7 –	– –	68,2 –	107,7 –	56 –	
5,	Sumatera Selatan	303 490	49,75 –	8,25 290	126,5 100	56 –	
6.	Lampung	291 914	35 552	15 100	115 150	126 142	
	Total	2.418,9 5,513	292.75 1,004	206,45 1.109,5	695,2 1,345	644 0,342	km km
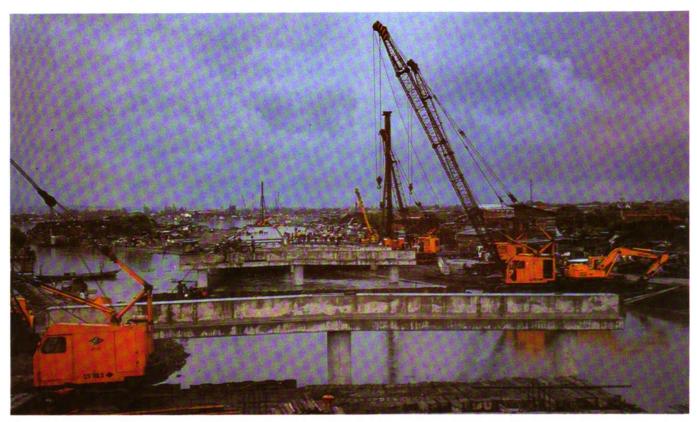
Proyek Jembatan Boesem, merupakan bagian Jalan Tol Surabaya–Gempol– (Malang)

reklamasi lahan rawa berupa pembuatan saluran dan pematusan *(drainase)*, agar sawah rawa yang tidak produktif dapat dikembangkan menjadi daerah pusat produksi pertanian baru. Dalam Repelita IV direncanakan dan dilaksanakan reklamasi lahan rawa sebagai berikut:

(1) Lahan rawa pasang surut seluas 310.000 hektar, dan

(2) Lahan rawa non pasang surut seluas 150 hektar.

Dalam rangka program ini dilaksanakan pula peningkatan kondisi jaringan pematusan *(drainase)* rawa yang telah ada tetapi belum sempurna dan melengkapi dengan bangunan pelengkap yang diperlukan, agar prasarana tersebut dapat tetap berfungsi dengan baik.

b. Bina Marga

Kebijaksanaan pembangunan di bidang jalan dan jembatan dalam Repelita IV ditujukan untuk memberikan prioritas kepada proyek-proyek yang dapat cepat diselesaikan dengan biaya yang relatif rendah dan dengan mutu yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan. Dalam memenuhi standar teknis terbaik ditempuh cara pentahapan dengan menitikberatkan pada kekuatan struktur dan menomor-duakan geometri jalan, dengan catatan bahwa pengamanan keselamatan pemakai jalan terhadap kecelakaan lalu-lintas tetap harus dilakukan.

Pelaksanaan program di bidang jalan dan jembatan diarahkan kepada berfungsinya jaringan jalan secara satu kesatuan yang efisien, baik jalan arteri, kolektor maupun jalan lokal agar tidak mengalami hambatan setempat dalam pelayanan terhadap jasa angkutan yang dibutuhkan.

Dalam Repelita IV pembangunan jalan mengutamakan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya, termasuk jaringan jalan yang mendukung pengembangan pemukiman transmigrasi. Di samping itu diutamakan pula menurut tingkat keperluan jaringan jalan yang meningkatkan hubungan dengan kawasan industri, menghubungkan pelabuhan dengan daerah-daerah pedalaman *(hinterland)* dan membuka daerah-daerah potensi yang selama ini terisolir. Pembangunan jaringan jalan hakekatnya untuk meningkatkan arus barang serta jasa dan mobilitas manusia antar daerah, yang pada akhirnya menunjang usaha-usaha untuk pembangunan bangsa *(nation building)*.

Program di bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan dalam Repelita IV terdiri dari:

(1) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk
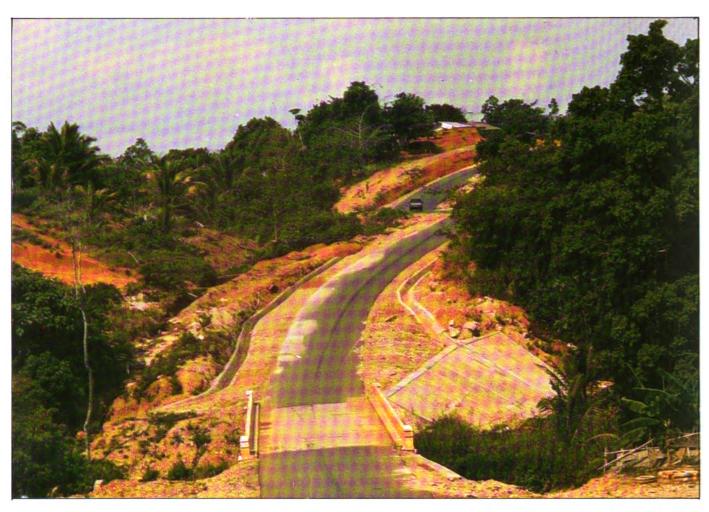
Peningkatan jalan di Bengkulu

mempertahankan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ditingkatkan dan berada dalam kondisi mantap agar sesuai dengan tingkat pelayanan yang diperlukan. Rehabilitasi jalan meliputi jaringan jalan sepanjang 18.500 kilometer; sedang pemeliharaan dilakukan untuk jaringan jalan sepanjang 97.775 kilometer.

Proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek

(2) Penunjangan jalan dan jembatan berupa pekerjaan perbaikan dengan tujuan agar jalan dan jembatan yang belum mantap dapat tetap berfungsi melayani lalu-lintas. Kegiatan itu berupa perataan jalan-jalan beraspal, berkerikil, dan jalan-jalan tanah serta pematusannya agar jalan tidak terputus. Pekerjaan penunjangan jalan itu dalam Repelita IV dilakukan beberapa kali dan meliputi seluruhnya sepanjang 79.020 kilometer.

(3) Usaha peningkatan dilakukan pada jalan dan jembatan yang belum mantap agar mampu melayani lalu-lintas yang

diperkirakan akan terus meningkat dengan masa pelayanan 5-10 tahun dan masa pelayanan di atas 10 tahun. Program peningkatan jalan dan jembatan dalam Repelita IV meliputi jalan sepanjang 18.205 kilometer dan jembatan 50.000 meter.

(4) Pembangunan yang berupa pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan baru dilaksanakan di beberapa kota besar agar dapat menampung pertumbuhan lalu-lintas kota; serta di beberapa tempat untuk menunjang daerah transmigrasi, pertanian, dan pemekaran kota. Selama Repelita IV sasaran pembangunan dengan konstruksi baru meliputi jalan sepanjang 1.280 kilometer dan jembatan 5.250 meter.

Di daerah dan tempat tertentu di usahakan melibatkan masyarakat pemakai jalan untuk ikut membiayai pembangunan jalan-jalan baru melalui sistem jalan tol dalam rangka mendukung dan menunjang berbagai sektor strategis bagi perkembangan perekonomian.

Salah satu instalasi air bersih dengan sistim paket/modul.

Pemanfaatan air bersih langsung dirasakan masyarakat

c. Cipta Karya

Pembangunan perumahan dan pemukiman sesuai dengan pengarahan yang diberikan GBHN 1983, ditujukan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, juga diarahkan kepada sasaran untuk lebih meratakan hasil-hasil pembangunan dan menunjang pembangunan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja .

Peningkatan penyediaan sarana fisik seperti: perumahan, air bersih dan sarana penyehatan lingkungan pemukiman harus dapat terjangkau rakyat banyak, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman dalam Repelita IV merupakan kelanjutan dan peningkatan serta pemantapan keserasian antar program dalam Repelita III. Dalam rangka Program Perumahan Rakyat dalam Repelita IV dilakukan usaha dan kegiatan:

(1) Perbaikan dan peningkatan mutu perumahan desa dengan melalui pemugaran perumahan desa di sekitar 10.000 lokasi desa. Dalam hal ini diperhatikan pada desa nelayan, desa kritis, terbelakang dan miskin dan/ atau dalam rangka penanggulangan bencana alam.

(2) Perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota meliputi ± 400 kota dengan luas keseluruhan 15.000 hektar kampung untuk ± 3.000.000 orang. Di samping itu diusahakan perbaikan kawasan pusat kota di kota-kota sedang dan kecil dengan perintisan perbaikan lingkungan pemukiman pasar untuk ± 100 kota.

(3) Perintisan peremajaan kota di kota besar dan sedang, dengan melakukan konsolidasi pertanahan di dalam rangka penataan kembali penggunaan tanah perkotaan. Dalam hubungan ini diusahakan perencanaan tata ruang untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, pariwisata dan lain-lain.

(4) Pembangunan perumahan rakyat di daerah perkotaan sebanyak ± 300.000 unit rumah, yang terbagi atas:
- — 140.000 unit dibangun oleh Perum Perumnas,
- — 160.000 unit dibangun oleh masyarakat dengan bantuan kredit pemilikan rumah oleh BTN.

Untuk menanggulangi kebutuhan perumahan di kota-kota besar dimana lahan tersedia sudah sangat terbatas dan harganya sudah membubung tinggi, di-
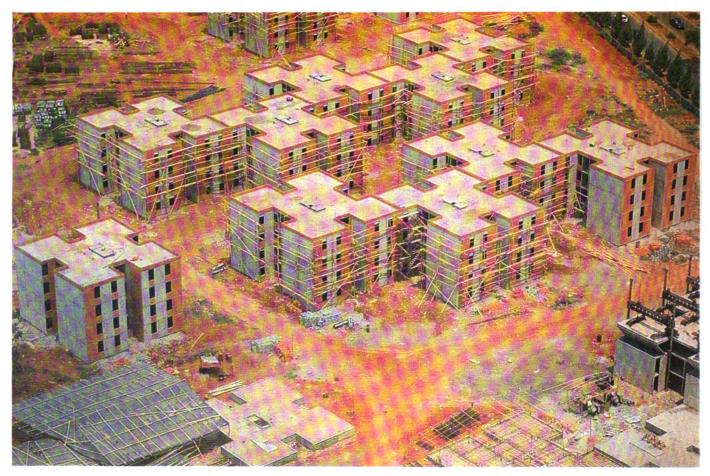
Kawasan perumahan Pulo Mas — Jakarta

Penjernihan air minum Pulo Gadung — Jakarta

usahakan pembangunan rumah-rumah susun (bertingkat).

Dalam usaha pembangunan rakyat dan perbaikan lingkungan perlu diikut-sertakan potensi organisasi seperti LKMD, Gerakan Pramuka, ABRI masuk desa, KKN, BUTSI dan lain-lain untuk membantu meningkatkan usaha pembangunan perumahan dan perbaikan lingkungan.

Program yang tidak kurang pentingnya bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat ialah penyediaan prasarana air bersih untuk kemantapan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih sebesar 60 liter perorang per hari bagi semua pemukiman kota. Seluruh potensi kapasitas air bersih dimanfaatkan untuk dapat memperluas penyediaan pelayanan air bersih bagi 75% jumlah penduduk kota, yaitu di ± 350 kota besar, sedang dan kecil serta 600 ibukota Kecamatan (IKK). Rehabilitasi juga dilakukan terhadap sistem produksi, dan sistem distribusi air bersih, yang sudah mengalami kemunduran dalam kemampuan pelayanannya.

Dalam kurun waktu 1983-1986 proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum, yang telah diresmikan penggunaan atau berfungsinya oleh Presiden Republik Indonesia antara lain:

— Proyek Pembangunan Jalan Pakanbaru - Dumai di Dumai Riau yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 28 Juli 1983.

— Proyek Pembangunan Jalan Meulaboh - Tapaktuan di Daerah Istimewa Aceh, yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 2 Agustus 1983.

— Proyek Pembangunan jalan Jambi Muara Bungo - Lubuk Linggau di Sumatra yang telah diresmikan tanggal 7Mei 1984.

— Proyek Irigasi Way Rarem dan Proyek Pembangunan Jembatan Tulang Bawang di Lampung yang telah diresmikan pemanfaatannya dan penggunaannya tanggal 14 Juli 1984.

— Proyek Pembangunan Rumah Susun Perum Perumnas di Kebon Kacang, Tanah Abang Jakarta, yang penghuniannya telah diresmikan pada tanggal 8 September 1984.
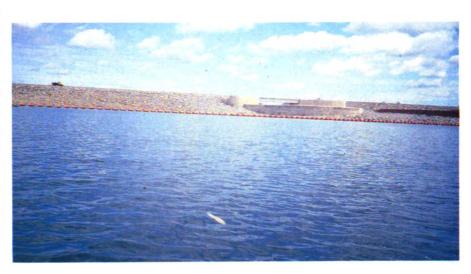
Bendungan Way Rarem – Lampung

Proyek Jalan Pekan Baru – Dumai

Jembatan Mahakam — di Kalimantan
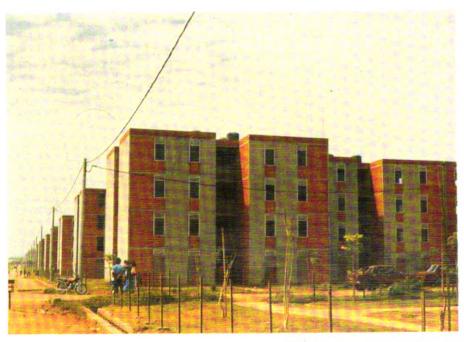
Rumah-rumah susun Klender

- Proyek Pembangunan Waduk Song Putri di Kabupaten Wonogiri Sala, yang diresmikan pemanfaatannya pada tanggal 22 Agustus 1985.
- Proyek Pembangunan Rumah Susun Perum Perumnas di Klender, Jakarta, yang telah diresmikan penghuniannya pada tanggal 3 September 1985.
- Proyek Jaringan Pematusan Tulung Agung dan Jalan Tol Surabaya - Gempol di Jawa Timur, yang diresmikan pada tanggal 26 Juli 1986.
- Proyek Pembangunan Jembatan Mahakam di Kalimantan Timur, yang penggunaannya diresmikan pada tanggal 2 Agustus 1986.

Organisasi dan Tata Kerja pada Repelita IV

23. Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, maka Susunan Organisasi Departemen yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974, diatur kembali sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984.

Berdasarkan ketentuan baru tersebut di atas, dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211/KPTS/1984 tanggal 2 Agustus 1984 ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Dengan berlakunya keputusan tersebut maka semua ketentuan di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 145/KPTS/1975 jis Nomor 112/-KPTS/1977 dan Nomor 160/-KPTS/1980 dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengenai Depot Peralatan Jalan (Pasal 493 Keputusan Menteri PUTL Nomor 145/KPTS/1975) dan yang mengenai Pendidikan Wilayah (pasal 739 s.d. 741 Keputusan Menteri PUTL Nomor 145/KPTS/1975).

Dalam susunan organisasi tersebut terdapat satu organisasi eselon I baru, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, yang membawahi :

- Sekretariat Balitbang,
- Puslitbang Pengairan,
- Puslitbang Jalan,
- Puslitbang Pemukiman.

Masing-masing Puslitbang membawahi beberapa Balai Penyelidikan, dan loka-loka perintisan yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 316/KPTS/1985 sampai dengan Nomor 325/KPTS/1985 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Organisasi Proyek terdiri dari 7 (tujuh) Pola proyek, Yaitu :

- Pola I : untuk Proyek-proyek yang sederhana.
- Pola II A : untuk Proyek-proyek yang mempunyai Sub Proyek.
- Pola II B : untuk Proyek-proyek yang mempunyai Bagian Proyek.
- Pola II C : untuk Proyek-proyek yang mempunyai Bagian Proyek dengan lingkup tugas yang lebih besar.
- Pola III A : untuk Proyek-proyek yang merupakan Proyek Induk dan mempunyai beberapa Proyek.
- Pola III B : untuk Proyek-proyek Induk dengan beberapa Proyek dan lingkup tugas yang lebih besar.
- Pola III C : untuk Proyek-proyek Induk, yang membawahi beberapa Proyek dengan Sub Proyek-nya masing-masing.

Yang mendapat wewenang untuk menetapkan/membentuk unit pelaksana Proyek ialah :

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum atas nama
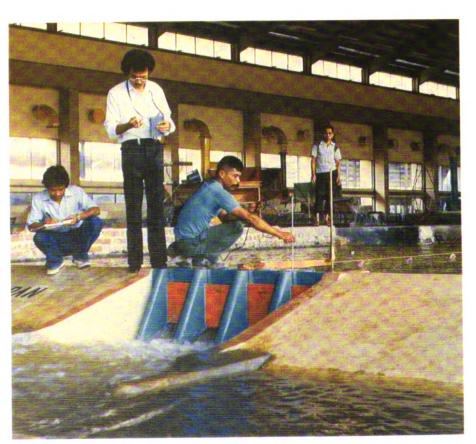
Model yang disiapkan oleh Puslitbang Air Bandung
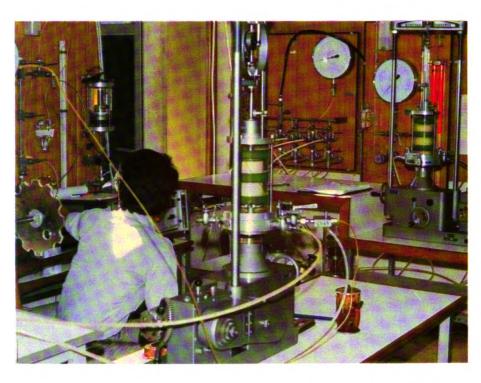
Peralatan Uji Mutu Puslitbang Jalan Bandung

Model Rumah tahan gempa Puslitbang Pemukiman Bandung

Menteri Pekerjaan Umum untuk Proyek-proyek APBN Daerah atau Proyek dalam rangka tugas pembantuan, yang pelaksanaan-nya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi atau Dinas Daerah Bidang Pekerjaan Umum, dengan menggunakan Pola I atau II A.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk Proyek-proyek APBN Pusat, yaitu Proyek yang dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja (Badan atau Unit Pelaksana Proyek), dengan menggunakan Pola I, II atau III.

Untuk kepentingan kemantapan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum di daerah, dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/KPTS/1983 tanggal 5 Oktober 1983 ditetapkan Hubungan Kerja antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum dengan Pemimpin Proyek yang melaksanakan Proyek-proyek dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum ditugaskan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum, termasuk program kerja Perum Perumnas, Perum Otorita Jatiluhur dan PT. Jasa Marga di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum ditugaskan sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek melaksanakan koordinasi penuh atas Proyek-proyek APBN Pusat, yang wilayah kerjanya terletak di lebih dari satu daerah Propinsi dan/atau yang meskipun letaknya di satu daerah Propinsi tetapi ruang lingkup tugas proyek terlalu besar atau terlalu

rumit *(sofisticated)*, atau yang memerlukan hubungan kerja yang sangat intensif dengan Badan Pemberi Bantuan Luar Negeri maka koordinasi penuh dilakukan oleh Direktur yang bersangkutan dan bertindak sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek, sedang Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum melakukan koordinasi tidak penuh (konsultatif dan informatif). Yang dimaksud dengan koordinasi penuh, ialah : koordinasi disertai usaha pengendalian; sedang koordinasi tidak penuh ialah koordinasi yang bersifat konsultatif dan informatif disertai usaha pengawasan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pekerjaan umum Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing mempunyai aparatnya, yang disebut Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (DPUP), dan Pekerjaan Umum Kabupaten dan/atau Kotamadya (PUK). Dinas Pekerjaan Umum Propinsi kecuali melaksanakan tugas-tugas Pekerjaan Umum yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam arti yang dibiayai dengan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), juga melaksanakan tugas-tugas Pekerjaan Umum yang diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum, yang biayanya dibebankan kepada APBN. Dan tugas terakhir ini adalah tugas pembantuan.

Mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri :

- Nomor 363 Tahun 1977 ditetapkan pedoman untuk pembentukan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Nomor 274 Tahun 1982 ditetapkan pedoman untuk pembentukan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, kepada :

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia,

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

diinstruksikan untuk membentuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977. Dalam instruksi tersebut antara lain ditentukan bahwa Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I pada pokoknya terdiri dari :

(1) Kepala Dinas,

(2) Bagian Tata Usaha, dengan empat Sub Bagian.

(3) Sub Dinas Bina Program, dengan tiga Seksi,

(4) Sub Dinas Pengairan, dengan empat Seksi,

(5) Sub Dinas Bina Marga, dengan empat Seksi,

(6) Sub Dinas Cipta Karya, dengan tiga Seksi,

(7) Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan dengan tiga Seksi.

Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dapat dibentuk unsur Pembantu Kepala Dinas, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Pembantu Gubernur. Pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dapat terdiri dari :

(1) Pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan,

(2) Pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

(3) Pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

Pada ketujuh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I tersebut di atas dapat dibentuk Cabang-cabang Dinas, yaitu :

(1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan,

(2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

(3) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) terdiri dari :

(1) Kepala Dinas,

(2) Sub Bagian Tata Usaha dengan empat urusan,

(3) Seksi Jalan dengan tiga Sub Seksi,

(4) Seksi Tata Bangunan dengan dua Sub Seksi,

(5) Seksi Teknik Penyehatan dengan dua Sub Seksi,

Kawasan Cikini Jakarta Pusat (Foto: Pembangunan Jaya Group)

(6) Seksi Tata Kota/Tata Daerah dengan dua Sub Seksi,

(7) Seksi Peralatan dan Perbekalan dengan tiga Sub Seksi.

Khusus untuk Daerah Ibukota Jakarta, mengingat kedudukannya sebagai Ibukota Negara seperti ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, maka susunan organisasi aparat yang menangani bidang Pekerjaan Umum mempunyai bentuk lain dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Organisasi yang menangani bidang Pekerjaan Umum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari :

(1) Dinas Pekerjaan Umum DKI, yang antara lain menangani urusan : jalan/jembatan, teknik penyehatan, bangunan, pengawas bangunan, dan pertamanan.

(2) Dinas Tata Kota DKI, yang menangani urusan : perencanaan kota, pengendalian/perizinan pembangunan.

(3) Dinas Perumahan DKI, yang antara lain menangani penghunian, sewa menyewa.

(4) Dinas Kebersihan DKI, yang antara lain menangani urusan : kebersihan kota, pemanfaatan sampah, pompa tinja.

Peraturan Perundang-undangan

24. Kemajuan dan perkembangan keadaan yang dicapai setelah melalui Pelita I, II, dan III, menuntut adanya penyesuaian atau peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu di antaranya yang mendesak ialah peninjauan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan

Kota Kecil (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 395). Peraturan Pemerintah tersebut pada waktu itu ditetapkan berdasarkan pada dan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, yang ternyata telah dicabut dan diganti beberapa kali berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778), yang mempunyai landasan filosofis tidak sama dengan undang-undang yang semula.

Selain daripada itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tersebut di atas hanya mengatur pelaksanaan penyerahan Pekerjaan Umum kepada Propinsi tertentu saja, yaitu : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Materi yang diatur menurut Peraturan Pemerintah tersebut ternyata sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan organisasi dan manajerial bagi penyelenggaraan pembinaan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yang semakin luas baik ruang lingkupnya maupun kualitasnya. Untuk itu telah disusun/disiapkan dan diajukan kepada Pemerintah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, yang diharapkan dapat menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953.

Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293). Peraturan Pemerintah tersebut antara lain mengatur lebih lanjut tentang wewenang pembinaan jalan; peranan pengadaan dan persyaratan jalan; daerah manfaat jalan; daerah milik jalan; pelimpahan dan penyerahan wewenang pembinaan jalan; pengelompokan jalan seperti : jalan Nasional, jalan Propinsi, jalan Kabupaten, jalan Desa dan jalan Khusus, rencana umum, program, rencana teknik jaringan jalan dan sebagainya.

Di bidang Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna pemanfaatan tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah yang padat penduduk, perlu dibuka kemungkinan untuk membangun perumahan dalam bentuk rumah susun. Untuk itu telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318).

Rumah Susun adalah Bangunan Gedung bertingkat untuk perumahan, yang distrukturkan secara fungsional dalam arah vertikal, yang terbagi dalam satu satuan yang masing-masing jelas batasnya, ukuran dan luasnya, dan dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah. Selain satuannya yang penggunaannya terpisah, ada bagian bersama dan tanah bersama yang di atasnya didirikan rumah susun, yang karena sifat dan fungsinya harus digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan. Dengan Undang-Undang tentang Rumah Susun ini diciptakan dasar hukum hak milik atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi :

(1) hak pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah;
(2) hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah;
(3) hak bersama atas benda-benda;
(4) hak bersama atas tanah;

yang semuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur, dan Kota Cibinong, maka dengan Keputusan Presiden RI Nomor 79 Tahun 1985 tanggal 6 Desember 1985 telah ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak, yang merupakan pedoman dasar bagi Instansi-instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah dalam menetapkan program-program pembangunan serta pedoman bagi penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Bagian, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak bertujuan untuk mengoptimasikan pemanfaatan ruang secara serasi, seimbang, dan
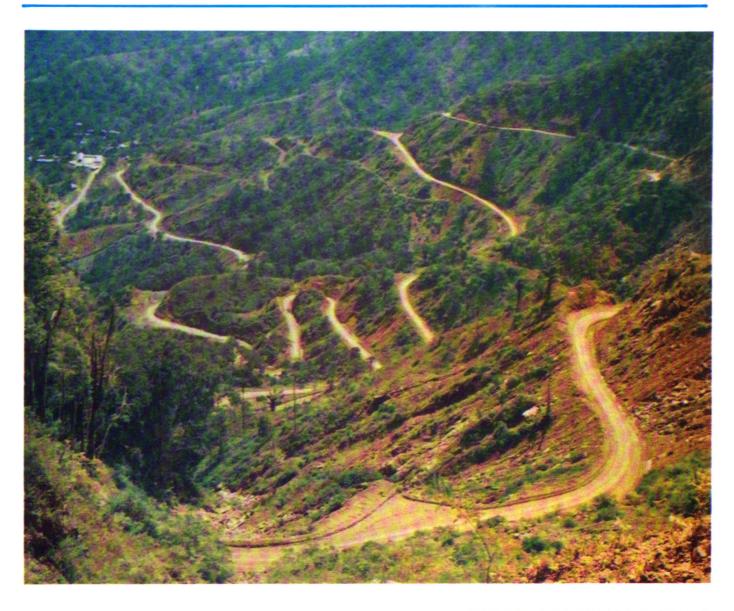
Salah satu ruas Jalan di daerah Sulawesi

lestari dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat perkembangan kehidupan yang semakin pesat. Sasaran yang hendak dicapai ialah : meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna; serta meningkatkan fungsi budidaya kepariwisataan, perindustrian, pertanian, pemukiman pedesaan dan pemukiman kota. Rencana Umum Tata Ruang Kawasasan Puncak meliputi rencana alokasi peruntukan ruang berdasarkan fungsi sebagai berikut :

- Kawasan lindung, yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, dan areal lindung lainnya di luar hutan;
- Kawasan Penyangga, yang terdiri dari peruntukan ruang untuk perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas;
- Kawasan Budidaya Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman pangan lahar besar;
- Kawasan Budidaya non Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, industri dan pariwisata.

Rencana alokasi peruntukan ruang tersebut di atas merupakan arahan dominasi peruntukan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dengan Keputusan Presiden.

Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/-1986 tanggal 23 Desember 1986 sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/-KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota, telah ditetapkan ketentuan mengenai Perencanaan Tata Ruang Kota, yang berlaku sebagai ketentuan pedoman yang mengikat untuk penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang kota, yang diselenggarakan baik oleh aparat Pusat maupun oleh aparat Daerah.

Rencana Tata Ruang Kota merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota, yang terdiri dari :

(1) Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, yaitu rencana struktur ruang perkotaan secara garis besar yang disusun untuk menjaga : konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang; dan keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya, dalam rangka pengendalian program sektoral maupun daerah;

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, yakni rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;

(3) Rencana Detail Tata Ruang Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

(4) Rencana Teknik Ruang Kota, yaitu rencana geometri pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota.

Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan diselenggarakan oleh Aparat Departemen Pekerjaan Umum dalam bentuk produk dokumen yang dihasilkan berupa :

(1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan,

(2) Rancangan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan,

(3) Analisa Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, dan

(4) Analisa Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan.

disertai uraian lengkap secara kualitatif dan kuantitatif, beserta peta, tabel dan diagram.

Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Teknik Tata Ruang Kota diselenggarakan oleh Aparat Daerah yang memenuhi persyaratan teknik.

Rencana Umum Tata Ruang Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejak dilancarkannya Pelita I, II dan III dan nampak adanya gejala, bahwa pengadaan pembangunan bangunan gedung, perumahan terus meningkat. Sementara itu penggunaan bahan, komponen bangunan dan peralatan/instalasi dalam bangunan belum diatur secara mantap dan memadai.

Dalam pada itu menurut data yang dapat dihimpun dari berbagai kota di Indonesia dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini memberikan petunjuk adanya peningkatan kebakaran pada bangunan gedung. Padahal kebakaran pada bangunan gedung dapat menimbulkan kerugian berupa korban manusia, harta benda, terganggunya proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan dan terganggunya ketenangan masyarakat.

Oleh karena itu perlu diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dengan titik berat pada pengamanan bangunan dengan memperketat persyaratan teknis dan teknologis dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan gedung, yang meliputi aspek lingkungan dan bangunan, bahan bangunan, struktur bangunan, utilitas dan upaya penyelamatan.

Untuk itu mendahului adanya Undang-Undang tentang Tata Bangunan, dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tanggal 2 Januari 1985 telah ditetapkan ketentuan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung, yang mengatur dan menetapkan persyaratan tertentu dalam lingkungan dan bangunan, penggunaan bahan bangunan, struktur bangunan, utilitas, serta tata cara upaya penyelamatan dan lain-lain.

Pelaksanaan Anggaran

25. Pasal 19 ayat (15) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 antara lain menentukan bahwa untuk mengendalikan

dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemborongan/pembelian di lingkungan Departemen/Lembaga baik melalui pelelangan maupun penunjukkan langsung, dibentuk Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah tingkat Departemen/Lembaga. Untuk itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 162/KPTS/1984 tanggal 1 Mei 1984 dibentuk Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut di atas berpedoman kepada petunjuk yang termuat dalam Tata Kerja Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Departemen Pekerjaan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 232/KPTS/1984 tanggal 6 Juli 1984, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 232 A/KPTS/1984 tanggal 1 Desember 1984.

Untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan baik yang berbentuk badan hukum maupun perusahaan perorangan, yang usaha pokoknya melakukan pekerjaan pemborongan (kontraktor), konsultasi (konsultan) dan pengadaan barang/-jasa lain, diadakan prakualifikasi perusahaan yang meliputi kegiatan :

- registrasi yaitu pencatatan dan pendaftaran data perusahaan,
- klasifikasi yaitu penggolongan perusahaan menurut bidang pekerjaan, lingkup pekerjaan atau spesialisasinya,
- kualifikasi yaitu penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang.

Prakualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Prakualifikasi yang dibentuk dan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai Sekretaris I, merangkap Ketua Tim Teknis untuk bidang pekerjaan pemborongan dan konsultasi. Panitia Prakualifikasi bekerja dengan berpedoman pada Pedoman Prakualifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 912/TPPBPP/VIII/1984 tanggal 7 Agustus 1984.

Perusahaan-perusahaan yang lulus prakualifikasi dicantumkan dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang digunakan bagi pengadaan pekerjaan pemborongan, konsultasi dan pengadaan barang/jasa lain dengan nilai harga di atas lima juta rupiah. Di samping DRM ada Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), yang memuat rekanan, yang tercatat dalam DRM yang masih memiliki sisa kemampuan nyata untuk dapat diizinkan mengikuti pelelangan terbatas. Usaha-usaha tersebut di atas juga dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan dunia usaha jasa khususnya usaha jasa konsultasi, sebagai mitra pembangunan.

Dalam rangka menangani proyek-proyek yang telah selesai dan berfungsi terutama proyek-proyek air bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dibentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dalam satu wilayah Daerah Tingkat II, yang diserahi tugas pengelolaan sarana dan prasarana air bersih untuk suatu jangka waktu tertentu, yaitu sejak instalasi air bersih itu dapat berfungsi sampai penghasilannya mampu mencukupi kebutuhan untuk biaya operasi dan pemeliharaan (masa uji coba dan pemantapan). Setelah itu pengelolaannya lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II cq. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersangkutan. Agar efisiensi pengelolaan oleh BPAM dapat berjalan lancar dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 633/KPTS/1986 tanggal 3 Desember 1986 dibentuk Badan Pembina dan Pengawas BPAM. Dalam hubungan pembinaan pengelolaan proyek air bersih ini telah ditetapkan beberapa Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, antara lain :

(1) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 - Nomor 26/KPTS/-1984 tanggal 23 Januari 1984 Tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara, dan Penyerahan Pengelolaannya.

(2) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 - Nomor 27/KPTS/-1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

(3) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 - Nomor 28/KPTS/-1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan

tarif air minum, pelayanan air minum kepada langganan, pengelolaan air bersih ibukota kecamatan dan pengelolaan kran umum air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pengelola Air Minum (BPAM).

Paket instalasi air bersih
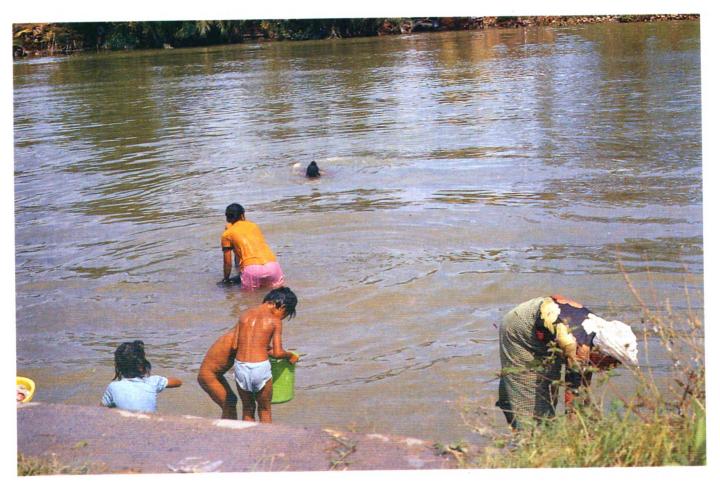
Masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

KABINET PEMBANGUNAN V

26. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1988 menandai akhir putaran kurun waktu lima tahunan dari kehidupan bangsa dan negara seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar, juga sekaligus merupakan awal dari kurun waktu putaran lima tahun yang akan datang, telah menghasilkan 7 (tujuh) buah Ketetapan MPR yang secara historis sangat menentukan bagi jalannya mekanisme pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Dari tujuh buah Ketetapan MPR itu disimpulkan oleh Presiden **Soeharto** dalam pidato pengarahannya pada Sidang Kabinet Paripurna Pertama dari Kabinet Pembangunan V pada tanggal 28 Maret 1988, ada empat ketetapan MPR yang harus dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris, yaitu :

(1) Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

(2) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1988 tentang Pemilihan Umum.

(3) Ketetapan MPR Nomor V Tahun 1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

(4) Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Disamping itu ada Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila **(Ekaprasetia Pancakarsa)** yang harus terus kita laksanakan. Dalam pada itu, Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988 melimpahkan tugas kepada Presiden/Mandataris untuk :

(1) Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-V dalam rangka Garis-garis Besar Haluan Negara.

(2) Meneruskan penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara di segala bidang dan tingkatan.

(3) Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila.

(4) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Keseluruhan Ketetapan-ketetapan MPR tersebut di atas merupakan landasan kerja dan landasan tugas bagi Presiden/Mandataris.

Karena itu semua para Menteri sebagai pembantu Presiden diminta untuk mendalami secara sungguh-sungguh semua Ketetapan MPR tadi. Tidak cukup hanya dengan mempelajari dokumen-dokumen kenegaraan yang sangat penting tadi akan tetapi juga dengan menangkap seluruh semangat, jiwa dan pikiran yang melahirkannya. Yang juga tidak kalah penting adalah menangkap segala isyarat, harapan, aspirasi-aspirasi dan keprihatinan-keprihatinan yang hidup di kalangan rakyat kita.

27. Denggan memperhatikan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1988 Jenderal (Purn) **Soeharto** yang telah diangkat Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR dengan Keputusan Presiden RI No. 64/H/Tahun 1988 telah membentuk Kabinet Pembangunan V dan sekaligus membubarkan Kabinet Pembangunan IV. Susunan Kabinet Pembangunan V ini terdiri dari :

(1) 3 (tiga) Menteri Koordinator yang masing-masing mengkoordinir bidang tertentu;

(2) 8 (delapan) Menteri Negara yang masing-masing melaksanakan tugas/urusan tertentu.

(3) 21 (duapuluh satu) orang Menteri yang masing-masing memimpin suatu Departemen;

(4) 6 (enam) orang Menteri Muda yang masing-masing diperbantukan kepada seorang Menteri untuk tugas/urusan tertentu.

Jumlah anggota Kabinet Pembangunan V ialah sebanyak 38 (tigapuluh delapan) orang Menteri. Dalam susunan kabinet tersebut yang ditunjuk/diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum ialah **Ir. Radinal Moochtar.**

Memahami tugas nasional yang utama untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dengan memperhatikan perkembangan nasionaldan internasional yang akan sangat mempengaruhi dalam kurun waktu lima tahun mendatang dan meneliti tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepada Mandataris MPR, maka dalam membentuk Kabinet Pembangunan V itu Presiden **Soeharto** sekaligus telah menetapkan Pancakrida Kabinet yang juga merupakan program nasional untuk waktu lima tahun mendatang yaitu :

Pertama : Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Kedua : Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketiga : Membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 **(Ekaprasetia Pancakarsa)** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keempat : Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Kelima : Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1992.

REPELITA V

28. **Ir. Radinal Moochtar,** yang lahir di kota Surabaya, pada tanggal 20 September 1930, dalam memimpin Departemen Pekerjaan Umum melakukan pendekatan-pendekatan melalui kebijaksanaan penanganan pembangunan Repelita V bidang pekerjaan umum dengan mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan bidang prasarana ke-PU-an, agar prasarana ke-PU-an dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat secara meluas dengan tingkat penyebaran yang merata. Dan dalam mencapai perwujudan pembangunan wilayah secara optimal diperlukan polapikir pengem-

Ir. Radinal Moochtar

Menteri Pekerjaan Umum Radinal Moochtar pada salah satu upacara di Departemen PU.

IR. RADINAL MOOCHTAR

Ir. Radinal Moochtar Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dari tahun 1983 sampai dengan 1988. **Ir. Radinal Moochtar** lahir di Surabaya pada tanggal 20 September 1930 dan didampingi seorang istri **Ny. Oepin Radinal Moochtar** serta 5 orang putra dan putri. Lulus dari ITB Jurusan Arsitektur pada tahun 1960 dan sebelum bekerja di Departemen Pekerjaan Umum, beliau bekerja di Bandung serta menjabat sebagai Asisten Luar Biasa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dari tahun 1957 sampai dengan 1960. Dari tahun 1960 sampai dengan 1963 menjabat sebagai pegawai LMPB di Bandung, Asisten Ahli ITB, dan Lektor Muda ITB. Bekerja di bidang ke-PU-an dari tahun 1965 sebagai Kepala Direktorat Perencanaan Kota dan Daerah Departemen Cipta Karya hingga tahun 1966. Tahun 1966 sampai dengan tahun 1974 jabatan yang didudukinya antara lain sebagai Kepala Direktorat Tata Kota dan Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya, disamping itu juga merangkap pula jabatan Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Regional Bidang Fisik Bappenas, dan

Kepala Biro Pembangunan Regional Daerah Bidang Fisik Bappenas, serta Kepala Biro Fisik dan Tata Ruang pada Bappenas. Direktur Utama Perum Perumnas dijabat oleh **Ir. Radinal Moochtar** pada tahun 1974 sampai dengan 1978. Selama 5 tahun yakni dari tahun 1978 sampai dengan 1983 jabatan yang didudukinya adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Tanda jasa yang diperoleh **Ir. Radinal Moochtar** antara lain Satyalencana Pembangunan, Satyalencana Karya Satya dan Piagam Satya Karya, serta bintang "Legion d'Honour" dari Presiden Perancis pada Th. 1987.

Pada sela-sela kesibukan Ir. Radinal Moochtar tetap menyempatkan berdialog baik dengan masyarakat maupun dengan pers sebagai mitra kerjanya.

bangan wilayah yang integral dan terpadu, dimana antar bagian kesatuan sistem wilayah tersebut membentuk struktur yang mengarah kepada suatu kesatuan Wilayah Nasional yang menjamin terciptanya upaya ke arah peningkatan pemantapan ketahanan nasional. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pendekatan tata ruang yang memungkinkan tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan serta kebersamaan pembangunan sektor dan daerah, sehingga pembangunan itu sendiri selalu berorientasi kepada geografi, demografi dan sumber daya alam tanah air serta dapat merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat yang sejalan dengan upaya peningkatan dan pemantapan IPOLEKSOSBUD dan Hankam yang sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam Wawasan Nusantara.

Jalan layang simpang susun Tomang Jakarta Barat

Kurun waktu 1989 – 1992 akan merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Pada masa kerja Kabinet Pembangunan V ini tercapai proses dibirokratisasi yang telah dimulai sejak kurun waktu sebelumnya. Pada masa ini pula muncul badan-badan usaha yang sangat besar kemampuannya yang oleh sejumlah pers nasional dijuluki konglomerat. Pada masa ini terjadi pula peningkatan investasi swasta yang sangat besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri pemantapan pasar uang dan pasar modal telah menimbulkan kegairahan investasi melalui peningkatan dana yang terhimpun, melalui ekspansi perbankan dan bursa saham. Pulihnya perekonomian dunia dan perkembangan baru di dunia komunis serta ketidakpastian atas status Hongkong telah mendorong masuknya penanam modal dari luar negeri. Investasi pemerintah yang tetap besar dalam upaya mempercepat pembangunan dalam menyongsong era tinggal landas serta berkembangnya investasi dari dalam dan luar negeri di dunia usaha jasa konstruksi nasional merupakan "boom" konstruksi yang perlu mendapat penanganan yang serius dari Pemerintah maupun pengusaha jasa konstruksi nasional.

Keikutsertaan swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum semakin mendapat tempat dalam pembangunan negara. Pembangunan jalan tol, real estate dan pembangunan air bersih telah mulai menarik para wiraswastawan nasional maupun swasta asing sedang pekerjaan lain masih menunggu peminat.

TEKNOLOGI PENYELAMAT BIAYA
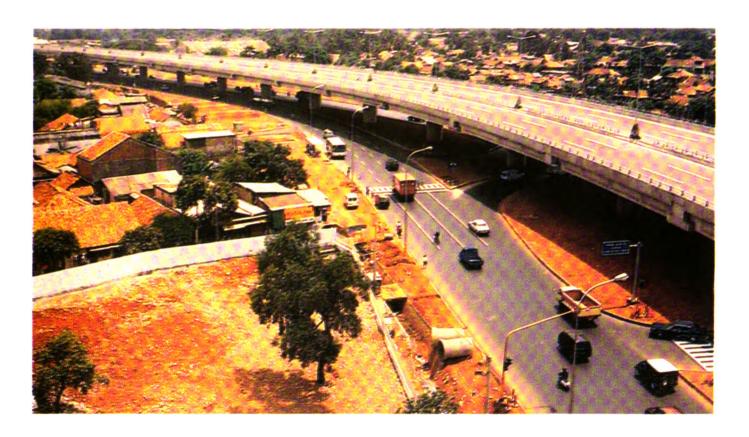
Apa arti Rp 200 milyar bagi Anda? Tiap-tiap orang bisa membelanjakan uang sebanyak itu berdasarkan selera pribadi masing-masing. Uang sebanyak itu bisa dipakai membangun tiga buah hotel setaraf Hotel Borobudur Inter Continental di Jakarta. Kalau mau dibelikan pesawat terbang, dengan uang sebanyak itu hanya bisa dibeli dua buah pesawat Boeing 747 dengan konfigurasi tertentu.

Kalau demikian, cukupkah uang sebanyak itu untuk membangun jalan layang sepanjang 15,6 kilometer dengan delapan buah *on-off ramps* dan satu pintu utama seperti proyek yang tengah kami kerjakan ini? Jawabnya memang tidak bisa lain : cukup. Semula kami mempunyai target untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 40 bulan dan dengan biaya Rp 236 milyar.

Indah dan megah Jalan Layang tol diwaktu malam

Perhitungan kami ternyata meleset. Pada bulan Maret 1989, ketika kami melakukan *review* terhadap jalannya proyek, kami berkeyakinan bahwa kami bisa mempercepat waktu penyelesaian proyek menjadi 22 bulan saja - dengan catatan : bekerja penuh selama 24 jam. Percepatan penyelesaian proyek itu ternyata tidak membuat biaya membengkak, tetapi malah diperkirakan susut menjadi 220 milyar. Artinya, bila dihitung rata-rata tiap kilometer jalan layang yang kami buat menelan ongkos sekitar Rp 14 milyar. Padahal, di Thailand standarnya adalah 25 milyar per kilometer jalan layang. Di Amerika Serikat biayanya bahkan mencapai Rp 80 milyar per kilometer *elevated highways*.

Apa yang menyebabkan tercapainya hal-hal yang positif itu? Sebagian besar memang disebabkan oleh pemecahan teknis. Dalam pembangunan proyek diterapkan Program Analisa Teknis dan Nilai *(Value Engineering)*, yaitu suatu metode penganalisaan kembali untuk mendapatkan sasaran penghematan baik biaya dan waktu tanpa sama sekali mengubah fungsi dan kekuatan konstruksi.

Penemuan Landas Putar Bebas Hambatan "Sosrobahu", misalnya, tidak menyebabkan kenaikan biaya. Malahan, secara jelas ia menurunkan *social cost* karena kemacetan lalu lintas di jalan yang sedang kami bangun itu bisa ditekan seminimum mungkin. Memang tidak semua *pier head* diputar dengan sistem "Sosrobahu". Dari 318 *pier head*, hanya 85 *pier head* tipe I saja yang diputar memakai bantuan "Sosrobahu". Tetapi, sistem penemuan baru itu jelas merupakan salah satu dari unsur positif yang menunjang percepatan waktu penyelesaian proyek.

Tahap pelaksanaan pembangunan Jalan Layang Tol Cawang – Tanjung Priok

Pengerjaan pengecoran Jalan Cawang – Tanjung Priok

Absennya ketergantungan pada unsur luar negeri juga merupakan faktor utama yang membuat proyek ini bisa diselesaikan lebih cepat dari anggaran waktu. Lancarnya pasokan besi beton dan semen dari Krakatau Steel dan Indocement yang menjadi anggota Konsorsium adalah kunci krusial.

Lempengan baja "Sosrobahu" yang dibuat di dalam negeri hanya melibatkan biaya sekitar satu juta rupiah. Menurut **Djoko Ramiadji,** kalau teknologi itu dibeli dari luar negeri, dengan lempengan luar negeri, harganya mungkin mencapai Rp 100 juta tiap satu lempengan. Itu terutama karena biaya *royalty* yang tinggi terhadap hak cipta.

Saya memang pernah bertanya kepada **Ir. Raka** mengapa ia tidak meminta *royalty* untuk hasil ciptaannya itu. Ia menjawab dengan nada yang sangat merendah : "Ciptaan saya itu tidak akan ada artinya kalau tak ada orang seperti **Ibu Tutut,** Pak **Djoko Ramiadji,** almarhum Pak **Wiyoto** dan seluruh rekan yang telah dengan sepenuh hati mendukung, dan pada akhirnya sepakat untuk menerapkannya. "Ia juga mengingatkan saya pada Konstruksi Cakar Ayam yang baru 25 tahun kemudian diakui-bahkan **Prof. Sedyatmo** yang menemukan konsep itu tak "menikmati" hasil dari penciptaannya.

Dari orang-orang lain, saya juga mendengar banyak ceritera tentang **Ir. Raka.** Katanya, **Ir. Raka** bahkan sudah berkata kepada istri dan anak-anaknya, bahwa bila ia sampai gagal dengan konsep **"Sosrobahu"** itu, ia akan mengundurkan diri dari Hutama Karya dan pulang ke Bali. Ada juga yang mengatakan bahwa diam-diam **Ir. Raka** dilantik menjadi Direktur Utama Hutama Karya "bersumpah" untuk mengibarkan kembali nama Hutama Karya seperti ketika dulu dipimpin **Ir. Sutami.**
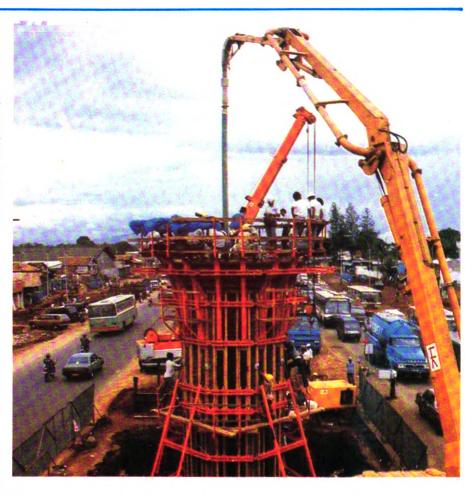
Proses penciptaan dan hasil penciptaan itu sendiri di negeri kita memang masih relatif sangat murah. Dari para pelaksana di lapangan saya juga sering dilapori tentang cetakan *beam* yang dibikin sendiri. Kata mereka, itu baru pertama kali terjadi di Indonesia. Harga cetakan *beam* buatan sendiri itu hanya Rp 40 juta. Bila di beli di Singapura, harganya Rp 200 juta.

Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang kreatif. Hanya saja, seringkali kreativitas mereka terbentur karena tak menemukan *outlet*-nya. Di lingkungan Citra Marga, kebebasan untuk menciptakan bukan hanya ungkapan manis di bibir saja. Saya memberikan semua peluang untuk

Menteri PU Radinal Moochtar didampingi Dirjen Bina Marga berbincang dengan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana

berkreasi, berinovasi yang selanjutnya kami analisa bersama untuk mendapat musyawarah dan mufakat. Di lingkungan yang lain, mungkin saja **Ir. Raka** belum melahirkan konsep "Sosrobahu"-nya yang fenomenal itu. Di lingkungan yang lain, mungkin saja prestasi **Djoko Ramiadji** tidak akan setinggi yang telah ditunjukkannya dalam proyek jalan layang ini.

Proyek North-South Link ini juga berhasil memacu hal-hal yang semula masih menjadi hambatan bagi sektor konstruksi. Pabrik-pabrik pengecoran gelagar *beam* di Indonesia, misalnya., sebelumnya hanya mempunyai kapasitas 700 *gelagar* per lima tahun. Kalau kami hanya menyerah dengan kapasitas itu, kami tak akan pernah dapat menyelesaikan proyek ini. Kebutuhan kami adalah 300 gelagar sebulan. Artinya, pabrik harus meningkatkan *output* produksinya sekitar 30 kali lipat.

Masalah itu lalu kami bahas bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Staf Citra Marga membuat perhitungan-perhitungan baru dan menyiasati berbagai metoda baru untuk mengecor gelagar. Sasarannya : cepat selesai, tetapi mutunya tidak dikurangi sedikit pun. Dengan penerapan *value engineering* dan berbagai perhitungan lainnya, ternyata dari pabrik-pabrik yang sama itu kami berhasil memperoleh pasokan 300 gelagar sebulan. Hal itu pasti tak akan terjadi bila kami hanya meminta, tetapi tidak ikut terlibat.

Kita agaknya sudah terlalu lama meniru budaya **Gepeng Srimulat.** Bila menghadapi sesuatu yang sulit, kita cepata berkata : tak mungkin. Kebiasaan seperti itu membuat kita manja dan cengeng. Kita kurang tertantang membuat mungkin hal-hal yang semula dianggap tak mungkin.

Saya termasuk salah seorang yang semula mempertanyakan mengapa dalam proyek seperti ini masih banyak kelihatan alat-alat dan mesin-mesin tua? Anak buah saya di lapangan segera menjawab keraguan saya. "Selama mesin-mesin tua itu tidak mengganggu kelancaran, tidak merepotkan, dan bisa berfungsi, harus kita manfaatkan secara maksimum untuk pekerjaan ini," kata mereka.

Di Indonesia memang belum tersedia alat-alat yang cukup untuk menunjang pembangunan berskala sebesar ini, dalam waktu sesingkat itu. Misalnya, hanya ada 20 *concrete pumps* di seluruh Jabotabek. Duabelas di antaranya dipakai untuk proyek ini. Saya bahkan bertanya-tanya sendiri : lalu bagaimana proyek-proyek konstruksi lainnya dilayani hanya dengan delapan buah *concrete pumps* yang ada?

Duabelas *concrete pumps* yang melayani proyek North-South Link ini pun masih jauh dari mencukupi. Lalu saya melihat rekan-rekan di lapangan memodifikasi *stationary concrete pumps* untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan pekerjaan. **Djoko Ramiadji** berhasil menggerakkan anak buahnya untuk memanfaatkan apa saja yang bisa dikumpulkan di sekeliling kita sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Ia paling benci mendengar sikap bahwa satu pekerjaan bisa lebih cepat diselesaikan bila mendatangkan peralatan khusus dari luar negeri. Menurutnya, itu hanya merupakan *excuse* untuk tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalnya.

Pada suatu ketika saya juga melihat sebuah *pier* dihancurkan. Saya bertanya kepada **Arie Prabowo,** mengapa harus ditempuh jalan itu. Jawabnya : "Telah kami teliti, ternyata ada prosedur yang tak dijalankan dalam proses pembuatannya. Setelah kami uji, ternyata *pier* itu tak memenuhi syarat konstruksi."

Saya kecewa melihat *pier* itu dihancurkan, karena sudah menelan banyak ongkos. Tetapi, saya juga bangga bahwa hal itu dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh anak buah saya. Ketika itu saya langsung teringat pada orang yang bertanya apakah saya tidak khawatir Jalan Layang Cawang-Priok ini tidak akan runtuh seperti **The Bay Bridge** di San Francisco. Keyakinan saya bertambah tebal. Inilah imbalan yang saya peroleh. Saya memberikan kepercayaan penuh. Dan mereka mengimbanginya dengan tanggung jawab penuh.

Sudah menjadi rahasia umum, sektor konstruksi adalah sektor "basah" di mana setiap pemain bisa bermain untuk memasukkan sebagian dana konstruksi ke dalam kantungnya. Bukan hanya di tingkat pimpro, para mandor pun bahkan lebih pintar mencari peluang memperkaya diri sendiri.

Peristiwa penghancuran *pier* itu secara tidak langsung menunjukkan kepada saya bahwa anak-anak buah saya di lapangan memegang teguh nilai-nilai profesi. Mereka sadar bahwa pelat baja yang satu milimeter lebih tipis, atau adukan beton yang komposisi bahannya tidak sesuai dengan perhitungan, akan menjadi titik rapuh yang bisa merobohkan karya monumental ini.

Tanpa sikap kejujuran dan kebanggaan profesi seperti itu, saya dapat membayangkan bagaimana jadinya proyek yang setiap hari pelaksa-

naan mengeluarkan biaya sekitar Rp 300 juta. Mungkin harus saya kerahkan satu resimen polisi untuk mengawasi staf lapangan.

Secara periodik, setelah melakukan inspeksi lapangan, seperti biasa saya mengajak para pelaksana inti untuk melakukan penilaian yang sifatnya lebih makro dan general terhadap proyek yang sedang kami rampungkan itu. Diskusi dan argumentasi adalah merupakan santapan yang rutin baik yang formal atau dalam suasana santai, untuk lebih dapat menghimpun permasalahan dan penyelesaiannya. Banyak orang sebenarnya meragukan kemampuan kita sendiri.

Pada awal mula pembangunan proyek ini banyak orang dan bahkan pejabat pemerintahan yang mengusulkan pembangunan proyek ini untuk di *turn key* kepada kontraktor asing hingga kita dapat tidur nyenyak, dalihnya.

Tetapi serta merta dengan dasar observasi yang memang telah kami lakukan sebelumnya dengan segala perhitungannya serta keyakinan saya yang kuat, maka usulan, himbauan atau segala istilahnya, saya tolak. Saya tetap bersikeras untuk memakai kontraktor Indonesia. Saya yakin kalau kontraktor dan para ahli konstruksi Indonesia diberi kesempatan, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk membuktikan kemampuannya yang baik. Saya sadari risikonya memang besar. Tapi, kalau kita takut menanggung risiko, kapan kita akan maju?

Saya datangi dan argumentasikan menyeluruh untuk meyakinkan mereka, bahwa kita Insya Allah akan mampu menyelesaikan pembangunan proyek ini. Kepada mereka saya jaminkan "kepala" saya.

Dan tak salah bila saya telah "menyerahkan kepala" saya kepada semua para pelaksana, karena mereka benar-benar telah membuktikan tanggung jawab serta kepercayaan yang saya serahkan kepada mereka, sesuai tekad saya untuk tidak menggantungkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor asing.

Membangun jalan, apalagi dengan tingkat kecanggihan seperti jalan layang yang kami rampungkan ini, memang lebih banyak menyangkut masalah teknis. Kami telah membuktikan lain. Jalan Layang Cawang-Priok itu adalah produk utama yang hasil kongkretnya bisa kita rasakan bersama. Meski para pelaksana proyek ini masih muda-muda usia, namun kami tak melupakan konsultasi dan arahan para pakar konstruksi seperti : **Prof. Dr. Ir. Sosrowinarso, Prof. Dr. Ir. Rooseno, Ir. Wiratman** yang bersatu dan sering bersama kami memberikan masukan-masukan teknis dan pengalaman mereka dalam masalah-masalah kritis. Sehingga, *by-product* yang kami capai ternyata jauh lebih penting dan besar artinya bagi bangsa kita daripada sekadar memiliki sepenggal jalan layang.

Saya lantas teringat pada masa kanak-kanak saya dulu. Kami sering mencoba kekuatan kami untuk membalikkan batu besar yang kami lihat. Teman-teman dan saudara-saudara saya senang telah berhasil membalikkan batu besar yang semula teronggok di sana. Tetapi, saya lebih terpesona melihat binatang-binatang kecil dan aneh di tanah yang semula tertutup batu besar itu.

Ya, kami tidak hanya membangun jalan layang. Kami telah membangun semangat dan kepercayaan sektor jasa konstruksi Indonesia
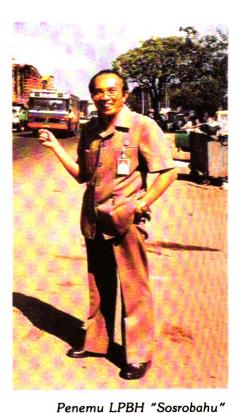
Penemu LPBH "Sosrobahu"
Ir. Raka Sukawati,
Dirut PT Hutama Karya

bahwa kita sudah naik kelas. Kita sudah mampu menunaikan karya besar yang semula dianggap tak mungkin diselesaikan bangsa kita.

Dikutip dari **H. Siti Hardiyanti Rukmana "Mendobrak Kultur Pesimis"** *Pengalaman Membangun Jalan Layang Tol Cawang-Priok, Jakarta.*
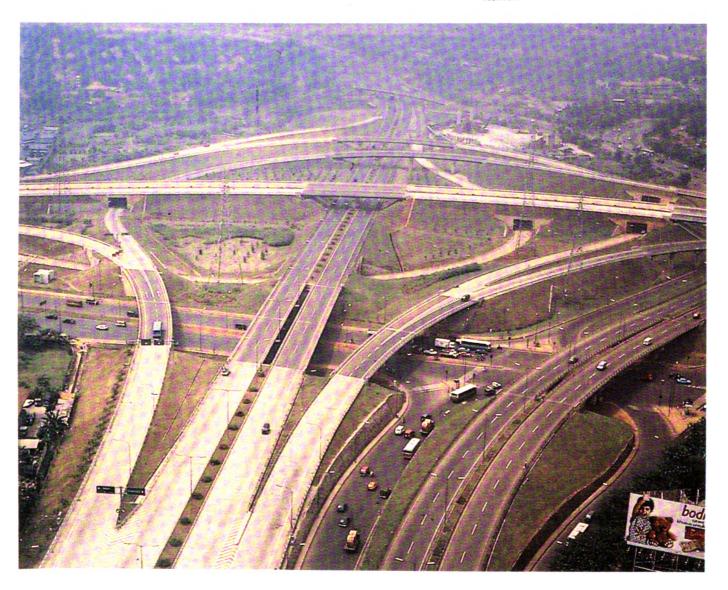
Simpang susun Jakarta, dibangun oleh PT Jasa Marga, 1989

Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum

29. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah yang disusun sejak lama akhirnya terbit sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, yang merupakan kelengkapan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II (tanpa mengurangi tanggung jawab Menteri) adalah :

a. **Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I:**

Bidang Pengairan :

(1) penyusunan rencana penyediaan irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, guna dimintakan penetapan Menteri berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai keperluan;

(2) pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;

(3) pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;

(4) penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna;

(5) penetapan prioritas pembangunan air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;

(6) pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama beserta bangunan pelengkapnya;

(7) pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan perlengkapan mulai dari bangunan pengambilan sampai

Saluran Pembagi kepetak-petak persawahan

kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap;

(8) pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang berada di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(9) perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya;

(10) perizinan untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada angka 9 yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi.

Peningkatan Jalan dengan Hot Mix

Bidang Bina Marga :

(1) penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(2) perencanaan teknis dan pembangunan atas :

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II.

b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;

d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional;

(3) perencanaan teknis dan pembangunan jalan pada jaringan jalan sekunder di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(4) pemeliharaan atas :

a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;

d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam jalan Nasional;

5) Penetapan status sebagai jalan Propinsi.

Pemerintah Daerah Tingkat I mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan dengan Surat Keputusan suatu ruas jalan sebagai jalan Propinsi atas :

a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

c. Jalan selain daripada yang tersebut huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;

(6) Penetapan status sebagian jalan Kabupaten atas :

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;

b. Jalan lokal primer;

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;

(7) Penetapan status sebagai jalan Kotamadya atas :

a. Jalan Arteri Sekunder;

b. Jalan Kolektor Sekunder,

Bidang Cipta Karya :

(1) penyusunan rencana umum tata ruang Daerah Tingkat I beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat I atau beberapa dari rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat II yang berlainan, kecuali Daerah Tingkat I yang mempunyai kepentingan Nasional dan satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional;

(2) penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman yang wilayahnya merupakan, sebagian wilayah Daerah Tingkat II yang berlainan, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional;

(3) pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;

(4) pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Tingkat I;

(5) pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;

(6) pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis;

(7) perencanaan, pengadaan dan pengelolaan air bersih yang mencakup kepentingan lebih dari satu Daerah Tingkat II;

(8) pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;

(9) pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah
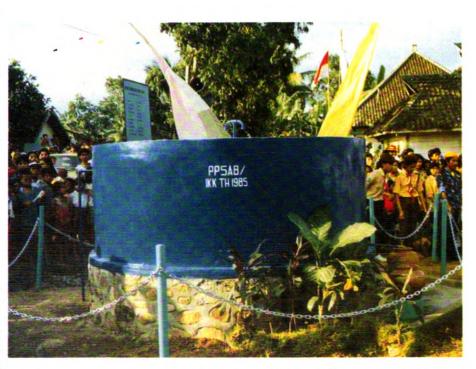
Bak penampungan air bagi masyarakat umum

Pembagian air melalui Bangunan Pembagi

dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II;

(10) koordinasi pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan akhir sampah dan air limbah yang digunakan oleh lebih dari satu Daerah Tingkat II;

(11) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana drainase perkotaan yang melayani lebih dari satu Daerah Tingkat II.

b. **Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II :**

Bidang Pengairan.

Penetapan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansiil maupun untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beseta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, kwarter, desa dan subak dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi.

Pembangunan Jalan kolektor

Bidang Bina Marga.

(1) penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder :

a. Pada kota-kota yang merupakan Ibukota Daerah Tingkat I, kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

b. Pada kota-kota yang bukan merupakan Daerah Tingkat II dan bukan merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

c. Pada kota-kota yang merupakan Daerah Tingkat II dan bukan merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

(2) perencanaan teknis dan pembangunan atas :

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;

b. Jalan lokal primer;

c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan jalan Propinsi;

d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;

e. Jaringan jalan sekunder di dalam Daerah Tingkat II.

(3) Pemeliharaan atas :

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;

b. Jalan lokal primer;

c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;

d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;

(4) Penetapan status suatu ruas jalan lokal sekunder sebagai jalan Kotamadya;

(5) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa.
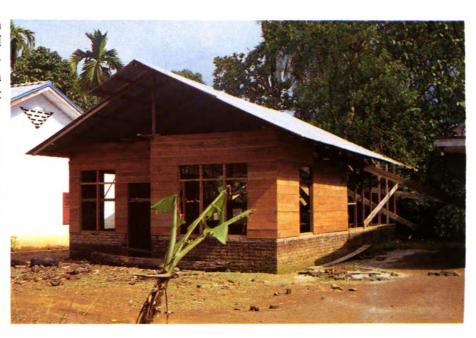
Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Proyek Pemugaran Perumahan Desa

Bidang Cipta Karya

(1) penyusunan rencana umum tata ruang Daerah Tingkat II beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat II Kabupaten dan rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan, kecuali Daerah Tingkat II Kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;

(2) penyusunan rencana umum tata ruang kota beserta program pemanfaatan ruang untuk kota. rencana detail tata ruang untuk kawasan kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;

(3) penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;

(4) Penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk kota, kecuali kawasan kota yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;

(5) pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;

Fasilitas olahraga balap sepeda di Jakarta

(6) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;

(7) pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;

(8) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan pekuburan umum;

(9) pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

(10) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;

(11) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah pemukiman;

(12) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah daerah pemukiman;

(13) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di Daerah Tingakt I dapat dibentuk Dinas Peker-

jaan Umum Propinsi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya; DKI dapat membentuk Dinas-dinas Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhannya.

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud diusahakan melalui sumber-sumber anggaran Pemerintah Daerah yang murni maupun melalui bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan pemerintah ini yang menganut prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* masih digarap.

Jalan Tol Sediyatmo menghubungkan Bandara Soekarno – Hatta dan daerah Jakarta

Peraturan Perundang-undangan.

30. Dengan perkembangan terbaru munculnya badan-badan usaha yang meraksasa, maka penyertaan badan-usaha tersebut dalam kegiatan di bidang pekerjaan umum semakin mantap dan pengaturan yang ketat perlu disusun oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan cara membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pemakai; jalan tol juga diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Pembiayaan untuk penyelenggaraan jalan tol yang meliputi studi kelayakan, biaya perencanaan teknis, biaya pembangunan dan biaya pengoperasian serta biaya pemeliharaan ditanggung Badan (PT. Jasa Marga) atau Badan bekerjasama dengan pihak lain berbentuk usaha patungan *(joint venture)* atau usaha gabungan *(joint operation)*. Pihak lain antara lain BUMN/BUMD, perusahaan swasta nasional atau asing dan koperasi. Usaha patungan telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga dalam membangun dan mengoperasikan jalan Cawang – Tanjung Priok dalam konsorsium PT. Citra Marga-Nusaphala Persada, jalan tol Tangerang – Merak konsorsium PT. Marga Mandala Sakti, sedang usaha gabungan dilakukan oleh PT. Jasa Marga pada jalan tol Cikampek – Bekasi bersama PT. Bangun Tjipta Sarana dan pada simpang susun Gunung Putri dengan pabrik Semen Cibinong (Indocement Tunggal Prakarsa).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 telah membentuk Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dan pengusahaan air dan sumber-sumber air. Perusahaan akan menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai yang meliputi antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan sungai dan/atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan. Wilayah kerjanya adalah Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lahor, Kali Surabaya dan 34 sungai kecil dan wilayah Kali Brantas. Dengan demikian pada waktu ini ada dua perusahaan umum di bidang pengairan, yaitu Perum Otorita Jatiluhur dan Perum Jasa Tirta ini. Di bidang Cipta Karya sedang dirintis pengikutsertaan swasta dalam penyediaan air bersih untuk kota Surabaya dan beberapa kota lain. Selain itu perusahaan-perusahaan *real estate* dan *industrial estate* juga didorong untuk menyediakan air bersih dan pengaturan air limbah, baik cair maupun padat.

Mengenai peremajaan pemukiman kumuh telah terbit Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tanggal 26 September 1990. Peremajaan pemukiman kumuh
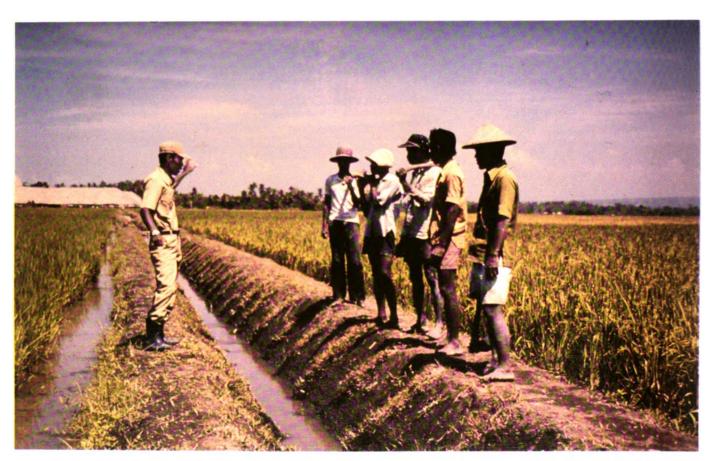
Penyuluhan pada para petani

Peremajaan perumahan kota

adalah pembongkaran sebagian atau seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan rumah susun serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Rumah susun yang dibangun di lokasi peremajaan berikut tanahnya menjadi milik negara dan Menteri Keuangan melimpahkan pengelolaannya kepada Perum Perumnas yang dapat disewakan atau dijual oleh Perum Perumnas. Penghuni lingkungan yang diremajakan ditampung kembali di rumah susun hasil peremajaan atau di lokasi lain yang berdekatan dengan lokasi peremajaan, baik dengan cara memiliki yang didukung dengan fasilitas kredit pemilikan rumah maupun dengan cara menyewa. Peremajaan itu dilakukan dengan menerapkan sistem subsidi silang antara pembangunan rumah susun dengan areal komersial yang berada di kawasan yang diremajakan. Sumber pembiayaan adalah BUMN/ Perum Perumnas, Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial dan *Developer* swasta. Dalam penyelenggaraan peremajaan itu masyarakat didorong berperan secara aktif dalam proses peremajaan tersebut.

Bab V

Pelaksanaan tugas dan kebijaksanaan Departemen Pekerjaan Umum dalam menyongsong era tinggal landas

1. Umum

Departemen Pekerjaan Umum sebagai salah satu aparat Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan sebagian Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembangunan berupa penyediaan prasarana dan sarana, pembinaan dan pengaturan dalam bidang pengairan, jalan, perumahan dan pemukiman serta penataan ruang dan konstruksi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup serta meletakkan dasar yang kuat untuk setiap tahapan pembangunan nasional.

Sebelum Pelita dimulai, keadaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Melalui pelaksanaan pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV, telah dibangun prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum di berbagai pelosok tanah air.

Hasil-hasil Pelita tersebut telah meningkatkan kemampuan dan pelayanan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum untuk berperan dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, meskipun ketersediaan prasarana dan sarana tersebut masih berada di bawah tingkat kebutuhan yang diinginkan.

Terhadap hasil-hasil pembangunan selama ini bidang pekerjaan umum di nilai telah memberikan hasil-hasil penting antara lain :

(1) Tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai kebutuhan, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya.

(2) Telah secara nyata menunjang perkembangan-perkembangan di berbagai sektor penting.

(3) Peningkatan pembangunan antar daerah yang semakin seimbang.

(4) Mendorong usaha memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan pemukiman baik yang bersifat fisik maupun non fisik untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan yang berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemekaran fisik kota yang kurang terkendali dan beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Dengan demikian, perencanaan penanganan prasarana dan sarana pekerjaan umum dalam rangka mendukung dan mendorong perkembangan sektor-sektor secara keseluruhan, tidak saja perlu memperhatikan aspek teknis dalam arti penerapan teknologi yang lebih sesuai, tetapi lebih dari itu, perlu memperhatikan berbagai aspek yang terkait dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan keamanan secara keseluruhan yang merupakan hakekat dari pembangunan dimaksud.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana fisik bidang pekerjaan umum dalam Pelita V sekaligus diupayakan untuk dapat ikut memecahkan berbagai permasalahan yang masih memerlukan penanganan secara berlanjut, yaitu :

(1) Pemantapan produksi pangan beras.

(2) Penunjangan dalam meningkatkan perkembangan industri dan ekspor non migas.

Petani memanfaatkan pola tanam (Foto : OIL PROGRESS)
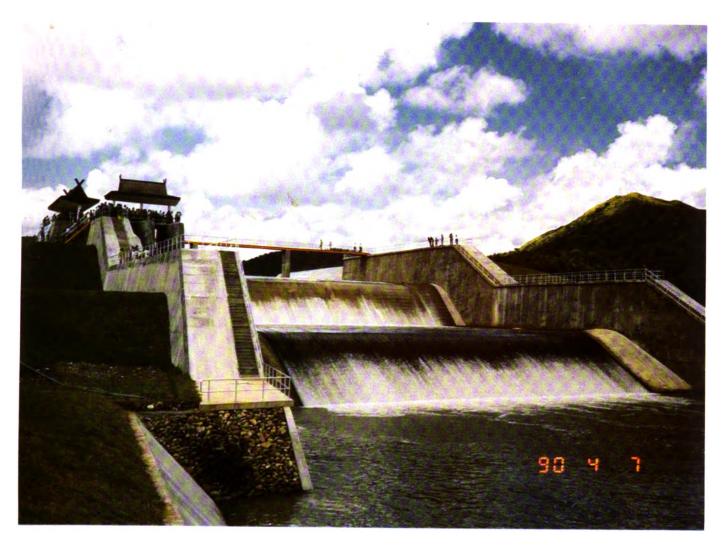
Bendungan air seluma – Bengkulu

(3) Penyediaan lapangan kerja yang semakin meningkat.

(4) Peningkatan usaha keterpaduan dalam wilayah pembangunan.

(5) Penanganan kemampuan dunia usaha jasa konstruksi.

(6) Penanganan dampak lingkungan dan sinkronisasi program pembangunan.

(7) Upaya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertentu yang masih terbelakang.

Dalam Pelita V ini Departemen Pekerjaan Umum akan mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan prasarana dan sarana bidang PU agar bermanfaat bagi masyarakat secara optimal dan meluas dengan tingkat penyebaran yang lebih merata.

2. Hasil-hasil Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Sampai Dengan Akhir Pelita IV.

Dari hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum selama 4 Pelita tersebut, maka keadaan prasarana dan sarana pekerjaan umum sampai dengan akhir Pelita IV adalah sebagai berikut :

a) Prasarana dan Sarana Pengairan.

Pembangunan Pengairan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV telah menunjukkan hasil-hasil yang memadai, baik dalam rangka pemanfaatan air maupun pengembangan sumber-sumber air irigasi di daerah pertanian yang sudah ada dan daerah pertanian baru (termasuk pertambakan), mengamankan daerah pemukiman dan daerah produksi dari kerusakan akibat bencana banjir, bencana kekeringan dan lahar gunung berapi serta menunjang penyediaan air baku untuk air bersih bagi kesejahteraan rakyat serta kebutuhan kelistrikan.

Dengan pencapaian sasaran dalam Pelita IV, maka hasil-hasil pembangunan pengairan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV adalah sebagai berikut :

- Perbaikan dan Peningkatan Irigasi seluas 2.558.915 Ha.
- Pembangunan Irigasi Baru seluas 1.191.610 Ha.
- Pengembangan Daerah Rawa seluas 1.390.570 Ha.
- Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air seluas 1.358.688 Ha.

Dengan hasil-hasil pembangunan pengairan tersebut, maka keadaan lahan pertanian pada akhir Pelita IV adalah sebagai berikut :

- Irigasi Teknis seluas 2.534.613 Ha.
- Irigasi Setengah Teknis 1.180.716 Ha.
- Jaringan Irigasi Rawa 1.328.000 Ha.
- Irigasi Sederhana seluas 672.632 Ha.

Waduk / Bendungan Kedung Ombo, Jawa Tengah

Dalam struktur pengembangan wilayah nasional telah terwujud suatu sistem jaringan jalan primer yang mampu mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya secara hirarki.

b) Prasana dan Sarana Jalan.

Pembangunan prasarana dan sarana Jalan sampai dengan Pelita IV telah berhasil melaksanakan pembangunan jaringan jalan yang memadai dalam rangka mewujudkan kerangka tinggal ladas pembangunan nasional, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Berfungsinya prasarana jalan secara meluas dan merata, di pusat-pusat pertumbuhan, di pusat-pusat produksi maupun yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

Pemeliharaan Jalan di Irian Jaya

- Pada setiap pusat-pusat pertumbuhan terwujud suatu sistem jaringan jalan sekunder yang mampu melayani kehidupan dan kegiatan masyarakat di masing-masing pusat pertumbuhan dan dapat berfungsi terutama sebagai simpul-simpul jasa distribusi yang melayani wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya.

Kemampuan masing-masing sistem jaringan jalan beserta setiap ruas jalan dalam masing-masing sistem, pada umumnya secara proporsional dapat melayani kelancaran arus manusia, barang dan jasa yang terdapat pada masing-masing sistem/ruas jalan, serta mempunyai peluang dan potensi untuk dikembangkan guna melayani kebutuhan jangka

Jembatan Tol Citarum dalam pengerjaan

menengah maupun jangka panjang.

Pada akhir Pelita IV jumlah panjang jalan dan kondisinya adalah sebagai berikut :

Jalan Nasional dan Jalan Propinsi (45.992 Km).

- Jalan Mantap 27.480 Km.
- Tidak Mantap 17.207 Km.
- Kritis 1.305 Km.

Jalan Kabupaten : 152.170 Km.

- Baik 46.122 Km (29%)
- Rusak 106.048 Km (71%)

c) Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman

Pembangunan Perumahan dan Pemukiman telah diusahakan baik di kotabesar, kota sedang dan kota kecil maupun di pedesaan dengan penekanan sasaran pada aspek penyediaan perumahan bagi golongan berpenghasilan rendah, perbaikan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, penanganan persampahan, drainase, limbah air dan limbah padat.

Disamping itu dalam mendukung pembangunan pemukiman, telah diusahakan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, penyusunan strategi pengembangan perkotaan nasional, pengembangan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu, pemantapan pendekatan program pembangunan lingkungan pemukiman desa terpadu, kegiatan penyuluhan dan latihan, pengembangan manajemen dan organisasi, pengembangan sistem informasi, penelitian dan lain-lain.

Dalam hal ini mekanisme pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pemukiman secara terpadu perlu disempurnakan dalam rangka mendukung usaha peningkatan partisipasi masyarakat dan usaha swasta.

Adapun hasil-hasil pembangunan bidang Cipta Karya sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV adalah sebagai berikut :

1) Perumahan Rakyat
   a) Perintisan Pemugaran Desa 12.902 Desa
   c) Perumnas (Rumah Sederhana, Rumah Inti dan Rumah Susun) 203.246 unit.

2) Penyediaan Air Bersih :
   a) Peningkatan Kapasitas Produksi (termasuk IKK) 52.300 l/d.
   b) Jumlah penduduk kota yang dilayani 21,3 juta.

3) Penyehatan Lingkungan Pemukiman :
   a) Drainase 163 Kota
   b) Persampahan 238 Kota
   c) Air Limbah 90 Kota
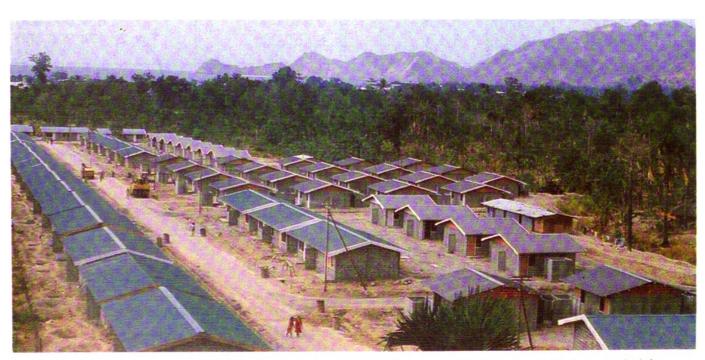
Pembangunan perumahan di Dili guna mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Penyerapan tenaga kerja pada proyek pembangunan saluran irigasi

3. Dukungan terhadap sektor-sektor lain.

Prasarana fisik merupakan sebagian daripada prasarana ekonomi yang menunjang dan mendorong bagi perkembangan sektor-sektor prioritas dalam pencapaiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tingkat sumbangan kepada Produksi Nasional yang semakin tinggi. Prasarana bidang pekerjaan umum yang diwujudkan dalam pembangunan bidang pengairan, prasarana jalan dan jembatan serta prasarana pemukiman selain menunjang kebutuhan sektor-sektor prioritas juga ikut mengatasi berbagai masalah yang timbul seperti halnya penyerapan tenaga kerja, alih teknologi dan sebagainya.

Dalam hal penunjangan terhadap sektor-sektor prioritas, penelaahan dampak atas pembangunan prasarana ke-PU-an terhadap sektor-sektor tersebut secara umum telah memberikan pengaruh positif atas peranannya dalam pencapaian swasembada pangan, meningkatkan laju mobilitas arus barang dan jasa serta integritas antar wilayah/daerah dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam kegiatan dunia usaha. Sektor-sektor prioritas yang mendapat penunjangan baik langsung maupun tidak langsung dengan terbinanya prasarana ke-PU-an antara lain :

- Pertanian
- Industri
- Perhubungan
- Pariwisata
- Perdagangan
- Perumahan dan Pemukiman
- Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
- Transmigrasi
- Energi
- Tenaga Kerja
- Koperasi
- Kesehatan

1) Pertanian

Pembangunan pertanian yang paling menonjol adalah upaya pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, dan sasaran lainnya adalah peningkatan perikanan khususnya tambak udang, peningkatan perkebunan khususnya kelapa sawit dan kopra, serta distribusi produksi khususnya yang berorientasi ekspor.

Program-program pengairan yang berperan dalam swasembada pangan adalah program-program perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan program-program pembangunan irigasi baru dan pengembangan daerah rawa berfungsi terutama untuk meningkatkan produksi beras dalam mengimbangi pertumbuhan penduduk, disamping juga untuk mendukung pertanian non beras yang berorientasi ekspor.

Komoditi non migas (kelapa sawit)

Menunjang swasembada pangan (beras) dengan menjamin tersedianya irigasi

Program perbaikan dan pemeliharaan, program penyelamatan hutan, tanah dan air juga berperan besar dalam meningkatkan efisiensi penyediaan air baku dengan memperbaiki kondisi daerah aliran sungai di bagian hulu, sehingga upaya-upaya intensifikasi bidang pertanian seperti pemberian pupuk, insektisida, dan penyuluhan, semakin efektif dalam pencapaian sasaran swasembada beras.

Dalam Pelita IV telah dikembangkan proyek-proyek irigasi, yang menonjol antara lain Bah Bolon dan Simalungun di Sumatera Utara Pasaman Barat dan Daerah Sitiung di Sumatera Barat, Ogan Komering/-Musi Rawas di Sumatera Selatan, Muko-muko di Bengkulu, Teluk Lada di Jawa Barat, Lembor di NTT, dan Wawotobi di Sulawesi Tenggara. Sementara itu proyek-proyek irigasi dengan pembangunan bendungan/-waduk tercatat antara lain Wadas Lintang, Palasari, dan Kedung Ombo yang baru selesai pada akhir Pelita IV.

Sementara itu di wilayah-wilayah yang relatif kering seperti Propinsi NTB dan NTT, telah dikembangkan embung-embung yang berfungsi sebagai waduk penahan air *(retarding basin)* yang berhasil memecahkan sebagian persoalan kekurangan air bagi produksi pertanian.

Keberhasilan yang lain adalah pengembangan air tanah di daerah-daerah kering di Jawa Timur dan Madura, yang selain menunjang produksi pertanian, juga dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih.

Dalam menunjang produksi kelapa sawit dan kopra dengan tujuan ekspor, berbagai wilayah pantai telah direklamasi. Yang tercatat menonjol adalah pengembangan kelapa sawit di pantai timur Sumatera dan Sulawesi Selatan yang telah mengubah daerah gambut menjadi areal produksi kelapa sawit.

Proyek-proyek reklamasi pantai juga telah dimanfaatkan untuk mengembangkan tambak-tambak udang dan areal pertanian. Dalam Pelita IV tercatat pantai-pantai Sumatera Barat, pantai utara Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali merupakan pantai-pantai yang telah dikembangkan untuk tambak dan pertanian.

Dalam program pemeliharaan sangat dirasakan kecilnya biaya per hektar yang pada umumnya biaya per hektar yang dibutuhkan untuk mampu mendukung produksi pertanian secara wajar adalah Rp 25.000,- per hektar. Namun, selama Pelita IV anggaran yang tersedia bagi program ini hanya sekitar Rp 15.000, – per hektar. Hal ini dapatlah menyebabkan turunnya kualitas
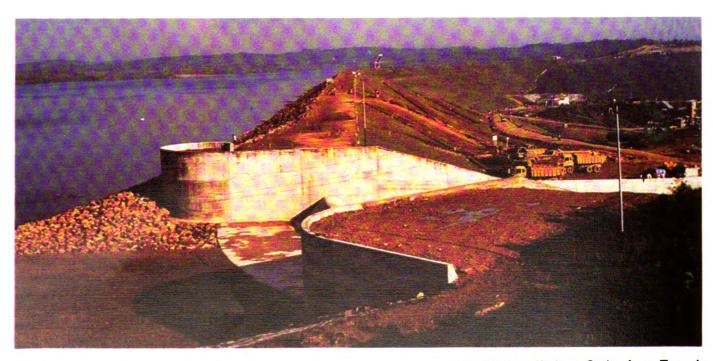
Bendungan Kedung Ombo Jawa Tengah

pelayanan pengairan bagi pertanian, ditinjau dari segi efisiensi.

Sementara itu biaya perbaikan menyerap sekitar Rp 1 juta per hektar, sehingga kalau program perbaikan dibatasi dan sebagian dananya dialihkan bagi program pemeliharaan (selama Pemerintah Daerah belum mampu) maka dukungan pelayanan pengairan akan tetap meningkat. Dalam menunjang produksi pertanian berorientasi ekspor tercatat pula selama Pelita IV dukungan pembangunan jalan baru akses Pelabuhan Dumai ke Kota Pinang (10 km), ruas-ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pelabuhan/pemasaran baik yang sedang dan akan dilaksanakan dan peningkatan jalan Wonosobo - Dieng - Wonosobo - Wiradesa (120 km), yang mendukung kelancaran angkutan antara lain produksi jamur.

Manfaat pembangunan sarana dan prasarana bagi penghuni sekitar daerah industri

2) Industri

Dukungan bidang PU bagi pembangunan industri umumnya berupa penyediaan air baku bagi industri itu sendiri dan pemukiman kawasan industri, jalan bagi angkutan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Sumbangan lain bidang PU bagi sektor ini adalah pengamanan kawasan industri dari bahaya banjir dan dukungan teknis pengelolaan sanitasi dan limbah industri, terutama ke lingkungan perairan.

Mengenai dukungan air baku bagi industri yang menonjol tercatat penambahan pemasokan air baku bagi kawasan-kawasan industri di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya.

Dalam memberikan dukungan teknis penanganan limbah industri di lingkungan perairan, Badan Litbang PU telah melakukan penelitian-penelitian bagi upaya pengelolaan limbah industri di kawasan Bandung Selatan dan pencemaran Kali Surabaya. Selain mendukung sektor industri upaya-upaya ini juga merupakan dukungan bagi sektor sumber alam dan lingkungan hidup.

Sektor industri juga mendapatkan dukungan dari dibangunnya jalan-jalan tol di Jakarta, Cikampek, Surabaya, Ujung Pandang, Medan (Belmera), Cirebon, Semarang, jalan di Dumai, yang memperlancar angkutan bagi penunjangan kawasan-kawasan industri di kota-kota besar tersebut.

3) Perhubungan

Sektor ini merupakan sektor yang didukung langsung oleh pembangunan bidang PU, khususnya bidang Bina Marga dan secara tidak langsung dukungan terhadap sektor ini merupakan dukungan pula terhadap sektor-sektor ekonomi seperti antara lain, industri, perdagangan, dan pariwisata.

Di sektor ini sendiri, sistem perhubungan Nasional yang ada telah menunjukkan keterpaduannya antara perhubungan darat (jalan raya dan jalan baja), perhubungan laut dan udara.

Pertambahan jaringan jalan belum dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan, sehingga pada ruas jalan tertentu batas kemampuan pelayanan terlampaui sehingga kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan. Pembangunan jalan baru, termasuk jalan Tol merupakan salah satu upaya yang telah ditempuh.

4) Pariwisata

Dukungan PU bagi pengembangan pariwisata umumnya berupa penyediaan jaringan jalan, air bersih, pengendalian erosi pantai, dan penanganan persampahan.

Selama Pelita IV dukungan yang menonjol adalah realokasi ruas jalan bagi pengamanan obyek wisata Goa Gajah dan penyediaan air bersih bagi kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, akses ke pelabuhan udara Adi Sumarmo (Solo) dan rencana peningkatan jalan arteri selatan kota Solo, peningkatan jalan bagi kawasan pariwisata Tanah Toraja (Sulawesi Selatan), dan pembangunan jalan tol Jakarta-Tangerang secara tidak langsung telah menunjang perkembangan pariwisata daerah Banten, khususnya pantai barat Jawa Barat. Dukungan bagi pariwisata yang cukup menonjol juga adalah di Propinsi Jawa Timur.

Secara menyeluruh dukungan bidang pekerjaan umum ditujukan kepada 17 daerah wisata meliputi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sementara itu, proyek penyehatan lingkungan pemukiman di berbagai lokasi telah turut memberikan andil bagi pengembangan sektor ini.

Pelayanan jasa angkutan melalui peti kemas

5) Perdagangan

Dalam Pelita IV Departemen PU telah merintis upaya penunjangan perkembangan "kawasan berikat" **(bounded zone)** dan "peti kemas", disamping penunjang kawasan industri yang berkaitan. Dukungan terhadap sektor ini ditujukan terutama untuk mendukung upaya pemerintah dalam menggalakkan ekspor non migas. Departemen PU telah melakukan identifikasi kebutuhan prasarana bidang PU bagi rencana kawasan-kawasan berikat : Cakung, Marunda, Lhok Seumawe, Sabang, Kawasan berikat Medan, Pasir Jaya, Cilegon, Tanjung Perak, Rungkut, Industri Ujung Pandang, dan Batam.

Bagi penunjangan perkembangan stasiun peti kemas Gede Bage, telah diselesaikan disain bagi peningkatan jalan Soekarno-Hatta (Bandung) dari

Bangunan bertingkat di perkotaan merupakan salah satu jawaban untuk penyediaan sarana perumahan

dua jalur menjadi empat jalur, dan jalan akses ke stasiun Gede Bage. Sedangkan bagi stasiun-stasiun peti kemas Banjar, Cirebon, Jebres, dan Rambipuji, telah dilakukan telaahan secara mendalam atas jaringan-jaringan jalan yang menghubungkan pabrik-pabrik/industri ke stasiun-stasiun tersebut,

6) Perumahan dan Pemukiman

Manfaat langsung dari pembangunan bidang perumahan dan pemukiman adalah meningkatnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan oleh indikator seperti penurunan tingkat kematian bayi, meningkatnya tingkat harapan hidup yang merupakan akibat meningkatnya kesehatan lingkungan serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Program perbaikan kampung telah dapat dilaksanakan di kota-kota besar, sedang dan kecil diseluruh Indonesia.

Proyek-proyek pemugaran perumahan desa telah dilakukan dan tersebar di seluruh propinsi berupa perbaikan pemugaran rumah dan perbaikan lingkungan termasuk penyediaan prasarana dan sarananya.

7) Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Dukungan bagi sektor ini berupa upaya pembangunan berkesinambungan di bidang pekerjaan umum. Secara operasional hal ini diwujudkan melalui program penyelamatan hutan, tanah dan air, dan program-program bidang perumahan dan pemukiman maupun upaya penataan ruang wilayah dan kawasan. Selain itu, upaya pelaksaaan proses **"Analisa Mengenai Dampak Lingkungan"** (AMDAL) bagi proyek-proyek pekerjaan umum yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan juga

merupakan pendukung ini.

Dari program penyelamatan hutan, tanah dan air tercatat upaya-upaya perlindungan tata air yang diwujudkan melalui proyek-proyek pengembangan wilayah sungai khususnya di Pulau Jawa dimana sumber air relatif terbatas dibandingkan kebutuhannya.

Penyiapan lahan pemukiman Transmigrasi di daerah pasang surut – Jambi.

8) Transmigrasi

Untuk menunjang keberhasilan program ini, disamping pengembangan daerah irigasi, melalui pembangunan jaringan jalan untuk membuka daerah transmigrasi dan pemasaran hasil usaha para transmigran sekaligus kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, serta penyediaan air bersih bagi pemukiman dan air baku bagi pertanian. Pe-

Pekerjaan tebas tebang dalam rangka pembuatan saluran pada proyek pengairan pasang surut Kalimantan selatan

ngembangan daerah rawa untuk dijadikan lahan persawahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk lahan transmigrasi.

9) Energi

Tenaga air merupakan salah satu sumber energi bukan minyak yang akan terus dikembangkan melalui pemanfaatan ribuan sungai besar dan kecil di seluruh Indonesia sebagai potensi tenaga air yang cukup besar dan tersebar di Indonesia. Pengembangan listrik tenaga air tersebut perlu didukung dengan melalui pembangunan bendungan-bendungan besar dan serbaguna, sekaligus berguna dalam rangka pengendalian banjir.

10) Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi akan mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja yang cukup pesat di satu pihak dan di pihak lain sangat terbatasnya lapangan kerja.

Prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang diperlukan bagi perluasan lapangan kerja antara lain dengan menghindari pemakaian alat-alat mesin untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh tenaga manusia, seperti : eksploitasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan, pembangunan perumahan dan pemukiman, persampahan, dan lain-lain.

11) Koperasi

Pengembangan koperasi merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam membangkitkan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan tarap hidup, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Peranan dan usaha koperasi perlu didukung oleh prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum agar lebih efisien dan efektif apabila ditangani melalui koperasi, seperti prasarana irigasi pedesaan, air bersih pedesaan dan penyediaan bahan bangunan melalui KUD. Koperasi juga didorong dalam pembangunan perumahan melalui kredit bagi anggotanya.

12) Kesehatan

Manfaat langsung dari pembangunan bidang perumahan dan pemukiman adalah meningkatnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan oleh indikator-indikator seperti penurunan tingkat kematian bayi dan meningkatnya tingkat harapan hidup akibat meningkatnya kesehatan lingkungan.

Penunjangan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum terhadap peningkatan kesehatan masyarakat adalah melalui antara lain, penyediaan air bersih, sarana pembuangan air limbah, penyuluhan kebersihan lingkungan perumahan, usaha perintisan persampahan, perbaikan kampung, pemugaran rumah pedesaan, perbaikan perumahan kota dan lain-lain.

Gerobak Sampah : alat angkut sampah Rumah tangga ke tempat penampungan sementara sebelum dibawa ketempat pembangunan akhir (TPA)

4. Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum Dalam Repelita V

1). Masalah Umum

a). Tata Ruang

Meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan semakin kompleksnya masalah koordinasi, integrasi dan pengendalian dalam usaha mengoptimasikan sumberdaya. Keterkaitan spatial dan fungsional unsur-unsur pembangunan merupakah salah satu usaha untuk mengoptimasikan sumberdaya.

Penata ruang sampai dengan Pelita IV belum cukup memadai untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan pembangunan sebagai dasar kebijaksanaan, perencanaan, perwujudan dan pengendalian. Sampai saat ini juga masih dirasakan belum cukup tersedianya tenaga perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, disamping belum tersedianya landasan hukum dan peraturan pelaksanaan penataan ruang yang memadai. Mekanisme penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang masih merupakan masalah yang belum dapat dipecahkan hingga saat ini.

Peningkatan intensitas pembangunan menuntut semakin detailnya tata ruang, baik untuk kawasan lindung, kawasan pemukiman, termasuk proyeksi pusat-pusat pemukiman maupun kawasan strategis. Penataan tata ruang sampai Pelita V dirasakan masih kurang komprehensif disamping belum diawali dengan penelitian dan pengembangan tata ruang yang mendasari perumusan kebijakan dan penyusunan rencana tata ruang.

Pembangunan Perumahan Susunan Kemayoran yang berwawasan lingkungan

b). Standarisasi

Kesadaran masyarakat akan mutu produk dan jasa konstruksi serta persaingan antar produsen konstruksi, perlu ditindaklanjuti dengan standarisasi bidang pekerjaan umum dan akreditasi laboratorium. Penerapan standar bidang pekerjaan umum sampai dengan Pelita IV masih berorientasi pada standar asing dan standar sebelum Indonesia merdeka, disamping itu laboratorium uji mutu belum dapat diandalkan hasilnya.

c). Lingkungan Hidup

Penunjang prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dalam pembangunan ekonomi, perlu diimbangi dengan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan hidup alam, nabati dan sosial. Banyak proyek prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum sampai dengan Pelita IV yang belum secara menyeluruh mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup, kalaupun ada baru bersifat parsial.

d). Penyerapan Bantuan Luar Negeri Dalam Pelita IV

Dalam Pelita IV dana pinjaman luar negeri adalah sebesar US$ 8,062 juta, yang terdiri dari pinjaman baru US$ 5,838 juta dan sisa pinjaman Pelita III sebesar US $ 2,226 juta. Dari seluruh dana pinjaman Pelita IV tersebut telah diserap dana sebesar US $ 3,492 juta (43,3%), dan sisa dana pinjaman akhir Pelita IV adalah sebesar US $ 4,572 juta. Selain itu juga telah diterima dana hibah sebesar US $ 200 juta (56%), sisa dana hibah akhir Pelita IV sebesar US$ 157,3 juta. Dengan demikian sisa seluruh dana Bantuan Luar Negeri (pinjaman dan hibah) pada akhir Pelita IV adalah sebesar US $ 4,729.3 juta.

Rendahnya tingkat penyerapan dana Bantuan Luar Negeri dalam Pelita IV (rata-rata 44%) antara lain disebabkan karena :

- Kelambatan dalam memulai pelaksanaan proyek.
- Prosedur pengadaan jasa konsultan, jasa kontraktor dan barang serta prosedur *reimbursement* masih memerlukan waktu yang lama.
- Keterbatasan kemampuan manajemen proyek, termasuk pengadministrasian dana Bantuan Luar Negeri.
- Keterbatasan kemampuan dunia usaha jasa konstruksi nasional.
- Perbedaan kebijaksanaan/pendapat antara Badan/Negara Donor dengan Pemerintah Indonesia, yakni mengenai jasa dan produksi dalam negeri, terutama dalam penggunaan dana hibah.
- Keterbatasan dalam penyediaan dana rupiah pendamping.

2). Masalah pengairan

a). Tata Air.

Tekanan penduduk yang semakin meningkat di Pulau Jawa akan mendesak pemanfaatan lahan kering di daerah hulu sungai dan akhirnya akan mengganggu keseimbangan hidro-orologis di wilayah sungai. Dengan semakin meningkatnya permintaan akan air, baik untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sektor pertanian maupun untuk mencukupi keperluan di sektor lainnya, maka diperlukan kebijaksanaan tata air dan alokasi air yang lebih efektif dan dapat dilaksanakan secara lebih efisien daripada masa lampau.

b). Mempertahankan Swasembada Beras

Dalam rangka mempertahankan swasembada beras, disamping masalah penanganan operasi dan pemeliharaan, masalah pemanfaatan jaringan irigasi baru masih perlu ditangani secara terpadu. Perluasan jaringan irigasi baru belum seluruhnya

Bendung Benteng di Sulawesi Selatan

Pembangunan Jalan di daerah-daerah terpencil (Irian Jaya)

dilaksanakan secara terpadu dengan usaha pencetakan sawah. Pembangunan jaringan irigasi secara terpadu menuntut penyederhanaan penyelesaian sertifikat tanah, penyederhanaan kredit pencetakan sawah dan pengembangan teknologi pertanian. Peluang untuk pengembangan lahan beririgasi di beberapa daerah, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ditentukan oleh tersedianya petani transmigran, berbagai faktor agronomis dan kemudahan para petani untuk memperoleh modal kerja yang diperlukan.

c). Penanganan Operasi dan Pemeliharaan

Sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan selama Pelita IV dan sebelumnya, jumlah jaringan pengairan semakin meningkat. Peningkatan tersebut menuntut peningkatan dan penyempurnaan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Dalam rangka meningkatkan penanganan operasi dan pemeliharaan, satu masalah yang sangat penting bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Dalam hubungan ini sumber dana untuk pembiayaan dan peningkatan kemampuan lembaga petani untuk menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimanfaatkan masih merupakan masalah yang perlu ditangani dengan seksama.

3). Masalah Jalan

a). Di bidang kelembagaan, diperlukan kejelasan batasan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam pelimpahan tugas pembinaan jalan kepada Pemerintah Daerah, berikut peningkatan pemenuhan penyelenggaraannya (termasuk peningkatan pendayagunaan aparatur).

b). Di bidang prioritas investasi, masih terdapat ketimpangan perimbangan antara program pemeliharaan dan peningkatan/anggaran pembangunan dibandingkan dengan tuntutan pembangunan.

c). Anggaran pembangunan prasarana jalan sangat terbatas, jika dibandingkan dengan manfaat ekonomis yang dihasilkan secara nasional dari pemanfaatan jalan.

d). Masih adanya keterbatasan kemampuan dunia usaha jasa konstruksi untuk menghasilkan mutu pelaksanaan yang dapat diandalkan.

e). Masih adanya penyimpangan pemanfaatan jalan :

- Pemakai Jalan : muatan lebih, kecepatan lebih.
- Bukan Pemakai Jalan : salah penggunaan bagian jalan.

4). Masalah Perumahan dan Pemukiman.

a). Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Perkotaan.

(1) Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi.

Pada awal Repelita V penduduk Indonesia berjumlah 179,1 juta jiwa, dimana jumlah penduduk perkotaan sebesar 52,4 juta jiwa. Pada akhir Pelita V penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 192,9 juta jiwa, dimana 61,1 juta jiwa merupakan penduduk perkotaan. Diperkirakan 46% penduduk perkotaan bermukim di 18 kota raya dan kota besar, dan sisanya tersebar di 800 kota sedang dan kecil.

(2) Keseimbangan Perkembangan Antar Wilayah, Kota dan Desa.

Perkembangan fisik dan kegiatan ekonomi pada umumnya masih cenderung terpusat di kota raya dan kota besar, meskipun demikian banyak kota sedang dan kecil yang tumbuh dan berkembang secara harmonis dan fungsional sebagai pusat kegiatan ekonomi sosial, pusat pemerintahan dan fungsi-fungsi lain yang sifatnya strategis. Pengembangan kota-kota sedang dan kecil yang mempunyai peranan strategis tersebut terutama dalam pertumbuhan ekonomi daerah masih belum dicukupi dengan prasarana dan sarana yang memadai, terutama untuk meningkatkan perkembangan wilayah, agar keseimbangan perkembangan antar wilayah, kota dan desa menjadi lebih baik.

(3) Ketidakselarasan Perkembangan Fisik

Sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota raya dan kota besar mengalami perkembangan fisik yang cepat dan tidak terkendali. Perkembangan fisik ini dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu horizontal, vertikal dan interstisial (pengisian bagian kosong). Perkembangan fisik tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan merupakan perkembangan yang tidak teratur dan sporadis. Tata bangunan yang kurang selaras dan penempatan tata ruang dan lahan, pemanfaatan sumber alam lainnya secara tidak wa-
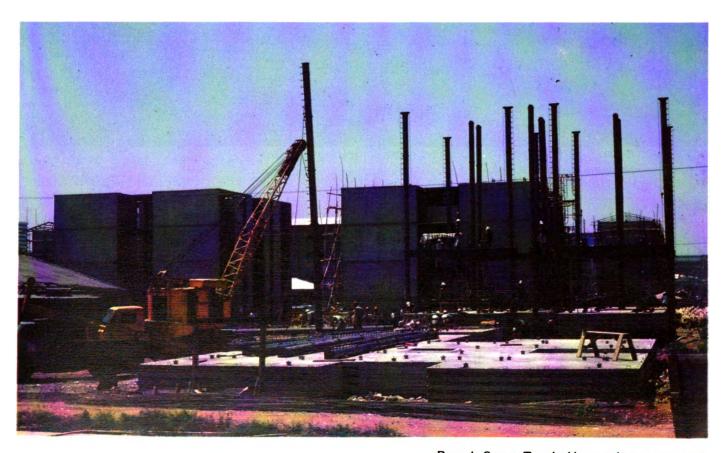
Rumah Susun Tanah Abang tahap pengerjaan
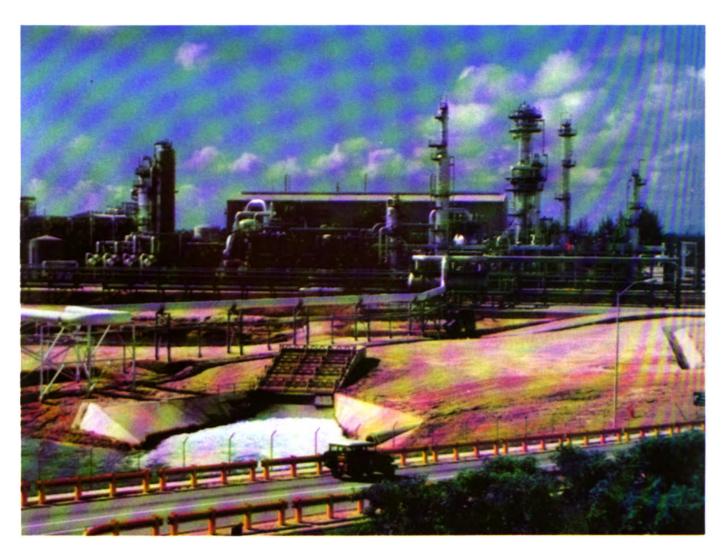
Pembangunan Industri hendaknya memperhatikan dampak lingkungan.

jar seperti sungai sebagai pembuangan limbah dan tempat hunian, terbentuknya kawasan kumuh yang makin meluas serta kurangnya kawasan hijau dan kawasan lindung.

(4) Penurunan Kualitas Lingkungan

Pada bagian kota tertentu terjadi proses penurunan kualitas lingkungan yang terkait dengan masalah kebersihan, kesehatan masyarakat, estetika dan pencerminan lingkungan. Masalah kebersihan dan kesehatan terutama terjadi pada kawasan perumahan kumuh, pusat kegiatan pasar, serta pusat-pusat kegiatan umum lainnya. Masalah kesehatan masyarakat yang tidak lepas dari masalah kebersihan dan pencemaran terasa pula pada kawasan tersebut di atas dan kawasan yang terdapat kegiatan industri. Pada umumnya masalah estetika sudah dipandang penting, terutama dilihat dari aspek tata bangunan, lansekap bangunan dan hijauan, serta lansekap pemukiman kota. Namun demikian, pada kawasan tertentu hal tersebut belum mendapat perhatian yang cukup, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan fisik yang seharusnya tidak terjadi, khususnya di daerah pu-

sat kota lama, pergudangan, kawasan industri maupun kawasan perumahan tertentu.

Masalah pencemaran lingkungan akibat air limbah rumah tangga maupun industri sudah mulai terasa dampaknya, seperti penurunan fungsi prasarana drainase dan sungai, kualitas air permukaan dan air tanah bahkan pencemaran alam lainnya seperti udara, iklim, flora dan fauna.

(5) Keterlambatan dan Keterbatasan Dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemukiman.

Kecepatan pertumbuhan kota dari segi pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha selalu tidak dapat diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana pemukiman yang memadai. Hal tersebut menjadi salah satu sebab terjadinya masalah ketidakselarasan perkembangan fisik maupun penurunan kualitas lingkungan.

Beberapa permasalahan pokok adalah belum terpadunya penyiapan program maupun perencanaan khususnya dalam aspek pembiayaan institusi dan waktu pelaksanaan, sehingga terjadi kelambatan penyediaan prasarana yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan penduduk, baik di kawasan lama, kawasan yang berubah maupun perkembangan kawasan baru. Keterbatasan dapat pula disebabkan tingkat pelayanan yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dikaitkan dengan efektivitas kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Bagi masyarakat pendatang yang belum mapan, juga belum dapat disediakan papan dan tempat kerja yang memadai. Karena keterbatasan penyediaan prasarana dan sarana tersebut, seolah-olah mereka merupakan kelompok pengganggu ketertiban, keserasian, pencipta kekumuhan kota dan lainnya.

(6) Ketidaksiapan Proses Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat.

Permasalahan pokok dalam mengembangkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keselarasan pada kehidupan masyarakat adalah kurangnya pengarahan sikap sosial budaya masyarakat, perencanaan pengembangan sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan fisik kota.

Kesempatan kerja belum diupayakan melalui perencanaan kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya bagi kelompok informal atau kurang mapan. Akibatnya semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mengembangkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu perlu penanganan khusus.

Perubahan perilaku atau sikap budaya yang kurang cocok belum sepenuhnya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan maupun penerapan disiplin dan sangsi.

Upaya pengembangan dan pembinaan manusia seutuhnya akan sulit dicapai jika upaya tersebut tidak dilakukan secara sistematis atas dasar kerjasama pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat sendiri.

(7) Keterbatasan Kemampuan Mobilisasi Pembiayaan Pembangunan.

Pembiayaan dalam pembangunan prasarana pemukiman masih harus dipandang secara lebih luas yang merupakan bentuk nilai tambah yang terjadi dan harus dikelola untuk diinvestasikan kembali guna memenuhi kebutuhan pembangunan selanjutnya (bukan sebagai bentuk pengeluaran saja). Sumber pembiayaan belum dapat dimobilisasi secara optimal baik dari sumber pendapatan Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun masyarakat, sehingga penggunaan berbagai sumber biaya tersebut belum terpadu.

Di sisi lain permasalahan pembiayaan dalam penyediaan prasarana tidak hanya dipandang dari sudut efektivitas penggunaannya, tetapi harus dipikirkan juga bahwa setiap investasi yang telah dikeluarkan harus dapat dikembalikan guna membiayai operasi dan pemeliharaan maupun pembangunan prasarana baru. Meskipun demikian, prinsip pemulihan biaya tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada semua prasarana perkotaan, karena sifat pelayanannya, sehingga perlu dibedakan antara prasarana yang dapat dipulihkan secara langsung dan tidak langsung.

Disamping itu, sumber pembiayaan pemerintah belum dapat diefektifkan untuk mendorong motivasi masyarakat dan pihak swasta untuk menyediakan dana guna pembangunan prasarana dan sarana yang jelas merupakan suatu kebutuhan.

(8) Lemahnya Pengelolaan

Permasalahan dalam pengelolaan tidak saja berkenaan dengan masalah institusi, tetapi berkenaan dengan instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengaturan dalam konteks kebutuhan suatu daerah.

Sebagai contoh : pemanfaatan rencana tata ruang kota, penataan bangunan, pengendalian kawasan

khusus, pengendalian pencemaran sungai, pelaksanaan pembangunan prasarana terpadu, pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, pengendalian mutu sumber air dan lain-lainnya.

(9) Penanganan Program Prasarana Perumahan dan Pemukiman Perkotaan.

Secara khusus permasalahan dalam program pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman perkotaan adalah sebagai berikut :

(a) Pembangunan Perumahan Sederhana.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan adalah belum dapat dipenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak akibat pertambahan penduduk yang pesat maupun rendahnya kemampuan membangun oleh sebagian penduduk, Masalah lain yang dihadapi adalah kebutuhan dana, khususnya untuk penyediaan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah.

Disamping itu juga sulit untuk memperoleh lahan dalam jumlah yang memadai dengan harga yang wajar dan jarak yang dekat dengan pusat kegiatan, serta sulitnya penentuan lokasi perumahan yang serasi dan terpadu dengan kebijaksanaan tata ruang, penyediaan prasarana dasar seperti jalan kolektor, air bersih, saluran drainase dan sebagainya.

Bagi masyarakat yang masih belum merasa mampu atau tidak membutuhkan rumah tinggal sendiri, kebutuhan rumah sewa masih sangat tinggi, dan merupakan potensi untuk tetap harus disediakan, terutama oleh masyarakat sendiri.

(b) Perbaikan Kampung dan Lingkungan Pasar.

Penyediaan prasarana di daerah perkampungan dan sekitar pasar masih belum menggunakan standar yang memadai, namun pelaksanaan perbaikan kampung secara bertahap telah meningkatkan kondisi lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi adalah antara lain pembebasan lahan untuk prasarana dan sarana yang akan dibangun, serta pola penanganan yang lebih mengenai sasaran menurut besaran kota dan jenis kampung yang berbeda.

(c) Peremajaan dan Pengembangan Pemukiman Kota.

Peremajaan kota belum dapat dilaksanakan secara terencana karena adanya beberapa masalah seperti besarnya biaya, rumitnya status pemilikan tanah, kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya informasi dan belum mantapnya perencanaan tata ruang dan program pembangunan kota.

Perkembangan pemukiman baru, khususnya di kota raya dan besar sangat cepat, sementara kesiapan pengendaliannya masih lemah dan tertinggal, sehingga timbul ketidakteraturan tata ruang dan penggunaan lahan, terbatasnya prasarana yang dapat disediakan serta semakin terdesaknya pemilikan lahan yang kurang mampu.

(d) Penyediaan Air Bersih.

Masalah pokok yang dihadapi adalah peningkatan kebutuhan penduduk akan air bersih yang belum dapat diimbangi dengan kemampuan untuk menyediakannya.

Meskipun kapasitas produksi terpasang sudah cukup besar, tetapi belum dapat didistribusikan secara penuh karena kurangnya jaringan distribusi dan tingginya tingkat kebocoran.

Kota-kota besar tertentu menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air baku yang memadai sebagai akibat pencemaran. Di lain pihak pemanfaatan air tanah yang berlebihan memberikan dampak intrusi air laut dan masalah geohidrologi.

(e) Penanganan Air Limbah.

Kurangnya perhatian masyarakat dan aparat pemerintah dalam masalah air limbah merupakan salah satu masalah dalam peningkatan kesehatan lingkungan.

Disamping itu pengelolaan air buangan rumah tangga masih sangat sederhana dan kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Penanganan air limbah tersebut masih dianggap sangat mahal dan belum terjangkau. Pada daerah padat penanganan air limbah setempat yang tidak terarah menimbulkan kontaminasi terhadap air tanah.

(f) Penanganan Persampahan.

Penerapan teknologi dan pengelolaan sampah masih belum memadai, termasuk dalam hal operasi dan pemeliharaan fasilitas dan sarana yang telah disediakan.

Penanganan dan pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sangat menjadi masalah terutama dilihat dari segi cara pengelolaan dan mendapatkan lahan yang murah dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Penentuan retribusi, peranserta masyarakat dan pihak swasta menjadi masalah pokok dalam meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman.

(g) Penanganan Drainase.

Banyak prasarana drainase kurang berfungsi karena kurangnya usaha pemeliharaan. Di lain pihak masih terdapat masalah kurang terpadunya perencanaan sistem drainase utama dengan sistem drainase lokal, sehingga penyalurannya kurang efektif. Hal lain adalah masih belum disusunnya penetapan klasifikasi sistem drainase dan sungai sebagai fungsi pengendalian banjir, sehingga masih timbul kerancuan dalam tanggungjawab dan wewenang penaganannya.

b). Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Pedesaan.

Masalah pokok yang dihadapi dalam penanganan pemukiman pedesaan adalah :

(1) Pola pemukiman desa yang tersebar dan karakteristik yang beranekaragam.

Jumlah unit pemukiman desa sangat banyak dan tersebar serta karakteristiknya sangat beraneka-ragam, sehingga hasil investasi akan tidak optimal jika tidak memperhatikan aspek lokasi dan kesesuaian dengan karakteristik desa.

Disamping itu tingkat perkembangan desa juga sangat beranekaragam, terutama dilihat dari segi ekonomis. Hal ini juga memberi keragaman kemampuan masyarakat dalam membangun.

(2) Kondisi perumahan dan prasarana yang tidak memadai.

Tingkat kesejahteraan penduduk desa relatif rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hal ini terlihat dari kondisi perumahan dan
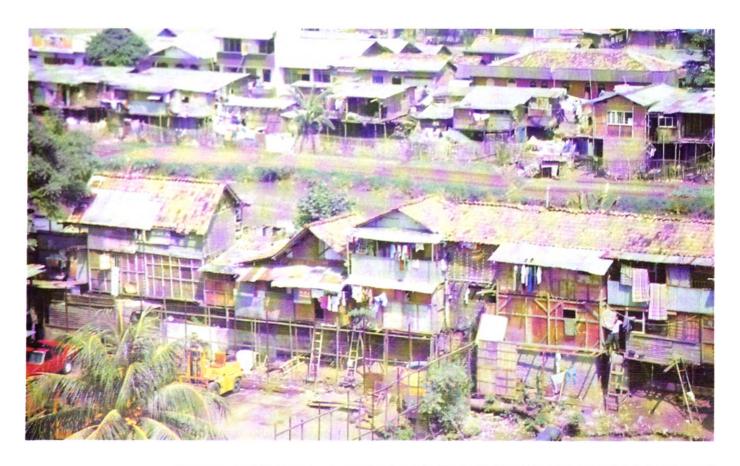
Membangun di bantaran sungai adalah tidak dibenarkan karena mengganggu kualitas tanggul.

ketersediaan prasarana dan sarana yang ada.

Masalah utama adalah kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, kurang tersedianya sarana air dan kurang memadainya sarana air limbah manusia dan rumah tangga.

Dalam rangka pengembangan potensi desa, masalah utama yang dihadapi adalah kurang memadainya prasarana dan sarana desa pada desa-desa yang berfungsi sebagai pusat pelayanan, industri, pariwisata maupun budaya.

Masalah yang sangat mendasar untuk meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan ataupun penyediaan prasarana dan sarana adalah kurangnya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini masalah pembinaan sosial ekonomi sangat penting untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan fisik. Swadaya dan gotong royong masyarakat desa masih menjadi sikap budaya yang potensiil, sehingga potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal.

(3) Penanganan Program Prasarana Perumahan dan Pemukiman Pedesaan.

Secara khusus permasalahan dalam program pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman pedesaan adalah sebagai berikut :

(a) Perumahan dan Lingkungan Desa.

Perumahan dan lingkungan desa sejak Pelita I telah dilaksanakan secara terpadu, namun demikian proporsi dana yang dialokasikan masih terbatas.

Masalah peningkatan mutu rumah, usaha untuk pengadaan secara mandiri melalui Program Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu masih belum memadai. Penataan lingkungan, penyediaan air bersih dan penanganan limbah rumah tanggal masih belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan.

(b) Penanganan Air Bersih Pedesaan.

Program air bersih pedesaan masih sangat terbatas, padahal sangat penting peranannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat belum menghayati pentingnya air bersih yang baik bagi kesehatan masyarakat. Dan saat ini penanganan air bersih pedesaan diserahkan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum sepenuhnya.

(c) Penanganan Air Limbah Pedesaan.

Penanganan air limbah pedesaan dalam Pelita IV masih sangat terbatas dan masih disatukan dengan penanganan pemugaran perumahan desa dan melalui Inpres sarana kesehatan yang ditangani oleh Departemen Kesehatan. Disamping itu masyarakat masih belum menghayati pentingnya sarana sanitasi yang baik bagi kesehatan.

c). Penanganan Penataan Ruang.

Masalah yang dihadapi dalam penataan ruang saat ini adalah masih sangat konvensionalnya proses rencana tata ruang yang bertitik-tolak semata-mata sebagai alat pengaturan dan pengendalian, sehingga produknya tidak operasinal.

Perkembangan pembangunan yang sangat dinamis membutuhkan tata ruang yang mampu memberikan peluang dan kemudahan serta menjadi pendorong kegiatan pembangunan tersebut.

Lemahnya keterkaitan rencana tata ruang dengan aspek pengelolaan ruang merupakan salah satu sebab tidak efektifnya produk tata ruang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan. Belum lengkapnya sarana pendukung proses perencanaan berupa standar, prosedur, peralatan maupun tenaga ahli dalam perencanaan tata ruang merupakan masalah yang mendesak dan memerlukan perhatian.

d). Penanganan Penataan Bangunan.

Penanganan penataan bangunan meliputi penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar serta penataan bangunan umum, bangunan negara dan bangunan pada kawasan khusus.

Selama Pelita IV masih terbatas pelaksanaannya pada pembinaan tertib pembangunan bangunan negara dan umum serta pembinaan pembangunan bangunan gedung sekolah dan rumah sakit. Disamping itu juga telah dilaksanakan bantuan teknis dalam rangka penataan bangunan-bangunan khusus.

Masalah yang dihadapi belum disusunnya pengaturan dalam penataan bangunan secara lebih luas, belum adanya pengertian dan koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam pengadaan bangunan, belum tersedianya mekanisme kerja serta sumber biaya yang memadai untuk mengembangkan program penataan bangunan.

5). Masalah Pengaturan dan Pembinaan.

b). Meningkatnya hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dan besarnya tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan memerlukan peningkatan usaha pengaturan dan pembinaan agar prasarana dan sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Namun pada kenyataannya usaha pengaturan dan pembinaan belum cukup memadai, terutama dalam penyediaan berbagai produk pengaturan dan pembinaan yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan manajemen pembangunan.

Kondisi yang demikian telah membawa kesenjangan antara usaha pengaturan dan pembinaan dengan usaha pengelolaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.

Hal ini disebabkan belum sepenuhnya usaha pengaturan dan pembinaan dapat dilaksanakan mengingat yang dihadapi seperti bidang kepegawaian, keuangan, prasarana kerja dan sarana utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

b). Tuntutan terhadap peningkatan usaha pengaturan dan pembinaan semakin jelas dalam Repelita V terutama dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI.

Hal ini dikaitkan dengan perlunya diupayakan pendayagunaan berbagai ketatalaksanaan yang sejalan dengan usaha peningkatan tuntutan terhadap sumberdaya insani di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam kurun waktu Repelita V.

c). Tanpa mengurangi keberhasilan peranserta kegiatan pengaturan dan pembinaan bagi usaha pembangunan yang selama ini dapat dicapai, masih jelas nampak bahwa aspek pengaturan dan pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan masih belum mampu menunjang laju pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka unsur utama fungsi manajemen seperti perencanaan, kepegawaian, keuangan, material serta unsur pendukungnya seperti antara lain hukum, informasi, iptek, litbang, masih perlu ditangani secara lebih intensif.

Bentuk penyusunan yang perlu dilakukan haruslah dapat mewujudkan produk ketatalaksanaan terpadu yang bersifat pengaturan dan pembinaan, dan pada gilirannya diharapkan dapat melestarikan pendayagunaan pengelolaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.

6). Masalah Pengawasan.

Upaya peningkatan pengawasan, sebagai salah satu fungsi manajemen yang diterapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu antara lain telah semakin tertibnya pelaksanaan tugas Departemen, terutama pelaksanaan tugas pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.

Usaha yang berupa peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan telah dirintis pada saat Pelita IV. Pengawasan yang dilaksanakan selama Pelita IV telah memberikan kontribusi yang cukup memadai bagi kelangsungan pembangunan bidang pekerjaan umum yang antara lain berupa :

- Pola rencana dan strategi program pengawasan berdasarkan konsep yang realistis (konseptual).
- Landasan operasional dari pengawasan didasarkan pada konsepsi pemeriksaan menyeluruh *(Compreensive Audit)* Departemen Pekerjaan Umum.
- Semakin meningkatnya kemampuan teknis aparat pengawasan fungsional Departemen Pekerjaan Umum.

Namun demikian, peningkatan pengawasan itu juga mengalami hambatan sebagai akibat menurunnya anggaran pengawasan secara drastis sejak tahun anggaran 1986/-1987, karena keadaan keuangan negara yang memprihatinkan. Dampak menurunnya anggaran pengawasan tersebut diantaranya ialah :

- Berkurangnya kemampuan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang ada.
- Kurang lancarnya pengembangan sistem pengawasan lebih lanjut.
- Berkurangnya kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur pengawasan fungsional.

Berkaitan dengan dampak-dampak tersebut di atas, sangat dikhawatirkan akan tidak dapat dipertahankannya hasil yang pernah dica-

pai oleh Inspektorat Jenderal di waktu lampau yaitu berkurangnya jumlah temuan. Kondisi itu dapat muncul tidak hanya karena menurunnya anggaran, tetapi juga karena belum berfungsinya pengawasan melekat sebagaimana mestinya.

Dengan ditingkatkannya pengawasan melekat diharapkan dapat mengurangi tugas pengawasan fungsional pada tingkat pemeriksaan administratif dan pemeriksaan operasional, sehingga Inspektorat Jenderal dapat memusatkan perhatiannya pada pemeriksaan kinerja *(Performance Audit)* dan pemeriksaan program *(Program Audit)*.

Hal lain yang menjadi masalah di bidang pengawasan ialah adanya sikap sementara pengendali yang belum sepenuhnya tanggap terhadap laporan hasil pemeriksaan fungsional intern (Inspektorat Jenderal) maupun ekstern (BPKP dan Bepeka). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya temuan yang belum ditindaklanjuti oleh pengendali tingkat Pusat dan aparatnya di tingkat Daerah.

7). Masalah Penelitian dan Pengembangan.

Masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian selama kurun waktu Repelita V adalah :

a). Pembangunan fisik yang dilaksanakan menunjukkan kecenderungan adanya pemborosan, persyaratan teknis yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dan kurang diperhatikannya kelestarian fungsi lingkungan.

Kegiatan penelitian dilaboratorium DPMA Bandung.

b). Menurunnya kemampuan Pemerintah dalam penyediaan dan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman akan menyulitkan tercapainya target pemenuhan kebutuhan akan rumah khususnya bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah di daerah perkotaan. Untuk itu perlu dicari pemecahannya melalui pengembangan sistem pendanaan pemukiman.

c). Kebijaksanaan Pemerintah dalam hal wewenang dan tanggung jawab penyediaan prasarana dan sarana semakin diarahkan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat akan lebih berfungsi dalam pengaturan dan pembinaan serta bantuan teknis. Namun Pemerintah Daerah masih terbatas dalam hal pendanaan dan kemampuan pengelolaan kelembagaannya.

. Pengaturan yang menyangkut pola peruntukan lahan masih belum jelas, sehingga memungkinkan terjadinya lingkungan yang tidak teratur. Peraturan perundang-undangan yang akan memberikan kelancaran dan kemudahan.

. Penerapan teknologi baru relatif berlaku sangat cepat namun tidak diikuti dengan penyuluhan kepada masyarakat.

Luas tanah kritis di Indonesia dengan jumlah lebih kurang 20 juta hektar, dimana sebagian besar tanah kritis tersebut mengalami degradasi antara lain karena erosi. Bila hal ini terjadi pada lereng-lereng dapat menimbulkan longsor, sehingga tidak dapat melayani lalu lintas sebagaimana mestinya. Lokasi longsoran ter-

sebut, hampir di seluruh Indonesia dan merupakan daerah labil. Karena itu ruas-ruas jalan yang melalui daerah labil sering mengalami kerusakan.

. Jembatan di Indonesia berada dalam lingkungan korosif, sehingga kualitas dan masa pelayanannya menurun. Pengembangan jalan di atas tanah lembek selalu menghadapi problema. Daya dukung tanah rendah sehingga terjadi penurunan cukup besar yang berlaku dalam jangka waktu lama.

Jalan Tol prof. Sediyatmo dalam tahap pelaksanaan
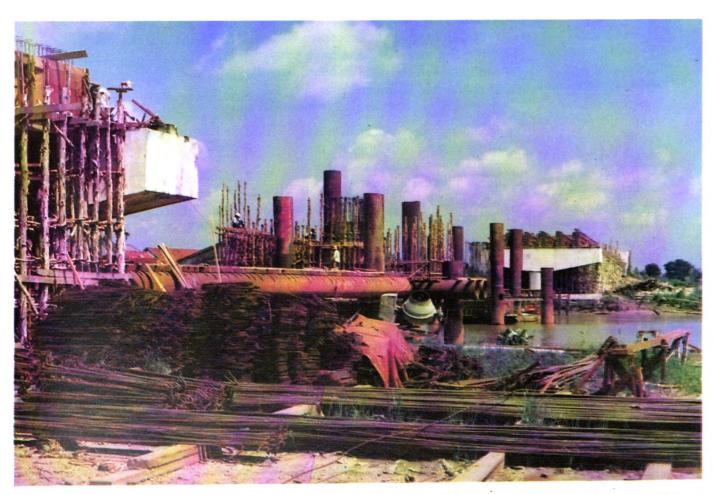
Jembatan Keramasan — Sumatera Selatan

STANDARISASI DAN PENERAPAN STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Standar digunakan sebagai rujukan oleh para pelaksana konstruksi untuk kemudahan-kemudahan. Penggunaannya tidak dapat dipaksakan, kecuali dengan ketentuan (peraturan atau keputusan Menteri) yang mengharuskan penggunaannya. Oleh sebab itu standard dapat dilihat dari sifatnya, yaitu :

a. Standar yang bersifat sukarela *(voluntary)*, dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan, umpamanya seorang perencana dapat mendesain suatu elemen bangunan sipil yang tidak sama dengan standard yang ada, tetapi yang bersangkutan perlu mencari dan menghitung sendiri segala sesuatunya.

b. Standar yang bersifat keharusan untuk menggunakan *(compulsory, mandatory)*. Standar kategori ini umumnya menyangkut kesehatan atau/dan keselamatan pemakai bangunan, umpamanya standar spesifikasi mengenai dinding kamar radiasi, komponen pencegah bahaya kebakaran, dan lain-lain standar yang dipandang perlu untuk dijadikan *compulsory*.

Apabila tidak ditentukan lain, maka umumnya standar bersifat sukarela. Sesuai dengan norma yang berlaku dibidang standarisasi bentuk standar yang dikenal di bidang pekerjaan konstruksi meliputi :

(1) Metode Pengujian *(Testing Method)*.
(2) Spesifikasi Produk *(Product Specification)*.
(3) Tata Cara Pengerjaan *(Code of Practice)*.

2. Jenjang standar di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Dewan Standarisasi Nasional (SK Menristek selaku Ketua DSN No. 681/IV.22/2/88 tanggal 12 Februari 1988), terdiri dari 2 jenjang, yaitu :

a. S.N.I. (Standar Nasional Indonesia), dan
b. S.K.S.N.I. (Standar Konsep SNI)

SNI berlingkup nasional dan SK SNI bidang Pekerjaan Umum merupakan Standar instansi teknis Departemen Pekerjaan Umum. Sebelum 31 Maret 1989, SK SNI di Deparemen Pekerjaan Umum bernama SKBI, yaitu Standar Konstruksi Bangunan Indonesia. Penggantian dari SKBI menjadi SK SNI dimaksud-

kan agar secepatnya dicapai satu standar untuk seluruh Indonesia dan secepatnya pula SK SNI diproses untuk diangkat menjadi SNI. Ciri Instansi Teknis hanya terdapat pada nomor kode saja, umpamanya pada SK SNI bidang konstruksi, di pakai nomor kode SK SNI-T-01-1989-F, SK SNI-M-01-1989-F, SK SNI-S-01-1989-F. Huruf F menunjukkan bahwa standar yang bersangkutan ada dalam lingkup departemen Pekerjaan Umum (bidang konstruksi), baik pada penyusunannya, maupun pada penerapannya.

SK SNI bidang Pekerjaan Umum diputuskan dan ditetapkan dengan SK Menteri Pekerjaan Umum, sedangkan SNI ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, setelah mendapat persetujuan dari DSN. Pengangkatan SKI SNI menjadi SNI dilakukan oleh DSN yang bersidang dua kali setahun untuk membahas dan menyetujui pengangkatan sejumlah SK SNI menjadi SNI.

3. Jumlah standar bidang konstruksi yang sudah dihasilkan hingga September 1990 adalah 219 standar yang terdiri dari 43 SNI dan 176 SK yang belum diangkat menjadi SNI. Menurut perkiraan para ahli jumlah standard di bidang Pekerjaan Umum yang dibutuhkan tidak kurang dari 5.000 standar, baik berupa Standar Metode Pengujian, Standar Spesifikasi Produk dan Standar Tata Cara Pengerjaan. Oleh sebab itu masih banyak kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh para pakar dan para peneliti di Departemen Pekerjaan Umum. Standarisasi di Departemen Pekerjaan umum masih sangat ketinggalan dengan standarisasi umpamanya di Departemen Perindustrian. Standardisasi di Departemen Perindustrian relatif maju, karena ada tuntutan antara lain untuk mengamankan kebijaksanaan produksi dalam negeri dengan mengamankan ekspor/impor barang-barang produksi tersebut. Karena standar di bidang Pekerjaan Umum masih banyak sekali yang perlu dihasilkan, maka untuk tahun 1989/1990 diprogramkan untuk menghasilkan kurang lebih 200 standar dan perlu melipat gandakan program standarisasi untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Untuk pemrosesan Standar, Menteri Pekerjaan Umum telah membentuk Panitya Tetap (Pantap) Departemen Pekerjaan Umum, yang dibantu oleh Panitya-panitya Kerja (Panja). Pantap dipimpin oleh Kepala Badan Litbang Pekerjaan Umum dan Panja dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Kesemuanya terdapat 3 Panja. Panja berperan untuk menghasilkan konsensus untuk standar demi standar yang konsep akhirnya disampaikan kepada Pantap untuk diperiksa, dievaluasi dan disetujui untuk diusulkan guna ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pantap perlu bersidang setiap minggu dan Panja bersidang setiap kali diperlukan. Pekerjaan untuk mendapatkan konsensus (dan prakonsensus) memakan waktu relatif lama, dan melibatkan para ahli, pakar dan peneliti dari Badan Litbang Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal, Universitas, Asosiasi Profesi dan pihak Swasta lainnya yang terkait. Mekanisme kerja dari seluruh pemrosesan ditetapkan oleh Pantap.

Panja dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, dengan maksud agar standar-standar yang dihasilkan adalah standar-standar yang sangat diperlukan oleh pemakai atau untuk mengamankan urutan prioritas dari pembuatan standar. Pekerjaan pembuatan standar dapat bermula dari standar-standar luar negeri atau bermula dari prakarsa dari Pejabat-pejabat tertentu. Pekerjaan pengkajian standar-standar luar negeri atau penelitian-penelitian yang diperlukan melibatkan para peneliti dan teknisi Badan Litbang Pekerjaan Umum. Pengetahuan yang terbatas dan sarana penelitian yang terbatas (di samping penyediaan dana) merupakan penghambat utama dari kecepatan menghasilkan standar. Adapun materi pokok standar terdiri dari diskripsi yang memuat tujuan, ruang lingkup standar dan penjelasan materi yang distandarkan. Dalam pada itu pada standar dicantumkan pula perujukan pada standar-standar lain, para perumus dan pemrakarsa standar, para peserta sidang-sidang konsensus dari Panja dan anggota Pantap yang menyidangkan untuk terakhir kalinya. Bentuk dan format standar sudah pula diseragamkan untuk setiap bidang/sektor.

5. SNI dan SK SNI yang sudah ditetapkan, disunting selanjutnya untuk dicetak. Dewasa ini biaya pencetakan belum disediakan, sehingga pencetakan dilakukan di Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum di Jakarta dan Yayasan DPMB di Bandung, untuk kemudian dijual melalui suatu cara penyebarluasan tertentu.

Penyebarluasan standar diselenggarakan secara konsepsional dan terus-menerus. Serangkaian kegiatan yang dilibatkan adalah di Tingkat Pusat diadakan Seminar penyuluhan dengan materi standar-standar yang dihasilkan dalam semester pertama, untuk kemudian model yang sama diselenggarakan di setiap Propinsi oleh para Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum. Penyelenggara adalah gabungan Badan Litbang Pekerjaan Umum (di Daerah: Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum), Gapensi, AKI dan Inkindo. Dalam semester kedua hal tersebut diulang lagi dengan materi standar yang dihasilkan dalam semester kedua. Dengan demikian diharapkan bahwa penyebarluasan standar dapat sampai kepada para pemakai dengan cepat dan benar.

6. Pemantauan pelaksanaan atau penerapan standar dilakukan secara bersama-sama antara unsur pelaksana (termasuk Ditjen-ditjen) dan unsur pemroses (Bidang Litbang Pekerjaan Umum). Masukan-masukan sangat diperlukan untuk memungkinkan penyelenggaraan evaluasi yang cermat, sedemikian rupa sehingga para perumus standar mendapatkan kemudahan untuk pekerjaan *review* (mengkaji kembali) dan pemrosesan penyempurnaan standar-standar yang telah ada.

7. Salah satu aspek yang menonjol dari penerapan standar adalah masalah akreditasi laboratorium. Sebagai diketahui tipe laboratorium dapat dibedakan menurut peranannya :

(1) Tipe laboratorium uji mutu rujukan.
(2) Tipe laboratorium uji mutu biasa.

Laboratorium rujukan ada yang berkedudukan di pusat, seperti yang terdapat di Pusat Litbang Pengairan, Pusat Litbang Jalan dan Pusat Litbang Pemukiman, termasuk laboratorium yang ada di Balai-balai dan Loka-loka dari Pusat-pusat Litbang di atas. Di daerah, laboratorium rujukan ada di Kanwil-kanwil di seluruh Indonesia yang dewasa ini sedang giat-giatnya diadakan peningkatan kemampuan. Laboratorium-laboratorium di daerah tersebut diharapkan hanya mempunyai kemampuan sedikit lebih rendah daripada laboratorium rujukan yang ada di Pusat, dan dalam hal tertentu yang bersifat kedalaman yang canggih perlu merujuk ke laboratorium rujukan yang ada di Pusat. Laboratorium yang ada di Pusat dan di Daerah pada umumnya milik Pemerintah.

Laboratorium uji mutu adalah laboratorium yang pada umumnya dipunyai oleh pelaksana konstruksi yaitu Dunia Usaha Jasa Konstruksi dan langsung berperan mengadakan uji mutu pekerjaan di lapangan. Uji mutu tersebut dapat pula dilakukan oleh laboratorium lapangan. Pemiliknya adalah baik Pemerintah maupun Swasta. Dalam pada itu laboratroium rujukan yang disebut terdahulu dapat pula menyelenggarakan uji mutu.

8. Dalam ketentuan DSN, setiap laboratorium yang menyelenggarakan uji mutu, perlu diakreditasi dengan hasil bahwa laboratorium bersangkutan mendapatkan sertifikat akreditasi. Akreditasi diartikan sebagai sesuatu rangkaian kegiatan untuk menilai/mengkaji kemampuan laboratorium tersebut.

Akreditasi kemampuan diberikan untuk waktu 3 tahun, secara periodik dipantau dan dinilai kembali untuk pencabutan atau perpanjangan/penambahan.

Akreditasi laboratorium dilakukan oleh satu Badan (komisi) Akreditasi Departemen Pekerjaan Umum yang memobilisir tim-tim penilai.

Adapun hal-hal yang dinilai, pada umumnya menyangkut :

(1) Prosedur dan tata cara uji mutu.
(2) Kelengkapan gedung dan sarana laboratorium termasuk peralatannya.
(3) Kelengkapan tenaga ahli dan teknisi (laporan dan *surveyor)*-nya.
(4) Pemenuhan ketentuan-ketentuan seperti standar uji mutu, dan lain sebagainya.
(5) Sistem pelaporan yang digunakan.

5. Kebijaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum.

Dengan pedoman dasar pemikiran pembangunan dalam Repelita V, maka kebijaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dalam Repelita V diarahkan untuk:

(1) Memantapkan kerangka tinggal landas yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;

(2) Memanfaatkan hasil pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum;

(3) Memenuhi tuntutan kebutuhan prasarana untuk menunjang sektor-sektor pembangunan prioritas.

Usaha memantapkan kerangka tinggal landas akan dilakukan baik dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum maupun di luar Departemen Pekerjaan Umum. Usaha yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk membentuk manusia pembangunan baik unsur pemerintah maupun masyarakat, karena pada hakekatnya pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Karena usaha pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat maka operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang telah tersedia perlu ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah akan menangani operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang tidak langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan masyarakat diharapkan berperanserta dalam menangani operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembangunan akan mengakibatkan perubahan dan menimbulkan tuntutan kebutuhan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang selalu meningkat baik jumlah maupun mutunya. Peranan Departemen Pekerjaan Umum sebagai penunjang pembangunan perlu meramalkan serta memenuhi tuntutan-tuntutan yang akan terjadi. Penunjangan perlu dilakukan untuk mendukung kebutuhan sektor prioritas dalam pembangunan nasional, agar kontribusi dan sarana bidang pekerjaan umum dalam mendorong usaha pemantapan kerangka tinggal landas dalam Repelita V dapat semakin ditingkatkan. Secara lebih terperinci kebijaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

1) Kebijaksanaan Pemantapan Kerangka Tinggal Landas.

Penyediaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dalam kurun waktu Repelita V masih akan merupakan tantangan besar bagi Departemen Pekerjaan Umum, sehubungan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, kualitas maupun kuantitas.

Hasil-hasil pembangunan bidang pekerjaan umum yang dicapai selama ini telah dapat mendorong secara nyata terciptanya persiapan kerangka tinggal landas dalam Pelita IV. Didalam menyongsong pemantapan kerangka tinggal landas dalam Repelita V, akan terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.

Upaya-upaya yang dilakukan mencakup juga pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan institusi/kelembagaan baik di lingkungan Departemen Pekerjaan umum maupun yang menyangkut di luar Departemen Pekerjaan Umum.

a). Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

(1) Peningkatan Kelembagaan.

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituntut adanya pembangunan dan peningkatan organisasi, institusi/kelembagaan yang mampu menangani tugas pembangunan yang makin meningkat baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Upaya ini dilakukan dengan: Memantapkan Kemampuan Aparatur dan Institusi/Kelembagaan Pengelolaan serta Pembinaan di Pusat maupun di Daerah.

(2) Peningkatan Kemampuan Staf

Pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum perlu diselenggarakan secara menyeluruh terarah dan terpadu, meliputi pendidikan dan latihan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang tangguh, cerdas, terampil sesuai dengan tuntutan kebutuhan peningkatan pembangunan. Upaya ini dilakukan dengan: Pembinaan staf menuju pada kejuruan intelektual dan tanggung jawab profesional dengan cara :

(a) Menyelenggarakan pendidikan kedinasan dan latihan.

(b) Membudayakan pengawasan melekat dan memantapkan pengawasan fungsional intern.
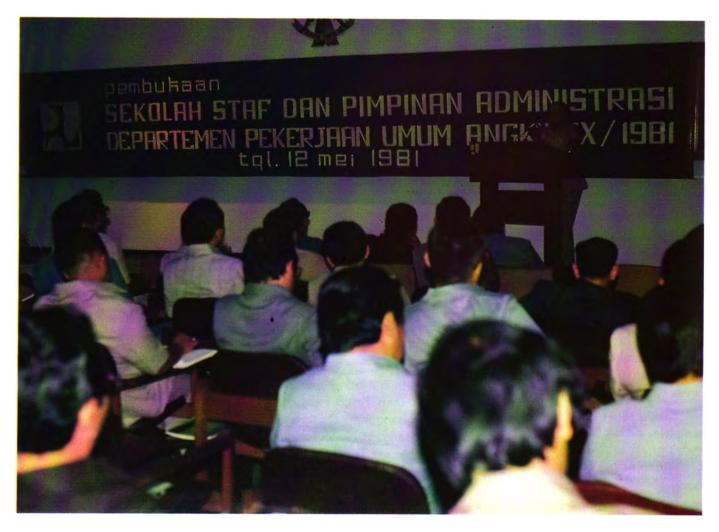
(3) Peningkatan Pedoman dan Ketatalaksanaan

Tuntutan pembangunan yang semakin meningkat memerlukan pengembangan administrasi pembangunan antara lain dengan penyusunan pedoman-pedoman, petunjuk petunjuk pelaksanaan baik dalam bentuk produk hukum maupun peraturan-peraturan lainnya yang mendukung. Upaya penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan diusahakan dengan: Memantapkan produk-produk statuter dan non statuter yang diarahkan kepada segi efisiensi, efektivitas dan pendisiplinan pembangunan serta tertib pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Peningkatan ketrampilan pegawai melalui kursus-kursus

b). Di Luar Departemen Pekerjaan Umum

(1) Meningkatkan Peranan Pemda/Masyarakat.

Momentum pembangunan yang telah ada perlu dipertahankan baik dalam rangka peningkatan pembangunan sesuai dengan tuntutan perkembangan maupun dalam rangka memperluas kesempatan kerja.

Keterbatasan dalam kemampuan pendanaan Pemerintah, memberikan tantangan kepada semua institusi/kelembagaan di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendayagunakan kemampuannya dalam hal memobilisasi penyediaan dana dari masyarakat serta meneruskan pembangunan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Upaya ini diselenggarakan dengan:

(a) Mendorong terciptanya mobilisasi penyediaan dana pembangunan oleh masyarakat.

(b) Meningkatkan kemampuan Pemda melalui kebijaksanaan desentralisasi, agar Pemda dapat lebih berperan.

(2) Meningkatkan Peranan Mitra Pembangunan

Perkembagan Dunia usaha Jasa Konstruksi Nasional sampai saat ini telah cukup memadai, namun perlu lebih ditingkatkan dalam usaha untuk meningkatkan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan penerimaan negara, Dukungan terhadap perkembangan dunia usaha ini perlu dilanjutkan dengan :

(a) Memantapkan iklim usaha yang semakin sehat.

(b) Meningkatkan kemampuan Dunia Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

(3) Memasyarakatkan Produk Hukum

Pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup pokok sehari-hari dan kemudahan untuk melakukan kegiatan usaha pada umumnya.

Agar hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum ini dapat tetap berfungsi dengan baik, perlu diusahakan pengaturan tertib pemanfaatan hasil pembangunan.

Upaya ini dilakukan melalui: Memasyarakatkan Tertib Pemanfaatan Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, antara lain, berupa Tertib Pemanfaatan Jalan, Tertib Pemanfaatan Sumber-sumber Air dan Bangunan Air, Tertib Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman.

2). Kebijaksanaan Pemantapan Operasi dan Pemeliharaan.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama periode Pelita I sampai dengan Pelita IV khususnya bidang pekerjaan umum telah menunjukkan hasil yang memadai. Namun demikian dengan adanya tuntutan peningkatan pembangunan yang semakin meningkat di berbagai sektor pembangunan prioritas, menuntut pula peningkatan pembangunan penyediaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.

Pada akhir-akhir ini perekonomian Indonesia masih menunjukkan hal-hal yang kurang menggembirakan, namun perhatian terhadap prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang telah berfungsi perlu dipertahankan dalam arti mutu dan tingkat pelayanannya dengan mengutamakan usaha pemantapan operasi dan pemeliharaan.

Upaya yang akan dilakukan dengan mengadakan:

a) Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Meningkatkan penanganan operasi dan pemeliharaan produk prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang telah berfungsi melalui:

(1) Penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan yang memadai.

(2) Mengembangkan secara meluas dan intensif serta mendetail, metode operasi dan pemeliharaan.

b). Di Luar Departemen Pekerjaan Umum

Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan. Masyarakat sebagai pemanfaat produk prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum perlu diikutsertakan dalam menggalang pemupukan dana untuk sejauh mungkin membantu Pemerintah Daerah atau bersama-sama mengupayakan pendanaan bagi biaya operasi dan pemeliharaan misalnya dengan mengadakan Biaya Pelayanan Irigasi (Irrigation Service Fee) serta mengusahakan terciptanya lembaga-lembaga masyarakat (koperasi) yang dapat menangani operasi dan pemeliharaan seperti Koperasi Petani Pemakai Air dan sebagainya.

Upaya ini ditempuh dengan cara:

(1) Terhadap Pemerintah Daerah

(a) Mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan.

(b) Membantu kemampuan teknis Pemda secara berjenjang dalam menangani operasi dan pemeliharaan.

(2) Terhadap Masyarakat

Mendorong berkembangnya kelembagaan dalam masyarakat penerima manfaat prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum untuk dapat berpartisipasi menangani operasi dan pemeliharaan.

3) Kebijaksanaan Penunjangan Sarana Prioritas.

Sejalan dengan prinsip Trilogi Pembangunan Nasional dalam Repelita V, keberhasilan pembangunan akan tetap mencerminkan dan menekankan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum akan diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut.

Dalam kaitan dengan usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum akan diarahkan pada usaha perluasan lahan pertanian sawah, dan perluasan jaringan jalan ke seluruh pelosok tanah air, serta akan ditingkatkan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, penyediaan prasarna dan sarana bidang pekerjaan umum baik kuantitas maupun kualitasnya akan ditingkatkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas.

Sejalan dengan arah pelaksanaan pembangunan sebagaimana dikemukakan di atas, dan dengan mempertimbangkan geografis wilayah Indonesia serta sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara, pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dalam Pelita V mendatang akan dilakukan berbagai kegiatan pembangunan di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Dengan arah pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Untuk mendukung sektor-sektor prioritas pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum antara lain akan diarahkan guna:

a). Menunjang Pembangunan Pertanian.

Bidang pertanian yang perlu mendapat penunjangan prasarana dan sarana pekerjaan umum dalam rangka memantapkan swasembada pangan antara lain :

- Penyediaan air baku pertanian.
- Menunjang perluasan lahan pertanian sawah prioritas.
- Mengendalikan perlindungan atas air dan sumber air.
- Menggiatkan perlindungan atas air dan sumber air.
- Reklamasi rawa.
- Menyediakan prasarana jalan di daerah lahan pertanian sawah prioritas.

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas maka penunjangan bidang pekerjaan umum diusahakan melalui:

- Penyediaan air baku untuk perikanan, peternakan dan perkebunan yang telah diprogramkan secara mantap (udang, kelapa sawit, coklat dan lain-lain).
- Menyediakan jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat kawasan yang diprioritaskan.
- Menyediakan prasarana lingkungan

b). Menunjang Pengembangan Industri

Pengembangan industri yang merupakan bagian dari usaha pengembangan ekonomi jangka panjang, diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang, yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh.

Penunjangan usaha ini dilakukan melalui upaya berikut:

- Menyediakan air baku di kawasan prioritas pengembangan.
- Mengamankan kawasan industri dari bencana banjir.
- Menyediakan jalan-jalan penghubung kawasan industri.
- Menyediakan prasarana lingkungan.

c). Menunjang Penyediaan Energi

Kebutuhan energi di Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun, sejalan dengan laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Tenaga air merupakan salah satu sumber enrgi bukan minyak yang terus akan

dikembangkan melalui pemanfaatan ribuan sungai besar dan kecil di Indonesia sebagai potensi tenaga air yang cukup besar. Penunjangan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dalam penyediaan energi antara lain meliputi: Pembangunan waduk dan perlindungan sumber-sumber air bagi penyediaan listrik tenaga air.

d). Menunjang Pembangunan Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia ke seluruh wilayah tanah air, guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meningkatkan ketahanan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara.

Penunjangan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dalam pembangunan perhubungan ini akan dilakukan melalui:

- Pembinaan jaringan jalan untuk melancarkan arus barang dan jasa dari daerah produksi ke daerah pemasaran atau sebaliknya.
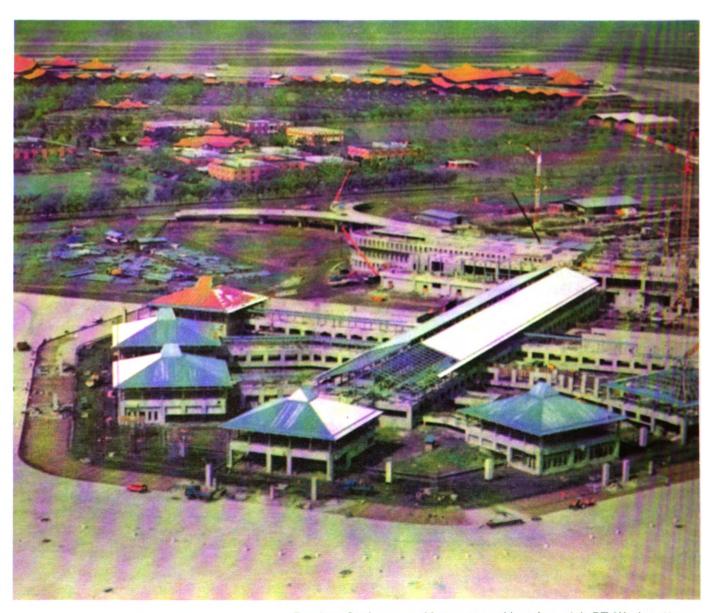
Bandara Soekarno – Hatta, yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya
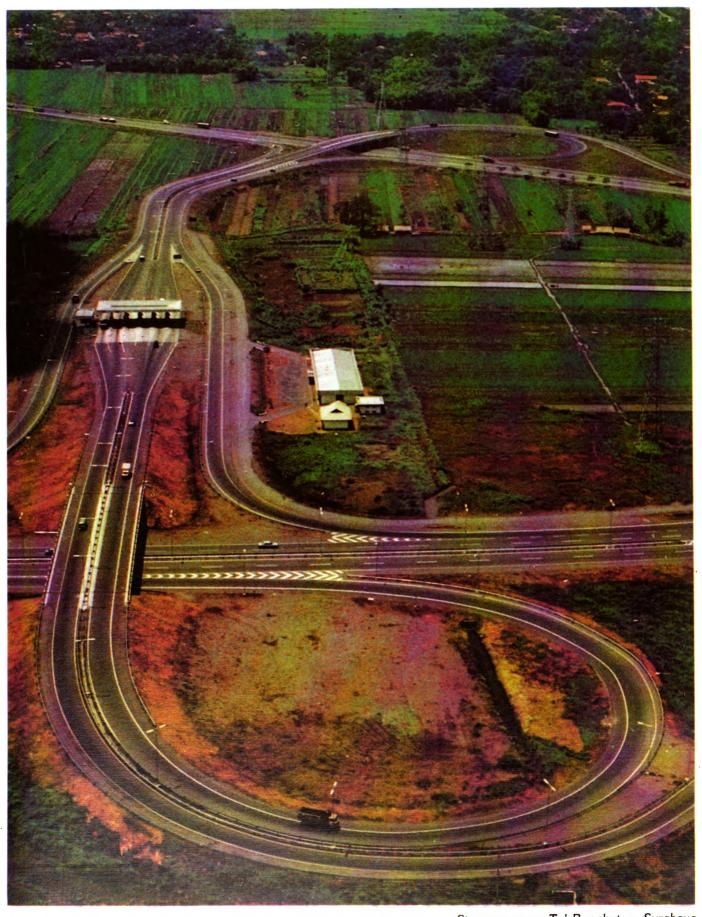
Simpang susun Tol Rungkut – Surabaya

Pembangunan jalan tol sebagai jalan alternatif.

Pembangunan jaringan jalan untuk membuka daerah terisolir dan daerah perbatasan.

- Menyediakan jalan penghubung ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

e). Menunjang Program Transmigrasi

Penunjangan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dalam program transmigrasi ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan bagi para transmigran untuk memasarkan hasil usaha serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Penunjangan dilakukan antara lain melalui:

- Pembinaan jalan menuju daerah transmigrasi.
- Reklamasi daerah rawa untuk dikembangkan menjadi daerah transmigrasi.
- Penyediaan jaringan irigasi.

Perumahan Transmigran Sitiung – Sumatera Barat

- Mendorong terciptanya organisasi pemakai air di petak-petak sawah.
- Mendorong terciptanya koperasi bahan bangunan.

f). Menunjang Pengembangan Koperasi

Pengembangan koperasi, merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam membangkitkan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam membangkitkan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidup, mendorong kewiraswastaan, perluasan kesempatan kerja dan produktivitas masyarakat.

g). Menunjang Perbaikan Kesehatan Masyarakat.

Tingginya angka penyakit menular di Indonesia sebagai akibat kekurangan penyediaan air bersih, sarana pembuangan air limbah, kurangnya kebersihan lingkungan perumahan serta perilaku membuang sampah dan lain-lain.

Penunjangan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum antara lain:

- Penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.
- Penyediaan air bersih untuk kota-kota besar, sedang, kecil maupun daerah pedesaan yang kesulitan air.
- Penyediaan sarana pembuangan air limbah, persampahan dan drainase.

h). Menunjang Perbaikan Pemukiman dan Lingkungan

Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan telah dirasakan manfaatnya, namun perlu ditingkatkan lebih lanjut dalam Pelita V.

Pengaruh terhadap alam dan lingkungan erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan pola penyebarannya yang kurang seimbang, serta penataan ruang dan lingkungan yang belum memadai.

Penunjangan prasarana dan sarana pekerjaan umum dilakukan melalui: Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman berupa penye-

Pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui penyediaan air bersih dengan hyndrant umum di Bali.

diaan air bersih, penanganan limbah air bersih, penanganan limbah cair dan padat, pembuangan drainase kota, jalan lingkungan, KIP/MIPP, perumahan, peremajaan pemukiman, pembangunan kota baru/kawasan pinggiran kota, penyediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemantapan tata ruang wilayah dan kota.

i). Menunjang Pengembangan Pariwisata

Perkembangan pariwisata meningkat dengan pesat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Penunjangan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum bagi pengembangan pariwisata antara lain melalui :

- Menyediakan air bersih dan jaringan distribusinya.
- Menyediakan jalan penghubung ke pusat-pusat pariwisata yang diprioritaskan.

j). Menunjang Kesempatan Kerja

Kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penyediaan kesempatan kerja menunjukkan per-
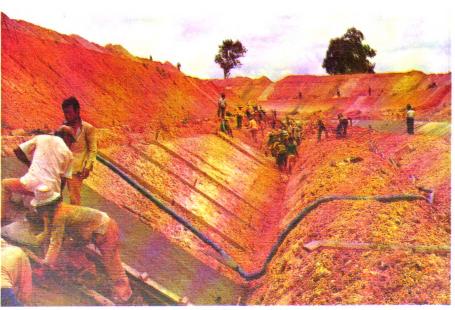
Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan / pekerjaan padat karya

bandingan yang tinggi, sehingga memerlukan pemecahan masalah secara nasional.

Pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang dapat menunjang peningkatan kesempatan kerja antara lain melalui upaya:

- Mengusahakan kemampuan tenaga kerja bidang pekerjaan umum.
- Mengusahakan proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja.

k). Menunjang Pengelolaan Sumber Air dan Lingkungan Hidup

Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan pada pendayagunaannya dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga disamping memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat di masa kini, tetap bermanfaat pula bagi generasi di masa mendatang.

Jumlah sumber alam yang terbatas merupakan kendala terhadap pembangunan nasional. Permasalahan timbul akibat ulah manusia dalam pemanfaatan sumber alam tanpa memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang menunjang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup antara lain:

- Pemanfaatan air untuk berbagai keperluan seperti penyediaan air untuk rumah tangga, kota dan industri, untuk pembangkit tenaga listrik, pengendalian banjir, pengendalian pencemaran air dan lain-lain.
- Pengamanan daerah pertanian dan daerah pemukiman terutama pengamanan kota-kota terhadap bencana banjir dan genangan.
- Pengamanan daerah pantai termasuk daerah pertanian dan pemukiman serta prasarna dan investasi di sepanjang pantai terhadap penggerusan dan pengikisan pantai.
- Konservasi tanah dan air terutama pada daerah aliran sungai bagian hulu dengan pembuatan bangunan-bangunan pengendali erosi, sedimentasi dan tanah longsor serta pengelolaan daerah aliran sungai bekerjasama dengan instansi-instansi lain.

Sumber daya air kali Brantas — Jawa Timur

l). Menunjang Peningkatan Peranan Wanita.

Dalam rangka peningkatan peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan akan ditingkatkan kemampuan dan kesempatan bagi wanita untuk memegang peranan yang lebih besar sebagai pengambil keputusan, penentu kebijaksanaan, perencana pembangunan serta penikmat hasil pembangunan.

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dilakukan hal-hal berikut:

- Meningkatkan kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal serta pelatihan dan penyuluhan bagi wanita, baik melalui kegiatan-kegiatan sektoral maupun kegiatan khusus peranan wanita.
- Mengupayakan perluasan kesempatan kerja bagi wanita, serta peningkatan produktivitas kerja wanita.

Bakti sosial Dharma Wanita Unit Departemen Pekerjaan Umum dalam bakti sosial

- Menyempurnakan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada peningkatan kedudukan dan kesejahteraan wanita.
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan mengenai peranan wanita dalam pembangunan mengembangkan sistem monitoring dan informasinya dan memantapkan keterpaduan kelembagaan antara sektor pemerintah dan masyarakat.

m).Menunjang Eliminasi Kemiskinan.

Dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman pelaksanaan pembangunan masa lalu, masih dirasakan adanya hasil-hasil pembangunan yang kurang menyentuh hajat hidup masyarakat golongan ekonomi sangat lemah khususnya pada daerah-daerah terpencil, sehingga sebagian masyarakat masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, upaya penunjangan bidang pekerjaan umum adalah :

- Menyediakan pemukiman yang layak, menyediakan perumahan dan lingkungan yang sehat.
- Mendorong terciptanya kemudahan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia seperti papan, pangan dan sandang serta mendorong kemudahan manusia dalam melakukan kegiatan usahanya seperti penyediaan jaringan jalan, air bersih dan lain-lain.

n). Menunjang Kawasan Kritis, Perbatasan dan Terisolir.

Daerah kritis di Indonesia masih cukup luas sehingga perlu dilakukan penanganan pelestariannya agar daerah tersebut serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya dapat segera diatasi. Sedangkan daerah perbatasan dan terisolir juga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan integritas pembangunan serta stabilitas Nasional dan Keamanan Pertahanan.

Pembangunan bidang pekerjaan umum dilakukan melalui pencegahan/konservasi, terhadap kerusakan alam dan lingkungan hidup untuk daerah kritis demi pelestariannya serta penyediaan prasarana bidang pekerjaan umum di daerah perbatasan dan daerah terisolir.
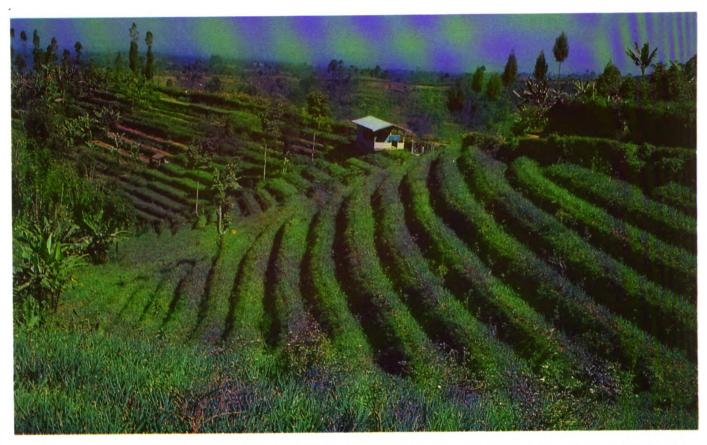
Terasering merupakan salah satu upaya konservasi lahan kritis di DAS Brantas

Keadaan perumahan yang belum ditangani menurut kaidah tata ruang yang benar

4). Kebijaksanaan Penataan Ruang

Tata ruang akan dikembangkan dan ditingkatkan peranannya baik dalam arti konsepsinya maupun ujudnya sebagai alat koordinasi dan integrasi program bidang pekerjaan umum, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pencapaian keserasian dan optimasi pemanfaatan ruang mengikuti Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang.

Keterkaitan fungsional program dan tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan kawasan ditujukan guna mengoptimasikan penggunaan sumberdaya dan lingkungan.

Atas dasar usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional, dan landasan kebijaksanaan GBHN dan Repelita V yang telah ditetapkan, maka beberapa arahan kebijaksanaan tata ruang dalam alokasi program bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

a). Sasaran pokok pembangunan bidang pekerjaan umum adalah penunjangan sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, oleh karena alokasi program akan diarahkan pada wilayah atau kawasan yang mempunyai potensi pengembangan pertanian, perdagangan dan perhubungan. Prioritas diberikan pada wilayah atau kawasan pusat-pusat produksi dan distribusi di daerah luar Jawa yang investasi prasarana bidang pekerjaan umumnya masih terbatas. Upaya ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah atau kawasan yang kurang berkembang khususnya Indonesia Bagian Timur.

b). Sasaran penting lainnya dalam pembangunan bidang pekerjaan umum adalah pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan upaya pemeliharaan sumberdaya serta pelestarian lingkungan hidup.

Pada prinsipnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar semua wilayah atau kawasan yang tingkat pelayanan prasarana di bawah standar kebutuhan yang menimbulkan kerawanan sosial, politik dan lingkungan mendapat prioritas utama untuk mendapat alokasi program. Wilayah atau kawasan pemukiman yang mendapat prioritas tinggi adalah wilayah atau kawasan yang proporsi penduduk berpenghasilan rendah sangat besar, termasuk wilayah yang tingkat perkembangan kesejahteraannya di bawah rata-rata nasional.
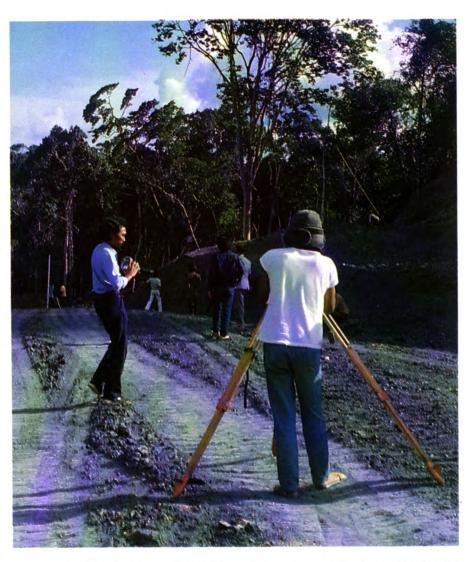
Pembangunan jalan didaerah-daerah produksi terus ditingkatkan

Pada prinsipnya upaya peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dapat diciptakan melalui dukungan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dengan bantuan teknis dari program bidang pekerjaan umum di seluruh kawasan pemukiman.

Perhatian dalam pemeliharaan sumberdaya dan lingkungan hidup diprioritaskan pada wilayah atau kawasan yang mengalami kerawanan lingkungan akibat tekanan penduduk, pemanfaatan yang tinggi serta mengalami kerusakan dan pencemaran yang berat.

Dengan demikian pembangunan bidang pekerjaan umum benar-benar dapat lebih terkoordinir, integratif, fungsional, optima terkait, berhasilguna dan berdayaguna dalam perannya sebagai penunjang dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

- Road and building construction
- Industrial plant and power station
- Bridges
- Foundations and ground engineering techniques
- Offshore construction
- Underground Structures
- Water supply and irrigation system
- Dam construction

Picture :

Road construction for Padalarang Cileunyi Toll Highway **Project, Section B in Bandung**

Address :

16 th Wisma Kosgoro
Jl. M.H. Thamrin 53
Jakarta 10350
Telephone : 021-320277, 321942, 321808 ext. 340-342
Fax : 021-322832

Adress :

Jl. Cipagalo Raya
P.O. Box 657
Bandung 40001
Telephone : 022-460455
: 022-460639
Fax : 022-460326

Sejak lama konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan menjadi dambaan Pemerintah. Tantangan ini dijawab oleh masyarakat Sumatera Barat secara kongkrit dalam bentuk *manunggal sakato* .

MANUNGGAL SAKATO DI SUMATERA BARAT
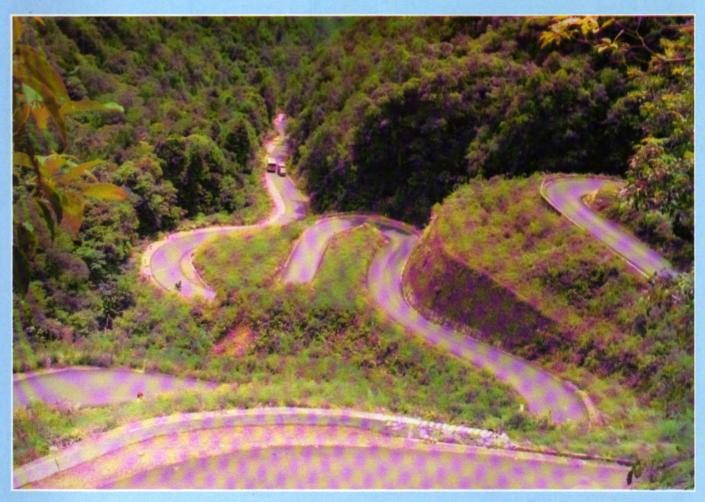
Jalan kelok 44 di Sumatera Barat

Besarnya partisipasi masyarakat bagi pembangunan Sumatera Barat antara lain ditandai dengan pembebasan 3.000 ha tanah tanpa ganti rugi senilai Rp 3,5 milyar. Ini berlangsung sejak Pelita IV sampai awal Pelita V. Pengorbanan masyarakat secara sukarela tersebut di antaranya tertuang bagi peningkatan jalan-jalan Propinsi dan Nasional, jalan-jalan Arteri Kota, serta areal pariwisata ISTANO BASA PAGARUYUNG dekat Batusangkar. Penanganan prasarana jalan tersebut menjadi penting artinya dalam kegiatan Manunggal Sakato (gotong royong khas Sumber) dan mendapat prioritas, karena erat kaitannya dengan upaya menguak

Salah satu ruas jalan di Sumatera Barat

isolasi pedesaan, dan ini sekaligus dalam rangka peningkatan produksi non migas.

Kebijaksanaan "ruang awak" dalam hal ini, kata Kakanwil Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat **Sabri Zakaria,** terutama didorong kenyataan besarnya dominasi sektor perhubungan terhadap pengembangan wilayah. Kebijaksanaan tersebut telah berhasil mengubah wajah pelosok-pelosok terpencil menjadi desa-desa potensial yang "ditempuh roda". Dalam hubungan itu, sejak beberapa tahun ini tidak kurang dari 2.310 Km jalan desa yang berhasil dibenahi serta dibangun baru di Sumatera Barat. Sebagian di antaranya merupakan produk gabungan dengan kegiatan Manunggal/ AMD setempat dan telah meningkatkan total panjang jalan Kabupaten dari 6.058 Km menjadi 6.349 Km. Selanjutnya kegiatan Manunggal Sakato dalam hal ini juga berhasil menjangkau sejumlah areal P3A di 26 desa serta areal P3D di 317 desa.

Manunggal Sakato (yang secara harfiah berarti kebulatan dan kebersamaan atas mufakat), adalah satu bentuk kegiatan ke-PU-an dengan pola gotong royong khas Sumbar, dengan mana kesinambungan pembangunan dimotivasi sebagai tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu kehidupan penduduk, yang mayoritas masih golongan ekonomi lemah.

Dalam bidang air bersih kegiatan Manunggal Sakato ini dapat menstimulasi kerjasama terpadu hingga hasilnya berlipat ganda. Misalnya, bagi pembangunan sarana air bersih di desa Padang Magek, Kabupaten Padang Pariaman berkapasitas 5L/ detik, Pemerintah hanya menyediakan perpipaan seharga Rp. 30 juta, namun nilai akhir produksinya hampir Rp. 200 juta.

Kondisi alam dan pembangunan

Sumatera Barat dengan daratan berikut kepulauannya seluas 42.000 Km persegi lebih, saat ini berpenduduk 3.943.363 jiwa, sekitar 78% di antaranya warga pedesan. Mereka ini memukimi 412 Nagari (desa adat) dengan kepadatan rata-rata 87 jiwa per Km persegi, di dalam mana sudah termasuk mantan transmigran dari berbagai suku di Indonesia.

Karakteristik wilayahnya ditandai

"relief kasar" dalam bentuk perbukitan, pegunungan, dan lembah-lembah dengan curah hujan yang relatif tinggi, di mana "daerah Gempa nomor 2" yang membujur dari Utara ke Selatan ikut mewarnai labielnya morfologi setempat. Dengan kemiringan rata-rata di atas 30% maka hanya sekitar 25% wilayahnya yang dapat digunakan untuk tujuan pertanian. Akibat sentra-sentra produksi relatif kecil-kecil, dengan areal terpencar. Dilemma keterbatasan tanah garapan ini antara lain menyebabkan 65% dari setengah juta petani miskin di daerah ini rata-rata hanya punya lahan di bawah 0,5 hektar. Hal ini terutama terjadi sekitar tahun 1969, yakni ketika total produksi padinya masih di bawah 9.000 ton/tahun ketika masih minus). Namun di balik itu, tanahnya subur, alamnya indah, penduduknya ramah, dan wilayahnya banyak menyimpan sejarah, hingga lewat dukungan berbagai infrastruktur khususnya "irigasi dan jaringan jalan", perekonomian Sumbar tetap bisa menanjak. Income per kapitanya telah naik dari Rp. 345. 787. – tahun 1983 menjadi Rp. 565.553, – pada tahun 1987, yang berarti mengalami kenaikan rata-rata 13,09% per tahun.

Lewat dukungan 3.900 Daerah Irigasi serta berbagai intensifikasi bidang pertanian lainnya, produksi padi Sumber yang tahun lampau telah mencapai 1.604.800 ton, pada akhir Pelita V diestimasikan naik lagi menjadi sekitar 2 juta ton, hingga daerah ini akan lebih banyak dapat membantu pengadaan stock beras nasional.

Di sisi lain, karena dalam memacu pembangunan juga diperlukan "kecepatan dan kelancaran" transportasi, sepanjang 689,6 Km jalan Nasional di Sumbar saat ini 100% sudah dalam keadaan mantap, dan jalan Propinsi 1.153,1 Km (35% mantap), di mana selama Pelita IV telah hilir mudik sebanyak 3,2 juta wisatawan, dengan estimasi kunjunan mendatang juga meningkat.

Jalan Nasional yang merupakan bagian Lintas Barat Sumatera tersebut perlu segera ditingkatkan "pelayanannya" guna mengimbangi kiprah pembangunan Lintas Timur Sumatera yang dalam waktu dekat sudah akan berfungsi. Untuk itu diperlukan beberapa upaya bersifat terobosan. Antara lain telah dilakukan pelebaran jalan dengan memotong tebing batu sebesar 15.000 M^2 secara manual di kawasan cagar alam Lembah Anai. Batu raksasa itu terpaksa dipahat sedikit demi sedikit guna keamanan terowongan kereta api yang berada di bawahnya.

Di samping itu, dalam menunjang pengembangan pedesaan sebagai sumber produksi non migas, sepanjang 1.500 Km jalan-jalan Kabupaten yang ditingkatkan lewat pendanaan IPJK dan APBD Tk. II, tahun ini diarahkan terutama kedaerah pinggiran. Lima daerah pinggiran potensial yang diharapkan bebas dari terisolasi sebelum akhir Pelita V adalah: "Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota bagian timur, Swl. Sijunjung bagian Tenggara, Kepulauan Mentawai, dan Solok Selatan.

Kota Padang

Untuk lebih berfungsi sebagai pintu gerbang DTW (Daerah Tujuan Wisata) Sumbar, sekaligu sebagai pusat pengembangan wilayah propinsi, Kota Padang telah dimekarkan 22 kali lipat. Yaitu dari luas 33 Km persegi lima tahun lalu menjadi 695 Km persegi sekarang. Sementara itu bencana alam (banjir) masih saja mengancam kehidupan kota ini.

Implementasi adalah berlanjutnya keterkaitan Pemerintah Pusat (c.q. Dept. PU) terhadap pembangunan Ibukota Propinsi berpenduduk 600 ribu jiwa ini, khususnya menyangkut penanganan infrastruktur.

Untuk pengendalian banjir kota Padang diharapkan dapat segera terealisasi dengan dana Rp 127 milyar dari OECF dan APBN. Untuk peningkatan jalan Padang By Pass yakni jalan arteri khusus menuju pelabuhan, sudah dapat persetujuan pula dengan dana loan Korea Selatan dan APBN sebesar Rp 26 milyar (kini menunggu redesign dan revisi harga), sedangkan untuk rehab/pemeliharan beberapa ruas jalan penting dalam kota dengan total dana IPJP hampir Rp 1 milyar, saat ini bahkan sebagian pelaksanaannya sudah berlangsung. dengan demikian, dalam waktu dekat, investasi Departemen Pekerjaan Umum berjumah hampir Rp 230 milyar bagi pembangunan kota terbersih 1988 ini. Dan ini belum termasuk biaya pelebaran jalan Padang – Bungus yang nampaknya juga harus dikerjakan secara manual (menggunakan pahat batu) lewat kegiatan padat karya, sebagaimana penanggulangan "botle neck" Singgalang Kering, Lembah Anai.

---

6. Prioritas-prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam Repelita V.

1) Kebijaksanaan Pembangunan Repelita V.

Repelita V mempunyai arti strategis yang penting dan menentukan dalam pembangunan nasional, karena Pelita V disamping merupakan akhir pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahun pertama, juga merupakan periode untuk memantapkan persiapan memasuki tahap tinggal landas dalam Repelita VI.

Tersedianya prasarana yang mantap dan andal dengan tingkat penyebaran yang merata dan meluas diseluruh tanah air akan memungkinkan mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi terutama dalam mendayagunakan secara optimal sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal untuk lebih merangsang pembangunan sektor-sektor strategis dalam pembangunan ekonomi seperti: pertanian (dalam arti kata luas), industri, pariwisata, transmigrasi dan lain sebagainya.

Keberhasilan Pelita V terutama dalam bidang ekonomi, tergantung dari keberhasilan sektor-sektor strategis yang memerlukan dukungan prasarana ekonomi yang dapat diandalkan secara mantap. Oleh karena itu kegiatan pembangunan perlu didukung oleh pengelolaan dan pemeliharaan secara mantap.

Dengan berpedoman pada pemikiran pembangunan dalam Pelita Kelima maka kebijaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum diarahkan untuk:

a) Memantapkan kerangka tinggal landas yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Di dalam memantapkan kerangka tinggal landas dalam Pelita kelima,
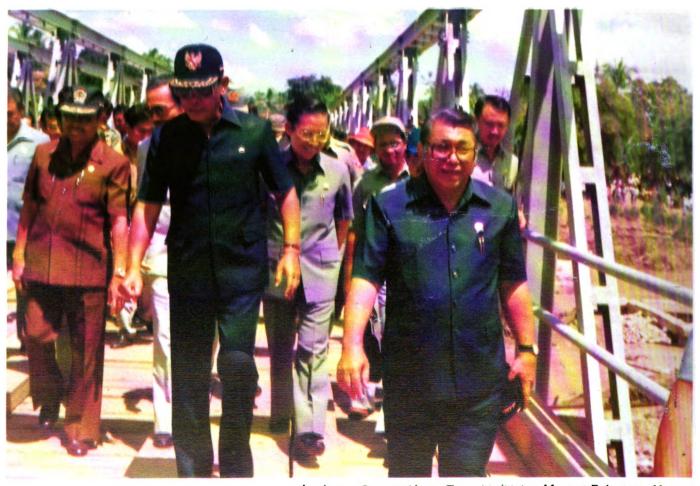
Jembatan Comal, (Jawa Tengah) ditinjau Menteri Pekerjaan Umum

akan terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup juga pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan institusi/kelembagaan baik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum maupun yang menyangkut di luar Departemen Pekerjaan Umum.

Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum meliputi:

- Peningkatan Kelembagaan;
- Peningkatan Kemampuan Staff;
- Peningkatan Pedoman dan Ketatalaksanaan.

Diluar Departemen Pekerjaan Umum meliputi:

Meningkatkan peranan Pemda/masyarakat dengan:

- Mendorong terciptanya mobilisasi penyediaan dana pembangunan oleh masyarakat.
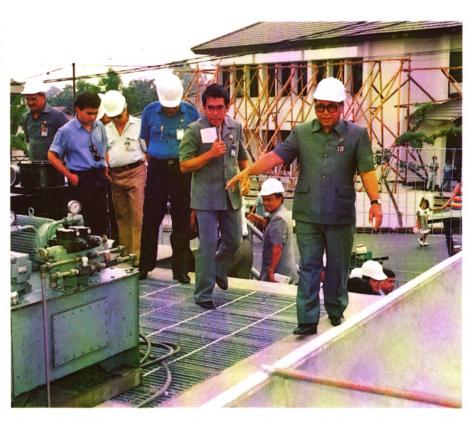
Menteri Pekerjaan Umum di Lokasi pengambilan air baku untuk air minum Buaran – Jakarta

Senyum Menteri Pekerjaan Umum Radinal Moochtar bagi generasi penerus pembangunan di Jambi.

- Meningkatkan kemampuan Pemda dalam penanganan desentralisasi urusan bidang ke-PU-an.

Meningkatkan peranan mitra pembangunan dengan:

- Memantapkan iklim usaha yang semakin sehat.
- Meningkatkan kemampuan dunia usaha jasa kontruksi Nasional.

b) Memanfaatkan hasil pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum.

Mendorong peningkatan penanganan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang telah berfungsi melalui:

Di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum meliputi :

Peranan Irigasi atas swasembada pangan di Timor Timur

- Penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan yang memadai;
- Mengembangkan secara meluas dan intensip serta mendetail, metode operasi dan pemeliharaan.

Di luar Departemen Pekerjaan Umum ditempuh dengan cara:

- Mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan.
- Membantu kemampuan teknis Pemda dalam menangani operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang ke-PU-AN.

c) Memenuhi tuntutan kebutuhan prasarana untuk menunjang sektor-sektor prioritas.

Dalam kaitan dengan usaha pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum akan diusahakan perluasan lahan pertanian sawah dan perluasan jaringan jalan keseluruh pelosok tanah air, serta akan ditingkatkan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, akandilakukan pemenuhan peningkatan kebutuhan sektor prioritas dalam arti memberikan dukungan yang maksimal antara lain penyediaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sektor-sektor pembangunan prioritas yang perlu ditunjang dengan prasarana dan sarana pekerjaan umum antara lain :

1) Pembangunan Pertanian;
2) Pengembangan industri yang mendorong peningkatan ekspor non migas;
3) Penyediaan energi;
4) Pembangunan perhubungan;
5) Program transmigrasi;
6) Perbaikan kesehatan masyarakat;
7) Perbaikan pemukiman dan lingkungan;
8) Perluasan kesempatan kerja;
9) Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.

2) Penanganan Masalah Prioritas.

Strategi Departemen PU dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an seperti jalan, irigasi, dan sarana pemukiman dan lingkungan dijiwai oleh usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Efisiensi dimaksudkan agar biaya pembangunan dapat dibuat seminim mungkin dengan hasil yang baik, sementara efektivitas dimaksudkan agar prasarana yang dibangun dapat saling menunjang sesamanya maupun dengan prasarana lain seperti komunikasi, transmigrasi dan industri.

Dengan demikian keseluruhan prasarana dan sarana ke-PU-an bersama dengan prasarana lainnya dapat secara harmonis menunjang pembangunan sektor dan daerah/wilayah untuk mewujudkan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang berwawasan Nusantara sesuai dengan makna yang tertuang didalam GBHN.

a) Rayonisasi Pusat-Pusat Pengembangan Daerah.

Rayonisasi disini kita artikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya dengan tetap menjaga agar tercipta keseimbangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan wilayah/kawasan-kawasan yang lain berbeda didalam suatu wilayah/kawasan pengembangan. Dalam pelaksanaan pendekatan tersebut terlebih dahulu dilakukan perencanaan pembangunan wilayah. Penganalisaannya dilakukan dengan melalui kegiatan dengan studi wilayah untuk mengetahui potensi wilayah serta kemungkinan pengembangannya, serta keterkaitannya dengan wilayah lainnya. Dalam hal ini konsep **"Comperative advantage"** digunakan sebagai dasar menyatukan proses pertumbuhan/perkembangan wilayah nasional agar berada pada suatu kesatuan proses ekonomi. Lebih lanjut dengan memperhatikan potensi wilayah serta ketersediaan prasarana di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang lainnya serta strategi sektor lain (seperti kawasan/industri, hutan lindung, pengembangan pertanian), serta dirumuskan juga perwilayahan yang mencakup pusat-pusat pengembangan serta wilayah layanannya. Pengenalan pusat-pusat pertumbuhan ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan program pembangunan Prasarana ke-PU-an.

Dalam pendekatan ini diperhatikan pula kondisi sepesifik wilayah seperti misalnya wilayah-wilayah IBT.

Perhatian khusus pada daerah ini diberikan pada pembangunan prasarana-prasarana yang meningkatkan **"Aksesibilitas"** pusat-pusat kegiatan produksi untuk meningkatkan daya tariknya.

b) Arah pengembangan jalur komunikasi darat dalam menjamin perwujudan Wawasan Nusantara.

Di dalam melakukan pembangunan prasarana jalan prioritas dan penyebarannya juga didasarkan pada pendekatan pembangunan wilayah tersebut diatas. Sebagaimana halnya jalan raya, dibangun untuk menghubungkan antara pusat-pusat pertumbuhan dan antara pusat pertumbuhan dengan daerah layanannya. Hal ini dimaksudkan agar pusat-pusat produksi pengolahan dan pertanian dapat saling terkait baik antara wilayah maupun di dalam wilayah.

Dengan demikian seluruh wilayah dapat disatukan dalam satu proses ekonomi, yang kemudian akan dapat pula mendorong interkasi sosial dan budaya karena terjadinya kemudahan pergerakan orang dan barang. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini lintas Sumatera terus mengalami peningkatan. Untuk Kalimantan dan Sulawesi secara bertahap telah dimulai. Khususnya untuk IBT diberikan perhatian khusus dengan upaya-upaya percepatan dan perluasan pengmbangan prasarana dan sarana, agar dapat segera disejajarkan dengan Bagian Indonesia lainnya.

c) **Upaya Keterpaduan Sektor Pekerjaan Umum - Perhubungan - Perdagangan dan Transmigrasi.**

Sektor pekerjaan umum sangat erat kaitannya dengan usaha peningkatan kegiatan produksi di bidang industri dan pertanian serta usaha peningkatan ekspor produksi nasional. Dalam kaitan ini pembangunan prasarana ke-PU-an sejalan dengan pendekatan keterkaitan wilayah juga tetap memperhatikan program Nasional yang mendesak seperti peningkatan ekspor dan pemanfaatan sumber daya melalui program transmigrasi. Untuk keperluan ini sistim perhubungan jalan raya dikaitkan dengan sistim perhubngan laut dan udara serta program transmigrasi agar secara fisik wilayah Indonesia menyatu. Selain dengan prinsip keterkaitan pemanfaatan prasarana fisik ini juga dikaitkan dengan usaha perdagangan untuk menunjang ekspor dari wilayah produksi khususnya dalam rangka menghubungkan pelabuhan-pelabuhan ekspor dengan kantong-kantong produksi industri dan/atau pertanian baik yang dikelola pihak BUMN, Swasta maupun dengan usaha transmigrasi didalam ketatalaksanaannya, sehingga manfaatnya diharapkan dapat menjamin keberhasilan Pembangunan Nasional berwawasan Nusantara.

Kapal ferry pengangkut orang dan barang

7. Upaya mendukung pembangunan jangka panjang Tahap II.

1) Kondisi yang ingin dicapai dalam Pelita VI.

Di dalam GBHN 1988 telah digariskan bahwa Repelita V merupakan kelanjutan dari Pelita-Pelita sebelumnya dan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan serta merupakan tahap pemantapan kerangka tinggal landas. Selanjutnya diharapkan pada Repelita VI pembangunan akan memasuki tahap tinggal landas.

Kondisi yang ingin dicapai oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam periode tinggal landas ialah menunjang sektor-sektor strategis secara memadai agar sektor-sektor strategis tersebut tumbuh dan berkembang secara seimbang dalam mencapai suatu kondisi yang siap tinggal landas pada akhir Pelita VI.

Di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum gambaran sementara tentang kondisi yang diinginkan adalah:

a. Di Sub Bidang Pengairan antara lain:
   - Mampu menyediakan air baku secara cukup bagi keperluan pemukiman, perindustrian dan pertanian.
   - Mengusahakan sekecil mungkin kawasan/daerah potensial yang menderita banjir dan kekeringan.

b. Di Sub Bidang Bina Marga antara lain:
   - Jalan Negara dan Jalan Propinsi dalam kondisi mantap mendekati 100%.
   - Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 40%.

c. Di Sub Bagian Cipta Karya antara lain :
   - Penekanan pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip desentralisasi dan pemulihan biaya serta peningkatan partisipasi swasta masyarakat.
   - Peningkatan pembangunan prasarana kota terpadu.
   - Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman diperkotaan dan dipedesaan.

d. Di Sub Bidang Pengaturan dan Pembinaan antara lain:
   - Kelembagaan yang mantap,
   - Kemampuan staf yang memadai.
   - Ketersediaan berbagai pedoman dan ketatalaksanaan dalam pengelolaan pembangunan.

e. Di Sub Bidang Penelitan dan Pengembangan antara lain:
   - Meningkatkan rekayasa di bidang teknik pekerjaan umum yang mencakup aspek penelitian dan pengembangan terus dikembangkan dan
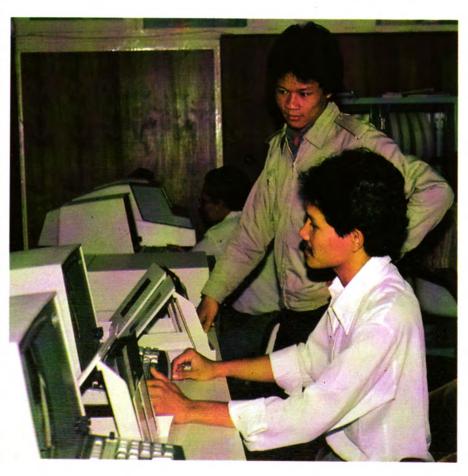
Kegiatan-kegiatan non teknis pada pelaksanaan physik di lapangan

ditingkatkan seperti antara lain di sub bidang Pengairan *(estuary & coastal engineering, swamp area development)*, di sub bidang Bina Marga *(soft soil engineering, pavement engineering and management system*, kecelakaan lalulintas dan keselamatan jalan, serta teknologi perkuatan/pemeliharaan jembatan lama) di sub bidang pemukiman *(high rise building engineering, rural & small town water supply, material engineering)* dan sebagainya.

- Pemantapan program SK SNI/SNI
- Pemantapan penanganan AMDAL
- Pemantapan penanganan akreditasi laboratorium
- Pemantapan Buku Katalog PU

f. Di Sub Pengawasan antara lain:

- Terciptanya kondisi pengawasan yang lebih mendorong terwujudnya kelancaran pembangunan aparatur negara yang bersih dan berwibawa.
- Aparatur pengawasan yang dapat diandalkan.
- Unsur pengawasan yang berfungsi sebagaimana siklus manajemen.
- Kondisi pengawasan korektif-represif.

2) Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup.

1. Sebagaimana diketahui, bahwa pola pembangunan yang ditempuh oleh negara-negara maju cenderung lebih mengutamakan pertumbuh-material, dengan mengesampingkan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup timbul akibat interaksi manusia dalam ekosistem, sebagai wujud dorongan

PENGEMBANGAN WILAYAH SERAM
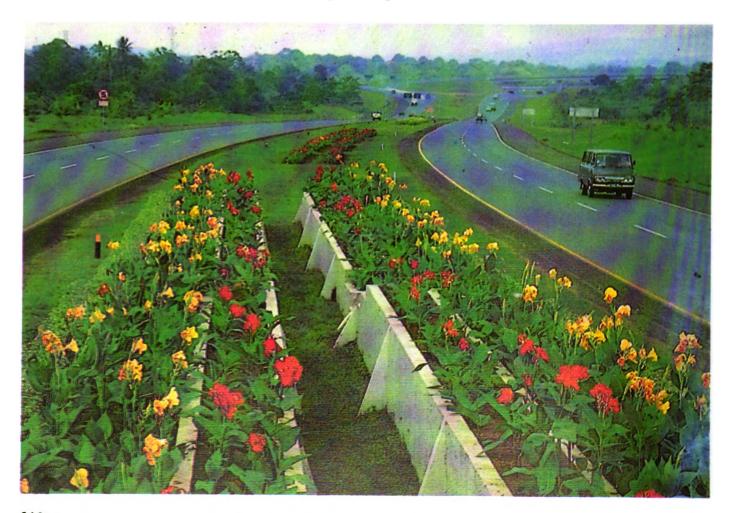
Jalan Lintas Seram

Pulau Seram, merupakan pulau terbesar di propinsi Maluku. Untuk mengembangkan pulau Seram (18.625 km2) yang cukup potensial tersebut, kendala utamanya adalah tiadanya prasarana perhubungan darat yang cukup memadai di pulau itu. Sebagai gambaran, di awal tahun 80-an penduduk di pesisir utara Seram apabila hendak ke Ambon atau Masohi (ibu kota Kabupaten Maluku Tengah di pulau Seram bagian selatan) harus melalui laut mengelilingi pulau, baik ke arah timur maupun barat yang memerlukan waktu sekitar 40 jam !. Ini pun sangat tergantung kepada musim dan cuaca karena alat transportasi laut yang ada berupa perahu-perahu kayu.

Oleh karenanya, untuk mengatasi isolasi ini, tahun 1977 dilakukan survey untuk pembangunan jalan lintas Seram. Baru tiga tahun kemudian, tahun 1980, pelaksanaan konstruksi pembangunan Lintas Seram dimulai untuk tahap I. sepanjang 40 Km, antara Masohi - Saleman, dengan nilai kontrak Rp. 640 juta. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi menggunakan pola perencanaan teknis bertahap *(stage design)* yakni perencanaan dan pelaksanaan phisik dilaksanakan bersamaan. Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dilaksanakan dengan anggaran tahunan dan dalam jumlah terbatas sehingga pada 1989/1990, untuk ruas Amahai - Saleman dari target 92 Km, hanya dapat dicapai 80 persennya.

merupakan kebutuhan mendesak tersebut, maka sejak tahun 1990/1991 ini pola pembangunannya dilakukan secara terpadu dengan pendanaan multi years. Untuk itu, penanganannya dibagi atas tiga seksi, yang menghubungkan Kairatu - Masohi - Saleman - Wahai, dengan panjang total 311 Km. Ke tiga seksi tersebut ialah Seksi I, ruas Kairatu - Simpang Wai Pia, Seksi II, Amahai - Saleman dan Seksi III, Saleman - Wahai. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sejak Lintas Seram ditangani

tahun 1980, dana yang telah diserap bersumber dari APBN, sebesar Rp. 11,20 milyar. Produk dari pembangunan selama 10 tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut :

Seksi I :

Kairatu - Simpang Wai Pia, panjang 119 Km, lebar perkerasan 4,5 m bahu jalan 2 x 2 m. Konstruksinya, Kairatu - Wai Selan - Liang sepanjang 83 Km, beraspal 36 Km, selebihnya dengan konstruksi kerikil. Ruas Liang - Simpang Wai Pia, 36 Km, dengan konstruksi kerikil.

Dalam tahun 1990/1991 ini, penanganannya dengan dana APBN sebesar Rp. 6,53 milyar, dipergunakan untuk pekerjaan pemeliharaan sepanjang 59 Km, dan untuk pekerjaan peningkatan dengan konstruksi lapis penetrasi, sepanjang 60 Km.

Seksi II,

Amahai - Saleman. Panjang jalan 93 Km, lebar perkerasan 4,5 Km bahu jalan 2 x 2 m. Kondisinya, saat ini 13 Km berupa jalan aspal, 39 Km jalan kerikil dan 41 Km masih berupa jalan tanah. Dalam tahun 1990/1991, disediakan dana sebesar Rp. 16, 26 milyar. Dana tersebut untuk menangani pekerjaan peningkatan dengan konstruksi lapis penetrasi sepanjang 47 Km, dan 46 Km dengan konstruksi jalan kerikil.

Seksi III,

Saleman - Wahi. Panjang 100 Km, lebar perkerasan 4,5 m dan bahu jalan 2 x 2 m. Kondisi jalan di ruas ini saat ini ialah 11 Km sudah beraspal, 13,5 Km berupa jalan kerikil, dan 72 Km masih berupa hutan. Untuk tahun 1990/1991, dialokasikan dana sebesar Rp. 8,77 milyar. Dengan dana ini, ditangani pekerjaan pembangunan jalan kerikil sepanjang 72 Km, lapis penetrasi sepanjang 14 Km dan pelebaran jalan sepanjang 14 Km.

Sejalan dengan program percepatan pembangunan di Indonesia Bagian Timur, panangananan jalan Lintas Seram sepanjang 311 Km itu diharapkan akan selesai pada akhir Pelita V nanti.

Irigasi Kairatu

Selain kegiatan pembangunan lintas Seram sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam rangka pengembangan Wilayah Pulau Seram sejak tahun 1977/1978 di pulau ini ditangani pula jaringan Irigasi Kairatu untuk areal seluas 850 ha.

Penanganan irigasi ini sekaligus untuk menunjang program transmigrasi yang dilokasi tesebut telah ditempatkan 625 KK transmigran.

Sampai dengan tahun 1983/ 1984 pembangunan jaringan irigasi ini menghabiskan biaya dari APBN sebesar Rp 2.200.000.000, – untuk menangani pembangunan bendung dan jaringan irigasi beserta bangunan airnya.

Untuk meningkatkan kemampuan dan pelestarian jaringan dengan dana pinjaman ADB sebesar Rp 1,2 milyar. Daerah Irigasi Kairatu tersebut mulai tahun 1988/1989 dilakukan pekerjaan rehabilitasi, sehingga dapat dicapai peningkatan produksi disamping kesejahteraan masyarakat.

Bendungan Kairatu dipulau Seram

PEMBANGUNAN DI PROPINSI TIMOR TIMUR

Tujuh Proyek bernilai Rp. 5 milyar lebih di Timor Timur diresmikan Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Prof. Dr Benny Moeliana, tanggal 22 September 1990. Peresmian dipusatkan di Loes. Kecamatan Maubara, Kabupaten Liquica, Timtim. Ketujuh proyek tersebut terdiri atas jembatan Loes dengan panjang 345 meter lebar 7 meter bernilai Rp. 2,1 miliar, proyek irigasi Maliana I dengan kapasitas 2 m3 per detik dan mampu mengairi 1.000 ha bernilai Rp. 930 juta lebih, pembangunan kantor Dinas PU Tingkat I TIMTIM bernilai Rp. 346,5 juta, Kantor Dinas PERKEBUNAN TIMTIM bernilai Rp. 178,1 juta. Kantor Dinas Pertanian bernilai Rp. 135,2 juta, Kantor Walikota Dili bernilai Rp. 193,9 juta dan sebuah terminal air di kota Dili senilai Rp. 121 juta.
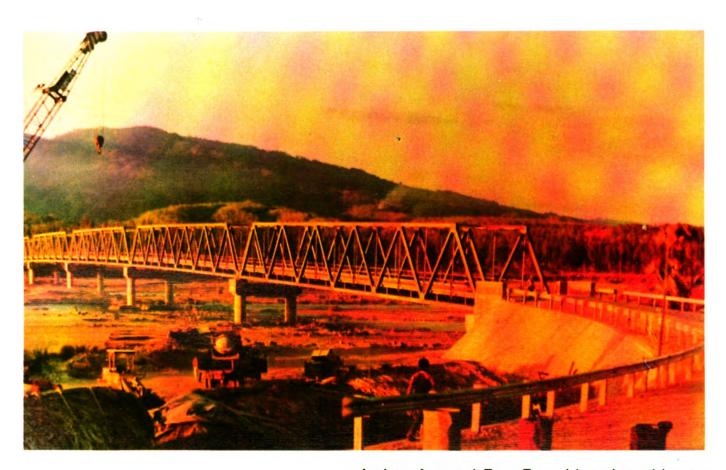
Jembatan Loes, di Timor Timur dalam tahap pelaksanaan

kebutuhan hidup, baik dalam penggunaan teknologi tradisional maupun teknologi tinggi, yang keseluruhannya berakibat pada kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup.

2. Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan, kiranya perlu terus ditingkatkan upaya yang konsepsional dan berkesinambungan yang dapat menjamin pemikiran dan tindakan kearah antara lain:
   - Rumusan kebijaksanaan pembangunan yang memungkinkan terwujudnya harmoni yang produktif dan menyenangkan antara manusia dengan lingkungannya.
   - Mengarahkan usaha pencegahan serta pengabdian kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan manusia.
   - Meningkatkan saling pengertian mengenai pentingnya keserasian ekologi dan sumber daya alam bagi bangsa-bangsa.
   - Menggiatkan kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan.

c. Alasan perlunya upaya tersebut diatas adalah apabila kita amati maka dalam proses pembangunan, telah terjadi perkembangan yang bertentangan antara air dan udara, pengrusakan dan kerusakan sumber alam dan lingkungan. Kondisi tersebut secara nyata telah terjadi di Negara Asean terutama di daerah-daerah perkotaan, daerah yang berkembang menjadi kota industri perdagangan dan kota-kota pelabuhan.

d. Memang diakui bahwa pembangunan Nasional di negara berkembang (termasuk Indonesia) diprioritaskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Usaha itu diarahkan untuk dapat mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan untuk meningkatkan produktivitas didalam masyarakat.
   Namun perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja tidak memberikan jaminan untuk suatu proses yang stabil dan berkelanjutan apabila tidak dibarengi upaya pelestarian sumber daya alam dan penanganan dampak pembangunan ekonomi pada lingkungannya. Untuk itu maka membangun tanpa merusak lingkungan akan menjadi pendekatan operasional pelaksanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.

3) Penataan Ruang sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan.

a. Pola Tata Ruang sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan upaya kebersamaan, berfungsi menjaga dan melestarikan sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah.
   Penataan Ruang juga harus melihat perkembangan kegiatan ekonomi, oleh karena itu Penataan Ruang merupakan unsur yang strategis sebagai salah satu landasan bagi upaya menyatukan kebersamaan pembangunan bidang pekerjaan umum dalam menunjang dan mendukung keberhasilan sektor-sektor lain.
   Pola Tata Ruang daerah satu dengan lainnya tidak harus sama, oleh karena itu Tata Ruang harus bersifat luwes, tidak kaku serta dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi.

b. Penataan Tata Ruang, harus siap menampung tuntutan pengembangan daerah, serta mampu menterjemahkan lebih lanjut makna yang tertuang dalam GBHN, khususnya terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah yang bertumpu kepada potensi, prioritas serta aspirasi daerah.
   Selanjutnya dengan hal tersebut yang perlu diperhatikan di dalam setiap penyusunan Pola Tata Ruang adalah penekanan upaya pengembangan daerah antara lain dalam rangka:
   (a) Mewujudkan pertumbuhan dan pengembangan daerah sesuai dengan prioritasnya.
   (b) Pengembangan daerah yang terkebelakang dan daerah minus.
   (c) Pemanfaatan secara rasional terhadap sumber alam setempat dengan memperhatikan kemampuan dan daya dukung alam, kelestarian dan upaya konservasinya.

(d) Terciptanya kerjasama yang makin mantap antar daerah dalam hal keseimbangan pertumbuhan dan perkembangannya.

(e) Makin terkoordinasinya pembangunan perkotaan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pendekatan pembangunan sarana dan prasarana fisik bidang ke-PU-an berdasar-Pola Tata Ruang, merupakan upaya yang perlu ditempuh secara berencana dan bertahap dalam rangka proses keterpaduan didalam perencanaan dan sinkronisasi dalam pembiayaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya.

Bendungan Palasari – Bali
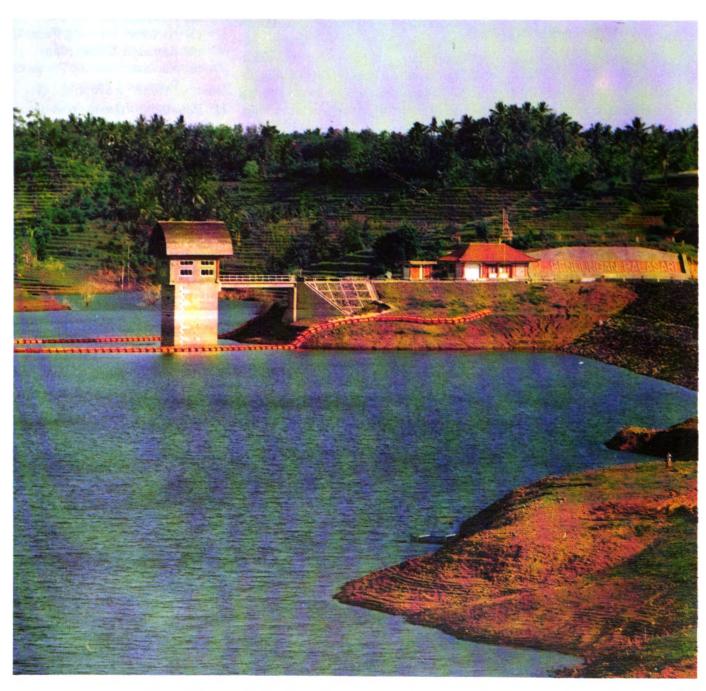
8. Strategi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dalam Repelita V

Strategi penanganan pembangunan bidang pekerjaan umum yang ditempuh dalam Repelita V didasarkan atas kebijaksanaan Departemen Pekerjaan Umum yang telah diuraikan di atas, serta memperhatikan kendala-kendala yang diperkirakan masih akan dihadapi, antara lain:

a) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
b) Keterbatasan sumberdaya alam.
c) Keterbatasan pembiayaan.
d) Keterbatasan pengetrapan teknologi
e) Mutu pelaksanaan pembangunan yang kurang memadai.

Strategi yang akan ditempuh oleh Departemen Pekerjaan Umum, adalah:

1) Strategi Penataan Ruang

Strategi untuk memberikan keterkaitan spatial yang optimal bagi pembangunan di bidang pekerjaan umum akan dilakukan melalui penataan ruang nasional, penataan ruang wilayah dan penataan ruang di kawasan dan pusat-pusat pemukiman yang ditetapkan berdasarkan suatu strategi nasional pengembangan tata ruang. Untuk menyusun strategi pola tata ruang tersebut, dilakukan proses penyiapan yang secara terus menerus dimantapkan melalui upaya sebagai berikut:

a) Penetapan Kawasan Hutan Lindung yang sedang disiapkan pengaturannya dengan suatu Keppres, yang menetapkan pelbagai jenis kawasan lindung, sebagai berikut:

(1) Kawasan Lindung Hutan.
(2) Kawasan Suaka Alam.
(3) Kawasan Lindung Pantai.
(4) Kawasan Cagar Alam.
(5) Kawasan Lindung Pantai dan Perairan Lainnya.

b) Penetapan sistem pemukiman perkotaan serta proyeksi pusat-pusat pemukiman, sebagaimana telah diletakkan dasarnya dalam
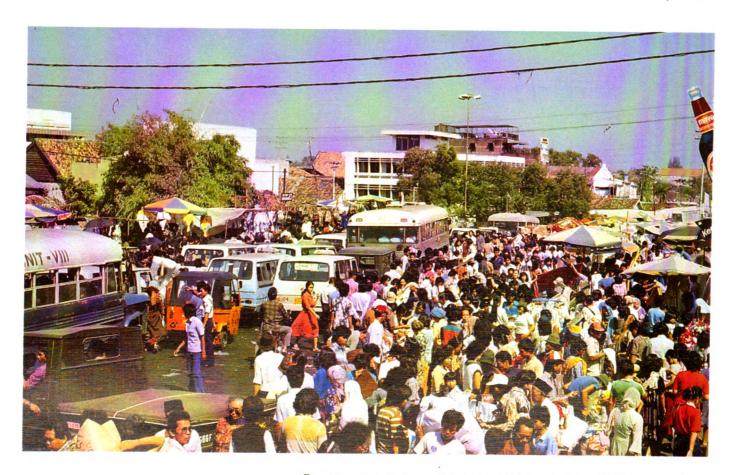
Pesatnya populasi penduduk merupakan tantangan dalam penyediaan sarana dan prasarana ke PU-an.

Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan yang meliputi:

(1) Tujuan pembangunan perkotaan.

(2) Pola spasial pengembangan sistem perkotaan dalam meningkatkan integrasi regional dan distribusi penduduk.

(3) Penentuan fungsi dan hirarki kota untuk menetapkan tingkat campur-tangan kebijakan pembangunan dan investasi.

(4) Identifikasi daerah-daerah perkotaan prioritas.

c) Penetapan kawasan-kawasan strategis yang menjadi sasaran penunjang kegiatan untuk mendukung tercapainya hasil dalam pembangunan sektor-sektor strategis, yaitu kawasan yang memenuhi kriteria:

(1) Prioritas bagi pembangunan sektor-sektor strategis.

(2) Terdapat intensitas pembangunan yang tinggi, dengan indikasi minat investasi yang cukup besar.

(3) Terdapat penguasaan dan pengembangan lahan dalam skala besar.

(4) Mendapatkan perhatian secara nasional atau regional.

(5) Kawasan yang secara khusus mendapat perhatian karena kerawanan politis, pertimbangan hankamnas dan lain sebagainya.

d). Penetapan Strategi Spasial yang dikembangkan oleh masing-masing prasarana di bidang pekerjaan umum, seperti untuk pembangunan jalan, pengembangan sumberdaya air, program pembangunan prasarana kota terpadu, dan lain-lainnya, tetap berlaku dan kini dipadukan dengan unsur-unsur penetapan strategi lainnya seperti telah disebutkan di atas.

Dampak dari penambahan penduduk yang tak terkendali ialah tumbuhnya daerah pemukiman kumuh.

e) Penetapan strategi-strategi spasial yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah tingkat I Propinsi dan daerah tingkat II Kotamadya/Kabupaten berdasarkan Pola Dasar dan Repelita Daerah, harus konsisten dan tidak bertentangan dengan strategi pengembangan tata ruang nasional.

2) Strategi Pembinaan dan Pengaturan.

a) Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, maka perlu ditingkatkan peranan dan fungsi administrasi pembangunan dalam bentuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pembangunan, agar lebih mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan, baik meningkatkan team work/koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan antar Departemen maupun menggerakkan dan mengarahkan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam GBHN dan sasaran Kabinet Pembangunan V.

b) Meningkatkan peranan dan fungsi administrasi pembangunan yang mencakup manajemen staf di bidang teknis dan administratif yang meliputi kegiatan: perencanaan, organisasi dan personalia, administrasi keuangan, adminis-

trasi peralatan, pembinaan hukum, jasa konstruksi, administrasi umum, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, data dan statistik, pembinaan peralatan dan kegiatan lainnva yang bersifat piranti lunak agar seimbang dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pendayagunaan sumberdaya yang terbatas.

c) Pengaturan dan Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi Nasional didasarkan atas pendekatan jasa konstruksi sebagi sistem, yang terdiri dari beberapa sub sistem, yakni: badan usaha, pasar, modal dan teknologi/tenaga kerja. Melalui pendekatan tersebut dapat dikenali berbagai faktor yang menjadi kendala (baik yang bersifat internal maupun eksternal) bagi perkembangan jasa konstruksi nasional, sehingga dapat dirumuskan secara tepat program-program pengaturan dan pembinaannya.

d) Khusus di bidang perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan program akan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dengan langkah-langkah penanganan antara lain sebagai berikut:

(1) Penciptaan proyek-proyek dengan skala kecil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang mungkin dapat dilaksanakan dengan cara padat karya.

(2) Pemanfaatan bahan-bahan lokal dan teknologi tepat guna serta penyesuaian penggunaan peralatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sifat, lokasi proyek serta potensi daerah yang dapat memperluas dan menciptakan lapangan kerja.

(3) Mendorong motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

(4) Pemanfaatan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan Departemen Pekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah dalam rangka peningkatan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja.

(5) Melaksanakan penelitian-penelitian di bidang peningkatan produktivitas yang dikaitkan dengan aspek-aspek pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja.

(6) Program pendidikan, termasuk pertukaran-pertukaran pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dengan negara-negara lain dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kerja, yang dilaksanakan melalui pemanfaatan proyek-proyek yang terkait dengan bantuan luar negeri di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

3) Strategi Pembangunan Pengairan.

Dilandasi oleh kebijaksanaan Departemen Pekerjaan Umum dalam Repelita V maka strategi pembangunan pengairan dalam Repelita V adalah sebagai berikut:

a) Melanjutkan program-program dalam Pelita IV dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan air secara nasional, menciptakan suasana aman terhadap bahaya banjir dan kekeringan serta melestarikan fungsi air dan sumber air, untuk meningkatkan kondisi lingkungan hidup, dengan azas manfaat, terpadu, seimbang, lestari dan bebas pencemaran.

b) Meningkatkan penanganan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta produktivitas jaringan/bangunan pengairan.
Meneruskan usaha-usaha rehabilitasi serta peningkatan kemampuan jaringan pengairan untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai dalam mendukung swasembada pangan.

c) Memperluas prasarana dan sarana pengairan baru di luar pulau Jawa, terutama dengan menyelesaikan proyek-proyek lanjutan (on going), agar secara bertahap dapat berfungsi penuh, untuk mempertahankan swasembada pangan/beras dan mengimbangi berkurangnya areal sawah di Pulau Jawa, termasuk di dalamnya prasarana pengairan untuk pertambakan dan perkebunan yang menunjang ekspor non migas.

d) Menggiatkan pengelolaan wilayah sungai, yaitu atas air dan sumber-sumber air, baik kuantitas maupun kualitas di Daerah Pengaliran Sungai (DPS), untuk meningkatkan pembangunan pengairan dalam:

- Penyediaan air untuk air bersih, pertanian, pertambakan, industri penggelontoran kota,
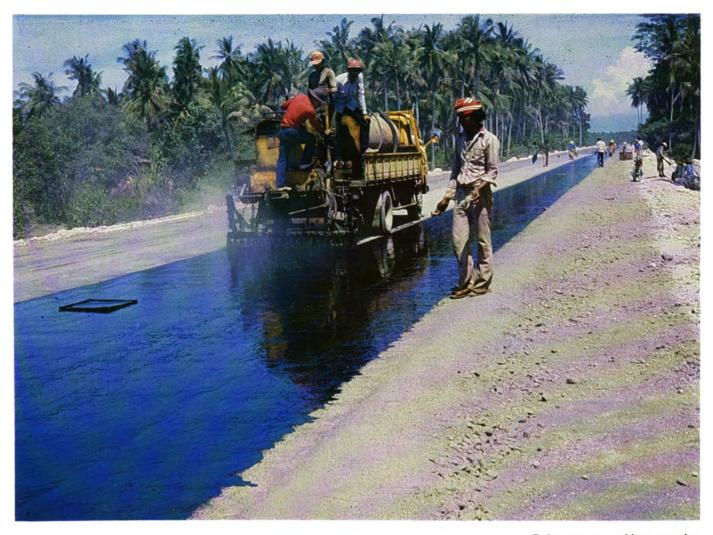
Pekerjaan pemeliharaan jalan

perhubungan (navigasi) dan kelistrikan.

- Pengendalian banjir dan erosi untuk pengamanan daerah-daerah berpotensi pertanian, perkebunan, pertambakan, pemukiman, pertambangan, industri serta jalur-jalur strategis ekonomis.

e) Meningkatkan efektifitas organisasi pengelola pengairan serta kemampuan manajerial dan ketrampilan personil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengaturan serta pembinaan.
Memperbesar kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan jaringan pengairan secara bertahap khususnya meningkatkan peranan P3A agar secara bertahap dapat mengelola daerah irigasi yang lebih kecil dari 500 hektar.
Melengkapi peraturan perundang-undangan, pedoman serta tata-laksana perizinan dan pengaturan atas air dan sumber air.

f) Melanjutkan perencanaan pembangunan pengairan dengan lebih mempertimbangkan keseimbangan air yang efisien, keterpaduan, penyerapan angkatan kerja, tataguna tanah serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang cocok untuk kondisi setempat.

4) **Strategi Pembangunan Jalan**

Berpedoman pada kebijaksanaan Departemen Pekerjaan Umum di bidang pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, maka strategi penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang akan ditempuh selama Pelita V sebagai berikut:

a) Pemeliharaan jalan dan jembatan, baik rutin, berkala maupun penunjangan, dikembangkan secara terus menerus, meluas dan intensif dengan lebih terarah dan mendetail. Pemeliharaan jalan dan jembatan ditujukan untuk menjaga kondisi jalan agar dari waktu ke waktu tetap baik dan tidak rusak, dalam rangka mem-

perpanjang kemampuan pelayanan jalan/jembatan dimaksud.

b) Kondisi jalan perlu dimantapkan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu lintas dengan penajaman kaidah-kaidah efisiensi untuk mendapatkan produk jalan mantap yang merata ke seluruh pelosok tanah air.

c) Cara pentahapan dalam pemenuhan standar teknis terbaik dan pentahapan dalam mewujudkan sasaran fungsional, dilakukan dengan menitikberatkan pada kekuatan struktural.
Perbaikan geometri jalan dibatasi untuk ruas-ruas jalan dengan lalu lintas yang sangat padat, apabila hal tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, ekonomis maupun finansial.

d) Dalam pelaksanaan pembinaan jalan, jalan diprioritaskan penggunaan produk-produk dan sumberdaya dalam negeri, dengan tidak mengurangi pemenuhan pertanggungjawaban teknis, ekonomis maupun finansial yang berlaku.

1) Penggunaan semen untuk konstruksi jalan, baik untuk pondasi (soil cement) maupun untuk perkerasan jalan (surface rigid pavement) perlu ditingkatkan, tanpa menaikkan harga jalan.

2) Penggunaan Aspal Buton untuk konstruksi jalan akan terus dikembangkan terutama untuk ruas-ruas jalan dengan kepadatan lalu lintas kurang dari 3000 kendaraan perhari, serta kompetitif dibanding aspal lainnya.
Penggunaan Aspal Buton perlu diserasikan dengan perkembagan usaha peningkatan produksi Aspal Buton yang meliputi:
- Mutu produksi
- Jumlah produksi
- Sistem distribusi, serta
- Teknologi penggunaannya untuk konstruksi jalan.

e) Pendayagunaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan jalan dilakukan dengan cara memasyarakatkan pengertian disiplin pemanfaatan jalan termasuk kepada petugas-petugas yang bersangkutan, sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan beserta peraturan pelaksanaannya.

5) Strategi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman.

a) Program Perumahan Rakyat.

(1) Perumahan Sederhana

Penyediaan perumahan harus dapat diselenggarakan dalam lingkup pemukiman terpadu yang sesuai dengan tata ruang, kependudukan dan memperhatikan lingkungan hidup.

Pembangunan Perumahan harus disertai dengan penataan dan perbaikan lingkungan sehingga terwujud lingkungan yang sehat, tertib, aman dan serasi, termasuk pengadaan prasarananya.

Perhatian perlu diberikan pada masalah pertanahan, serta penanganan pemeliharaan prasarana dan sarana yang sudah dibangun.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam perumahan seperti Perumnas, BTN, Papan Sejahtera akan ditingkatkan kemampuan manajemennya maupun untuk memobilisasi dana dana masyarakat. Secara khusus peranan Perumnas dalam pembangunan pemukiman skala besar akan lebih ditingkatkan.

Koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi yang terkait akan terus ditingkatkan baik di pusat maupun di daerah.

Kebijaksanaan pembangunan perumahan diarahkan untuk mendukung kelancaran proses produksi, disamping itu akan diterapkan standarisasi bahan bangunan agar murah dan efisien.

(2) Rumah Sewa

Penyediaan rumah sewa pembangunannya lebih banyak diserahkan kepada prakarsa dan swadaya masyarakat.

Pemerintah akan meneruskan usaha perintisan dan memberikan kemudahan serta bantuan teknis yang diperlukan.

(3) Perbaikan Kampung dan lingkungan Pasar

Perbaikan kampung diprioritaskan pada daerah atau kawasan yang berpenduduk sangat padat, pemukiman penduduk berkepadatan rendah dan kondisi lingkungan perumahannya sangat buruk, kondisi prasarananya sangat kurang dan merupakan usulan daerah dan permintaan masyarakat setempat.

Dalam perbaikan kampung masyarakat perlu dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaannya. Pada prinsipnya usaha perbaikan kampung dilaksanakan atas prakarsa dan swadaya masyarakat.

Kondisi lingkungan kumuh

Penanganan perbaikan kampung akan disesuaikan dengan kebutuhan kota dan jenis kampung menurut pola penanganan yang tepat.

Untuk terlaksananya program ini pemerintah pusat akan terus membantu memberikan dana stimulasi.

(4) Peremajaan Kota dan Pengembangan Pemukiman Kota

Bentuk peremajaan kota perlu diperluas tidak hanya mencakup peremajaan perumahan kawasan-kawasan yang kumuh untuk fungsi perumahan saja, tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota menjadi lebih teratur sehingga lebih mudah dibina dan dikembangkan.

Pembangunan perumahan sederhana terus diwujudkan seperti dikota Pontianak ini.

Peremajaan kota harus dapat menampung kembali penduduk yang semula tinggal pada pemukiman tersebut atau menyediakan kompensasi lain sebagai pengganti.

Penanganan peremajaan kota dan pengembangan pemukiman kota harus dilakukan atas kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat setempat dengan menerapkan konsep konsolidasi tanah.

Pembangunan pemukiman baru di wilayah pinggiran harus diusahakan lebih tertib, terpadu dengan memperhatikan kepentingan penduduk setempat dan dampaknya kepada lingkungan sekitarnya.

Dalam pelaksanaannya pihak pemerintah sekedar memberikan bimbingan, pengarahan teknis dan bantuan teknis bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas serta menyiapkan perangkat perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang jelas.

(5) Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa

Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) yang sudah dirintis akan dilanjutkan dan makin disempurnakan penanganannya.

Prioritas pada desa-desa yang kondisi dan lingkungannya sebagian besar tidak memenuhi syarat kesehatan, termasuk desa nelayan dan perbatasan.

Pembangunan desa-desa pusat pertumbuhan akan dilanjutkan dan lebih dikembangkan.

b). Program Penyediaan Air Bersih.

(1) Penyediaan Air Bersih Perkotaan.

Penanganan penyediaan air bersih akan diprioritaskan secara berurut yaitu pengadaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, usaha pemanfaatan kapasitas produksi yang sudah terpasang, pengurangan kebocoran, penambahan sambungan rumah dan hidran umum, peningkatan kapasitas produksi dan perluasan sistem pada kota-kota yang benar-benar memerlukan.

Pihak swasta akan dilibatkan dalam pengadaan air bersih dalam bentuk penyediaan investasi maupun pengelolaannya atas dasar kerjasama dengan pihak pemerintah.

Dalam pengelolaan air bersih akan ditingkatkan kemampuan PDAM dan BPAM termasuk mempercepat pengalihan BPAM ke Pemda.

Dalam pengadaan sumber air baku akan ditingkatkan pengendalian pencemaran sungai pada kota-kota besar yang digunakan sebagai sumber utama.

(2) Penyediaan Air Bersih Pedesaan

Penyediaan air bersih pedesaan pada dasarnya merupakan usaha swadaya masyarakat itu sendiri. Bantuan pemerintah akan berupa bentuk fisik, penyuluhan, percontohan dan latihan ketrampilan teknis serta pengelolaan sarana air bersih yang sudah ada.

Prioritas penanganan adalah untuk daerah desa yang rawan air, rawan penyakit menular, pemukiman nelayan, transmigrasi, dan desa pusat pertumbuhan.

Bagi desa-desa yang berpenduduk relatif besar (> 3000 jiwa) dapat diterapkan sistem penyediaan air bersih IKK yang telah disempurnakan dan disesuaikan.

Perumahan Desa, wujud dari program perumahan dan lingkungan desa terpadu yang telah dirintis mulai Pelita III

Instalasi air bersih, untuk daerah yang Rawan air
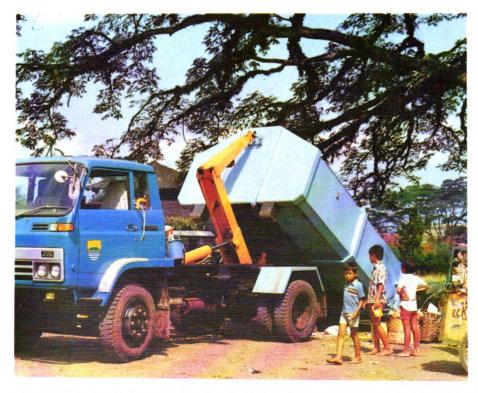
Container sampah diperuntukan bagi kota-kota besar dan sedang, yang sangat tinggi pertumbuhan dan kepadatan penduduknya.

c). Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

(1) Penanganan Persampahan

Pengelolaan persampahan ditujukan bagi usaha perbaikan pengelolaan dan perluasan pelayanan terutama bagi kota-kota besar dan sedang.

Prioritas penanganan adalah bagi daerah yang sangat tinggi pertumbuhan dan kepadatan penduduknya, penanganan sistem pengumpulan yang sederhana dan ekonomis, jumlah sampah yang dihasilkan memang cukup banyak dan tersedianya area untuk pembuangan.

Dalam penanganan persampahan akan lebih banyak diserahkan pada pemerintah kota dan sejauh mungkin melibatkan swasta dan masyarakat. Penanganan sampah memiliki potensi pemulihan biaya investasi *(cost recovery)* yang cukup baik.

Pembentukan dan pengembangan institusi pengelola dan peningkatan kapasitas dari aparat yang menangani operasi dan pemeliharaan.

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan akan lebih ditingkatkan. Dalam penanganan persampahan akan dicoba beberapa proyek percontohan untuk penanganan pembuangan akhir sampah dengan menggunakan metoda sanitary landfiil, kompos, pembakaran dan daur ulang.
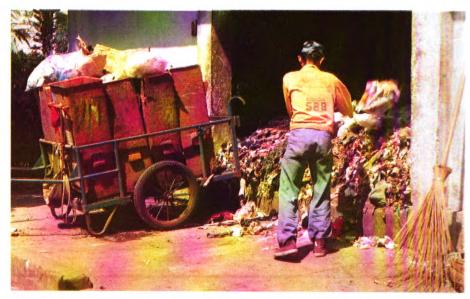
Tempat penampungan sampah sementara baik Rumah tangga maupun pasar.

Pengolahan sampah yang baik dengan sistim sanitary ***landfill***

(2) Penanganan Air Limbah

(a) Penanganan air limbah setempat akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi program penyuluhan dan pengadaan bantuan MCK.

(b) Penanganan air limbah tersebut juga akan dikaitkan dengan usaha perbaikan sistem pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga dengan melibatkan pula pihak swasta.

(c) Prioritas penanganan adalah bagi daerah yang mempunyai angka mortalitas tinggi, penduduk yang sangat padat dengan penyediaan air bersih yang cukup.
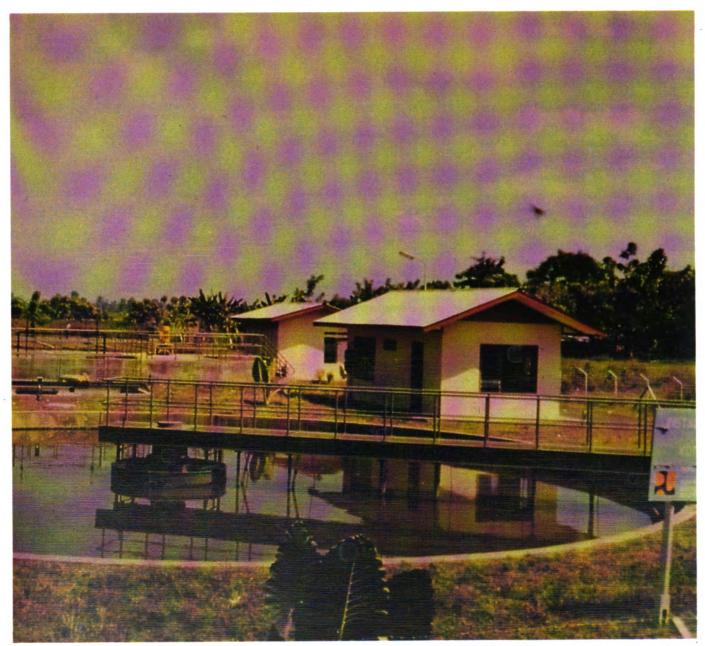
Tempat pengolahan air kotor berasal dari rumah tangga dan industri rumahan (home industry)

(d) Peningkatan kemampuan institusi Pemda dalam menangani operasi dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun.

(e) Dalam penanganan air limbah terpusat akan diprioritaskan pada penanganan perbaikan saluran yang sudah ada serta usaha pengadaan proyek percontohan.

(3) Penanganan Drainase

Penanganan penataan bangunan akan lebih ditingkatkan terutama pada penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar yang diperlukan. Disamping itu kegiatan penataan bangunan umum, bangunan negara dan bangunan lain pada kawasan khusus (perdagangan, perkantoran, industri, pariwisata dan lain-lainnya) akan lebih ditingkatkan.

Penanganan masalah tertib pembangunan bangunan pada kawasan khusus dan lansekap kota perlu ditingkatkan khususnya pada kota-kota besar.

Penanganan pembangunan gedung sekolah, rumah sakit dan bangunan penting lainnya akan ditingkatkan atas dasar kerjasama antara instansi yang terkait dalam penyediaan bangunan umum, baik dalam pembangunan sektor perumahan dan pemukiman maupun sektor lainnya.

Dalam rangka peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan diperlukan kegiatan bantuan teknis kepada aparat Pemda tentang tata cara untuk menilai tingkat pemanfaatan bangunan.

Pompa air Pluit di Jakarta dibangun guna menanggung genangan air yang selanjutnya dibuang ke laut

(5) Pelaksanaan Program

(a) Penyiapan Program

Kriteria pemilihan kota yang mendapat bantuan luar negeri terutama bentuk pinjaman dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana perkotaan adalah sebagai berikut:

- Kota yang sudah termasuk dalam daftar kota yang diidentifikasikan akan ditangani dalam Repelita V (816 daerah perkotaan).
- Total penduduk perkotaannya lebih besar atau sama dengan 20.000 jiwa pada tahun 1994.
- Presentase pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya lebih besar dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (2,35%).
- Kota-kota yang mempunyai potensi pengembangan strategis dan daerah perkotaannya berkembang dengan cepat.
- Kota-kota yang telah diprioritaskan pembangunannya oleh Pemda Tingkat I dan Tingkat II.
- Kota-kota yang mempunyai pertimbangan khusus seperti pariwisata, industri, pengembangan daerah yang bersejarah, dan pertimbangan sosial politik.

Bagi kota-kota yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tetapi juga memerlukan pembangunan prasarana akan ditangani melalui pendekatan bantuan yang lain baik melalui bantuan hibah, bantuan pinjaman lunak pemerintah pusat maupun penunjangan bantuan APBN murni.

P.T. MACCAFERRI GABIONS OF INDONESIA

Wisma Abadi, Blok B-4 – b Lt. III
Jl. Kyai Caringin 29 – 31
Jakarta 10160
Phone : 349710, 356817
Tlx : 45716 BKS IA
Fax : (021) 356817

Specialists in Retaining Walls, River Erosion Controls, Channel Linings, Sea Defences and Rockfall Protection
Suppliers to the Government Agencies, Municipal Authorities and Public Works Contractors

BRONJONG DAN MATRAS (BRONJONG PASANGAN) MACCAFERRI

Maccaferri bagian dari Grup Industri Maccaferri adalah pabrik dan pemasok bronjong kawat, matras kawat yang sudah terkenal di seluruh Dunia. Bronjong kawat ditemukan oleh Maccaferri dan pertama kali dipakai tahun 1893 untuk memperbaiki tebing sungai di Itali.

Didalam perkembangannya, broonjong (gabion) dan matras (reno mattress) dengan bentuk segiempat atau empat persegi panjang banyak digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan sipil baik untuk pekerjaan darurat maupun permanen.

PT. Maccaferri Gabions Indonesia, didirikan berdasarkan SPP Presiden No. 104/I/PMA/1989 tanggal 22 Juni 1989. Perusahaan ini mempunyai pabrik di Tangerang Jawa Barat yang memproduksi bronjong dan matras dengan menggunakan mesin-mesin yang otomatis dan modern. Produksi perdana akan dimulai akhir tahun 1990 yang ditujukan untuk penggunaan dalam negeri dan export.

Bronjong dan matras Maccaferri dibuat dari kawat baja yang berlapis seng, dengan 2,5 lilitan (double twist) sehingga mempunyai lubang (mesh) yang berbentuk segi enam. Susunan bronjong yang lentur sangat sesuai untuk pekerjaan perbaikan sungai, pengendalian erosi, perkuatan tebing, saluran irigasi, perkuatan tebing sungai dan lain-lain.
Bronjong yang dibuat dari kawat yang dilapisi seng yang tebal dan plastik (PVC) sangat sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan sipil di laut, muara sungai dan perlindungan pantai.

Bronjong dan matras Maccafferri dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi untuk memenuhi semua Spesifikasi International, termasuk British Standard BS 1052 dan BS 443 yang menjamin produksinya berkualitas tinggi dan tahan lama.

Daya tahan dari bronjong dan matras Maccafferri dijamin karena menggunakan kawat yang berlapis seng tebal. Lapisan sengnya adalah 269 gram/m2 dibandingkan dengan kawat biasa dengan lapisan seng 80 gram/m2 atau kurang. Dengan lapisan seng yang tebal ini maka bronjong dan matras Maccafferri akan terlindungi dari bahaya karat untuk waktu yang lama (biasa mencapai 20 tahun atau lebih). Penggunaan mesin dalam pembuatannya yang dapat membuat lilitan sampai 2,5 kali akan melindungi semua sambungan, sehingga mencegah terputusnya kawat.

Keunggulan teknis dari bronjong dan matras Maccafferri karena adanya dukungan penelitian dan percobaan laboratorium yang sangat intensip. Produk kami sudah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia, digunakan sejak beberapa tahun yang lalu oleh instansi-instansi pemerintah, kontraktor asing/nasional dan dikenal sebagai produk yang berkualitas tinggi dan tahan uji.
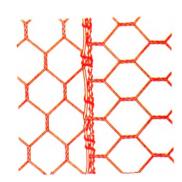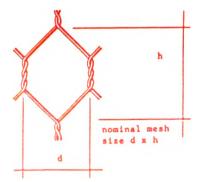
Gambar 1.
Kawat dan mesh dengan 2,5 lilitan kawat.

Gambar 2. Unit bronjong
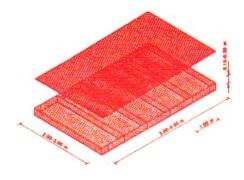
Gambar 3. Unit Reno Mattress

Gambar 4. Cara merakit bronjong
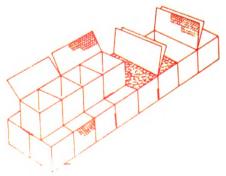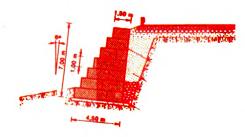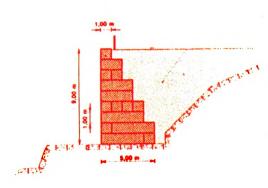
Gambar 5. Perkuatan tebing dengan bronjong
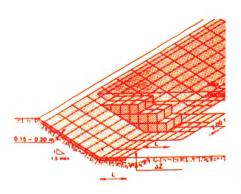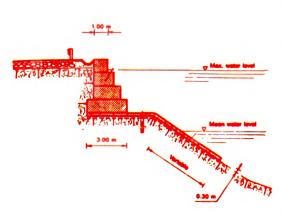
GAmbar 6. Pekerjaan Tebing Sungai

Kualitas yang unggul dari bronjong dan matras Maccaferri dapat menjamin struktur bangunan yang tahan lama sehingga umur bangunan akan lebih lama jika dibandingkan dengan bangunan yang dibuat dari bahan lain. Harganyapun dapat bersaing dan mudah dipasang dengan menggunakan tenaga manusia, sehingga sangat cocok untuk daerah-daerah yang terpencil.

Sifat-sifat utama dari bronjong dan matras Maccaferri adalah sebagai berikut :

- **Sistim pertulangan** yang menghubungkan setiap bagian sangkar bronjong/matras akan membentuk struktur yang homogen monolithic.
- **Lentur,** kemampuan untuk menyesuaikan apabila ada penurunan dan patahan tanah, sehingga membuat bangunan menjadi kuat.
- **Dapat ditembus air,** kemampuan untuk mengeringkan air dari tanah akan memperbaiki struktur tanah disekitarnya dan stabilitas bangunan.
- **Harga yang bersaing, muda dipasang dan cepat berfungsi.**
  Membuat bangunan dari bronjong tidak membutuhkan tenaga khusus dan sangat mudah diangkut kedaerah terpencil. Bangunan dari bronjong akan cepat berfungsi begitu pekerjaan selesai.
- **Alamiah** (ecology), penggunaan bronjong dan matras dilapangan kelihatannya alamiah karena menggunakan batu alam, dan apabila diantara sela-selanya diisi tanah maka akan tumbuh-tumbuhan diatasnya sehingga bangunan tersebut akan menyatu dengan alam disekitarnya.

Maccaferri menerbitkan beberapa tulisan teknis seperti Petunjuk Rancang Bangunan untuk beberapa penggunaan dilapangan seperti :

- Perkuatan tanah
- Pekerjaan perbaikan sungai
- Perkuatan tebing
- Bronjong kawat dan
- Perlindungan bangunan-bangunan batu.

Sarjana Teknis dari Maccaferri akan membantu anda untuk memberikan petunjuk mengenai rancang bangun bangunan-bangunan yang menggunakan bronjong dan matras secara cuma-cuma.

P.T. MACCAFERRI GABIONS OF INDONESIA

Wisma Abadi, Blok B4 – b Lt. III
Jl. Kyai Caringin 29 – 31
Jakarta 10160
Phone : 349710, 356817
Tlx : 45716 BKS IA
Fax (021) 356817
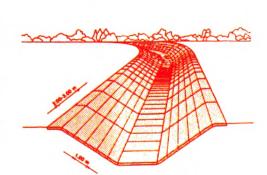
Gambar 7. Pasangan saluran
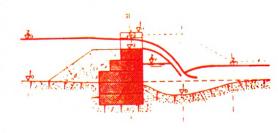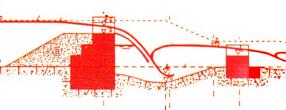
Gambar 8. Bendung bronjong

Ukuran standar untuk bronjong dan reno mattress

Ukuran Bronjong (m)	Ukuran Mesin (cm)	Diameter Kawat (mm)	Diaprahma (no)
2X1X0 , 5	8X10	7 , 7 / 3 , 0	1
2X1X1	8X10	2 , 7 / 3 , 0	1
4X1X0 , 5	8X10	2 , 7 / 3 , 0	3
4X1X1	8X10	2 , 7 / 3 , 0	3
Matras			
4X2X0 , 2	6X8	2 , 0 / 2 , 2	3
4X2X0 , 3	6X8	2 , 0 / 2 , 2	3
6X2X0 , 2	6X8	2 , 0 / 2 , 2	5
6X2X0 , 3	6X8	2 , 0 / 2 , 2	5

Pemerataan pembangunan bidang prasarana jalan di Irian Jaya.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI IRIAN JAYA

1. Irian Jaya, propinsi di ujung timur ini memiliki potensi besar berupa sumberdaya alam dan mineral yang memerlukan penanganan agar potensi tersebut membawa manfaat dan kesejahteraan. Propinsi dengan sembilan kabupaten ini memiliki luas wilayah 414.800 Km2, atau 21.9 persen dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari luas wilayah yang 414.800 Km2 tersebut 75 persen diantaranya masih berupa hutan tropis dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Sedangkan dataran rendahnya merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pertanian. Sementara luas perairan pantainya 288.000 Km2 memiliki potensi besar untuk pengembangan sumberdaya laut. Saat ini, baru 6.4 persen yang telah dimanfaatkan. Padahal, menurut perkiraan, sekitar 17 persen potensi sumberdaya laut negeri kita ini berada di Irian Jaya. Sumberdaya mineral yang terkandung dalam perut bumi Irian Jaya, juga belum sepenuhnya digali. Baru tembaga dan emas di Tembaga Pura serta minyak di Sorong yang telah dimanfaatkan. Selebihnya, masih berupa potensi yang tersimpan diperut bumi.

Percepatan Pembangunan.

2. Dalam rangka menyeimbangkan tingkat kemajuan agar sejajar dengan propinsi lainnya, dalam rangka mengejar ketinggalannya, maka Pemerintah bertekad memacu laju pembangunan di daerah Indo-

nesia bagian timur termasuk di dalamnya Irian Jaya serta daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Dengan upaya pencapaian seperti itu, diharapkan pada saatnya nanti kita memasuki tahapan tinggal landas pada Pelita VI, semua wilayah sudah memiliki tingkat kemajuan yang merata dan secara bersama-sama memasuki era tinggal landas dengan lebih mantap.

Apabila dalam Pelita IV (selama lima tahun) dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasana pekerjaan umum di Irian Jaya berjumlah Rp 119.074 milyar, maka pada tahun pertama Pelita V saja, sudah mendekati angka 40 persen dari seluruh biaya lima tahun sebelumnya. Untuk tahun 1989/1990, pembangunan bidang pekerjaan umum dialokasikan dana sebesar Rp 37 milyar. Sedangkan untuk tahun anggaran 1990/1991 ini, jumlahnya sebesar Rp 118,9 milyar, berarti naik 4 kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya, atau dalam dua tahun Pelita V ini saja, sudah lebih dari lima tahun anggaran pada Pelita IV.

Hasil-hasil pembangunan yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum di Irian Jaya tersebut, telah membawa manfaat dan hasilnya secara langsung telah dinikmati masyarakat. Bidang Cipta Karya, misalnya, berupa penanganan perbaikan/pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu, penyediaan sarana air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman dan sebagainya yang tersebar di 9 kabupaten kecamatan dan desa. Untuk bidang Pengairan, sampai dengan tahun 1990 ini telah ditangani pembangunan daerah irigasi Genyem di Kabupaten Jayapura dengan luas areal fungsional 959 Ha. Di daerah Irigasi Koya, Jayapura, untuk areal seluas 1.703 Ha. dan Daerah Irigasi Wariori di Kabupaten Manokwari, untuk areal persawahan seluas 1.003 Ha. Disamping itu, ditangani pula daerah rawa di Kabupaten Manokwari dan Sorong yang meliputi luas areal 1.500 Ha. Penanganan jaringan irigasi tersebut, disamping dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, sekaligus juga dalam rangka menunjang program transmigrasi.

Penanganan Jalan

3. Kebijaksanaan penanganan jalan di Irian Jaya merupakan prioritas utama dalam percepatan pembangunan itu sasaran utamanya ialah :

a) Pembangunan jalan baru untuk membuka isolasi daerah dengan maksud mengembangkan perekonomian daerah pedalaman.

b) Peningkatan jalan untuk meningkatkan kemampuan pela-

Pembangunan jalan untuk membuka daerah-daerah terisolir di Irian Jaya

Pemukiman transmigrasi di Irian Jaya.

yanan ruas-ruas jalan (termasuk jembatannya) sehingga memenuhi tingkat pelayanan yang sesuai dengan pertumbuhan arus lalulintas serta berada dalam keadaan mantap.

c) Pemeliharaan jalan untuk memelihara/merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap seluruh ruas jalan yang ada agar tetap dalam kondisi mantap. Pemeliharaan ini mencakup penanganan permukaan aspal, drainage dan daerah milik jalan.

Sampai dengan tahun 1989/90 pembangunan di bidang kebinamargaan yang telah dicapai adalah :

Panjang jalan menurut status :

a. Jalan Nasional	536.40 Km.
b. Jalan Propinsi	1.433.00 Km.
c. Jalan Lokal	3.140.87 Km.

Panjang jalan menurut kondisi :

a. Aspal	1.076.42 Km.
b. Japat (Jalan padat tahan cuaca).	1.773.97 Km.
c. Tanah	5.110.27 Km.
d. Lain-lain	1.581.50 Km.

Jembatan (dalam meter) :

a. Beton	932.80 M.
b. Baja	3.579.60 M.
c. Kayu	5.308.30 M.
d. Lain-lain	9.820.70 M.

Tersebar dalam 9 kabupaten. 177 kecamatan dan 928 desa.

Panjang jalan yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 1989/1990 adalah 47 Km. pada tahun anggaran 1990/1991 ini ditangani jalan Japat sepanjang 254 Km dengan total dana tersedia dalam DIP sebesar Rp 41.3 milyar.

Adapun ruas-ruas jalan yang memperoleh prioritas utama untuk ditangani. dalam Pelita V ini meliputi :

Waris — Ubrub

Sasaran Pelita V pada ruas Waris — Ubrub adalah menghubungkan Kecamatan Ubrub dengan daerah perbatasan di sekitarnya dengan Ibukota Propinsi Jayapura. Dengan dibangunnya sarana jalan pada ruas ini maka daerah perbatasan yang dapat dicapai dengan jalan darat dari Jayapura adalah Arso, Waris, Senggi dan Ubrub.

Wamena — Tengon.

Dengan tercapainya sasaran Pelita V pada ruas ini, yaitu menghubungkan dengan sarana jalan daerah pedalaman Wamena dengan Jayapura yang diharapkan selesai dalam tiga tahun anggaran, maka telah ada kabupaten di Propinsi Irian Jaya yang dapat dihubungkan dengan

jalan darat. Daerah-daerah yang menjadi sasaran untuk dihubungkan dengan jalan adalah Wamena, Usilimo, Pass Valley, Daerah Hulu Sungai Mamberamo, dan Senggi. Sedangkan sampai dengan Pelita IV baru Wamena dengan Usilimo yang dapat dihubungkan dengan jalan darat selainnya harus ditempuh dengan transportasi udara.

Taja — Lereh — Tengon

Sasaran yang ingin dicapai pada ruas jalan Taja — Lereh — Tengon adalah terbukanya dataran Lereh yang mempunyai potensi pengembangan daerah yang tinggi terutama bagi pertanian.

Akses Merauke — Muting.

Sasaran yang ingin dicapai pada ruas ini adalah menghubungkan Tanah Merah dan sekitarnya dengan Merauke melalui sarana jalan. Selama ini kedua daerah tersebut hanya dapat ditempuh dengan transportasi sungai dan udara yang jadwal operasinya tidak menentu. Disamping pembangunan jalan arteri direncanakan, dibuat pula jalan akses penghubung ke lokasi-lokasi transmigrasi dan lokasi-lokasi penting lainnya. Apabila sasaran Pelita V pada ruas ini tercapai maka daerah-daerah yang dapat dihubungkan dengan jalan darat adalah Merauke, Sota, Bupul, Muting dan Tanah Merah.

Tanah Merah — Maropko

Sasaran utama pada ruas jalan ini adalah menghubungkan daerah-daerah perbatasan di sekitar Waropko dan Mindiptana dengan Merauke, sebagai kelanjutan ruas jalan Merauke — Tanah Merah. Waropko merupakan desa perbatasan yang memerlukan hubungan ke Wilayah Indonesia lainnya. Hal ini diperlukan karena di seberang perbatasan banyak desa yang mempunyai hubungan langsung dengan Waropko. Saat ini satu-satunya hubungan ke luar dari Waropko dengan jalan darat adalah dengan menyeberang perbatasan. Pada akhir Pelita V diharapkan masyarakat daerah Waropko dapat lebih berkembang dengan adanya kemudahan untuk mobilisasi dari Waropko ke Merauke. Sedang daerah Mindiptana diharapkan pada tahun keempat Pelita V sudah dapat dihubungkan dengan jalan darat.

Nabire — Ilaga

Sasaran yang ingin dicapai pada ruas Nabire — Ilaga adalah menghubungkan daerah pedalaman Enarotali dengan ibukota kabupaten Paniai Nabire. Dengan dibangunnya sarana jalan pada ruas ini, selain bertujuan mengembangkan daerah pedalaman Enarotali diharapkan dapat diperluas jaringan jalan lainnya untuk tujuan pertambangan, kehutanan, pertanian dan lain-lain.

Klamono — Ayamaru

Sasaran yang ingin dicapai pada ruas jalan ini adalah membuka daerah pertanian Ayamaru ke arah Sorong, diharapkan dengan terbukanya daerah Ayamaru dan sekitarnya maka daerah tersebut dapat lebih berkembang.

Untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan jalan di Propinsi Irian Jaya pada tahun 1990/1991 telah diberikan bantuan peralatan oleh Menteri Pekerjaan Umum sebanyak 57 unit terdiri dari 2 unit stone crusher, 6 unit motor grader, 10 unit loader, 26 unit buldozer, 5 unit excavator, 6 unit vibro compactor dan 2 unit tire roller. Akhir Juni 1990 lalu alat-alat tersebut 100 persen telah tiba di Jayapura dan kini dioperasikan untuk menangani proyek pembangunan jalan Wamena — Senggi.

Rumah Adat di Irian Jaya

Kriteria untuk pemilihan komponen program bagi setiap kota seperti air bersih, air limbah, drainase, persampahan, perbaikan kampung, serta jumlah komponen untuk setiap kota adalah sangat tergantung pada kepadatan dan pertumbuhan penduduknya serta kebutuhan nyata dari kekurangan fasilitas prasarana.

(b) Pembiayaan

Untuk mengerahkan potensi pembiayaan, dalam hal tertentu prinsip pemulihan biaya akan diterapkan baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi dimungkinkan pemulihanya secara penuh, atau prasarana yang melayani program khusus (seperti hidran umum, KIP, perumahan dan prasarana pedesaan).

Dalam rangka memenuhi penyediaan prasarana pemukiman, pemerintah pusat antara lain akan membiayai secara langsung aspek penanganan masalah kemiskinan bantuan khusus/subsidi, bantuan teknis, pengaturan dan pembinaan, penyuluhan, proyek percontohan serta kegiatan lain yang menjadi tugas pemerintah pusat.

Untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana yang sudah dibangun pada prinsipnya merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, namun demikian pemerintah pusat masih memberikan subsidi untuk operasi dan pemeliharaan program khusus seperti untuk penyediaan air bersih yang masih dikelola oleh BPAM dan penanganan KIP, agar prasarana dan sarana yang telah dibangun dapat berfungsi dan bermanfaat secara optimal.

Sebagian besar pembiayaan program masih tetap diusahakan melalui bantuan luar negeri yang harus dilakukan secara optimal untuk penangan prasarana pemukiman baik melalui DIP Departemen maupun pinjaman kepada daerah.

Untuk proyek-proyek non bantuan luar negeri, baik yang lanjutan maupun proyek baru, diprioritaskan bagi proyek-proyek yang dapat segera bermanfaat bagi masyarakat, seperti misalnya perbaikan kampung dan prasarana pasar (KIP, MIIP), program pemugaran perumahan desa (P3D), air bersih pedesaan dan sanitasi sederhana.

Disamping itu juga disediakan dana untuk kegiatan lain yang membantu usaha penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor non migas, pengembangan daerah industri dan pariwisata, peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah serta pengembangan daerah terbelakang.

(c).Kelembagaan

Dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan dan penyempurnaan lembaga baik di pusat maupun daerah perlu dilengkapi tata cara pengaturan mutasi pegawai pusat dan daerah yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kemampuan dan jumlah tenaga.

Peningkatan kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk pemantapan pengaturan wewenang dan tanggung jawab dalam penyediaan prasarana pemukiman, penanganan tata ruang, tata bangunan, melalui penataan pertanahan dalm rangka perbaikan pedoman, petunjuk dan standar pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan prasarana pemukiman.

Disamping itu dilakukan pula usaha-usaha peningkatan kemampuan aparat melalui kegiatan latihan dan pendidikan baik dalam rangka tugas pembangunan dan pemerintahan, khususnya proses melibatkan masyarakat dan meningkatkan peranserta swasta dalam pembangunan.

6) Strategi Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya, hasil yang diharapkan dari pembangunan penelitian dan pengembangan adalah inovasi, dalam arti pengembangan sistem, produk dan jasa yang lebih baik.

Kemajuan bangsa dan negara tidak luput dari adanya inovasi-inovasi yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan. Sehubungan dengan itu strategi pembangunan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dalam Repelita V disusun berdasarkan ikhwal sebagai berikut:

a) Standarisasi, antara lain:

(1) Meningkatkan jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Pekerjaan Umum dengan adopsi dan atau penyesuaian standar-standar Internasional dan negara lain berdasarkan kondisi Indonesia, melalui konsensus dengan unsur masyarakat dan unsur pemerintah yang lain yang berkepentingan dengan materi yang distandarkan.

(2) Memantapkan Sistem Nasional Jaringan Akreditasi Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dengan penilaian dan akreditasi laboratorium-laboratorium, baik milik unsur masyarakat (kontraktor, konsultan, perguruan tinggi) maupun unsur pemerintah (departemen,

CARA-CARA BARU TUMBUH DALAM PEMBIAYAAN DI SEKTOR KONSTRUKSI

PEREKONOMIAN Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin baik. Hal ini nampak dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 1988 lalu sebesar 5,7%. Pertumbuhan ini masih akan semakin mantap dalam beberapa tahun ini. Pakar ekonomi Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo memperhitungkan bahwa tahun 1989 ekonomi Indonesia tumbuh dengan 6,2% dan pada tahun 1990 ini diperhitungkan akan tumbuh dengan 6,5% sampai 7%. Hal itu tentu akan berdampak positif terhadap pembangunan fisik di dalam negeri. Sehingga dapat diharapkan pertumbuhan di sektor konstruksi juga memperlihatkan kenaikan yang cukup tinggi.

Pada tahun 1988 PDB sektor konstruksi tumbuh dengan 6,58%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1985, di mana pertumbuhan PDB sektor konstruksi atas dasar harga konstan 1983, pada tahun 1987 tercatat 4,2%, tahun 1986 hanya 2,2% dan tahun 1985 sebesar 2,6%. Dengan demikian tumbuh pula harapan akan meningkatkan kebutuhan peralatan konstruksi yang sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan industri konstruksi.

PROYEK2 PEMBANGUNAN :

Tahun 1990 ini usaha jasa konstruksi akan semakin meningkat. Hal ini nampak jelas dari peningkatan proyek2 investasi swasta maupun rencana Pengeluaran Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1990/91 yg mengalami peningkatan 23,6% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya (1989/90).

Terdapat 5 sektor dalam Pengeluaran Pembangunan yang menyerap dana sebesar Rp. 10.008,8 miliar atau 61,7% dari seluruh anggaran Pengeluaran Pembangunan. Sektor2 ini meliputi Sektor Pertanian dan Pengairan; Perhubungan dan Pariwisata; Pembangunan Daerah, Desa dan Kota; Perumahan Rakyat dan Pemukiman; Pertambangan dan Energi.

Dari segi penyediaan dana pembangunan sebesar Rp. 16.225 miliar dalam RAPBN 1990/1991, sebesar Rp. 7.820,8 milyar berasal dari dana rupiah, berarti meningkat tinggi dibandingkan dengan tahun fiskal 1989/1990 yang sebesar Rp. 3.603,7 miliar. Hal ini mencerminkan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan dana sudah semakin kuat.

(Rp Milyard)

SEKTOR/SUB SEKTOR	A P B N		Naik
	1989/1990	1990/1991	%
Pertanian & Pengairan	1.944,2	2.391,6	
– Pertanian	1.416,1	1.693,7	19,9
– Pengairan	578,1	697,9	19,6
Perhubungan & Pariwisata:	2.522,1	3.041,6	20,7
– Prasarana Jalan	1.380,3	1.675,5	20,6
– Perhubungan Darat	295,7	357,4	21,4
– Perhubungan Laut	285,5	342,4	20,9
– Perhubungan Udara	378,2	444,6	19,9
– Pers & Telekomunikasi	144,9	173,4	17,6
– Pariwisata	37,5	48,3	19,7
Pembangunan Daerah,			28,8
Desa dan Kota	1.552,3	1.873,2	
Perumahan Rakyat			20,7
& Pemukiman	620,1	729,3	
Pertambangan & Energi	1.614,7	1.973,1	17,6
– Pertambangan	181,3	213,9	22,2
– Energi	1.433,4	1.759,2	18,0
			22,7

Sumber : APBN 1989/1990 – 1990/1991.

Keadaan itu dipertegas lagi dengan menurunnya bantuan proyek yaitu dari Rp. 9.526,2 miliar menjadi Rp. 8.404,2 miliar pada tahun fiskal 1990/1991, hal ini mencerminkan pula tekad Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri.

PERTUMBUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 1984/1985 – 1990/1991

Tahun	APBN (Rp MMM)	Dana Rupiah	PENGELUARAN PEMBANGUNAN (Rp MMM)			
			Bantuan Proyek	Jumlah	Laju Kenaikan %	% dari total APBN
1984/85	19.380,9	6.543,2	3.408,7	9.951,9	0,5	51,3
1985/86	22.824,6	7.369,7	3.503,4	10.873,1	9,3	47,6
1986/87	21.891,3	4.537,3	3.794,7	8.332,0	23,4	38,1
1987/88	26.958,9	4.047,2	5.430,2	9.477,4	13,7	35,2
1988/89	32.989,7	4.300,7	7.950,0	12.250,7	29,3	37,1
1989/90	36.574,9	3.603,7	9.526,2	13.129,9	7,2	35,9
1990/91	42.873,1	7.820,8	8.404,2	16.225,0	23,6	37,8

Catatan : 1990/1991 RAPBN.
Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 1990/1991.

Usaha Pemerintah untuk mendorong investasi swasta dengan deregulasi dan debirokratisasi mulai menampakkan hasilnya dengan munculnya minat para investor, baik investor nasional maupun investor asing untuk menanamkan modalnya dalam pelbagai sektor.

Antara lain yang agak menonjol ialah sektor manufakturing, terutama manufakturing untuk produk-produk yang berorientasi pasaran ekspor. Peningkatan investasi di sektor manufakturing ini membutuhkan lahan industri yang cukup luas. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang tertuang dalam Keppres R.I. No. 53/1989 pada tanggal 27 Oktober 1989 tentang kesempatan investasi oleh PMDN maupun PMA untuk Proyek Industrial Estate.

Pelbagai Proyek Industrial Estate yang telah disetujui, terlihat dalam tabel sebagai berikut :

PROYEK PEMBANGUNAN INDUSTRIAL ESTATE YANG TELAH DISETUJUI 1989

Nama Perusahaan	Status	Lokasi	Investasi (Rp miliar)	Luas Areal (Hektar)
PT KIEB	PMA	Jawa Barat	56	210
PT BIEC	PMA	Jawa Barat	50	200
PT BFIF	PMDN	Jawa Barat	56	500
PT Langeng Sahabat	PMDN	Jawa Barat	29	500
PT Citra Habitat I.	PMDN	Jawa Barat	92	500
PT Putra Daya Pks	PMDN	Jawa Barat	20	300
PT Merdeka Wirastam	PMDN	Jawa Tengah	30	300
PT Intim Hati	PMDN	Jawa Timur	76	500
JUMLAH				3.010

Sumber : B.K.P.M.

Permohonan baru yang masih menunggu proses izin Pembangunan Industrial Estate, dalam tabel sebagai berikut :

JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRIAL ESTATE DALAM PROSES PENGAJUAN, 1989

Nama Perusahaan	Status	Lokasi	Investasi (Rp MMM)	Luas Areal (Hektar)
PT Graha Mitra Santosa	PMDN	Jawa Barat	154	500
PT Tugu Indah Abadi	PMDN	Jawa Tengah	17	300
PT Guna Mekar Industri	PMDN	Jawa Tengah	21	300
PT Maspion Industrial Estate	PMDN	Jawa Timur	50	500
PT Indah Industrial Estate	PMDN	Jawa Timur	42	500
PT Altap Prima Industrial Estate	PMDN	Jawa Timur	46	500
JUMLAH				2.600

Sumber : B.K.P.M.

Selain itu dalam upaya meningkatkan prasarana jalan, Pemerintah melalui Keppres R.I. No. 25/1987 telah memberi izin kepada PT Jasa Marga untuk mengikutsertakan pihak swasta nasional maupun asing dalam usaha patungan mengelola Jalan Tol di Indonesia.

Adapun proyek-proyek Jalan Tol yang akan dibangun di Indonesia nampak seperti dalam tabel sebagai berikut :

PROYEK-PROYEK JALAN TOL YANG AKAN DIBANGUN DI INDONESIA

Nama Proyek	Volume lalu lintas mobil per hari	Panjang Jalan (KM)	Perkiraan biaya Pembangunan (US$ juta)	Kondisi Proyek
– Tangerang – Merak	15.000	75,0	300	C
– Gempol – Pasuruan	20.000	26,0	105	PFS
– Gempol – Malang	25.000	56,0	255	PFS
– Surabaya – Mojokerto	25.000	39,0	160	PFS
– Tegal – Batang	t.a.	69,0	t.a.	PFS
– Semarang – Batang	20.000	75,0	300	PFS
– Cirebon – Tegal	20.000	69,0	280	PFS
– Solo – Yogyakarta	20.000	60,0	240	FS
– Semarang – Bawen	25.000	21,0	85	PFS
– Cikampek – Cirebon	12.000	130,0	520	PFS
– Medan – Binjai	25.000	24,0	80	PFS
– Grogol – Pluit	40.000	7,0	45	FS
– Cikampek – Padalarang	14.000	34,0	240	FS
– Jkt Outer Ringroad				
West Section	20.000	9,1	70	FE
South West Section	20.000	10,0	85	FE
South Section	20.000	13,5	104	FE
South East Section	20.000	14,0	108	FE
East Section	20.000	7,5	50	FE
– Jkt Harbour Road	40.000	22,0	360	FE
– Surabaya – Gresik	25.000	9,0	36	FE
– Semarang Artery – Section C	t.a.	12,0	t.a.	PFS
– Padalarang – Cileunyi	t.a.	34,0	t.a.	C

Sumber : PT Jasa Marga (Diolah)

Catatan :
FF = Final Engineering Completed.
PFS = Pre Feasibility Study Completed
FS : Feasibility Study Completed
t.a. = Tidak ada data.
C = Construction

Sumber : PT Jasa Marga (Diolah)

Dengan perkembangan proyek-proyek pembangunan yang demikisan pesat, maka kebutuhan akan peralatanpun semakin meningkat.

Adapun perkembangan kebutuhan peralatan konstruksi, setelah dengan peningkatan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan usaha jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah :

PERKEMBANGAN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KEBUTUHAN PERALATAN KONSTRUKSI DILIHAT DARI PERTUMBUHAN PELBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN

Tahun Anggaran	Pengeluaran Pembangunan APBN										Realisasi Proyek-proyek PMA & PMDN			Kebutuhan Alat-alat Konstruksi	
	Pertanian & Pengairan		Perhubungan & Pariwisata		Pembangunan Daerah.Desa		Permhn Raky. & Permukiman		Pertambangan dan Euergi						
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Kurs	Rp.	%	Units	%
1983/84	1.323,8	–	1.307,3	–	783,0	–	297,1	–	1.116,1	–	988	10.601,8	–	604	–
1984/85	1.401,7	5,9	1.392,1	6,5	809,9	3,4	432,7	45,6	1.300,9	16,6	1.056	12.872,6	21,4	430	--28,8
1985/86	1.430,4	2,0	1.425,3	2,4	868,2	7,2	437,6	1,1	1.301,7	0,1	1.126	4.697,6	- 63,5	464	7,9
1986/87	1.105,5	- 22,7	1.063,3	-25,4	938,9	8,1	332,7	-24,0	1.036,6	- 20,4	1.420	5.614,7	19,5	275	- 40,7
1987/88	1.180,7	6,8	1.288,1	21,1	873,7	-6,9	452,0	23,8	1.129,1	8,9	1.650	12.858,6	129,0	348	26,5
1988/89	1.299,5	10,1	1.654,5	28,4	1.032,2	18,1	438,3	6,4	1.217,4	7,8	1.707	22.416,1	74,3	669	92,2
1989/90	1.994,2	53,5	2.522,1	52,4	1.552,3	50,4	620,1	41,5	1.614,7	32,6	1.790	28.041,0	25,1	1.059	58,3
1990/91	2.391,6	19,9	3.041,6	20,6	1.873,2	20,7	729,3	17,6	1.973,1	22,2	1.870	35.051,2	25,0	1.482	40,0

Catatan : Garis bawah = Perkiraan.
Sumber : Buku RAPBN 1983/1984 – 1989/1990.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat-alat konstruksi untuk menunjang pertumbuhan pembangunan, serta sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tentang alih tehnologi dan meningkatkan kemampuan industri nasional, maka di penghujung 1983 dinilai Era Industrialisasi alat-alat konstruksi di Indonesia. Perkembangan produksi alat-alat konstruksi ini terlihat dalam tabel berikut :

PERKEMBANGAN PRODUKSI ALAT-ALAT KONSTRUKSI DI INDONESIA

Keterangan	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Bulldozer & D Shovel	202	150	283	492	475	424
Wheel Loader	16	·64	98	103	154	161
Motor Grader	72	54	51	50	61	100
Hydraulic Excavator	150	196	128	109	336	613
Jumlah	440	464	560	754	1.026	1.298

Sumber : HINABI

Produksi alat-alat konstruksi di Indonesia di mulai dengan tahap perakitan (assembling), selanjutnya disusul dengan sejumlah "deletion program" dan diharapkan pada awal abad XXI kita sudah dapat memproduksi sepenuhnya (full manufacturing) peralatan konstruksi buatan Indonesia.

MASALAH PERALATAN DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI

Dengan perkembangan proyek-proyek pembangunan yang demikian pesat, maka dituntut pengadaan peralatan konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan proyek serta dukungan tehnis dan manajemen peralatan yang memadai.

Dan untuk memenuhi tuntutan tersebut, timbul beberapa masalah yang memerlukan penanganan secara terpadu dari pelbagai pihak :

1. *Masalah Keuangan*
   Investasi untuk peralatan konstruksi relatif besar nilainya, dalam hal ini peranan pihak per-Bank-an dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sangat besar artinya bagi Pihak Kontraktor. Demikian pula peranan usaha penyewaan (Rental Company) alat-alat konstruksi, akan sangat membantu terutama bagi pelaksanaan proyek-proyek jangka pendek, dimana investasi peralatan tidaklah memadai.

2. *Masalah Kesinambungan Proyek.*
   Masih dalam kaitannya dengan nilai investasi peralatan konstruksi yang relatif besar, diharapkan adanya jaminan kesinambungan proyek/ pekerjaan sehingga investasi yang telah dikeluarkan menjadi effisien, terutama untuk proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang.

3. *Masalah Manajemen Peralatan.*
   Kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen peralatan, merupakan masalah tersendiri bagi Pihak Kontraktor.
   Dalam hal ini peranan Agen Tunggal (Distributor) didalam memberikan dukungan, baik berupa penyediaan perangkat keras seperti suku cadang, bengkel dan perlengkapannya, dll. maupun berupa perangkat lunak seperti : Konsultasi Tehnis, Program pendidikan dan pelatihan bagi operator, dll, merupakan kewajiban yang mutlak harus dilakukan. Dengan demikian akan membantu Pihak kontraktor mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian project (time over run) maupun peningkatan biaya operasi berlebihan (cost over run).

4. *Masalah Pengangkutan.*
   Khusus dalam upaya peningkatan pembangunan di Indonesia bagian Timur, pengangkutan peralatan

konstruksi ke daerah-daerah di Indonesia Timur merupakan masalah tersendiri. Selain oleh langkanya kapal-kapal pengangkut, juga oleh keterbatasan sarana-sarana pelabuhan yang sangat diperlukan untuk pembongkaran muatan peralatan konstruksi.

K E S I M P U L A N :

Usaha Jasa Konstruksi menghadapi masa yang cerah, baik dilihat dari kenaikan Pengeluaran Pembangunan dalam APBN, maupun dari peningkatan investasi swasta nasional dan asing oleh kebijaksanaan deregulasi serta debirokrasi peraturan Pemerintah.

Hal ini mendorong kebutuhan akan peralatan konstruksi, dimana diperlukan investasi yang relatif besar dalam pengadaannya. Dan untuk memecahkan berbagai masalah peralatan konstruksi yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi, diperlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak.

PERANAN PERBANKAN DALAM JASA KONSTRUKSI :

Bisnis industri konstruksi bukan hal yang tabu bagi perbankan malah sebaliknya merupakan bisnis yang penuh harapan dan merupakan salah satu industri yang langgeng dan terus akan maju. Kerjasama bank dengan kontraktor profesional dapat saling menguntungkan dan dapat mempercepat laju pertumbuhan bagi kedua industri perbankan dan industri jasa konstruksi.

Dalam bidang jasa konstruksi telah terjadi perubahan-perubahan dalam sistim pembiayaannya. Dulu setelah penandatanganan kontrak, si pemborong menerima uang muka dan proyek mulai dikerjakan. Kemudian pembayaran dilakukan kalau pemborong sudah menunjukkan prestasi/performancenya, setelah itu berkembang dengan syarat yang lebih berat bagi kontraktor2 yakni : proyek dikerjakan sampai selesai, baru kemudian dibayar.

Namun pada tahun delapan puluhan jenis pembiayaan konstruksi yang sangat populer adalah dengan cara "Turn Key Project", yang menurut analisa beberapa pengamat dianggap lebih efektif dan tidak merepotkan owner karena sudah melibatkan pihak kontraktor pada tahap awal dengan memperhitungkan berbagai alternatif yang perlu.

Akhir-akhir ini sering terdengar istilah B.O.T. (Build Operate and Transfer), dimana owner tidak lagi disibukkan oleh siapa yang membangun proyek dan siapa yang membiayai proyek itu. Tetapi owner menyerahkan proyek yang bersangkutan kepada pihak lain selama suatu jangka waktu tertentu untuk dibangun dan dioperasikan dan kemudian diterima kembali (transfer) kepada pemilik yang sebenarnya.

Dengan demikian suatu investasi/pembiayaan proyek semakin sulit untuk diupayakan sendiri oleh kontraktor. Namun perlu adanya kerjasama dengan lembaga keuangan khususnya perbankan untuk membiayai suatu proyek mulai dari studi kelayakan, design dan engineering, pelaksanaan, manajemen proyek, sampai kepada pemasaran proyek tersebut.

Dari sini bank selaku kreditur, memperoleh nasabah sama halnya dengan kontraktor memenangkan tender. Bagi bank saat ini yang riskan bukan bisnis konstruksinya, tetapi mendapatkan kontraktor yang manajemennya profesional, committed dengan usaha yang tidak bersifat hit and run, serta bekerja dengan perencanaan dan pengawasan yang tepat. Fasilitas perbankan yang populer bagi industri konstruksi adalah sebagai berikut :

- fasilitas generasi bank, baik dalam kaitan dengan tender bond, advance payment bond, performance bond dan lain-lain.
- fasilitas kredit, termasuk kredit modal kerja, kredit investasi, KPR, KPM, dll.
- fasilitas impor, termasuk fasilitas LC, TR, dll.
- maupun fasilitas2 lainnya dari masalah perbankan.

Bagi perbankan persyaratan2 yang diharapkan sering tidak terpenuhi karena berbagai alasan, terutama karena adanya beberapa perbedaan persepsi yang menjadi kendala. Oleh karena itu perlu diketahui faktor2 yang perlu bagi bank dalam menilai suatu permohonan fasilitas yang disingkat dengan 5C, yakni :

1. Character; 2. Capacity; 3. Capital; 4. Condition; 5. Collateral, agar kerjasama antara Bank dan Kontraktor dapat terlaksana dan berjalan lancar.

Bagi bank saat ini pengaruh collateral tidak lagi utama, melainkan hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Keempat faktor sebelumnya (no. 1 – 4) lebih penting dan lebih menjadi pertimbangan bagi bank. Oleh karena itu profesionalisme kontraktor sangat menentukan, apakah permohonan fasilitasnya dapat dikabulkan atau tidak oleh bank.
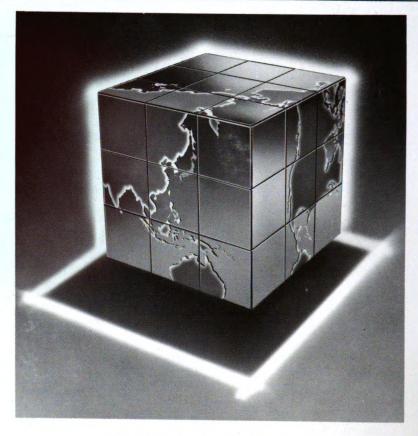
Sumber : Business News 5011/28-9-1990

lembaga non departemen, pemerintah daerah, perguruan tinggi).

(3) Memantapkan Sistem Jaringan Nasional Laboratorium Penguji Bidang Pekerjaan Umum, agar setiap laboratorium penguji mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing, dapat melakukan uji mutu yang benar dan sah.

(4) Memantapkan Sistem Nasional Kalibrasi Bidang Pekerjaan Umum, agar masyarakat pemakai lebih terlindungi dan mutu lebih terjamin.

b) Peneliti dan Pengembangan Teknologi, antara lain :

(1) Penelitian dan pengembangan tata ruang sebagai landasan bagi penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya.

(2) Penelitian dan pengembangan bahan, komponen dan elemen bangunan untuk bangunan pengairan, bangunan jalan dan jembatan, perumahan dan bangunan gedung.

(3) Penelitian dan pengembangan sistem antara lain untuk pengelolaan air bersih, pengolahan air kotor/limbah, pengelolaan prasarana dan sarana, pembinaan transportasi cepat dan massal di perkotaan, optimasi pemanfaatan sumberdaya air, pembinaan jasa konstruksi nasional, pembiayaan dan manajemen.

Daerah aliran sungai perlu dipelihara agar sumber air dapat lestari baik jumlah maupun mutu

c) Penunjang ilmiah kepada pihak-pihak yang memerlukannya, terutama kepada unsur-unsur di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, berupa antara lain: arbitrasi dan appraisal, penyelidikan dan advis teknis, serta pengujian mutu.

d) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, antara lain :

(1) Memantapkan kriteria tentang dampak penting yang negatif.

(2) Memantapkan pedoman umum dan pedoman teknis tentang penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).

(3) Pengamanan realisasi Aspek-aspek Pembangunan Berkelanjutan *(sustainable development)* secara konsisten pada Repelita V sebelum periode tinggal landas.

e) Penyebarluasan hasil-hasil, antara lain melalui pertemuan ilmiah, pembinaan dan bimbingan teknologi, publikasi serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

f) Appraisal bahan bangunan dan peralatan, antara lain : Pemantapan tata cara pengkajian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi :

- bahan/komponen/elemen (BKE) bangunan
- peralatan
- pengerjaan bangunan

g) Katalog PU
Pengaturan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja dengan kemudahan dalam memilih/menentukan/memanfaatkan bahan dan atau peralatan yang telah dikaji keandalan dan kesesuaiannya.

7) Strategi Pengawasan

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum lebih-lebih dengan dicanangkannya peningkatan disiplin nasional sesuai krida kedua Kabinet Pembangunan V, maka dalam Repelita V akan dilakukan langkah-langkah guna membudayakan pengawasan melekat dan pemantapan pengawasan fungsional intern, berikut ini :

a) Mengaktifkan fungsi pengawasan melekat di semua tingkat pimpinan unit, dengan mewajibkan pelaksanaan pengawasan atasan langsung.

b) Meningkatkan pemantauan *(monitoring)* terhadap program dan pelaksanaan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu instruksi Menteri Nomor 16/1983 tentang Pedoman Pengawasan setempat proyek-proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

c) Untuk memantapkan pengawasan fungsional intern, perlu dilanjutkan pengembangan sistem pengawasan dengan mengembangkan dan menerapkan pemeriksaan administratif, operasional, performance (kinerja) dan pemeriksaan program oleh aparat pengawasan fungsional.

d) Melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga aparat pengawasan dengan mengadakan penataran pengawasan melekat, serta pendidikan dan latihan berbagai jenis audit.

8) Strategi Koordinasi dan Kewenangan Penanganan.

Koordinasi dan kewenangan penanganan pembangunan bidang Pekerjaan Umum yang ditempuh Repelita V berdasarkan uraian di atas perlu dikaitkan dengan pelaksanaan asas desentralisasi, di mana urusan tertentu pemerintahan dari pemerintah pusat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan pemerintah daerah yang bersangkutan. Urusan-urusan yang diserahkan tersebut menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan (konstruksi) maupun segi-segi pembiayaan serta perangkat pelaksanaannya.

Tugas-tugas koordinasi dan penanganan hal-hal pembinaan dan pengawasan teknis, dengan Dinas-Dinas Daerah sebagai pihak yang menerima pembinaan dan pengawasan tersebut, akan menjadi titik berat penanganan pembangunan sekaligus merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum selama Repelita V ini.

a) Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis dalam penanganan pembangunan yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum berupa upaya untuk meningkatkan kemampuan Daerah melalui:

(1) Pengikut sertaan Dinas Daerah yang bersangkutan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

(2) Pemberian bantuan fasilitas peralatan pendidikan dan latihan serta tenaga ahli.

(3) Pemberian bimbingan teknis berupa pedoman, standar dan tata cara teknis lainnya.

b) Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis dalam hal ini merupakan upaya yang meliputi pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pelaksanaan (konstruksi) dan pemeliharaan agar pekerjaan-pekerjaan tersebut memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum sehingga sesuai dengan arah pembangunan nasional.

c) Kewenangan Penanganan

Sehubungan dengan PP Nomor 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum ke daerah, maka penanganan Bidang Pekerjaan Umum dalam Repelita V akan diatur penanganannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bidang sebagai berikut:

(1) Bidang Pengairan

(a) Pembangunan Irigasi akan ditangani melalui tugas dekonsentrasi dan desentralisasi, pembangunan sungai dan rawa ditangani melalui tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(b) Dalam rangka meningkatkan penanganan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi yang telah ada, kemampuan kelembagaan yang ada perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini khususnya pembinaan lembaga para petani yang

ada yakni perkumpulan petani pemakai air (P3A) akan makin ditingkatkan. Secara bertahap daerah-daerah irigasi yang lebih kecil dari 500 Ha akan diserahkan pengelolaannya kepada P3A. Bagi daerah irigasi dan reklamasi rawa yang jaringan utamanya masih dikelola pemerintah secara bertahap akan dipungut iuran pelayanan jasa air untuk membiayai operasi pemeliharaannya. Penanganan operasi dan pemeliharaan dapat pula dilaksanakan melalui pembangunan badan pengelolaan terpadu untuk wilayah sungai yang luas dan dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai faktor.

(2) Bidang Bina Marga

(a) Pembinaan bidang jalan berdasarkan UU Nomor 13, 1980 dan PP Nomor 26 tahun 1985 mengenai jalan yang sudah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1974 mengenai desentralisasi:

- Pembinaan jalan Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- Pembinaan jalan Propinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I.
- Pembinaan jalan Kabupaten menjadi tanggun jawab Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten.
- Pembinaan jalan Kotamadya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah Tingkat II/Kotamadya.

(b) Struktur penanganan dalam Repelita V telah mendekati prinsip-prinsip UU Nomor 5 tahun 1974 tentang otonomi Pemerintah di Daerah.

Jalan Nasional

- Perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknik jalan Nasional (APBN) diselenggarakan atas dasar dekonsentrasi oleh Aparatur Kanwil Departemen Pekerjaan Umum. Pada Kanwil-Kanwil tersebut perlu dibentuk Unit-Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- Pengaturan demikian, baik untuk peningkatan jalan dan penggantian jembatan maupun pemeliharaan jalan. Dalam hal tertentu untuk efisiensi, diselenggarakan tugas pembantuan.

Jalan Propinsi

- Perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan untuk peningkatan jalan Propinsi dan Penggantian Jembatan Propinsi (Dana (IPJK) diselenggarakan atas dasar Pekerjaan Umum Propinsi Cq. Proyek-proyeknya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi jalan Propinsi (Dana APBD I) diselenggarakan atas dasar desentralisasi oleh Aparatur Dinas PU Propinsi Cq. Cabang Dinas PU Propinsi.

– Jalan Kabupaten/Kotamadya.

Diselenggarakan atas dasar yang sama dengan jalan Propinsi.

(c) Departemen Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan pembinaan dan pengaturan untuk pelaksanaan baik jalan nasional dan jalan propinsi maupun kabupaten. Khusus untuk jalan propinsi dan jalan kabupaten, pembinaan dan pengaturannya terkoordinir dengan Departemen Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bangda, Bappenas Cq. Deputy Regional dan Daerah, Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Pembinaan dan pengaturan antara lain mencakup pembuatan petunjuk, pedoman dan standar (dalam bidang pemrograman, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peralatan dan sebagainya).

Pengaturan di atas menjadikan jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kotamadya dapat dilaksanakan dengan standar mutu yang sama dan setiap program sudah dialokasikan dana masing-masing.

(3) Bidang Cipta Karya

Pada prinsipnya sebagian besar kegiatan pembangunan, operasi dan pemeliharaan atau penanganan bidang Cipta Karya sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemda Tingkat II dengan bimbingan dan bantuan dari Pemda Tingkat I dan Pemerintah Pusat. Namun demikian mengingat banyaknya kegiatan yang belum ditangani oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat masih memberikan bantuan teknis, stimulan yang diperlukan oleh daerah.

Di tingkat Pusat akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Teknik.

DIRGAHAYU

45

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PT. BANGUN TJIPTA SARANA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54 Jakarta 10260

Phone : 5484907 (16 saluran), Fax. : 549 5221

Telex : 46969 SARANA IA

PT. ARJUNA PLAZA
persewaan perkantoran

PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
kontraktor pelabuhan, irigasi,
dam dan bendungan

PT. BANGUN TIRTA SARANA
rumah mewah dan kolam renang

PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA
real estate dan developer

PT. CIPTA PARAMULA SEJATI
Jakarta design centre

PT. FLORA TJIPTA SARANA
pertamanan dan rumah mewah

PT. HARMONI CIPTA
konsultan arsitektur

PT. LAHAN CIPTA SARANA
kontraktor pembukaan lahan

PT. MARGA SARANA RAYA
kontraktor jalan dan jembatan

PT. PANCURAN AIRMAS LUMINTU
perikanan

PT. REKA DAYA SARANA
industri, pabrikator
dan pekerjaan mekanikal

PT. TUGU VANILLA JAYA
perkebunan

PT. TRICONSDAYA CIPTATAMA
kontraktor gedung & bangunan

PT. SARANA PRATAMA REALINDO
real estate & developer

PT. YUDHA CIPTASARANA
hotel

Forging Leadership, Building Partnerships.

We started with Electric Resistance Welded Steel Pipe in 1960. We pioneered and led steel pipe manufacturing in Indonesia.

In the mid seventies, we developed the capability to produce various casting products such as pipe fittings, automotive parts, diesel parts and electrical accessories.

Our next step was manufacturing corrugated steel sheets, in a joint venture with ARMCO of USA, applicable for culverts, underpasses, guardrails, bridge decks, sheet piles, storage bins and containers.
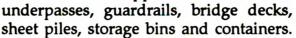
The acquisition of James Hardie Indonesia in 1986, has made us one of the leading manufacturers of fibre-cement building products & pipes in the country.

A joint venture with Transfield of Australia enabled us to fabricate steel structures, bridges, transmission line towers, offshore platforms and many others.

As leaders in the Indonesian industrial market, our products are known for their high quality standards. And being supported by the technological advantages, combined with professional management skills, gives us a leading edge in seeking new solutions to the engineering, procurement and construction field - building the best partnership that you deserve !

For further information please contact
Commercial Department
PT. BAKRIE & BROTHERS
Wisma Bakrie, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920, Indonesia P.O. Box 1191/DAK
Ph. 510192, 510212 Fax. 5200437

- Pengadaan bantuan proyek-proyek bagi kepentingan penduduk berpenghasilan rendah dan menunjang sektor strategis.

- Bangunan Teknis dan Proyek Percontohan.

- Kegiatan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana yang merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat.

9) Strategi Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan.

a) U m u m

Dalam rangka upaya pembangunan bidang Pekerjaan Umum, Repelita V akan diarahkan pada pendayagunaan dan pengembangan secara maksimal seluruh potensi pembangunan dari pada yang ada serta pemanfaatan setiap peluang yang terbuka, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dengan makin ketatnya dana pembangunan yang tersedia terutama dana pembangunan yang ada di tangan pemerintah, maka kebijaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum akan diarahkan untuk makin mendorong dan menggairahkan kemandirian, peranan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu keterbatasan dana pembangunan harus diupayakan agar tidak menjadi kendala yang menghambat laju pembangunan, oleh karena itu dana pembangunan yang terbatas akan dimanfaatkan sehemat dan seefisien mungkin melalui penajaman prioritas, penyempurnaan sistem operasi dan pemeliharaan bagi sarana dan prasarana yang ada serta peningkatan pengawasan pembinaannya.

Dalam Pelita IV menurunnya harga minyak dan keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu sangat mempengaruhi kemampuan penerimaan Negara dari ekspor. Hal ini tercermin dari struktur pembiayaan proyek-proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam Pelita IV, di mana peranan dana Bantuan Luar Negeri sangat dominan yaitu mencapai 86%. Dalam Repelita V pembiayaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum masih memerlukan Bantuan Luar Negeri. Namun diharapkan komposisinya terhadap total pembiayaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum akan menjadi lebih baik, yaitu turun menjadi 56%. Hal ini akan sangat bergantung pada keberhasilan untuk meningkatkan tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan.

b) Penyediaan Dana Pembiayaan

(1) Sebagaimana diuraikan di muka bahwa kebutuhan investasi Bidang Pekerjaan Umum dalam Repelita V ini akan berjumlah ± 34.203 milyar (termasuk dana yang berasal dari sumber-sumber asli daerah). Jumlah kebutuhan ini akan ditutup dari sisa bantuan luar negeri. Pelita IV yang belum dicairkan sebesar Rp. 8.440

Landas Putar Bebas Hambatan (LPBH) Sosrobahu teknologi baru untuk pembangunan jalan pada yang padat lalu lintas

milyar (US$ 4,729.3 juta) sisanya sebesar Rp. 26.680 milyar akan dipenuhi dari bantuan Pemerintah sebesar Rp. 15.453 milyar dan dari bantuan luar negeri sebesar Rp. 11.227 milyar (US$ 6,290 juta).

(2) Kebutuhan dana bantuan luar negeri dalam Repelita V sebesar US$ 6,290 juta yang sebesar US$ 4,232 juta diperkirakan akan dapat dipenuhi dari program-program yang akan dibiayai dari sumber-sumber multilateral dan bilateral sebagai berikut:

Sumber Multilateral:

- Bank Dunia s/d tahun 1991 memproyeksikan jumlah bantuan sebesar US$ 1,479 juta
- Bank Pembangunan Asia s/d tahun 1992 mengindikasikan jumlah sebesar US$ 1,659 juta

Sumber Bilateral:

- OECF s/d tahun 1990 diperkirakan sejumlah US$ 732 juta
- Negara-Negara Lain sebesar ... US$ 453 juta

Sedangkan sisanya sebesar US$ 1,967 juta akan diusulkan programnya untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut di atas.

(3) Kebijaksanaan dalam penyediaan dana bantuan luar negeri dalam Repelita V ini agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

(a) Mendukung usaha menurunkan Dept Service Ratio (DSR) dan mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan jalan:

- Optimasi penggunaan dana bantuan luar negeri.
- Pembiayaan program/proyek yang memiliki faktor-faktor *turn-over* tinggi, *quick yielding, multiplier-effect* tinggi.
- Penanganan yang mantap.

(b) Program/proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri memiliki prioritas tinggi yang mendukung program-program Repelita V bidang Pekerjaan Umum:

- Pemantapan eksploitasi dan pemeliharaan.
- Pendekatan secara sektoral (untuk proyek-proyek Direktorat Jenderal Pengairan dan Direktorat Jenderal Bina Marga, terutama yang berlokasi dan meliputi rural area, dan pendekatan secara regional (untuk proyek-proyek di daerah perkotaan).
- Penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, yang mempunyai kriteria: *quick yielding;* ,andiri *(cost-recovery* tinggi); manfaat proyek tetap dapat dipertahankan meskipun ada pengurangan sebagian lingkup pekerjaan, biaya dan waktu pelaksanaan; *sequential* dengan proyek prioritas lainya sangat tinggi; mempunyai aspek komitment sosial politis tinggi.
- Proyek-proyek baru, yang memiliki peranan meningkatkan penerimaan negara, memberikan hasil yang cepat, optimasi modal/investasi, persyaratan pinjaman yang lunak, mendukung sektor-sektor non-tradisional dan mendorong partisipasi swasta/masyarakat serta diutamakan untuk Indonesia Bagian Timur, selain itu diutamakan program-program yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia dan aspek lingkungan hidup.

(c) Mendukung kefleksibilitasan Pemerintah dalam menggunakan dana bantuan luar negeri, yakni melalui program/proyek-proyek yang bersifat sektoral.

(d) Dalam persyaratan penggunaan dana bantuan luar negeri diusahakan yang memberikan peluang yang semaksimal mungkin untuk penggunaan jasa dan produk dalam negeri.

(e) Pencairan dana bantuan luar negeri diupayakan dapat dilaksanakan secepat mungkin dan agar dapat membantu likuiditas kontraktor-kontraktor di daerah, yakni pembayaran melalui lembaga keuangan di daerah (KPN/KKN, Kantor Cabang Bank Indonesia dan lain-lain).

c) Penggunaan dan Penyerapan Dana Pembiayaan

Pada umumnya penggunaan dan pencairan dana yang berasal dari sumber dalam negeri (APBN, APBD, Inpres dan lain-lain) yang dipakai untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Selain itu porsi dari sumber dana dalam negeri ini relatif kecil dibandingkan degan jumlah dana yang berasal dari bantuan luar negeri. Namun untuk dana bantuan luar negeri penggunaan dan pencairan dananya mengalami pelbagai kesulitan, sehingga dalam Pelita IV yang lalu rata-rata penyerapan dana bantuan luar negeri hanya sebesar ± US$ 698 juta atau 42% dari target.

Di lain pihak dalam Repelita V ini komponen dana bantuan luar negeri naik cukup besar, yakni sebesar US$ 11,018 juta. Dengan demikian jumlah yang harus digunakan dan diserap sebesar rata-rata US$ 2,204 juta per

Jembatan Calender Hamilton – kali Krasak, Jawa Tengah

tahun, yang berarti mengalami kenaikan 3 kali lipat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, penanganan penggunaan dan penyerapan dana pembiayaan pembangunan Repelita V ini perlu diupayakan dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Percepatan dimulainya pelaksanaan proyek bantuan luar negeri dengan jalan antara lain sebagai berikut:

(a) Pekerjaan persiapan proyek (Pembebasan tanah, organisasi, tenaga proyek, dokumen pelelangan dan penelitian kembali data-data teknis di lapangan) dapat dimulai sebelum Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) ditanda tangani.

(b) Dukungan dan persetujuan dari Bappenas dan Departemen Keuangan atas penyusunan DIP untuk proyek bantuan luar negeri yang sudah dapat dipastikan dinegosiasi dan ditanda tangani dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Mendalami dan mematuhi garis-garis kebijaksanaan pemerintah Indonesia dan persyaratan pinjaman (pada guide-line pengadaan jasa konsultan/jasa konstruksi dari negara/badan donor, dan mengupayakan sedini mungkin kesepakatan-kesepakatan dalam penyesuaian perbedaan-perbedaan garis kebijaksanaan antara pemerintah Indonesia dengan Badan/Negara donor. Selain itu diusahakan agar kegiatan-kegiatan pra tender dapat dilakukan dengan cermat dan memaksimalkan usaha tersebut dalam batasan waktu yang tersedia (sebelum NPLN ditanda tangani). Dengan demikian diharapkan proses pengadaan jasa konsultan/jasa konstruksi/barang akan lebih efektif.

(3) Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan monitoring administrasi bantuan luar negeri, antara lain dengan :

(a) Meningkatkan kemampuan staf dalam memahami berbagai prosedur yang berlaku, baik dari pemerintah maupun dari Badan/Negara donor.

(b) Menciptakan dan memantapkan struktur/unit/sistem penatausahaan/administrasi keuangan sumber dana dalam negeri dan dana bantuan luar negeri.

(4) Meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga pelaksana proyek bantuan luar negeri dalam bidang manajemen proyek serta dalam hal kemampuan teknisnya.

(5) Meningkatkan jumlah dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam bidang teknis dan manajemen proyek, termasuk membantu dalam menyediakan sebagian peralatan konstruksi (melalui prosedur sewa) yang diperlukan kontraktor.

(6) Memaksimalkan tersedianya sumber dana rupiah pendamping yang sangat terbatas, yaitu dengan prioritas untuk membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan yang tidak mungkin dihentikan (dari pertimbangan lingkup/komponen proyek maupun keterkaitannya dengan program/proyek lainnya), atau untuk membiayai program/proyek prioritas yang sudah tersedia dana rupiahnya namun belum terikat dengan dana bantuan luar negeri.

10) Strategi Peningkatan Peranan Swasta

a) U m u m

Tugas penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pekerjaan umum pada dasarnya merupakan bagian tugas pemerintah, karena prasarana dan sarana tersebut merupakan fasilitas pekerjaan umum, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan Pemerintah sejak awal Pelita I sangat menonjol dalam mengambil prakarsa maupun dalam pembangunan bidang pekerjaan umum. Pembangunan berencana yang dimulai pada Pelita I secara bertahap telah meningkatkan pula kemampuan swasta serta kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta.

Pada pertengahan Pelita IV berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan oleh Pemerintah di sektor moneter dan sektor riel untuk memberi peluang kepada pihak swasta agar lebih berperan dalam pembangunan. Dilihat dari segi investasi dalam Repelita V, peranan swasta diperkirakan mencapai 55% dari total investasi nasional. Untuk kegiatan bidang pekerjaan umum peran swasta adalah sebagai mitra pembangunan dan sebagai investor.

b) Peran Swasta Sebagai Mitra Pemerintah dalam Pembangunan

Peranan swasta sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan bidang pekerjaan umum, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan prasarana dan sarana fisik ke-PU-an, terlihat dengan makin berkembangnya kontraktor, konsultan dan unit-unit dalam bidang usaha jasa konstruksi lain. Manfaat yang diperoleh dengan makin meningkatnya peranan swasta sebagai mitra antara lain:

- Menciptakan lapangan kerja, baik untuk tenaga kerja terlatih maupun tidak terlatih.
- Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
- Secara tidak langsung mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain.
- Memberikan sumbangan pada peningkatan Product Domestic Regional Bruto.

Untuk meningkatkan kemampuan kontraktor nasional ini, pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pembinaan antara lain :

- Pembinaan peralatan, bertujuan mengupayakan kemudahan peralatan untuk kontraktor nasional.
- Pembinaan tenaga kerja, bertujuan melakukan usaha untuk mendapatkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
- Pembinaan teknologi, bertujuan untuk mengusahakan alih teknologi yang diperlukan oleh masyarakat.

c) Peran Swasta Sebagai Investor

Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat memungkinkan pembangunan bidang pekerjaan umum mengikut sertakan peran swasta dalam penyediaan modal untuk investasi. Sebagai contoh bidang kegiatan yang menjadi peluang bagi keikut-sertaan swasta adalah: perumahan, jalan tol, pengelolaan limbah domestik (persampahan), dan penyediaan air bersih pada daerah-daerah tertentu, khususnya daerah pemukiman *real estate* berskala ekonominya telah memungkinkan. Pembangunan kawasan pemukiman yang luas seperti Bumi Serpong Damai, tentunya akan banyak melibatkan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang menggunakan modal swasta.
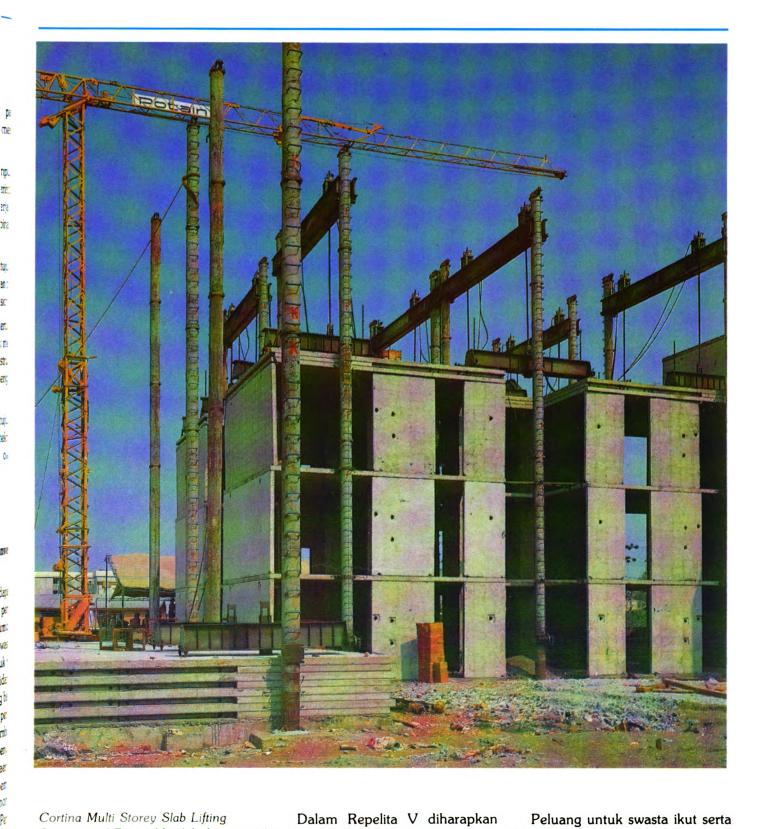
Cortina Multi Storey Slab Lifting System — (Foto : Majalah Jayapatra)

Dalam Repelita V diharapkan peluang-peluang ini dapat terus dikembangkan. Namun demikian pemerintah selain memberikan peluang kepada swasta perlu juga mengendalikan pembangunannya, agar tidak terjadi pertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Peluang untuk swasta ikut serta dalam pembangunan bidang pekerjaan umum lebih ditekankan pada tujuan utamanya yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut pelayanan umum bagi masyarakat.

JMM *Corporation Summary*

FY 90 to FY 94
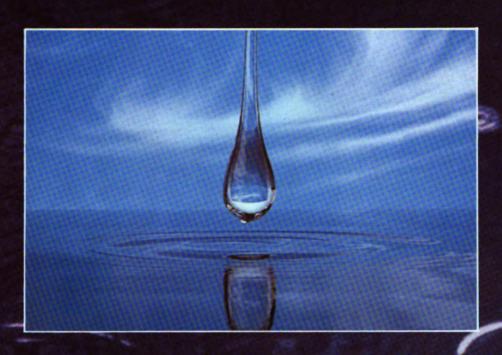
Industrial and Hazardous Waste Management

- Waste Minimization
- Closure Plans
- Environmental Audits
- Remedial Investigations
- Feasibility Studies
- Remedial Design
- Risk Assessment
- Industrial Water and Wastewater Treatment
- Radioactive and Mixed Waste Management

Water Treatment and Supply

- Treatment Plant Design
- Advanced Water Treatment
- Water Quality Studies
- Water Quality and Treatment Research
- Treated Water Storage
- Water Distribution
- Sludge Treatment and Disposal
- Financial Studies
- Demineralization

Wastewater Management

- Wastewater Treatment
- Wastewater Reclamation and Reuse
- Sludge Stabilization and Dewatering
- Odor Control
- Sludge Disposal/Reuse
- Collection Systems
- Rate Studies
- Ocean Outfalls
- Combined Sewer Overflow
- Infiltration/Inflow Studies
- Energy Recovery

Environmental Services

- EIS and EA Studies
- Audits
- Baseline Studies
- Mining Siting, Operation, Reclamation, Design and Closure
- Air Quality Studies
- Automated Mapping
- Applied Research

Program Management

- Scheduling
- Management
- Planning
- Cost Control
- Design Standardization
- Claims Control
- Public Relations
- Management Information Systems
- Contracts Control
- Construction Management

Laboratory Analysis

- Complete Drinking Water Analysis
- Wastewater and Hazardous Waste Analysis
- Laboratory Design
- Toxicological Testing
- Asbestos Identification by Transmission Electron Microscope

Water Resources Management

- Exploration
- Planning
- Modeling
- Large Transmission Lines

Aquaculture and Aquariums

- Hatcheries
- Aquaculture
- Aquarium Program Management
- Exhibit Tankage
- Zoological Exhibits
- Life Support Systems

Operations and Maintenance

- Contract Operations and Maintenance
- Operations Training
- Safety Programs
- Operations Manuals
- Energy Audits
- Computerized Maintenance Management Systems

Corporate Headquaters
James M. Montgomery Consulting Engineers Inc.
250 North Madison Avenue
Pasadena, California 91101
Tele[illegible] 796-9141
[illegible]

JMM James M. Montgomery
Consulting Engineers, Inc.

TIRTA PHALA III 1350 MM

POMPA AXIAL, TYPE VERTICAL

AXIAL FLOW PUMP. VERTICAL TYPE

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

JASA KONSTRUKSI

1. Peranan sektor jasa konstruksi dalam pembangunan adalah sangat penting, mengingat hampir 50% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan investasi swasta diserap oleh sektor jasa konstruksi. Sektor Jasa Konstruksi juga mempunyai peran sebagai penghasil bangunan yang umumnya berupa sarana dan prasarana, penyumbang terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, pendorong bertumbuhnya sektor yang lain, serta sebagai media pengalihan, segmen tradisional ke segmen modern dalam pembangunan.

Mengingat peranannya yang strategis itu, Pemerintah telah melakukan usaha pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi dengan maksud agar dapat menumbuhkannya dan berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan mitra pembangunan yang tangguh.

Jalan layang kereta api Jakarta dalam tahap Pelaksanaan — (Foto : PT. Nindya Karya)
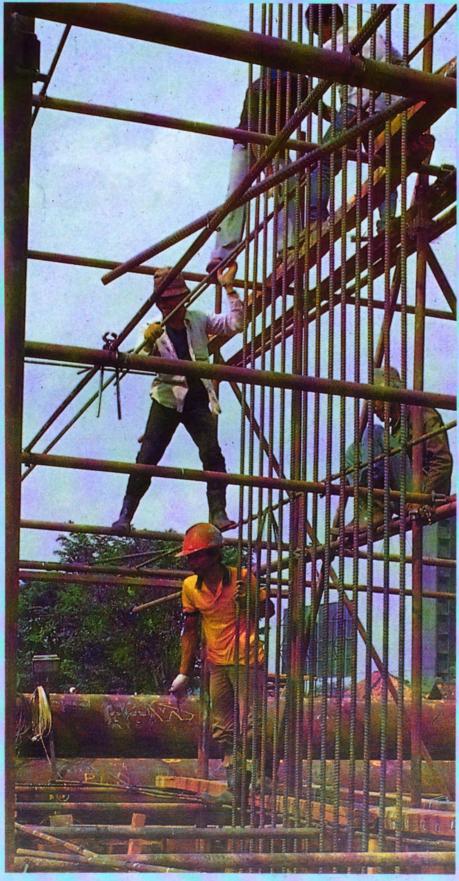
Partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan komponen bangunan

2. Usaha pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi telah lama dirintis dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, terutama sejak diadakannya Seminar Tertib Pembangunan pada tahun 1968 dalam menyongsong pelaksanaan Repelita. Berbagai studi dan observasi telah pula dilakukan. Berbagai persoalan mengenai dunia usaha jasa konstruksi nasional telah diidentifikasikan sebagai hambatan utama dalam memenuhi peranan yang diharapkan, antara lain :

a) kelemahan dalam keterampilan managerial;

b) kekurangan tenaga terampil di seluruh tingkatan;

c) kelemahan dalam keterampilan kewiraswastaan untuk mengelola perusahaan serta pelaksanaan kontrak;

d) kelemahan dalam permodalan atau keterbatasan dalam mendapatkan fasilitas kredit;

e) resiko tidak berkesinambungan kegiatan, karena penyebaran program pembangunan yang cukup bervariasi, dan sebagainya.

3. Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor $\frac{65/KPB/III/1987}{109/KPTS/1987}$ tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 139/KPTS/1988 menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan tentang izin usaha jasa konstruksi. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah surat yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pe-

jabat yang ditunjuk, dengan tujuan untuk :

(a) menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional;

(b) menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;

(c) adanya kepastian keandalan perusahaan;

(d) meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;

(e) menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik;

(f) menjamin mutu hasil produksi/kerja, sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;

(g) meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;

(h) menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi.

Dengan adanya surat izin usaha jasa konstruksi ini, maka surat izin usaha perdagangan (SIUP) di bidang jasa konstruksi tetap berlaku sampai dengan 1 April 1988 dan selanjutnya berlaku SIUJK untuk masa 5 tahun yang dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah orang atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) yang terdiri dari bidang pekerjaan bangunan gedung, bangunan sipil, bangunan mekanikal dan bangunan elektrikal. Untuk mendapatkan perusahaan yang andal atau memiliki tingkat kemampuan profesional tertentu diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyaring tingkat keandalannya. Pemberian izin usha, prakwalifikasi, penghitungan sisa kemampuan nyata perusahaan dan pelelangan adalah simpul-simpul kegiatan yang merupakan sarana penyaring keandalan perusahaan.

4. Selain dengan SIUJK, usaha pembinaan jasa konstruksi juga dilakukan melalui jalan latihan, telah lama dirintis dan telah banyak dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum yakni oleh PUSDIKLAT Pegawai, Proyek Perencanaan dan Pembinaan Industri Konstruksi (PERBINIKON) dan CDME *(Construction Development for The Middle East*/Proyek Pengembangan Ekspor Jasa Konstruksi serta oleh Pusat Pembinaan dan Latihan Jasa Konstruksi (PUSBINLAT). Kelompok sasaran pelatihan dan keterampilan jasa konstruksi adalah perusahaan jasa konstruksi, perusahaan penyedia alat dan bahan konstruksi serta tenaga-tenaga kerja konstruksi. Materi latihan yang dilakukan antara lain adalah materi latihan untuk mandor, kontraktor kecil, kontraktor sedang, kontraktor besar, pelaksana lapangan, pengawas lapangan, akuntansi dan penyusunan usulan teknis bagi konsultan serta latihan keterampilan untuk tukang/sektor informal.

5. Mengenai permodalan, Departemen Pekerjaan Umum telah mendorong tumbuhnya perhatian fihak perbankan dalam menyederhanakan prosedur dan jaminan-jaminan bank, mendorong asuransi (PT. Asuransi Jasa Raharja) dalam pelaksanaan program-program *surety bond* baik berupa jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka kerja dan lain-lain. Pemerintah juga telah mendorong tumbuhnya perusahaan patungan baik berupa *joint operation* ataupun *joint ventures* antar perusahaan nasional maupun dengan perusahaan jasa konstruksi asing.

Direksi beserta Karyawan Mengucapkan Selamat Hari Kebaktian Dep. PU. Ke - 45
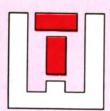
PT. TUJU WALI-WALI

GENERAL CONTRACTOR

Jalan Urip Sumoharjo No. 188 Telpon (0411) 316117 - 316118 - 316185 - 318689
Ujung Pandang - 90232 - Sulawesi Selatan Indonesia

CV. TAUFIK

UBIN BETON - BATU TELA - LEVERANSIR - KONTRAKTOR

Jln. Abe Tasangkapura 87 Telpone 22905 - 31781
JAYAPURA - IRIAN JAYA

Banker : B.R.I. Cab. Jayapura
EXIM Cab. Jayapura
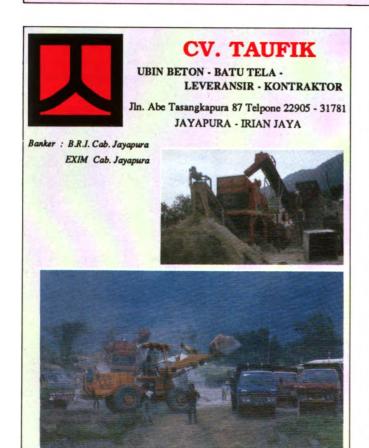
P.T. SKYLINE KURNIA

JLN. PERDAGANGAN NO. 5 - 7
JAYAPURA - IRIAN JAYA

Dirgahayu

Hari Bhakti

Pekerjaan Umum ke 45
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990

BUILDING
WATER TECHNOLOGY
Water is vital to human health,
vital to the environment and essential to industry.
Organic membrane ultrafiltration,
biological processes meeting the changing needs
and specificity of all types of water and uses:
from the laboratory to their application
in all regions of the globe, Degrémont creates,
develops and builds the technology that makes
it the reference in all water treatment.
Degrémont
THE WATER REFERENCE
p.t. Tirta Degremont
Jl. K.H. Wahid Hasyim no. 78 – Jakarta 10340 Telex 44153 INDSCO IA
Macrophotograph of ultrafiltration membranes
Toulouse Research Laboratory
saphir

9. Struktur dan Sasaran Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Dalam Repelita V.

Dengan memperhatikan timbulnya berbagai kendala dan keterbatasan yang selalu muncul pada setiap tahun anggaran, berupa terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta kemampuan pelaksana, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk menentukan prioritas penanganan program sebagai berikut :

1) Pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum untuk menunjang sektor-sektor nasional dan terciptanya lapangan kerja dengan prioritas sebagai berikut :
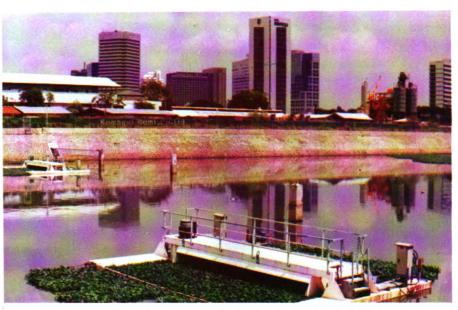
Waduk Setiabudi yang dirubah fungsinya dari waduk penampungan air hujan menjadi waduk penampungan air limbah rumah tangga dan industri rumahan (home industry)

Daerah permukiman kumuh Bangunrejo, Surabaya setelah diremajakan dan dihuni oleh penduduk lama kembali.

a) Untuk prasarana dan sarana yang sudah selesai dilaksanakan diusahakan untuk tetap mempertahankan dan mengamankan kondisi prasarana dan sarana tersebut agar tetap berfungsi secara optimal, dengan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memadai. Selain peranan pemerintah diusahakan pula partisipasi masyarakat dalam menangani operasi dan pemeliharaan tersebut.

b) Untuk pembangunan prasarana dan sarana yang sedang dilaksanakan, diusahakan agar dapat segera menyelesaikan proyek-proyek tersebut secepatnya agar segera berfungsi.

c) Bagi proyek-proyek yang belum dilaksanakan tetapi sangat perlu dalam menunjang pengembangan sektor-sektor prioritas nasional, akan ditangani secara selektif dan diusahakan agar dapat berfungsi secara bertahap.

d) Mengusahakan terciptanya lapangan kerja melalui proyek-proyek padat karya.

e) Proyek-proyek yang dianggap perlu namun belum merupakan prioritas utama, akan ditangani persiapan desainnya.

f) Meningkatkan keikut-sertaan swasta atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum.

2) Meningkatkan kemampuan para pelaksana pembangunan yaitu para aparatur pemerintah, para kontraktor/konsultan sebagai mitra usaha dan masyarakat, dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah melalui pendidikan, kursus, dan latihan-latihan baik di dalam maupun di luar negeri.

b) Membina dunia usaha dengan meningkatkan kemampuan kontraktor/konsultan nasional di bidang pengelolaan proyek dan meningkatkan daya saing terhadap kontraktor/konsultan asing. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap tugas-tugasnya dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.

3) Meningkatkan kesadaran hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi para pelaksana pembangunan dengan antara lain :

a) Meningkatkan pengawasan me lekat.

b) Meningkatkan ketaatan terhadap administrasi.

c) Meningkatkan ketaatan terhadap rencana dan program.

d) Meningkatkan ketaatan untuk melaksanakan usaha efisiensi dalam pelaksanaan.

4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, untuk meningkatkan mutu pekerjaan, dengan menerapkan metode dan ilmu pengetahuan yang lebih modern.

Sasaran dan Pembiayaan Program

Kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum ditetapkan sesuai dengan sasaran program, kemajuan pelaksanaan dan ketersediaan biaya serta prioritas penanganan pembangunan yang telah ditetapkan dalam GBHN dan Repelita Nasional.

Selama Pelita V, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah sebesar 5% per tahun, hal mana untuk menunjang tercapainya sasaran pertumbuhan tersebut, diperlukan investasi yang cukup besar.

Dana investasi tersebut harus disediakan dari berbagai sumber, baik sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri. Sumber luar negeri secara keseluruhan harus tetap merupakan pelengkap bagi sumber dana pembangunan dalam negeri.

Dalam Repelita V, total investasi yang diperlukan adalah Rp. 239,1 trilyun yang terdiri dari 45% investasi pemerintah, yaitu sebesar Rp. 107,5 trilyun, dan 55% investasi lainnya termasuk swasta dan masyarakat. Jumlah investasi ini diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ratarata 5% dalam Pelita V.

Kebutuhan Anggaran Pembangunan dalam Pelita V bidang pekerjaan umum diperkirakan sebesar Rp. 34.203 milyar yang terdiri dari bidang pengairan sebesar Rp. 7.371 milyar, bidang bina marga sebesar Rp. 16.580 milyar, bidang cipta karya sebesar Rp. 9.870 milyar, bidang pengaturan dan pembinaan sebesar Rp. 170 milyar, bidang pengawasan sebesr Rp. 12,1 milyar dan bidang penelitian dan pengembangan sebesar Rp. 200 milyar. Kebutuhan anggaran ini terdiri dari anggaran pusat Rp. 26.464 milyar dan daerah sebesar Rp. 7.799 milyar.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, alokasi dana bidang pekerjaan umum tersebut, diusahakan bersumber dari dana rupiah, yang terjadi atas rupiah murni maupun dana rupiah yang berasal dari pinjaman luar negeri. Selain dana rupiah, sumber dana lainnya
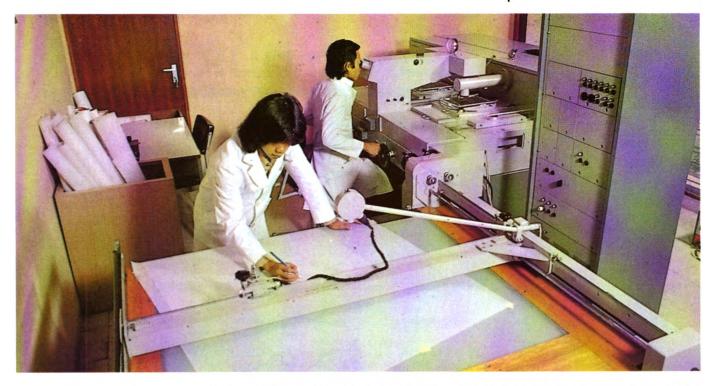
Kegiatan pra konstruksi dilakukan oleh tenaga-tenaga terampil dengan peralatan mutakhir

(Foto: booklef PT. EXSA INT)

adalah bantuan proyek yang berasal dari bantuan/pinjaman luar negeri atas dasar kerja sama baik multilateral maupun bilateral.

Secara garis besar sasaran dan pembiayaan untuk masing-masing program bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pengaturan dan Pembinaan

Dengan didukung oleh serangkaian program non fisik, di bidang pengaturan dan pembinaan akan dicapai sasaran peningkatan peranan dan fungsi administrasi agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum mau pun antar departemen.

Dana yang dibutuhkan dalam Repelita V untuk mencapai sasaran yang berkaitan dengan bidang pengaturan dan pembinaan tersebut sebesar Rp. 170.004 juta.

Dana untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan bagi kegiatan pada program sebagai berikut :

a) Program Pendidikan Apratur Pemerintah

Melaksanakan kegiatan peningkatan kecerdasan, ketrampilan, serta keahlian pegawai dalam melaksanakan fungsi manajemen yang meliputi : penyusunan manual/juklak pengaturan, kepegawaian, penataan perencanaan dan peningkatan tenaga kerja, serta peningkatan tatalaksana organisasi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Dana untuk Repelita V direncanakan sebesar Rp. 96.674 juta.

We congratulate Departemen Pekerjaan Umum for its 45 years of service to our beloved country,

PT Citra Buana Beton Perkasa

Foundation Engineering and Contractor
Concrete Construction Material Manufacturing
Prestressed Concrete Pile
Pretressed Sheet Pile
Precast Concrete Pile
Slab, Curbs
Other concrete product besed on requirement

MENARA BDN, Jalan Kebon Sirih 83, Jakarta 10340
Telephone 380.0129, Faximile 380.2752

b) Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan kriteria dan standar perencanaan proyek-proyek, pelaksanaan, penilaian dampak lingkungan hidup pembangunan, pengumpulan data sektoral, dan model kebutuhan bangunan serta sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik, pengintegrasian sistem informasi dan komputerisasi

Dana untuk Repelita V direncanakan sebesar Rp. 504 juta.

c) Program Penelitian Aparatur Pemerintah

Melalui program ini akan ditingkatkan penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen yang dapat menunjang koordinasi dan sinkronisasi dalam segala aspek pembangunan.

Rencana Pendanaan dalam Repelita V meliputi Rp. 14.071 juta.

d) Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

Menciptakan mekanisme, proses dan prosedur yang efisien dan efektif dalam rangka penyuluhan rencana pelaksanaan, pengendalian serta meningkatkan ketatalaksanaan pembangunan.

Direncanakan dana untuk program ini dalam Repelita V akan mencapai Rp. 25.922 juta.

e) Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan sarana kerja Kanwil, dan Kantor Pusat, serta peningkatan/penambahan fasilitas kerja, guna dapat produktivitas kerja.

Direncanakan dan untuk program ini dalam Repelita V akan mencapai Rp. 32.833 juta.

f) Program Pengembangan Usaha Koperasi

Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut :

- Membantu peningkatan dan pengembangan koperasi fungsional seperti koperasi karyawan, koperasi wanita dan lain sebagainya agar senantiasa selaras dengan perkembangan koperasi lainnya.
- Membantu peningkatan dan pengembangan kerja sama dan jalinan usaha antara koperasi dan antara koperasi dengan Perusahaan Negara dan Swasta.

Direncanakan dana untuk program ini dalam Repelita V sebesar Rp. 330 juta.

g) Program Peranan Wanita

Untuk memperluas kesempatan kerja wanita, latihan ketrampilan tidak akan dibatasi pada lapangan kerja tradisional untuk wanita, tetapi akan diperluas ke bidang-bidang konstruksi, transportasi dan lain-lain bidang yang sebelumnya hanya dianggap sesuai untuk pria. Namun demikian, dalam menyalurkan jenis lapangan kerja yang makin luas, tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabat wanita Indonesia.

Sejalan dengan upaya peningkatan kesempatan kerja wanita, akan ditinjau juga kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita, terutama yang berpenghasilan rendah.

Direncanakan dana untuk program ini dalam Repelita V sebesar Rp. 280 juta.

2) Bidang Pengawasan

Sasaran bidang pengawasan adalah mengamankan semua kebijaksanaan nasional antara lain GBHN, Pasca Krida Kabinet Pembangunan V, Kebijaksanaan Departemen Pekerjaan Umum serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, mencegah atau menemukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan dalam tugas-tugas pengaturan, pembinaan dan pembangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Biaya yang diperlukan untuk menunjang pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 12.101 juta.

Pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan dalam Repelita V dialokasikan dalam program-program sebagai berikut :

a) Program Penyempurnaan efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

Memeriksa kegiatan pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang meliputi pemeriksaan administrasi, operasional maupun usaha ke arah peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan hasil pelaksanaan proyek.

Direncanakan dana program ini dalam Repelita V adalah sebesar Rp. 8.381 juta.

b) Program Penelitian Aparatur Pemerintah

Mengembangkan sistem pengawasan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

Direncanakan dana program ini dalam Repelita V adalah sebesar Rp. 569 juta.

c) Program Pendidikan Aparatur Pemerintah

Meningkatkan kemampuan personalia aparatur pengawasan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar dan dilandasi sikap serta semangat pengabdian yang tinggi.

Dana program ini dalam Repelita V direncanakan sebesar Rp. 3.151 juta.

3) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Melalui bidang ini akan ditunjang berbagai pelaksanaan kegiatan penanggulangan di berbagai bidang dan mengadakan berbagai perangkat lunak di bidang pekerjaan umum.

Kegiatan Diklat

pelaksana teknik
c.v. KARYA PELITA
BIDANG USAHA : BANGUNAN GEDUNG, IRIGASI, JALAN, JEMBATAN, DLL.
JALAN TULANG BAWANG 31 TELP. 21470 METRO LAMPUNG TENGAH

PT. BATRA TERUNA UTAMA
KANTOR : JL. JATINEGARA BARAT I NO. 25 JAKARTA 13310
TELEPON : 8199011 - 819866 FAX. 8196115 PO. BOX. 116 JNG. 13001

PELAKSANAAN AMDAL
DI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka *Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986* di Departemen Pekerjaan Umum telah dibentuk Komisi Pusat AMDAL bidang Pekerjaan Umum dengan Ketua Kepala Badan Litbang yang berupaya menekan dampak negatif sekecil mungkin dengan cara pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, atau pembangunan yang berkelanjutan yang harus diperhatikan dalam penelaahan awal bukan saja segi teknis dan segi ekonomi, tetapi terutama segi-segi lingkungan hidup yang lengkap tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 265/-KPTS/1989, sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai cara-cara Pengelolaan Lingkungan Hidup.
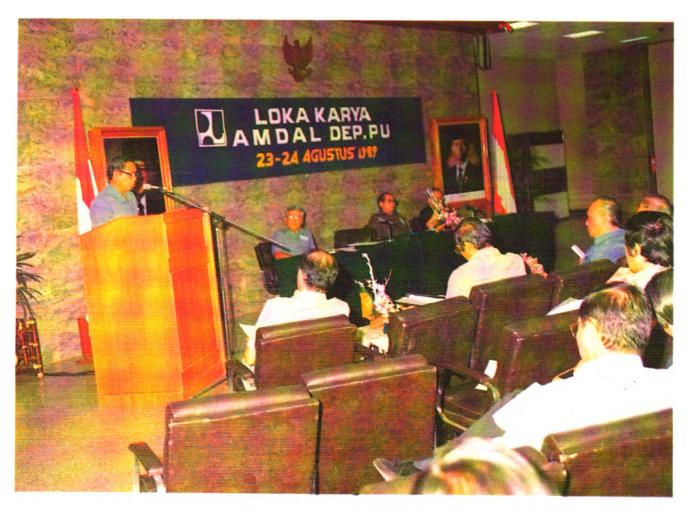
Sekretaris Jenderal PU Ir. Salmon Kodijat memberikan kata sambutan pada Lokakarya AMDAL di Dep. PU

Dana yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan ini sebesar Rp. 199.253 juta.

Pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan dalam Repelita V dialokasikan dalam program sebagai berikut :

a) Program Penelitian Pertanian dan Pengairan

Melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan perencanaan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber air, pemasangan dan observasi instalasi jaringan hidrologi dan hidrometri.

Direncanakan dana untuk program ini meliputi Rp. 38.208 juta.

b) Program Penelitian Perhu bungan dan Pariwisata

Menangani kegiatan-kegiatan penelitian bahan jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan mutu jalan dan jembatan, perencanaan teknis, studi kelayakan jalan dan jembatan bagi jalan-jalan arteri, kolektor dan pembangunan jalan baru.

Direncanakan dana untuk program ini sebesar Rp. 19.978 juta.

c) Program Penelitian Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Program ini meliputi penelitian dan pengembangan bangunan gedung dan pemukiman serta penelitian dan pengembangan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Direncanakan dana untuk program ini sebesar Rp. 40.106 juta.

d) Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Melakukan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang usaha pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam pemukiman, jalan, pelestarian sumber air untuk kebutuhan pemukiman produksi pangan dan industri serta usaha pengembangan industri bahan bangunan dalam bentuk penyebarluasan informasi, industri bahan bangunan.

Direncanakan dana untuk program ini sebesar Rp. 28.395 juta.

e) Program Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Melaksanakan kegiatan-kegiatan berbagai studi, seperti penelitian potensi sumber-sumber air dan kebutuhan air guna berbagai keperluan dalam rangka pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Direncanakan dana untuk program ini sebesar Rp. 67.927 juta.

f) Program Pendidikan Aparatur Pemerintah

Dalam program ini akan dilakukan pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga peneliti, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan.

Direncanakan dana untuk program ini sebesar Rp. 4.644 juta.

4) Bidang Pengairan

Dalam Sub Sektor Pengairan, program yang langsung menunjang peningkatan pertanian terdiri atas Program Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan, Program Pembangunan Jaringan Irigasi dan Program Pengembangan Daerah Rawa.

Untuk mendukung usaha peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan, kemampuan jaringan pengairan harus dipelihara dan ditingkatkan.

Usaha-usaha perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan pengairan dimaksudkan untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan serta menjaga tingkat pelayanan jaringan yang telah ada untuk mendukung usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian.

a) Program Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan

Jaringan irigasi dan reklamasi rawa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan mencakup areal seluas 5,8 juta ha. dan sebagian dari jaringan tersebut memerlukan pemeliharaan khusus seluas 775.000 ha. sebelum dikenakan kegiatan operasi dan pemeliharaan dari seluruhnya seluas 2.328.400 ha.

Eksploitasi dan pemeliharaan sebagian jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha. akan diserahkan pada P3A dari jumlah seluruhnya seluas 250.000 ha. Sedangkan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan fisik jaringan irigasi akan meliputi luas 334.300 ha dan tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian sasaran sebagaimana dikemukakan di atas, selama 5 tahun dibutuhkan dana sebesar Rp. 2.287.800 juta.

b) Program Pembangunan Jaringan Irigasi

Dalam Repelita V akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru mencakup areal seluas 500.000 ha, terutama di luar Jawa baik berupa jaringan irigasi kecil dan sedang dengan pertimbangan kesesuaian lingkungan dan kepentingan pengembangan wilayah untuk mendukung transmigrasi, peternakan dan pertambakan, termasuk pembangunan waduk-waduk lapangan (embung) di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Kebutuhan dana untuk menangani program ini sebesar Rp. 3.112.700 juta.

c) Program Pengembangan Daerah Rawa

Usaha perluasan areal pertanian juga terus dikembangkan dengan memanfaatkan lahan rawa pasang surut dan rawa bukan pasang surut, yang dipadukan dengan transmigrasi dan pemukiman serta mendukung usaha diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Sasaran peningkatan kemampuan jaringan reklamasi akan dilaksanakan di atas areal seluas 444.200 ha, sedangkan untuk mendukung pengairan tambak meliputi areal seluas 60.000 ha dan pembangunan jaringan baru pertambakan mencakup areal seluas 10.000 ha.

Kebutuhan dana untuk menangani program ini sebesar Rp. 938. 800 juta.

d) Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air

Dalam program ini usaha-usaha pengembangan wilayah sungai ditujukan untuk mengembangkan potensi sumber daya air dan untuk mengamankan daerah produksi pertanian dan industri, pemukiman terhadap gangguan banjir.

Kegiatan program ini antara lain melalui pembangunan waduk-waduk besar untuk pengendalian banjir, menyediakan bangunan tenaga listrik dan jaringan irigasi. Selain itu perlu dilanjutkan pula penanganan sungai-sungai besar seperti Cimanuk, Bengawan Solo, Brantas, Arakundo, Krueng Aceh, Bah Bolon dan pengendalian banjir pada kota-kota besar seperti Jakarta, Ujung Pandang dan sebagainya. Daerah-daerah pertanian dan perkotaan yang akan diamankan meliputi areal seluas 450.000 ha.

Kebutuhan dana selama Repelita V meliputi Rp. 919.700 juta.

e) Program Pembinaan Daerah Pantai.

Secara kuantitatif sasaran yang akan dicapai meliputi: pengendalian pantai sepanjang 20 km dan mengamankan daerah pantai seluas 1.300 ha, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 36.400 juta.

f) Program Pendidikan Pertanian dan Pengairan

Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pembangunan pengairan yang dilakukan melalui pendidikan dan latihan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 24.200 juta.

g) Program Penelitian Pertanian dan Pengairan

Sasaran program ini adalah untuk menunjang perencanaan program pengairan, sehingga dapat memanfaatkan perencanaan air dan sumber-sumber air bagi kepentingan penghidupan dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi: usaha penelitian, pengembangan dan evaluasi dibidang pengairan, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 51.000 juta.

5) Bidang Bina Marga

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dalam Repelita V Bidang Bina Marga mentargetkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Jalan Nasional sesuai dengan status pada akhir Pelita IV direncanakan kondisinya menjadi mantap seluruhnya (100%) pada akhir Repelita V.
- Jalan Propinsi sesuai dengan status pada akhir Pelita IV direncanakan kondisinya menjadi mantap seluruhnya (100%) pada akhir Repelita V.
- Jalan Kabupaten direncanakan pada akhir Repelita V ± 45% menjadi mantap.

Untuk mencapai sasaran tersebut akan dilakukan kegiatan-kegiatan dengan program-program :

a) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Secara kuantitatif sasaran program ini dalam Repelita V adalah untuk merehabilitasi dan memelihara jalan sepanjang 188.010 km dan jembatan 149.100 m yang mencakup jalan nasional (66.684 km) dan propinsi (121.328 km) serta jalan kotamadya 68.950 km dan jalan kabupaten 323.500 km.

Dana yang disediakan dari sub sektor prasarana jalan adalah sebesar Rp. 2.677.400 juta.

b) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap untuk memenuhi pertumbuhan lalu lintas yang meningkat dengan masa pelayanan 5 s/d 10 tahun. Dalam Repelita V program ini merupakan program utama di bidang jalan dan jembatan dan akan mencakup jalan sepanjang 71.050 km yang terdiri atas jalan nasional dan propinsi (24.800 km), jalan kotamadya (1.100 km), jalan kabupaten (45.150 km) dan jembatan sepanjang 149.000 m yang terdiri atas jembatan nasional dan propinsi (54.000 m), jembatan kotamadya (15.000 m), dan jembatan kabupaten (80.000 m).

Dana yang disediakan dari subsektor prasarana jalan adalah sebesar Rp. 7.640.300 juta.

c) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran program fisik ini dalam Repelita V adalah membangun jalan baru sepanjang 1.139 km yang terdiri dari jalan Arteri sepanjang 500 km, dan jembatan 4.200 m jalan Kota sepanjang 344 km dan jalan Tol 295 km.

Dana yang disediakan dari sub sektor prasarana jalan adalah sebesar Rp. 1.586.400 juta (di luar kebutuhan jalan Tol).
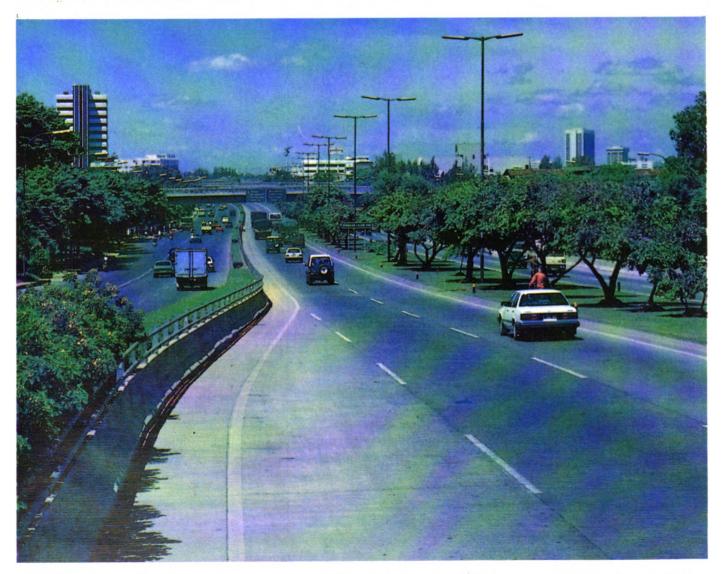
Jalan dan Jembatan Penyeberangan di salah satu sudut Jakarta
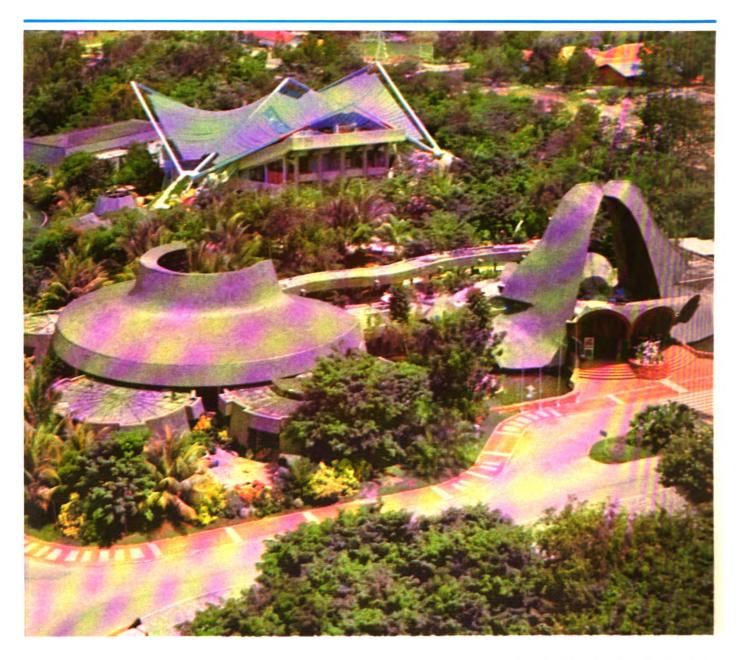
Kawasan Wisata Ancol – Jakarta

d) Program Pendidikan Perhubungan, Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para tenaga teknis dan non teknis di bidang jalan dan jembatan dengan latihan-latihan di tingkat pusat dan daerah, upaya peningkatan pendayagunaan di bidang aparatur negara, dibutuhkan dana sebesar Rp. 75.000 juta.

Selain dana yang disediakan dari sub sektor prasarana jalan dan sub sektor pendidikan kedinasan tersedia pula dana lainnya, yaitu dari sub sektor pembangunan daerah, desa dan kota yang meliputi:

a) Program Pembangunan Daerah Tingkat I yang diperkirakan sebesar Rp. 2.789.600 juta, yang dapat digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan propinsi dan untuk program peningkatan jalan dan penggantian jembatan yang urusannya telah diserahkan kepada Pemda Tingkat I sehingga kondisi jalan propinsi yang mantap meningkat dari 57% pada akhir Pelita IV menjadi 79,9% pada akhir Repelita V.

b) Program Pembangunan Daerah Tingkat II yang diperkirakan sebesar Rp. 1.821.570 juta, yaitu untuk operasi dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Kotamadya dan untuk peningkatan jalan dan penggantian jembatan, sehingga jalan tersebut yang beraspal dapat ditingkatkan dari 28,6% pada akhir Pelita IV menjadi 55,7% pada akhir Repelita V.

6) Bidang Cipta Karya

a) Program Perumahan Rakyat.

(1) Pembangunan Rumah Sederhana.

Dalam Repelita V akan dibangun sekitar 450.000 unit rumah sederhana berbagai type termasuk KSB, dengan perincian 300.000 unit (67%) type kecil (36 m² dan lebih kecil) 100.000 unit (22%) type besar (42²m, 54 m² m dan 73 m² m), serta 50.000 unit (11%) KSB (Kapling Siap Bangun), dengan luas kapling 54 m² dan 72 m²

Dari 450.000 unit rumah sederhana tersebut 120.000 unit akan disediakan oleh PERUMNAS dan 330.000 unit oleh swasta. Dan yang diperlukan sebesar Rp. 720.500 juta yang merupakan subsidi dan pinjaman bagi PERUMNAS maupun developer swasta.

Selain pembangunan rumah sederhana pemerintah juga menyediakan rumah sewa sederhana sebanyak 20.000 unit dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.500 juta.

(2) Pemugaran Perumahan Pedesaan

Upaya pemugaran dan penyuluhan yang intensif akan dilaksanakan di sekitar 20.000 lokasi desa, termasuk 1.000 desa pusat pertumbuhan dan pengembangan mandiri diharapkan dapat memugar 300.000 rumah desa beserta perbaikan lingkungannya. Dana yang diperlukan sebesar Rp. 300.000 juta.

(3) Perbaikan Kampung di Lingkungan Pasar

Sasaran kegiatan perbaikan kampung akan dilaksanakan di sekitar
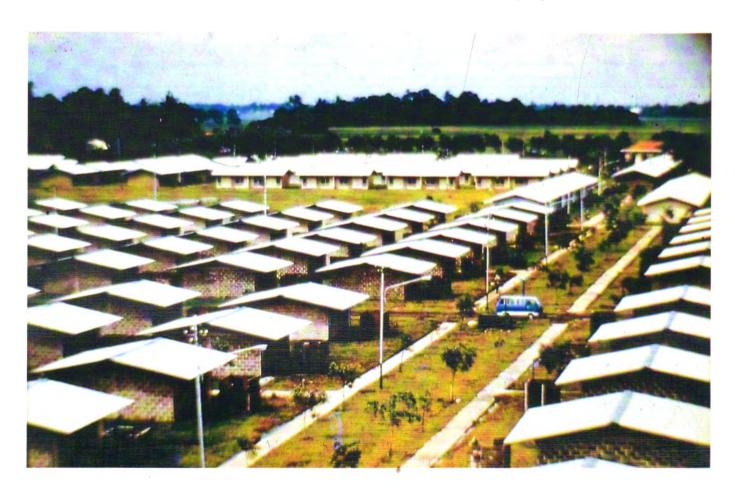
Lingkungan pemukiman menurut pola pengembangan tata ruang

P.T. PUTRA DAERAH
CONTRACTOR, DEVELOPER, PERDAGANGAN UMUM
JL. KAMPAR NO. 16 BENGKULU
JL. GATOT SUBROTO NO. 72, TELUK BETUNG, LAMPUNG, TELP. 42525
MITSUBISHI
Penanggulangan Bencana Alam
Air Jenggalu

pt DENA UTAMA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, S.H. NO. 91. TELP. 8291486 - 8281768 JAKARTA
PERWAKILAN : JALAN SUKARNO-HATTA NO. 46. TELP. 21135 - 22499 BENGKULU
JALAN MAWAR - 15. TELP. 22962 PADANG
BIRO BANGUNAN & PERDAGANGAN UMUM
BANKERS : BNI 1946 BENGKULU
BDN JAKARTA
Bendungan Air Padang Lais Kuro Tidur
Kabupaten Bengkulu Utara

P.T. BATANGHARI PERDANA
CONTRACTOR & DEVELOPER
KANTOR PUSAT :
Jl. Semeru No. 5 Tel. 31518
Bengkulu
PERWAKILAN
Jl. Suryo Pranoto No. 50 Tel. 344524.
Jakarta – 10130
STA: 50+300

PERSERO
PT BRANTAS ABIPRAYA
GENERAL CONTRACTOR
Menerapkan Hasil Alih Tehnologi
JL. SURABAYA 3 MALANG • POST BOX : 147 ML • PHONE : (0341) 51316 • TELEX : 31077 BA ML

RR
P.T. DUARA SEJATI
GENERAL CONTRACTOR
Jalan Sultan Abdurrachman No. 112 Telp. 34681, 36448
PONTIANAK
OFFICES : Cilegon : Kav. Blok F - Palembang : Kampus Blok B No. 19. Telp. 256421 -
Jakarta : Jalan Tebet Timur No. 54 Telp. 8290875 - Tanjung Enim : P.O. Box. 7
BANKER : Bank Dagang Negara

PT SUMBER WINDU KENCANA
KONTRAKTOR
HEAD OFFICE : JL. CIDENG BARAT NO. 92 TELP. 361182 - 3807007
FAX. NO. 3806891 JAKARTA PUSAT - INDONESIA
BRANCH OFFICE : KOMPLEKS TANJUNGPURA INDAH BLOK C/10
PONTIANAK 78111. TEL. 31089 - 38105

CV. "VILLA JAYA"
KONTRAKTOR, LEBERANSIR, PERDAGANGAN UMUM
Alamat : Jalan Tanjungpura 423 B. Telp. 4409 - 4536
PONTIANAK
Tanda Anggota GAPENSI
No. 18070083

EFA
P.T. EFA KALBAR
ENGINEERING CONSTRUCTION
KANTOR : JALAN S. PARMAN NO. 5 TELP. 4340 PONTIANAK
ANGGOTA GAPENSI NO. : 14.01.121 KAL BAR
KANTOR : JALAN S. PARMAN NO. 5 TELP. 4340 PONTIANAK
ANGGOTA GAPENSI NO. : 14.01.121 KAL BAR

500 kota meliputi areal seluas kurang lebih 30.000 ha dengan prioritas pada kota-kota besar yang berpenduduk padat dan prasarananya sangat tidak memadai.

Sasaran perbaikan lingkungan pasar meliputi sekitar 2.500 ha lingkungan pasar pada 200 kota besar dan sedang.
Dana yang diperlukan sebesar Rp. 533.700 juta.

(4) Peremajaan dan Pengembangan Pemukiman Kota

Sasaran peremajaan dan pengembangan pemukiman kota meliputi kurang lebih 140 kota, sedangkan pembangunan kota baru pada kota raya dan besar digunakan untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan dan proyek percontohan. Dana yang diperlukan sebesar Rp. 84.700 juta.

(5) Penataan Bangunan

Sasaran kegiatan ini meliputi aspek tertib pembangunan dan keselamatan bangunan di 27 Propinsi termasuk penanganan bangunan pada kawasan khusus. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 171.600 juta.

(6) Perencanaan pemrograman proyek khusus, training, penyuluhan dan lain-lain. Dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 200.000 juta.

b) Program Penyediaan Air Bersih

(1) Peningkatan Kapasitas Produksi.

Peningkatan Kapasitas Produksi selama Pelita V meliputi kurang lebih 14.000 1/detik sehingga pada akhir Repelita V kapasitas produksi terpasang kumulatif menjadi 65.000 1/detik, mencakup 820 kota termasuk kota-kota Kecamatan.

Perincian peningkatan kapasitas produksi adalah sebagai berikut :
– Jakarta 2.000 1/detik, Bandung 1.100 1/detik, Surabaya dan kota sekitar 2.800 1/detik, Medan 350 1/detik, Ujung Pandang 600 1/detik, Semarang 700 1/detik, Denpasar 400 1/detik, Menado 300 1/detik, Tangerang 2.800 1/detik.

Penyediaan air bersih pedesaan meliputi 3.000 desa terdiri dari 1.000 desa dengan IKK yang disempurnakan, 2.000 desa dengan sistem penyediaan air bersih sederhana.

(2) Peningkatan Pelayanan Air Bersih

Pada akhir Pelita V penduduk perkotaan yang akan mendapat pelayanan air bersih menjadi 29 juta orang (47%) dari jumlah 16 juta orang pada akhir Pelita IV.

Sasaran penambahan pelayanan air bersih selama Pelita V adalah untuk sambungan rumah 1.600. 000 buah hidran umum 17.900 buah dari jumlah penduduk yang dilayani sebesar 13.000.000 orang.

Total Kebutuhan dana Program Penyediaan Air Bersih adalah sebesar Rp. 3.878.800 juta.

c) Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

(1) Penanganan Air Limbah

Sasaran kegiatan ini diprioritaskan pada 200 kota-kota besar, sedang dan kecil serta 5.000 desa atau daerah-daerah rawan air. Kota-kota besar yang diprogramkan adalah Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Se-
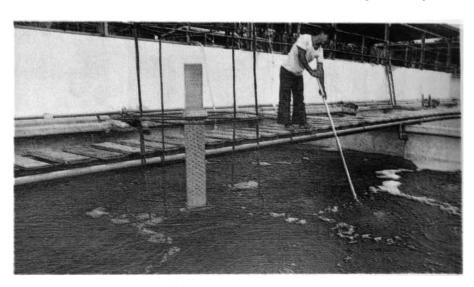
Penelitian awal dari limbah yang telah ditampung

marang, Surakarta, Yogyakarta dan Ujung Pandang.

(2) Penanganan Persampahan

Sasaran pengelolaan persampahan diprioritaskan pada kota-kota besar dan sedang meliputi 450 kota.

(3) Penanganan Drainase

Sasaran penanganan drainase meliputi perbaikan sistem drainase mikro pada 135 kota sedangkan kegiatan drainase makro akan dilaksanakan pada kota-kota besar saja, (Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Padang dan Ujung Pandang).
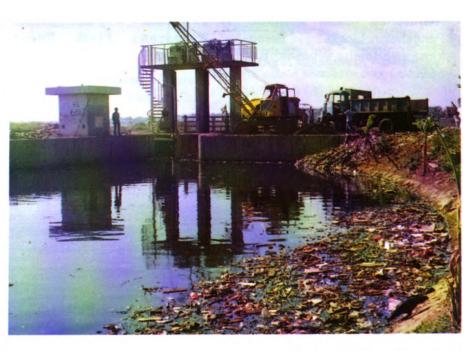
Bangunan penyaring sampah

Bangunan instalasi air bersih

Kebutuhan dana Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman adalah sebesar Rp. 665.400 juta.

Program Penataan Ruang Daerah.

Program penataan ruang meliputi :

(1) Studi pengembangan potensi dan penataan ruang wilayah.
(2) Penataan ruang kawasan strategis.
(3) Penelaahan rencana/strategi pengembangan kawasan pemukiman kota raya dan besar.
(4) Penataan kawasan khusus rawan lingkungan.
(5) Pelatihan tata ruang.
(6) Pengembangan sistem informasi tata ruang.
(7) Penyiapan produk pengaturan.

Kebutuhan dana untuk program ini sebesar Rp. 80.700 juta.

e) Program Penyempuranan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.

Melalui program ini akan dilaksanakan :

(1) Penatalaksanaan program pembangunan.
(2) Penatalaksanaan pembinaan dan pengaturan.
(3) Penatalaksanaan bidang keuangan, kepegawaian dan kelembagaan.
(4) Penatalaksanaan bidang pengawasan pembangunan.

Kebutuhan dana untuk program ini sebesar Rp. 12.000 juta.

f) Program Peningkatan Prasarana Fisik Pemerintahan

Melalui program ini akan dilaksanakan :

(1) Pembangunan prasarana fisik.
(2) Perbaikan dan peremajaan bangunan gedung.
(3) Pengadaan fasilitas dan barang.

Kebutuhan dana untuk program ini sebesar Rp. 13.500 juta.

g) Program Pendidikan Aparatur Pemerintah

Melalui program ini akan dilaksanakan :

(1) Pendidikan dan peningkatan kemampuan tenaga ketatalaksanaan pembangunan.
(2) Peningkatan kemampuan tenaga aparatur teknis pusat dan daerah.
(3) Pendidikan dan peningkatan kemampuan mitra pembangunan.

Kebutuhan dana untuk program ini sebesar Rp. 14.700 juta.

Selain dana pusat baik rupiah murni maupun bantuan luar negeri yang diuraikan di atas, diperlukan juga dana yang berasal dari daerah sebesar Rp. 3.176.100 juta, yang terdiri dari :

- Dana untuk Program Pembangunan Daerah Tk. II sebesar Rp. 1.772.700 juta.
- Dana untuk Program Pembangunan Daerah Tk. I sebesar Rp. 183.400 juta.
- Dana untuk Program Penyediaan Air Bersih yang berasal dari PDAM sebesar Rp. 900.000 juta.
- Dana untuk Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Limbah sebesar Rp. 20.000 juta dan Perusahaan Daerah Kebersihan Rp 300.000 juta.

Kota yang sedang berkembang pesat

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TIMUR
PERUSAHAAN DAERAH

SARANA BANGUNAN

JL. BASUKI RAKHMAT 15 TELP. 45934 - 512296 - 41366
FAX. 512297 SURABAYA

PABRIK :
- **PERABOT RUMAH TANGGA**

JL. DUPAK 81 TELP. 46902 SURABAYA

PABRIK :
- **GENTENG DAN WUWUNG**

JL. MASTRIP 70 TELP. 832481
KARANGPILANG SURABAYA

PABRIK :
- **UBIN DAN BETON**

JL. NGAGEL 95 TELP. 68226 SURABAYA

PABRIK :
- **BATU & SEMEN TAHAN API**

JL. MASTRIP 24 TELP 830307
KARANGPILANG SURABAYA

PABRIK :
- **UBIN DINDING**

JL. HASANUDIN 1 TELP. 81533 TULUNGAGUNG

PABRIK :
- **ISOLATOR LISTRIK**

JL. KERAMIK 336 TELP. 51566 DINOYO MALANG

PERSERO
PT BRANTAS ABIPRAYA
GENERAL CONTRACTOR

HEAD OFFICE :

JL. SURABAYA 3 MALANG
PHONE : 51316 – 51317
FAC : 51862
TELEX : 31077 BA ML

Mengucapkan Selamat 45 tahun

Departemen Pekerjaan Umum

3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.

PT. MULTI STRUCTURE

GENERAL - CONTRACTOR & GENERAL - SUPPLIER
JL. GATOT SUBROTO KAV. 12 1ST FLOOR JKT.
PHONE : 5 1 1 8 0 9 (15 saluran)

ALAMAT CABANG - CABANG

BANDUNG :
Jl. Cipaganti No. 158
Telp. (022) - 81425
Ir. AGUS WINARKO

BALIKPAPAN :
Jl. P. Antasari No. 1
Telp. (0542) - 21503
Ir. DEDDY

UJUNG PANDANG :
Jl. Sulawesi No. 22
Telp. (0411) - 7698, 21504
PAK GUNADI, IR. KERRY

SURABAYA :
Jl. Tenggilis Tengah V
Blok O No. 16
Telp. (031) - 814656
Ir. TJIPTO SUBROTO
Ir. HENDRA AT.

SAMARINDA :
Jl. Anggur No. 22
Telp. 21675
Ir. DEDDY

KENDARI :
Jl. Wayong Tobuuha
PO. BOX. No. 62
Telp. (0401) - 21046
BPK. NGOESMAN DJAJA

NTB / BIMA :
Jl. Soekarno Hatta No. 32
Telp. 426
PAK YAHYA GUNAWAN

CV. ,,BIRO TEHNIK SIGMA "

BUILDING & CONSTRUCTION CONTRACTORS.
Jl. Taman Potroagung 8A - Phone : 313921 - Fax : 312238
S U R A B A Y A

Cable : BITSI
Bankers : BBD Cab. Swandayani
BNI 1946 Kusumabangsa
BPD Jatim

Mengucapkan Selamat 45 tahun

Departemen Pekerjaan Umum

3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.

Yayasan Pendidikan PUTRA

Wisuda Perdana Akademi Sapta Taruna

Yayasan Pendidikan PUTRA didirikan dengan akta notaris R. Soeroyo Wongsowidjojo SH No. 10 tahun 1976 dan disempurnakan dengan akte No. 33 tanggal 18 Juli 1984. Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Pendidikan PUTRA adalah:

a. Membina dan mengembangkan anak dan generasi muda warga Departemen Pekerjaan Umum pada khususnya dan warganegara Indonesia pada umumnya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi warganegara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
b. Membantu meringankan beban warga Departemen Pekerjaan Umum dalam bidang pendidikan;
c. Membantu membina kesejahteraan warga Departemen Pekerjaan Umum yang secara instansional/formal tidak dapat dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum;
d. Yang dimaksud dengan warga Departemen Pekerjaan Umum adalah pegawai yang termasuk dalam :
   1. Susunan Organisasi Departemen Pekerjaan Umum;
   2. Susunan organisasi Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
   3. Keluarga pensiunan masing-masing.

Dasar dan azas dari Yayasan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berazaskan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Kegiatan Yayasan ini di bidang pendidikan telah semakin berkembang. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar semakin banyak didirikan, penerima bea siswa semakin meningkat jumlahnya dan mengelola pula sebuah SMP serta Akademi Sapta Taruna. Sampai tahun 1990 ini Yayasan mengelola 48 Taman Kanak-kanak dan 2 sekolah dasar tersebar di seluruh Indonesia. Penerima beasiswa dan bantuan khusus, seluruhnya berjumlah 3500 orang, 263 penerima diantaranya telah tamat. Akademi Sapta Taruna pada waktu ini memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Teknik Penyehatan Lingkungan dan Jurusan Sipil dengan jumlah mahasiswa 300 orang dan telah mewisuda 38 orang Program DIII.

PARA MENTERI PEKERJAAN UMUM

1. Abikusno Tjokrosujoso
19-8-1945 – 14-11-1945

2. Ir. M. Putuhena
14-11-1945 – 27-6-1947

3. Mochammad Enoch
3-7-1947 – 11-8-1947

4. Ir. H. Laoh
11-8-1947 – 29-1-1948
13-4-1948 – 20-12-1949
20-12-1949 – 6-9-1950
(Kabinet RIS)

5. Ir. Djuanda
29-1-1948 – 13-4-1948
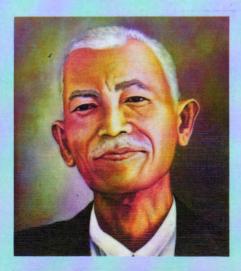
6. Ir. Sitompul
19-12-1948 – 15-7-1949

7. Prof. Ir. H. Johannes
6-9-1950 – 27-4-1951

8. Ir. Ukar Bratakusumah
27-4-1951 – 3-4-1952

9. Ir. Suwarto
3-4-1952 – 30-7-1953

10. Prof. Ir. Roosseno
30-7-1953 – 12-10-1953

11. Moch. Hassan
12-10-1953 – 12-8-1955

12. Raden Pandji Soeroso
12-8-1955 – 3-3-1956

13. Ir. Pangeran Moh. Noor
24-3-1956 – 9-1-1957 *)
9-4-1957 – 10-7-1959
*) Mengundurkan diri dan sebagai Menteri PU ad interim Prof.Mr. A.A. Su-

14. Ir. Sardjono Dipokusumo
10-7-1959 – 6-3-1962

15. Majoor Djenderal Soeprajogi
6-4-1962 – 21-3-1966

16. Ir. Sutami
21-2-1966 – 29-3-1978

17. Dr. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa
29-3-1978 – 16-3-1983

18. Ir. Suyono Sosrodarsono
16-3-1983 – 21-3-1988

19. Ir. Radinal Moochtar
21-3-1988 – sampai sekarang.

DAFTAR PEJABAT DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

NOMOR	JABATAN	N A M A
1.	Menteri Pekerjaan Umum	Ir. Radinal Moochtar
2.	Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.	Ir. Salmon Kodijat
3.	Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.	Ir. Putra Duarsa
4.	Direktur Jenderal Pengairan	Ir. Soebandi Wirosoemarto
5.	Kepala Balitbang	Ir. Suryatin Sastromijoyo
6.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Ir. Soenarjono Danoedjo
7.	Direktur Jenderal Bina Marga	Ir. Ruslan Diwiryo
	Staf Ahli Menteri :	
8.	Bidang Pengkajian Sistem Pengelolaan Departemen PU.	Ir. Soedarsono Soemoatmodjo
9.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Ir. Suhardja Tjakradipura
10.	Bidang Pengkajian Investasi Sarana dan Prasarana PU.	Drs. Soekrisno
11.	Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi.	Ir. Soeparmono
12.	Bidang Pengembangan Tata Keterpaduan Kawasan dan Planologi Kota.	Ir. J.P. Hendropranoto Suselo, MPW.
13.	Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Manusia	Ir. Rachmadi Bambang Soemadhijo
	Biro dan Pusat-pusat :	
14.	Kepala Biro Perencanaan	Ir. Soenardi Hadisoepadmo
15.	Kepala Biro Kepegawaian	Drs. Noerwantoro
16.	Kepala Biro Keuangan	Kaliamat Siregar, SE.
17.	Kepala Biro Perlengkapan	Tjuk Sudarsono, MSc.
18.	Kepala Biro Hukum	Ali Muhammad, SH.
19.	Kepala Biro Bina Sarana Perusahaan	Ir. Nuzwar Nurdin
20.	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri	Drs. Gembong Priyono, MSc.
21.	Kepala Biro Umum	Ark. Djauhari Sumintardja
22.	Kepala PUSDATA	Dr. Ir. Bambang Soemitroadi
23.	Kepala PUSDIKLAT	Drs. H. Anis Latief.
24.	Kepala PUSBINLAT	Ir. Mudjitaba.
25.	Kepala PUSBINAL	Ir. Rubiharto.
	Inspektorat Jenderal :	
26.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Drs. Hartono Soetoyo, MPA.
27.	Inspektur Wilayah I	Ir. Afandi Sobari.

NOMOR	JABATAN	NAMA
28.	Inspektur Wilayah II.	Ir. Soenarko.
29.	Inspektur Wilayah III	Ir. Hasbullah Bandamata.
30.	Inspektur Wilayah IV	Ir. R. Baskoro.
31.	Inspektur Wilayah V	Drs. Soenarto
32.	Inspektur Wilayah VI	Ir. H. Alwan Moedjono
33.	Inspektur Tugas Umum	Handono Martojoewono, SH
	Direktorat Jenderal Pengairan :	
34.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Ir. Moh. Hardjono
35.	Direktur Bina Program Pengairan	Ir. Djoko S. Sardjono
36.	Direktur Sungai	Ir. Hartono Pramudo, Dipl.HE.
37.	Direktur Rawa	Ir. Waloeyono, Dipl.HE.
38.	Direktur Irigasi I	Ir. Soenarno MSc.
39.	Direktur Irigasi II	Ir. Martono
40.	Direktur Peralatan Pengairan	Ir. Sakdoen,Dipl. HE.
	Direktorat Jenderal Bina Marga :	
41.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.	Ir. Satrio
42.	Direktur Bina Program Jalan	Ir. Syarifudin Alambai
43.	Direktur Pembinaan Jalan Kota	Ir. Djoko Asmoro
44.	Direktur Pelaksana Barat	Kol. CZI. E.L.M. Malonda
45.	Direktur Pelaksana Tengah	Soebaru Hendrodjojo, BRE.
46.	Direktur Pelaksana Timur	Ir. Made Selat

NOMOR	JABATAN	NAMA
47.	Direktur Peralatan Jalan	Ir. Muhammad Solechan Padmosudar-mo.
	Direktorat Jenderal Cipta Karya :	
48.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya.	Ir. Soeratmo Notodipoero
49.	Direktur Bina Program Cipta Karya.	Ir. Parulian Sidabutar.
50.	Direktur Tata Kota dan Tata Daerah	Ir. Tubagus Haedar Ali
51.	Direktur Perumahan	Ir. Alibasah Samhudi
52.	Direktur Tata Bangunan	Ir. Noer Saijidi Moestahdi Koesoemo
53.	Direktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman.	Ir. Darmawan Saleh
54.	Direktur Air Bersih	Ir. A.R. Tambing, Dipl. SE.
	Badan Litbang PU :	
55.	Sekretaris Balitbang	Ir. Sunaryo Sumadji
56.	Kepala Puslitbang Pengairan	Ir. Badruddin Mahbub, Dipl.SE
57.	Kepala Puslitbang Jalan	Ir. Soedarmanto Darmonegoro
58.	Kepala Puslitbang Pemukiman.	Ir. Sahat Mulia Ritonga
	Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.	
59.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi D.I. Aceh	Ir. M. Noor Muhamad

Menteri PU Ir. Radinal Moochtar (paling kanan) bergambar bersama para pejabat Eselon I Departemen Pekerjaan Umum

Menteri PU mengambil sumpah pada pelantikan Pejabat Eselon II dan III

NOMOR	JABATAN	N A M A
60.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sumatera Utara	Ir. J. Hendro Moeljono
61.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sumatera Barat.	Sabri Zakaria, BIE.
62.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Riau	Kol. CZI Bambang Sudibyo
63.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Jambi	**Ir. Abdul Manaf Zakaria**
64.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sumatera Selatan	Ir. Komar Ishak
65.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Bengkulu.	Ir. Basuki
66.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Lampung	Kol. CZI Kariyotomo
67.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU DKI Jakarta	Ir. Hally Dezar
68.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Jawa Barat	Ir. Sadeli Wiramihardja
69.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Jawa Tengah	Ir. Gatot Soenarjo
70.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU D.I. Yogyakarta	Ir. Soeripto Koesoemowi-noto
71.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Jawa Timur.	Ir. Budijana

NOMOR	JABATAN	N A M A
72.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Kalimantan Barat.	Ir. Binsar Imatua Siregar
73.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Kalimantan Tengah.	Ir. Soetomo Noeridin
74.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Kaliman-tan Selatan	Ir. A. Tamdjid
75.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Kaliman-tan Timur.	Ir. Sjafrin
76.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sulawesi Utara.	Ir. Abdullah
77.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sulawesi Tengah.	Ir. Soemarno, BIE.
78.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sulawesi Selatan.	Ir. Soeharsono Martakim
79.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Sulawesi Tenggara.	Ir. R.M. Rido Soesilo
80.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Bali.	Ir. Soeroto Martomidjojo
81.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Nusa Tenggara Barat.	Ir. Hari Sidharta, Dipl. HE.
82.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Nusa Tenggara Timur.	Ir. Iing Rochman Karyanegara.
83.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Maluku.	Ir. Sapari Anwar
84.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Irian Jaya.	Kol. CZI E. Ukon Kusnaedi.
85.	Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Timor Timur	**Letkol. CZI. Eddy Hamid**

PERSERO P.T. NINDYA KARYA
GENERAL CONTRACTORS - CIVIL ENGINEERING
CABANG XII PONTIANAK : JL. URAY BAWADI NO. 25 PONTIANAK TELP. 34860 - 32508
ALAT KAWAT NINDYA • BANK : BANK DAGANG NEGARA - BANK PEMBANGUNAN DAERAH
TELEX : 29130
KANTOR PUSAT : JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 22 JAKARTA (13630) TELP. 8093276 (3 SALURAN), 8093126, 8093105
TELEX No. 48153 NK PST. IA • ALAMAT KAWAT NINDYA PUSAT • BANK : BANK DAGANG NEGARA, BANK EXIM.
Dermaga Penyebrangan Fenry
Telok Bajang (Dalam Pelaksanaan)
CABANG/PERWAKILAN : BANDA ACEH - MEDAN - PADANG - PAKANBARU - PALEMBANG - BANDAR LAMPUNG - BENGKULU JAKARTA - BANDUNG - SEMARANG - YOGYA - SURABAYA - PONTIANAK - BANJARMASIN UJUNG PANDANG - PALU KENDARI - AMBON - DENPASAR - AMPENAN - KUPANG - JAYAPURA - SORONG - MANOKWARI - BIAK

GAPENSI
BADAN PIMPINAN DAERAH
GAPENSI TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
Alamat Sekretariat Jalan Pak Kasih No. 22 Telp. 35842
P O N T I A N A K 78112
Mengucapkan Selamat 45 tahun
Departemen Pekerjaan Umum
3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.

CV. Karya Agung
S.T.A Rahman 6 B Telp. 36486 / 35054
Pontianak - Kal Bar.
Dirgahayu 45 Tahun
Dep. P.U. R.I.
Menuju Tinggal Landas
Sukses dan Sejahtera

Dirgahayu 45 tahun
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990
BPD
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
Melayani semua urusan Perbankan
Kantor Pusat : Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak

* GENERAL CONTRACTOR & ENGINEERING
* PERDAGANGAN * IMPORTIR

KANTOR PUSAT :
Jl. Pangeran Jayakarta No. 9
Jakarta 11110
Telp. 6598612, 6598614

KANTOR CABANG :
BANDUNG : Jl. Burangrang No. 38 Telp. 50700
YOGYAKARTA : Jl. Sokonandi No. 15 Telp. 3574
JAWA TENGAH : Jl. Progo IV No. 6 Pekalongan Telp. 61853
SURABAYA : Jl. Jend. A. Yani No. 126 Telp. 816400

Mengucapkan Selamat 45 tahun
Departemen Pekerjaan Umum
3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.
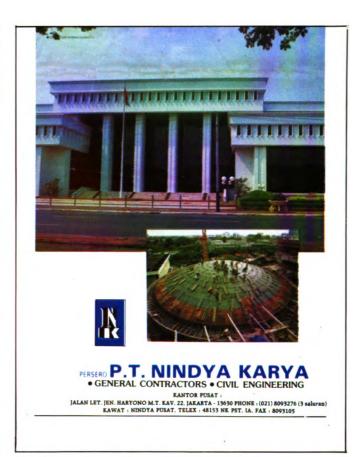
P.T. PJA FIBER GLASS

JL. TANAH ABANG II No. IA
Phones : 364543, 364557, 372484
3805322, 3805325
P.O. Box : 3824 Jkt.

Factory :
Desa Geluran, Kec. Taman
Sepanjang Kabupaten Sidoardjo
Phone/Facs. : 031 - 819138
Jawa Timur

P.T. ASIA BANGUN CIPTA

GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR

MAIN ACTIVITIES :
- HIGH RISE BUILDING & REAL ESTATE
- HIGHWAY & BRIDGE
- AIRFIELD
- HARBOUR & MARINE CONSTRUCTIONS
- DAM, IRRIGATION & RIVER BASIN DEVELOPMENT
- INDUSTRIAL BUILDING

HEAD OFFICE :
JL. WOLTER MONGINSIDI 97
PHONE : (021) - 715770 - 7201554
FACSIMILE : (021) - 715770
KEB. BARU - JAKARTA

BRANCH OFFICE :
JL. CITARUM 86
PHONE : (024) - 22552
SEMARANG

WE SERVE WITH OUR BEST
FOR
PAMETERINDO (PAM - METER - INDONESIA)
Under Licence of :
H. MEINECKE AG. West Germany
- Industrial Water Meter
- Compound Water Meter
- Pulser Converter, Pulse Counter, Recorder
- Test Bench
PONT - A - MOUSSON S.A. France
- Domestic Water Meter
- Test Bench
PONT - A - MOUSSON S.A. France
- Ductile Cast Iron Pipe & Fittings
- Gate Valves, Check Valves, Air Valves,
Butterfly Valve
- Hydrant
- Domestic Water Meter
SOCAM, France
- Domestic Water Meter
- Test Bench
SPANNER POLLUX - GmbH, West Germany
- Domestic Water Meter
- Test Bench
MUNICIPAL EQUIPMENT EXPORTERS, USA
- Sewer Equipment
MUELLER UMWELTTECHNIK GmBH,
West Germany
- Sewer Equipment
WHEELER - REX, USA
- Pipe Laying Equipment
RIZT PUMFENFABRIK GmBH, West Germany
- Centrifugal Pump
- Sewage Pumps
- Submersible Pump
- Drainage Pumps
CMC
P.T. CAPITOL - MUTUAL CORPORATION (CMC)
WATER SUPPLY EQUIPMENT DIVISION
Jl. Menteng Raya No. 23, Jakarta 10340
Phone : 354-051 ; 310-4004 (4 Lines)
Telex : 61414 CMC IA
Telefax : (62-21) 310-4081 - Kotak Pos : 3393 JKT.

• HOTEL
• MOTEL
• PERUMAHAN
• PERKANTORAN
• APARTEMEN
• JASA ANGKUTAN
PERUMAHAN
Patra Jasa

PT. TRIKARSA NUSANTARA
INDONESIA

c.v. **FUJI JAYA**

GENERAL CONTRAKTOR & SUPPLIER

AD. OFFICE
Jln. Tanjung Datuk No. 38
Phone : 21238
Pekan Baru - Riau

BANKERS
1. B.E.I.I.
2. B.P.D.
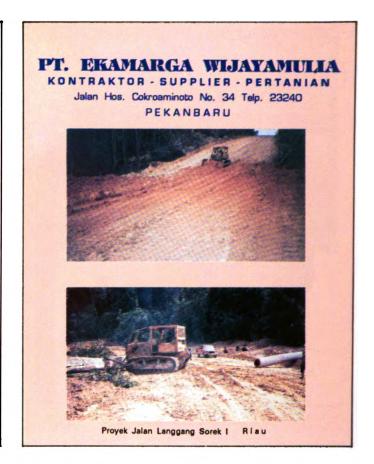
P.T. Gading Cempaka Graha

Kantor Pusat	:	Jln. Veteran No. 433 D. Lantai II. Telp. 26084 - 25084 PALEMBANG
Kantor Cabang	:	Jln. Talang Banjar Lrg. Budiman No. 65. Telp. 23958 JAMBI
Kantor Perwakilan	:	Jln. Laksamana Malahayati No. 12 - Telp. 42664 Teluk Betung (Bandar Lampung)

Contractors - Transportation

- Distributor & Industries

Bankers :
B.N.I. 1946
Bank Buana Indonesia

Proyek Simpang Lago Riau

MGE
The Modular GIS Environment

P.T. KARGA WALON
INTERNATIONAL DOOR – TO – DOOR TRANSPORT
GENERAL CARGO AND HEAVY EQUIPMENT

PARTNER ANDA
DALAM MENANGGULANGI
PROBLEM STABILISASI
TANAH
Kami melayani
design •
pengadaan •
supervisi •
pelaksanaan •
• Untuk Kontruksi :
• Jalan diatas tanah lunak
• dinding penahan tanah
• relamasi pantai
• erosi
• tanah longsor
• breakwater
• dam
• dan lain-lain
• Dengan :
• geotextile
• geogrid
• vertical drain
• horizontal drain
• concrete mats
• dynamic compaction
• vibro compaction
• dan lain-lain
PT
P.T. PANCA TETRASA
TRADING & ENGINEERING
Jl. Musi No. 5, Jakarta 10150 - P.O. Box 989 JAKGG
Phone : 342110, 342117, 376945, 3810589
Telex : 46715 TETRAS IA - 45742 RADJA IA
Fax. : (021) 364071

Concrete Pump
SCHWING
PRODUCT
Portable concrete pumps, Truck mounted concrete pumps,
Truck mixer concrete pumps,
Separate placing booms, Tunnel concrete pumps
and concreting systems, Concrete remixing silos,
Top shot wet shotcreting systems,
Sludge pumps, Fire fighting equipments.
Site mixers, Mobile concrete mixing plants,
compact concrete mixing plants,
Dry batching plants, Concrete recycling plants,
Truck mixers, Stationary mixers.
SOLE AGENT
INDOYASA DWITAMA PERDANA
Wisma Kosy
Jln. Jembatan Selatan No. 19
Kebayoran Baru, Jakarta - 12160, INDONESIA
SCHWING Stetter
Friedrich Wilh. SCHWING GmbH
Manufacturers of Construction Equipment. P.O. Box 20036. D-4690 Herne 2
Fed. Rep. of Germany. Phone (0) 2325 / 7871. Telex 820348

Penggunaan blok beton segmental pracetak ABA
Hanya mutu dan pelayanan profesional
yang dapat menjadi partner usaha anda
Jalan layang kereta api
Jalan layang antar pulau
Jembatan pejalan kaki dikota
tidak hanya itu PT. Aneka Beton Atama juga memberikan keuntungan lebih
karena hemat waktu, ekonomis dengan dukungan perencanaan gambar produk
dan pabrikasi Box Girder Segment pracetak untuk jalan layang
P.T. ANEKA BETON ATAMA
Kantor/Pabrik: Jl. Jembatan Tinggi Emplasemen PJKA
Tanah Abang — Jakarta Pusat, Phone : (021) 325674-325676
Fax : (021) 3807818

CV. SAMA SEJATI

JALAN ARIE LASUT No. 68 TELP. 52883
MANADO

BANKERS : B. B. D.
B. R. I.
B. P. D. SULUT
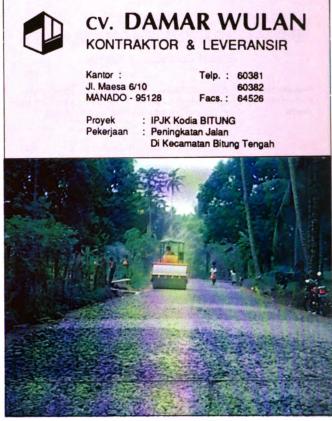
PERIKON PRIMA pt.

ADDRESS : JALAN DAAN MOGOT NO. 57 A TIKALA BARU
MANADO - 95126 CABLE PERIKON
PHONE : 51443 - TELEX : 74269 PPHG.
BANKERS : BANK DAGANG NEGARA - BANK BUMI DAYA

- INDUSTRY
- CIVIL ENGINEERING
- GENERAL CONTRACTORS

PERSERO P.T. NINDYA KARYA

• GENERAL CONTRACTORS • CIVIL ENGINEERING

- CABANG X PALU JL. SETIA BUDI NO. 37 PALU TELP. 21271
- ALAMAT KAWAT NINDYA • BANK : BANK DAGANG NEGARA
- TELEX : 75173
- KANTOR PUSAT : JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 22 TELP. 8093276 (3 SALURAN) JKT. 136300
- ALAMAT KAWAT NINDYA PUSAT • BANK : BANK DAGANG NEGARA - BANK EKSIM
- TELEX NO. 48153 NK PST. IA.

BENDUNG METAWA

P.T. ADHI KARYA (PERSERO)

GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR

Jl. G. Nokilalaki No. 5 Palu, Telp. 21171, Telex. 75146 ADHI Pal.

BENDUNG SINGKOYO

PERSERO P.T. WASKITA KARYA

Kantor Pusat : Jl. Hang Tuah Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, Telephone : 737545, Telex : 47198 WASKITA IA

CABANG X

Alamat : Jalan Rajawali No. 26 Palu Telp. 21572 Telex WKPL IA

BENDUNG TORUE

SATU PERUSAHAAN DENGAN PROFESIONAL TIGA !

HAISTE INTERNATIONAL
Consulting Engineers
England

URBAN WATER SUPPLY & SANITATION
SOLID WASTE MANAGEMENT
FLOOD PROTECTION
LAND DRAINAGE
INDUSTRIAL EFFLUENT TREATMENT
COASTAL ENGINEERING

CARL BRO INTERNATIONAL
Consulting Engineeres & Planners
Denmark

WATER RESOURCES DEVELOPMENT
IRRIGATION
RURAL WATER SUPPLY & SANITATION
ENVIRONMENTAL PROTECTION
HOUSING
ENERGY

HOFF & OVERGAARD
Planning Consultants
Denmark

TRANSPORTATION PLANNING
HIGHWAY & RURAL ROADS STUDIES
PORT PLANNING & OPERATIONS
STORAGE & DISTRIBUTION STUDIES
TOURISM DEVELOPMENT PLANNING
APPRAISAL AGRO/INDUSTRIAL PROJECTS

COMPLETE RANGE OF SERVICES INCLUDES SURVEYS, PLANNING, DESIGN, PROJECT IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT, HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT.

THE CARL BRO GROUP WISHES THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS MANY MORE YEARS OF SUCCESSFUL ENGINEERING ACHIEVEMENT

JAKARTA OFFICE : Jl. Bangka VIII/27, Pela Mampang, 12720 Jakarta Selatan, Tel. : 7980902, 7997297 Fax. : 7980903

cv. USAHA NASIONAL

Jalan Saranami No. 79 Telp. 21085 - 21951 Kendari

BIDANG USAHA : KONTRAKTOR, SUPPLIER DAN PERDAGANGAN UMUM
BANKERS : BNI. 1946, BBD, BRI DAN BPD CABANG KENDARI

FOTO PROYEK :

PEMBANGUNAN JEMBATAN
S. KAONGKE - ONGKEA
BENTANG = 40 METER
LOKASI : KAB. BUTON

FOTO PROYEK :

PEMBANGUNAN JEMBATAN
S. KAONGKE - ONGKEA
BENTANG = 40 METER
KAB. DATI II. BUTON
PELAKSANA : CV. USAHA NASIONAL

PT PADAT LANDAS
HEAVY EQUIPMENT RENTAL

Kantor : Jl. Bekasi I No. 8-C Telp. (021) 8194554-8502358
Jatinegara — Jakarta Timur. (13250)

Vibration Rollers

Tire Rollers

Three Wheel Rollers

Tandem Rollers

Disewakan diseluruh Nusantara. Mesin-mesin dalam keadaan prima dengan service yang memuaskan.

HEAD OFFICE
Jln. Jend. Sudirman Km. 4,5 No. 2835 A. Palembang
Phones : (0711) 411845 - 410179
Fax. : 411063. Telex : 27328 HAPG IA

BRANCH OFFICE
Delta Building, Jln. Suryopranoto No. 1 - 9
Block C. 10 - 11. Jakarta Pusat
Phones : 343964 - 344654 - 347881 - 347934
Fax. : 342149. Telex : 46522 AMIN IA

"MARCHING BAND BULLDOZER"

Awal tahun 1977 di Departemen Pekerjaan Umum ada sebuah drumband yang bernama "**Remaja Terlambat**", nama itu cepat populer karena beberapa penampilannya pada Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke XXXI dan Hari Kebaktian PU tanggal 3 Desember 1977 di lapangan Sapta Taruna, mendapat sambutan yang luas sekali. Banyak media massa yang meliput kegiatan tersebut.

Dalam waktu singkat **Remaja Terlambat** sudah mengorbit dan mendapat tempat tersendiri terutama di hati penggemarnya di Departemen Pekerjaan Umum, para karyawan dan karyawati. Bermula hanya sekedar main-main ternyata menjadi sungguhan. Itulah kira-kira awal berdirinya Drumband **Remaja Terlambat** pada tahun 1977.

Penampilan pertama Drumband **Remaja Terlambat** pada 17 Agustus 1977, kemudian pada HUT RI ke 32 di lapangan Sapta Taruna di hadapan Almarhum Prof. Dr. Ir. Sutami dan undangan lainnya. Ini kejutan bagi para karyawan PU mendapat tontonan yang lain dari yang lain. Bertindak selaku Drum Mayor Bapak **Dr. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa** Direktur Jenderal Bina Marga saat itu. Dalam waktu singkat para pakar atau teknisi ini berlatih dengan giat di bawah pimpinan Sdr. **Budi Nurdanadarma** yang melatih perkusi dan display. Untuk alat tiup dilatih oleh Pak **Sardi**. Sore hari setelah pulang kantor para Direktur, Kasubdit dan para Pimpinan Proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga giat berlatih sampai malam hari. Tidak saja di lapangan, di gang atau coridorpun jadi untuk latihan jalan. Anggautanya tidak terbatas pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga saja tetapi juga Direktur Utama PN. Aspal Negara (PT. Sarana Karya) dan Direktur Utama PT. Jasa Marga.

Pada tahun 1979 oleh Bapak **Ir. Suryatin Sastromijoyo** drumband ditetapkan dan disahkan namanya ialah "**BULLDOZER**". Sejak punya nama **Bulldozer** prestasinya mulai merangkak dan ikut berbagai aktivitas seperti pembukaan PON, SEA GAMES, HARDIKNAS, HUT KORPRI dan sebagainya. Penampilan demi penampilan di depan umum ini sangat betguna untuk bekal dalam mengikuti berbagai kejuaraan agar tidak demam panggung atau grogy menghadapi massa yang kadang galak dan kejam. Dari merangkak **Bulldozer** belajar berjalan pelan-pelan tapi pasti. Berbagai kejuaraan dan pertandingan seperti Kejurnas I di Malang 1980, Hamengkubuwono Cup II di Semarang dan Kejurnas II di Surabaya kita ikuti tahun 1982. Sejak tahun 1982 Drumband **Bulldozer** merupakan salah satu Drumband terbaik di tanah air.

Pada tahun 1985 **Marching Band Bulldozer** yang bergabung ke dalam wadah **Marching Band Indonesia (MBI)** mengikuti festival di beberapa Negara Eropa Barat yaitu di Yanitsjarfestivalen di Hamar, Norwegia World Music Contest di Kerkrade, Nederland, International Youth Music Festival di Zurich, Swiss. Sampai sekarang Marching Band "BULLDOZER" berkat dorongan dan bimbingan Bapak **Ir. Radinal Moochtar** Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia tetap berada dan berkarya di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya keluarga besar Departemen Pekerjaan Umum.–

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Himpunan Peraturan-peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang Struktur Organisasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
   (Biro V : Personalia dan Organisasi — 1971).
2. Informasi Pembangunan Ke-PU-an di Propinsi Irian Jaya.
   (Kanwil PU Irian Jaya — 1990).
3. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengairan 1986-1987.
4. Ir. Putuhena, Menteri Pekerjaan Umum Masa Revolusi (Putuwati).
5. Pengembangan Wilayah Sungai, Suatu Cara Pendekatan Pengembangan Sumber-sumber Air.
   (Ir. Suyono Sosrodarsono - 1978).
6. Peraturan Peraturan Umum tentang Hubungan Kerja Antara Ahli dan Pemberi Tugas
   (Dewan Teknik Pembangunan Indonesia, Yayasan LPMB - 1978).
7. Peraturan tentang Pelelangan Terbatas Untuk Pelaksanaan Pekerjaan.
   (Dewan Teknik Pembangunan Indonesia, Yayasan LPMB, 1970).
8. Peraturan tentang Ketentuan-ketentuan Persyaratan Kontraktor Pembangunan Indonesia.
   (Dewan Teknik Pembangunan Indonesia - 1970).
9. Peranan Bidang Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Daerah Bali.
   (Kanwil PU Bali - 1990).
10. Pidato Kenegaraan Presiden R.I. Soeharto di depan Sidang DPR, 16 Agustus 1989.
11. Profil dan Struktur Fungsi Pekerjaan Umum Dari Masa ke Masa.
    (Mutohar Sudiro - 1988).
12. R.M. Abikusno Tjokrosujoso Hasil Karya dan Pengabdiannya.
    (Drs. Suratmin, Depdikbud - 1982/1983).
13. Rencana Kerja Bidang Pekerjaan Umum Dalam Pelita V.
    (Departemen Pekerjaan Umum - 1990).
14. Riwayat dan Perjuangan Pangeran Mohammad Noor.
15. Suatu Studi Mengenai Fungsi dan Administrasi Pekerjaan Umum.
    (Ir. Soefaat, Drs. Lego Nirwhono, Ir. Hendropranoto - 1973).
16. SU 41. Syarat-syarat Umum Untuk Pelaksanaan Bangunan Umum yang dilelangkan.
    (Soekarsono Malangjoedo, Badan Penerbit Pekerjaan Umum - 1978).
17. Seperembat Abad Kebaktian PUT (Departemen PUT - 1970).
18. Sejarah Perkembangan Pekerjaan Umum di Indonesia.
    (Ir. Irdam Idris - 1970).
19. TAP MPR-RI/Pidato Pertanggungjawaban Presiden RI.
    (Penerbit Yayasan Mencerdaskan Bangsa).
20. TAP MPR-RI No. I/MPR/1988, (Penerbit ER-A).
21. 3 Desember 1945 Sejarah dan Perkembangannya. (Departemen PU - 1983).
22. 40 Tahun Karya Bhakti Departemen Pekerjaan Umu, (Badan Penerbit PU - 1985).
23. Undang-undang Pembentukan Kota
    (Staatsblad 1948 No. 168, DPMB Bandung - 1979).
24. Laporan Tahunan : — Direktorat Jenderal Pengairan
    — Direktorat Jenderal Bina Marga
    — Direktorat Jenderal Cipta Karya

C.V. SARSIAN & SONS CORPORATION
Transportation Supplier Contractor
Telp. : 4897015

DIRGAHAYU HARI BAKTI
PEKERJAAN UMUM KE 45
3 DESEMBER 1945 - 3 DESEMBER 1990

CV. SARSIAN & SONS CORP.
JL. LAYUR SELATAN NO. 5
RAWAMANGUN - TELP. 4897015

JASA ANGKUTAN DARAT / LAUT & UDARA
GOLONGAN B2.

Direksi & segenap karyawan
mengucapkan

SELAMAT MASA BAKTI P.U.
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990

SOCIÉTÉ
D'ÉTUDES D'URBANISME,
D'AMÉNAGEMENT ET
D'ÉQUIPEMENTS

Jalan Ampera Raya No. 18 A. Cilandak
JAKARTA SELATAN - INDONESIA
Tel. : 780 4736 Fax. : 780 0395

Mengucapkan Selamat 45 tahun

Departemen Pekerjaan Umum

3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.

pt. RUNGGU PRIMA JAYA

KONTRAKTOR LEVERANSIR JASA ANGKUTAN

PERDAGANGAN UMUM

Jl. S M A. XIV. No. 9 (Cililitan)
JAKARTA TIMUR
Telp. 8095446 - 8095765 - 8095766

Mengucapkan Selamat 45 tahun

Departemen Pekerjaan Umum

3 Desember 1945 – 3 Desember 1990.